



SEJARAH DAERAH SUMATRA BARAT



irektorat
dayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEJARAH SUMATRA BARAT

SEJARAH SUMATRA BARAT

oleh
Proyek Penelitian dan Pencatatan
Kebudayaan Daerah

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENERBITAN BUKU BACAAN DAN SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH
JAKARTA 1978

Hak pengarang dilindungi Undang-Undang

SUMATRA BARAT



KATA PENGANTAR

Kebudayaan merupakan wujud identitas bangsa. Pengembangan identitas bangsa adalah unsur utama di dalam rangka pengembangan ketahanan nasional untuk mencapai kesatuan bangsa. Meskipun rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan mempunyai adat istiadat yang berlainan, hal itu tidak mengurangi rasa kesatuan. Bahkan keanekaragaman itu menambah khasanah kebudayaan nasional.

Oleh sebab itu, segala warisan lama berupa sejarah daerah, cerita rakyat, adat istiadat dan lain-lain perlu dikembangkan dan disebarluaskan, sehingga dapat dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, agar dapat tercipta iklim dan lingkungan hidup yang lebih baik dan serasi.

Buku mengenai sejarah dan kebudayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan baru sedikit sekali, sehingga tidak memadai untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaktahuan itu menyebabkan orang kurang menghargai kebudayaan daerah, dan tidak suka menggali dari warisan lama itu.

Orang-orang tua yang mengetahui tentang seluk beluk kebudayaan daerahnya masing-masing banyak yang sudah meninggal. Sadar akan kerugian yang akan kita derita kalau sampai kebudayaan daerah itu tidak kita bukukan, maka Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan penelitian ke daerah-daerah dan menyusun naskah yang siap untuk diterbitkan.

Selanjutnya yang menerbitkan naskah tersebut menjadi buku ialah Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen P dan K bekerja sama dengan PN Balai Pustaka.

Mudah mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya kebudayaan nasional.

Jakarta, 1978.

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra
Indonesia dan Daerah

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/78 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan :

”Mengadakan penggalan, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional.”

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni :

- Sejarah Daerah,
- Adat Istiadat Daerah,
- Geografi Budaya Daerah,
- Ceritera Rakyat Daerah,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu :

Kegiatan di Pusat, meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi :

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/78, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Sejarah Daerah Sumatra Barat ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museumian Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Sumatra Barat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Padang.
3. Pemerintah Daerah Sumatra Barat.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatra Barat.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sumatra Barat yang terdiri dari :

Ketua Proyek/Penanggung

Jawab

: Drs. Mardjani Martamin

Ketua pelaksana

: Drs. Amir B.

Anggota

- : 1. A.M. Dt. Perpatih B.A.
2. Idrus Sita BA.
3. M. Nujus
4. Masrul Junus BA
5. Marthias Mahmud BA.
6. Mustika Z.
7. Ersis Aarmansyah
8. Herman.

6. Tim penyempurna naskah di pusat terdiri dari :

— Konsultan/anggota

- : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
2. Dr. Asbud S. Susanto
3. Abdurachman Suryomi
hardjo
4 A.B. Lopian.

— Ketua

: Sutrisno Kutoyo

— Sekretaris

: Soenjata Kartadarmadja

— Anggota

- : 1. Anhar Ganggang
2. Mardanus Sofwan
3. Masjkuri
4. Surachman
5. Muchtaruddin Ibrahim
6. Sri Sutjiatiningsih

7. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo
NIP. 130117589

PENGANTAR

Naskah ini merupakan hasil akhir dari rangkaian kerja yang bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Dalam bentuknya yang asli naskah ini merupakan hasil karya Tim di daerah. Kemudian oleh Tim Pusat bersama Tim Daerah diadakan penilaian dalam suatu lokakarya. Langkah berikutnya meliputi : penyempurnaan dan editing.

Pokok-pokok persoalan dalam menilai, menyempurnakan dan mengedit naskah ini, ialah sampai berapa jauh kesesuaiannya dengan cakupan tugas ataupun **terms of reference** yang meliputi dua sektor: pola penelitian dan kerangka laporan. Kemudian diperhatikan pula segi-segi: bahasa, cara penyajian, pendekatan, dan materi. Dalam menilai bahasa, telah dilakukan perbaikan seperlunya, antara lain tentang ejaan, dan istilah. Demikian pula cara penyajian telah mengalami perbaikan, sehingga sesudah diadakan perbaikan seperlunya menjadi lebih lancar dan terbaca, suatu hal yang sungguh diperlukan untuk menjamin tetap adanya komunikasi antara penyusun naskah dengan para pembaca.

Sesuai dengan obyek yang dibahas, yaitu Sejarah Daerah Sumatra Barat maka sudah sewajarnya apabila digunakan pendekatan regiosentris. Tanpa cara pendekatan demikian, niscaya tidak akan tercapai sasaran yang dituju. Naskah ini sudah cukup menunjukkan cara pendekatan regiosentris itu sebagaimana terlihat di berbagai bab dan bagian-bagiannya yang memang berusaha untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat khusus di daerah Sumatra Barat pada masa lampau.

Sedangkan mengenai materi itu sendiri kiranya sudah dicoba untuk menggantinya dari berbagai buku kepustakaan ataupun bahan tertulis. Selanjutnya diadakan wawancara dengan manusia sumber yang dianggap dapat memberi bahan tentang Sejarah Daerah Sumatra Barat.

Secara keseluruhan naskah ini mengalami penggarapan lebih intensif terutama pada proses editing. Kemudian pada akhirnya dapatlah dikemukakan, bahwa naskah ini seyogyanya dianggap sebagai usaha perintisan untuk penulisan Sejarah Daerah Sumatra Barat yang lebih sempurna di hari kemudian.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	vii
PENGANTAR	ix
PENGANTAR	xiii
PENDAHULUAN	1
1. Masalah Teoritis	1
2. Proyek Pencatatan/Penelitian Sejarah Daerah	4
3. Tujuan Pencatatan/Penelitian	5
4. Ruang lingkup Pencatatan/Penelitian	5
5. Metode dan teknik Pencatatan/Penelitian yang dipakai	6
6. Tahap-tahap pelaksanaan Pencatatan/Penelitian	8
7. Prosedur Pengolahan	9
8. Daftar Catatan	10
9. Daftar "Indeks"	10
10. Hasil akhir	11
BAB I : MASA PRASEJARAH	13
1.1. Geografis	13
1.2. Asalusul Penghuni yang pertama	14
1.3. Nagari Pertama	16
1.4. Organisasi Masyarakat	18
1.5. Kehidupan Seni Budaya	20
1.6. Kepercayaan	21
BAB II : ZAMAN KUNO ($\pm$ Abad I – 1500 M)	22
2.1. Pertumbuhan Sejarah	22
2.2. Berdirinya kerajaan Pagarruyung	26
BAB III : ZAMAN BARU ($\pm$ 1500 M – 1800 M)	40
3.1. Kerajaan Pagarruyung Sepeninggal Adityawarman	40
3.2. Alam Pikiran dan Kepercayaan	47
3.3. Hubungan ke luar	51
3.4. Kehidupan Seni Budaya	55
BAB IV : SUMATERA BARAT ($\pm$ 1800 – 1900 M)	61
4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	61
4.2. Gerakan Pemurnian Agama Islam di Sumatra Barat	64
4.3. Perang Paderi 1821 – 1937	68
4.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	75

BAB V : SUMATERA BARAT ($\pm$ 1900 – 1942).....	79
5.1. Pemerintahan Hindia–Belanda	79
5.2. Perlawanan Rakyat Sumatera Barat (1900 – 1942)	79
5.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pergerakan Kebangsaan	88
5.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	93
BAB VI : ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)	95
6.1. Keadaan pemerintahan dan Kenegaraan	95
6.2. Penyelenggaraan Hidup dalam masyarakat	102
6.3. Kehidupan Seni dan Budaya	104
6.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	108
6.5. Hubungan dengan dunia luar	110
BAB VII : ZAMAN KEMERDEKAAN (1945–1975) ...	114
7.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	114
7.1.1. Tumbuhnya Pemerintahan RI di Daerah	114
7.1.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan	131
7.1.2.1. Sekutu di Sumatera Barat	131
7.1.2.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan terhadap Sekutu/NICA	132
7.1.2.3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan terhadap Belanda	134
7.1.2.4. Agresi Belanda I	139
7.1.2.5. Agresi Belanda II	142
7.1.2.6. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)	143
7.1.3. Sumatera Barat setelah Pengakuan Kedaulatan	148
PENUTUP	154
INDEKS	155
LAMPIRAN I	171
LAMPIRAN II	181
LAMPIRAN III.....	191
DAFTAR CATATAN	195
DAFTAR BACAAN	201

PENDAHULUAN

1. Masalah Teoritis

Sampai seberapa jauhkah pencatatan mengenai Sejarah Daerah Sumatera Barat sudah pernah dilakukan? Pertanyaan ini telah pernah dicoba menjawabnya oleh suatu tim di Jakarta di bawah pimpinan Drs. M.D. Mansoer pada tahun 1970 yang menghasilkan sebuah buku setebal 286 halaman.

Judul bukunya adalah: *Sejarah Minangkabau* yang diterbitkan pada tahun 1970 itu juga. Menurut para penyusunnya sendiri buku itu masih merupakan suatu kerangka Sejarah Minangkabau (Sumatra Barat), karena masih diperlukan pengupasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan sejarah daerah itu yang belum dapat dikumpulkan dan ditemui. Walaupun demikian buku itu sudah merupakan satu-satunya buku tentang *Sejarah Daerah Sumatra Barat* yang lengkap atau agak lengkap secara keseluruhan pada waktu ini.

Di samping itu secara terpisah-pisah atau secara sebagian-sebagian sudah banyak pula ditulis tentang sejarah daerah Sumatra Barat, baik dalam bentuk buku yang sudah dicetak, maupun dalam bentuk stensilan. Dalam bentuk yang sudah dicetak seperti *Perang Paderi* oleh Muhammad Radjab yang terbit tahun 1954; *Minangkabau, Sejarah ringkas dan Adatnya* oleh M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghulu; *Adityawarman, sebuah studi tentang Tokoh Nasional dari Abad IV*, yang terbit tahun 1966, dari bentuk yang sudah dicetak ini ada pula yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan seperti yang ditulis oleh DE. Hall dalam bukunya: *History of South East Asia*, terbitan tahun 1970 (cetak ulang); oleh Bernard H.M. Vlekke dalam bukunya: *Nusantara, A History of Indonesia*, terbitan tahun 1961; oleh Mangaradja Onggang Parlindungan dalam bukunya *Tuanku Rao*, terbitan tahun 1964 dan lain-lainnya. Dalam bentuk stensilan misalnya seperti *Sumatra Barat 1945-1950* oleh Dra. Fatimah Enar dan kawan-kawan, terbitan tahun 1976;

dan dalam bentuk kertas kerja atau paper yang dibicarakan dalam suatu seminar. Di samping itu banyak juga tulisan mengenai Sejarah daerah Sumatra Barat yang diterbitkan di IKIP Padang dalam bentuk skripsi atau tesis yang belum sempat diolah kembali menjadi sebuah buku. Juga Pemerintah Daerah Sumatra Barat sendiri setiap tahun mengeluarkan sebuah laporan tahunan dengan judul *Sumatra Barat* dalam angka tahun, atau Sumatra Barat tahun

Kesemua tulisan itu, walaupun ada yang dianalisa secara sangat dalam, belumlah merupakan suatu kebulatan untuk seluruh Sejarah Daerah Sumatra Barat. Dengan demikian suatu masalah yang dihadapi sekarang dalam hal ini adalah belum adanya suatu tulisan yang lengkap dan menyeluruh tentang sejarah daerah Sumatra Barat sampai saat sekarang ini yang menyebabkan kurang lengkapnya pula penulisan untuk sejarah nasional secara keseluruhan. Hal tersebut di atas disebabkan antara lain kurang banyaknya atau kurang lengkapnya tersedia bahan-bahan untuk penulisan. Kalaupun bahan itu ada tetapi tidak dapat dicapai secara keseluruhan pada suatu waktu yang bersamaan oleh para penulisnya.

Oleh karena itu dirasa amat perlu melakukan pencatatan tentang bahan-bahan sejarah daerah Sumatra Barat secara menyeluruh dalam suatu penelitian yang terarah dengan waktu yang cukup. Pencatatan yang demikian dirasakan sangat penting gunanya untuk penulisan sejarah daerah Sumatra Barat di masa-masa yang datang.

Bahan sejarah Sumatra Barat yang kurang lengkap masih sangat banyak, dimulai dari zaman prasejarah sampai pada zaman abad ke-18, lebih-lebih bahan untuk zaman prasejarah boleh dikatakan tidak ada atau belum terkumpul sama sekali. Bahan sejarah dari abad ke-19 ke atas pun masih banyak yang belum dapat dikumpulkan secara keseluruhan.

Oleh karena itu setiap tulisan mengenai sejarah Sumatra Barat selalu kelihatan terputus-putus kalau tidak akan mengada-ada bahannya, karena bahan yang dijadikan sumber penulisan demikian juga keadaannya, serba terputus dan tidak lengkap sama sekali.

Untuk menanggulangi keadaan di atas itu secara singkat dan segera, sangat banyak dijumpai kesulitan dan hambatan-hambatan. Hambatan terpokok adalah kurangnya tenaga ahli

yang bersedia mengatasinya, sedikitnya bahan tertulis yang dapat dijumpai sampai sekarang ini dan terakhir biaya untuk itu sangat terbatas.

Kurangnya tenaga ahli di sini yang dimaksudkan adalah sangat kurang tenaga-tenaga ahli daerah Sumatra Barat sendiri yang bersedia mengulurkan tangannya untuk mengatasi masalah itu, sedangkan tenaga ahli itu sebetulnya cukup banyak jumlahnya, tetapi karena kesibukan-kesibukan di Jakarta, tidak ada lagi waktu yang tersedia untuk menangani masalah tersebut di atas. Tenaga-tenaga yang ada di daerah pada waktu ini bukanlah tenaga ahli khusus untuk menangani masalah tersebut, tetapi karena dipaksa keadaan terpaksa mengerjakannya secara apa dapatnya saja.

Bahan sejarah untuk penulisan sejarah Sumatra Barat, lebih-lebih untuk masa zaman kuno, yang terbanyak adalah merupakan bahan atau sumber sejarah lisan seperti Tambo yang diwariskan dengan lisan secara turun-temurun. Dari bahan ini sangat sulit menyaring fakta sejarah yang sebenarnya terjadi, karena sudah sangat banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak masuk akal atau khayal, kalau ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan. Tenaga ahli yang dapat menyaring fakta sejarah dari Tambo Minangkabau itu pun sangat langka terdapat di Sumatra Barat. Kalaupun ada mereka akan terbentur kepada kepercayaan sebagian besar orang Sumatra Barat pada apa yang dikatakan Tambonya itu adalah benar. Dalam hal ini para penulis akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat sensitif kalau dibicarakan secara ilmiah.

Untuk melakukan suatu penelitian yang mendalam dan sempurna guna mengatasi masalah ini, sudah barang tentu menghendaki biaya yang cukup besar dan tersedianya waktu yang relatif cukup banyak. Masalahnya adalah sumber biaya sangat terbatas, sehingga penelitian tidak dapat dijalankan secara penuh dan menyeluruh. Akibatnya bahan-bahan sejarah yang masih belum terkumpulkan itu masih berserakan juga di daerah-daerah tanpa dijamah oleh tangan-tangan para ahlinya.

Itulah beberapa masalah yang selalu dihadapi untuk menulis suatu sejarah daerah Sumatra Barat secara menyeluruh dan lengkap, di samping beberapa masalah lain yang tidak disebutkan di sini. Masalah yang demikian sebetulnya tidak dapat dibiarkan begitu terus, sebaiknya segera diatasi, kalau tidak

akan sekaligus, secara berangsur-angsur pun tidak jadi soal.

2. Proyek Pencatatan/Penelitian Sejarah Daerah

Dalam keadaan seperti yang telah disebutkan di atas tadi, rupanya pemerintah, dalam hal ini Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta tidak mau membiarkannya berlarut-larut. Salah satu usaha untuk mengatasi masalahnya adalah dengan mengadakan suatu proyek yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, di dalam mana termasuk untuk mencatat/meneliti sejarah daerah Sumatra Barat. Dalam proyek itu masalah yang akan dicatat dan diteliti mengenai sejarah daerah Sumatra Barat itu sangat luas, mencakup keseluruhan masa sebelum sejarah dan masa sejarah dari daerah Sumatra Barat, dan mencakup juga segala segi kehidupan manusia yang terdapat di dalamnya. Melihat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh proyek itu, rasanya kesulitan yang dihadapi untuk menulis suatu sejarah daerah Sumatra Barat yang lengkap, sudah akan dapat teratasi. Tetapi sayangnya waktu yang disediakan dalam proyek itu sangat minim, sehingga sangat sukar untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan baik seperti yang dikehendaki semula. Akibat kekurangan waktu itu hasil yang dapat dicapai tidak memuaskan. Walaupun ada juga hasilnya, tetapi sudah merupakan syarat untuk memenuhi target waktu saja lagi, tanpa memperhatikan nilai-nilai ilmiah yang seharusnya ada dalam sebuah pencatatan/penelitian. Waktu yang tersedia tidak seimbang dengan apa yang hendak dicapai.

Berdasarkan kerangka laporan yang diberikan, laporan pencatatan/penelitian yang ditetapkan oleh Pusat untuk dilaksanakan daerah, untuk daerah Sumatra Barat diperlukan waktu sedikitnya selama lima tahun, baru dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, itu pun belum tentu sempurna seluruhnya. Dapat dibayangkan apa hasil yang akan dicapai selama enam bulan saja, yang dimulai dari persiapan dan diakhiri dengan menulis sebuah laporan lengkap. Rasanya hal itu tidak mungkin dilakukan dengan baik. Hasilnya akan sama saja dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, bahkan mungkin kurang memuaskan karena dilakukan dengan sangat tergesa-gesa.

Berdasarkan penelitian singkat yang dapat dilaksanakan ke seluruh daerah kabupaten di Sumatra Barat, sangat banyak lagi masalah sumber sejarah daerah Sumatra Barat yang masih belum dapat dicapai dan diteliti, bahkan dilihat saja pun tidak sempat, karena waktu yang dipergunakan untuk itu akan menghabiskan waktu untuk hal yang lainnya dalam rangka pencatatan/penelitian secara keseluruhannya.

Dalam penelitian singkat banyak bekas peninggalan kuno dari sejarah daerah Sumatra Barat yang masih belum diteliti oleh tangan ahli.

Suatu hal menyedihkan sebetulnya dalam abad masa perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada abad ke-20 ini.

Walaupun demikian, dalam waktu yang sangat singkat itu sudah ada juga tambahan bahan yang dapat dijadikan sumber penulisan sejarah daerah Sumatra Barat, meskipun jumlahnya sangat sedikit.

3. Tujuan Pencatatan/Penelitian

Pencatatan/Penelitian ini bertujuan melakukan pencatatan tentang seluruh sumber sejarah Sumatra Barat dalam segala seginya dan aspeknya suatu tujuan yang sebetulnya tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Pencatatan/penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memelihara Kebudayaan Nasional dan menyusun Sejarah Daerah sebagai bagian dari keseluruhan Sejarah Nasional, yang merupakan salah satu program kerja dari Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

4. Ruang Lingkup Pencatatan/Penelitian

4.1. Materi

Materi sejarah daerah Sumatra Barat yang hendak dicatat/diteliti secara garis besarnya mencakup:

4.1.1. Penyelenggaraan hidup

4.1.2. Organisasi Masyarakat

4.1.3. Kehidupan seni budaya

4.1.4. Alam pikiran dan kepercayaan

4.1.5. Hubungan keluar;

untuk masing-masing periode sejarah daerah Sumatra Barat yang meliputi periode-periode: prasejarah (sebelum abad 1 M), zaman kuno ($\pm$ abad 1 – 1500 M),

zaman baru (± 1500 M – 1800 M), abad ke-19 (± 1800 M – 1900 M), zaman pendudukan Jepang (1942–1945) dan zaman kemerdekaan (1945 M – 1975 M). Untuk zaman prasejarah materinya ditambah dengan asal-usul penghuni pertama dari daerah Sumatra Barat.

Masing-masing bagian itu masih terbagi lagi ke dalam beberapa bagian kecil yang sifatnya masih sangat umum.

Dalam pencatatan yang telah dilaksanakan tidak semua materi dapat dikumpulkan, terutama mengenai materi prasejarah Sumatra Barat dan beberapa materi pada periode lainnya.

Dalam hal ini masalah waktu cukup merupakan faktor penentu yang menjadi penghalang utamanya. Walaupun demikian banyak juga dari materi itu yang dapat dikumpulkan.

4.2. Lokasi Pencatatan/Penelitian

Lokasi pencatatan/penelitian meliputi seluruh daerah administratif Sumatra Barat yang meliputi 8 kabupaten, yaitu:

- 4.2.1. Kabupaten Agam
- 4.2.2. Kabupaten Pasaman
- 4.2.3. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4.2.4. Kabupaten Solok
- 4.2.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 4.2.6. Kabupaten Pesisir Selatan
- 4.2.7. Kabupaten Tanah datar
- 4.2.8. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung

Dalam hal ini tidak diadakan daerah sampel, tetapi berusaha mengunjungi seluruh daerah yang menurut informasi di 6 buah kotamadya dan di 8 buah ibu kota kabupaten kemungkinan terdapat bahan yang ingin dicatat/diteliti. Beberapa daerah tidak dapat dicapai karena hujan terus-menerus, di samping itu juga motor (kendaraan roda dua) tidak dapat menempuh jalannya.

5. Metode dan teknik Pencatatan/Penelitian yang dipakai

Dalam pencatatan/penelitian ini metode yang utama diper-

gunakan adalah mengajukan "daftar pertanyaan" kepada sebanyak mungkin responden. Sangat disadari bahwa penggunaan metode seperti ini tanpa diikuti atau dilengkapi dengan tambahan metode lainnya, mempunyai beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi hasil pencatatan/penelitian. Metode seperti ini lebih banyak bersifat kuantitatif dan kurang mendalam.

Menyadari akan kelemahan dari metode ini, maka dalam pencatatan/penelitian juga dipergunakan metode observasi partisipasi, wawancara bebas, wawancara yang lebih mendalam, dan sedapat mungkin mengambil foto-foto dari peninggalan-peninggalan yang dapat dicapai. Di samping itu juga dipergunakan studi perpustakaan sebagai studi pendahuluan dan sebagai pelengkap bahan-bahan yang tidak dapat dicapai.

Studi perpustakaan hanya terbatas kepada buku-buku yang ada di daerah Sumatra Barat dan yang dapat dicapai saja.

5.1. Daftar Pertanyaan

Dalam pencatatan/penelitian ini dipergunakan dua macam daftar pertanyaan. "Daftar pertanyaan" pertama berisi mengenai data sejarah politik, sosial ekonomi, seni budaya, agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya dari manusia Sumatra Barat di Sumatra Barat. Sedangkan "daftar pertanyaan" kedua berisi data mengenai benda-benda peninggalan sejarah Sumatra Barat. Materi dari kedua macam daftar pertanyaan itu meliputi seluruh periode sejarah Sumatra Barat. Tetapi dalam pelaksanaannya kedua macam daftar pertanyaan itu tidak dapat diisi secara keseluruhan oleh responden yang telah dihubungi, walaupun sebelumnya sudah diberikan penjelasan secukupnya. Daftar pertanyaan itu disuruh isi dengan bermacam-macam golongan dalam masyarakat, seperti ninik-mamak, guru, mahasiswa, pejabat pemerintah, pejabat LKA-AM, pejabat kebudayaan, cerdik-pandai, alim-ulama dan sebagainya, dalam hal ini jumlah responden tidak dibatasi.

5.2. Observasi Partisipasi

Dalam metode ini para pencatat/peneliti mempunyai dua macam peranan, di satu pihak mereka bertindak sebagai salah seorang anggota kelompok masyarakat responden, di pihak lain mereka bertindak sebagai seorang pencatat/peneliti yang harus bertindak obyektif. Untuk itu mereka terpaksa

tinggal beberapa hari di daerah-daerah dengan maksud supaya lebih menghayati segi-segi kehidupan dan pola berpikir masyarakat setempat untuk sebagai bahan tambahan dari data yang diperoleh dari "daftar pertanyaan," sehingga deskripsi yang akan dibuat lebih kuat kebenarannya.

5.3. Wawancara Bebas

Wawancara bebas dipergunakan untuk masalah yang umum sifatnya, misalnya penyelenggaraan hidup, sistem pemerintahan dan sebagainya. Wawancara seperti ini hanya dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat yang dianggap kompeten, untuk melengkapi hasil dari "daftar pertanyaan."

5.4. Wawancara yang lebih mendalam

Wawancara yang lebih mendalam ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang lebih mendetail mengenai suatu masalah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam "daftar pertanyaan." Pertanyaan yang diajukan diambilkan dari beberapa pertanyaan terpilih dari "daftar pertanyaan" pertama dan kedua. Wawancara yang lebih mendalam ini hanya diajukan kepada beberapa orang yang telah ditentukan, sehingga dapat lebih menyempurnakan hasil yang diperdapat dengan "daftar pertanyaan." Daftar responden yang dilampirkan dalam laporan ini adalah daftar responden terpilih untuk menghadapi wawancara yang lebih mendalam ini.

5.5. Fotografi

Metode ini dipergunakan mengabadikan dan melengkapi hasil pencatatan/penelitian. Dalam hal ini tidak semua bahan sejarah daerah Sumatra Barat yang dapat diambil fotonya, karena cuaca sangat sering tidak mengizinkannya, di samping itu para petugas kurang mahir mempergunakan alatnya, sehingga banyak foto yang tidak jadi.

6. Tahap-tahap pelaksanaan Pencatatan/Penelitian

Karena waktu yang tersedia dalam pencatatan/penelitian ini sangat terbatas, terpaksa dibuatkan pentahapan pelaksanaannya sedemikian rupa, sehingga dapat diselesaikan sebagian besar rencana pencatatan/penelitian, walaupun dengan pentahapan itu rasanya tidak dapat dicapai hasil yang memuaskan. Tahap-tahap yang telah dilalui dalam pencatatan/penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 6.1. Studi eksplorasi ke daerah-daerah Sumatra Barat dilaksanakan pada tanggal 5-7-1976 sampai dengan 10-7-1976 (5 hari).
- 6.2. Studi kepustakaan di Perpustakaan IKIP Padang pada tanggal 11-7-1976 sampai dengan 15-7-1976 (4 hari).
- 6.3. Pembuatan "daftar pertanyaan" dan try out-nya pada tanggal 16-7-1976 sampai dengan 7-8-1976 (21 hari).
- 6.4. Kerja lapangan (pencatatan/penelitian) dilaksanakan pada tanggal 10-8-1976 sampai dengan 10-9-1976 (30 hari) oleh delapan orang petugas.
- 6.5. Pengolahan data dilaksanakan pada tanggal 11-9-1976 sampai dengan 30-9-1976 (21 hari).
- 6.6. Penulisan deskripsi data dilaksanakan pada tanggal 1-10-1976 sampai dengan 15-12-1976 (75 hari). Dalam pengolahan ini termasuk umpan balik untuk melengkapi data yang masih kurang.

Dari pentahapan pencatatan/penelitian di atas rasanya waktu pelaksanaan sangat kurang yang menyebabkan kurang berbobotnya hasil pencatatan/penelitian. Berkat ketekunan dan kesungguhan para petugas yang tidak mengenal lelah sajalah hasil pencatatan/penelitian yang alah kadarnya dapat disiapkan. Tentu saja hasil ini belum siap untuk dilemparkan demikian saja ke masyarakat ramai, tanpa melalui pengolahan lebih lanjut.

7. Prosedur Pengolahan

Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu, pencatatan/penelitian bersifat kuantitatif dan kurang mendalam. Demikian juga pengolahannya tidak dianalisa secara sangat mendalam. Pengolahan yang dilaksanakan adalah memberi deskripsi kepada bahan yang telah terkumpul. Tentu saja sebelumnya data yang terkumpul sudah ditabulasikan dan diklasifikasikan dan sesudah itu baru dibuatkan deskripsinya.

Sesuai dengan tujuan pencatatan/penelitian, maka sifatnya adalah eksplorasi (penjelajahan) dan deskriptif. Sifat penjelajahan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang gejala atau kejadian ataupun peristiwa tertentu dalam sejarah daerah Sumatra Barat atau untuk mendapatkan ide baru mengenai gejala itu untuk dirumuskan masalahnya secara lebih terperinci. Sifat deskriptif

bertujuan menggambarkan sifat keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat atau untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan faktor lain dalam masyarakat dengan maksud untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang dicatat dan diteliti.

Dalam pencatatan/penelitian ini belum lagi dimaksudkan untuk memberikan suatu uraian yang sangat terperinci dan mendalam (eksplanasi) untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang dicatat/diteliti dengan maksud memperkuat atau membenarkan teori yang menjadi landasan pemikiran pencatat/peneliti.

Sayangnya, karena kekurangan waktu, maka syarat minimal yang dikehendaki oleh pencatatan/penelitian yang bersifat deskriptif itu dalam pencatatan/penelitian ini tidak dapat diberikan atau dilaksanakan sehingga mengurangi nilai laporan pencatatan/penelitiannya sendiri.

8. Daftar Catatan

Untuk tidak meragukan membaca laporan ini, perlu dijelaskan bahwa catatan kaki (footnote) tidak seperti yang biasa dilaksanakan dalam membuat suatu laporan/penelitian dibuatkan di bawah setiap halaman atau di akhir setiap bab, tetapi akan diberikan pada akhir seluruh laporan dengan nama "Daftar Catatan" dan diberi nomor dari awal sampai akhir.

Dalam "daftar catatan" ini tidak diberikan catatan mengenai wawancara yang pernah dilakukan, karena hal itu telah dimasukkan dalam pengolahannya. Dalam "daftar catatan" hanya akan terdapat nama-nama pengarang dengan bukunya yang dikutip untuk memperkuat keterangan yang diperoleh dari "daftar pertanyaan" atau pun untuk menambahnya.

9. Daftar "Indeks"

Indeks dalam laporan ini dibuatkan tanpa menyebutkan nomor halaman dari kata-kata yang di indeks itu, mengingat bahwa laporan ini bukan merupakan pekerjaan akhir dan masih akan diadakan perbaikan seperlunya. Kalau dibuatkan nomor halaman - nya akan merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia belaka. Kata-kata yang dibuatkan indeksnyanya pada pokoknya mencakup tiga

jenis masalah, yaitu mengenai nama tempat, nama orang dan daftar kata-kata daerah atau daftar kata-kata sulit, sedangkan mengenai hal lainnya tidak dibuatkan dalam daftar indeks ini.

10. Hasil Akhir

Naskah ini merupakan hasil akhir dari rangkaian kerja yang bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Dalam bentuknya yang asli naskah ini merupakan hasil karya Tim di daerah. Kemudian oleh Tim Pusat bersama Tim Daerah diadakan penilaian dalam suatu lokakarya. Langkah berikutnya meliputi: penyempurnaan dan editing.

Pokok-pokok persoalan dalam menilai, menyempurnakan dan mengedit naskah ini, ialah sampai berapa jauh kesesuaiannya dengan cakupan tugas ataupun *terms of reference* yang meliputi dua sektor: pola penelitian dan kerangka laporan. Kemudian diperhatikan pula segi-segi: bahasa, cara penyajian, pendekatan, dan materi. Dalam menilai bahasa, telah dilakukan perbaikan seperlunya, antara lain tentang ejaan, dan istilah. Demikian pula cara penyajian telah mengalami perbaikan, sehingga sesudah diadakan perbaikan seperlunya menjadi lebih lancar dan terbaca, suatu hal yang sungguh diperlukan untuk menjamin tetap adanya komunikasi antara penyusun naskah dengan para pembaca.

Sesuai dengan obyek yang dibahas, yaitu Sejarah Daerah Sumatra Barat maka sudah sewajarnya apabila digunakan pendekatan regiosentris. Tanpa cara pendekatan demikian, niscaya tidak akan tercapai sasaran yang dituju. Naskah ini sudah cukup menunjukkan cara pendekatan regiosentris itu sebagaimana terlihat di berbagai bab dan bagian-bagiannya yang memang berusaha untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat khusus di daerah Sumatra Barat pada masa lampau.

Sedangkan mengenai materi itu sendiri kiranya sudah dicoba untuk menggalinya dari berbagai buku kepustakaan ataupun bahan tertulis. Selanjutnya diadakan wawancara dengan manusia sumber yang dianggap dapat memberi bahan tentang Sejarah Daerah Sumatra Barat.

Secara keseluruhan naskah ini mengalami penggarapan lebih intensif terutama pada proses editing. Kemudian pada akhirnya

dapatlah dikemukakan, bahwa naskah ini seyogyanya dianggap sebagai usaha perintisan untuk penulisan Sejarah Daerah Sumatra Barat yang lebih sempurna di hari kemudian.

BAB I

SUMATRA BARAT MASA PRASEJARAH

1.1. Geografis

Propinsi Sumatra Barat terletak di pantai barat Pulau Sumatra. Di sebelah utara berbatasan dengan propinsi Sumatra Utara, di sebelah timur dengan propinsi Riau dan Jambi, di sebelah selatan dengan provinsi Bengkulu dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Kecuali di kepulauan Mentawai, sebagian besar penduduk provinsi Sumatra Barat adalah suku bangsa Minangkabau. Mereka mendiami daerah dataran tinggi dan daerah bagian pesisir. Bagian dataran tinggi yakni darat (*darek*) merupakan daerah asal suku bangsa Minangkabau. Secara tradisional daerah tersebut disebut *Luhak nan Tigo* (Luhak yang tiga), yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Penduduk pesisir ialah mereka yang mendiami bagian pantai Samudra Indonesia, dan mereka berasal dari darat.

Penduduk Sumatra Barat tersebar dalam kelompok-kelompok teritorial yang disebut nagari, di mana lebih kurang terdapat 543 nagari di seluruh provinsi Sumatra Barat. ¹⁾

Daerah provinsi Sumatra Barat alamnya bergunung-gunung. Bukit Barisan membentang dari utara ke selatan, dengan puncak-puncaknya yang tinggi seperti Merapi, Singgalang, Sago, Talang dan Pasaman. Tanah *vulkanis* dan hujan yang cukup, menyebabkan banyak penduduk terikat pada kegiatan pertanian, penanaman padi di sawah dan di tegalan, penanaman sayur-sayuran, penanaman tanaman perdagangan seperti cengkeh, tembakau, kopi, kelapa, karet, dan kulit manis. Hutan menghasilkan beberapa hasil hutan seperti damar, rotan, dan kayu.

Danau dan sungai merupakan sumber perikanan darat dan di sepanjang pantai penduduk mengusahakan penangkapan ikan. Di beberapa daerah dijumpai emas yang sampai sekarang belum diusahakan sedangkan tambang batu bara terdapat di Sawahlunto. Di daerah yang kurang subur, penduduk mengusahakan beberapa jenis usaha kerajinan tangan, pertenunan, atau mereka bergerak

dalam usaha perdagangan.

Keadaan jalan raya sekarang sudah agak baik. Perhubungan antar kota dan antar provinsi yang berdekatan dan berbatasan berjalan dengan lancar, kecuali dengan provinsi Bengkulu.

Luas provinsi Sumatra Barat adalah 4229730 m², dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus 1971 sejumlah 2.792.221 orang.²⁾ Provinsi Sumatra Barat terdiri dari delapan daerah swatantra tingkat II dan enam kotamadya dengan urutan sebagai berikut:

1. Kabupaten Tanah datar
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten 50 Kota
4. Kabupaten Solok
5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Padang/Pariaman
8. Kabupaten Pesisir Selatan

Kotamadya ialah :

1. Kotamadya Padang
2. Kotamadya Bukittinggi
3. Kotamadya Payakumbuh
4. Kotamadya Solok
5. Kotamadya Sawahlunto
6. Kotamadya Padangpanjang

1.2. Asal-usul Penghuni yang Pertama

Pembagian zaman dalam prasejarah berdasarkan arkeologi, terdiri atas zaman batu (zaman *Palaeolitikum*, zaman *Mesolitikum*, zaman *Neolitikum*) dan zaman Logam (zaman Tembaga, zaman Perunggu, zaman Besi). Berdasarkan pembagian zaman yang tersebut di atas, para ahli *arkeologi*, *paleontologi* bisa menentukan umur dari benda-benda hasil kebudayaan, fosil manusia dan *fosil* hewan yang dijumpai dalam penyelidikan.

Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat, tak mungkin kedua-duanya itu dipisahkan. Ada manusia ada kebudayaan; tidak akan ada kebudayaan, jika tidak ada manusia, karena kebudayaan adalah produk manusia. Perkembangan kebudayaan manusia itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan perkembangan manusia.

Hasil kebudayaan serta *fosil* manusia yang sangat sederhana

dan tua itu di Indonesia baru ditemukan di Pulau Jawa (*Pithecanthropus* dengan alat-alat *choppers* = alat penetak yang terbuat dari batu) yang hidup pada masa Palaeolitikum. Di daerah lain di Indonesia sampai sekarang hanya dijumpai hasil kebudayaan yang umurnya lebih muda daripada yang pernah dijumpai di Pulau Jawa.

Di Sumatra Barat sampai sekarang belum pernah dijumpai fosil manusia maupun hasil kebudayaan dari zaman *Palaeolitikum*, *Mesolitikum*, dan *Neolitikum*, yang akan memberi petunjuk kepada kita, bahwa daerah ini telah didiami oleh manusia pada masa itu.

Penelitian kepurbakalaan yang terakhir dilakukan pada tahun 1973, dipimpin oleh Basuki dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen P dan K, bersama Dr. Bennet Bronson dari Universitas Pennsylvania beserta rombongan. Mereka juga tidak berhasil menemukan fosil manusia, hewan dan hasil kebudayaan yang tertua seperti yang terdapat di Jawa.³⁾

Penelitian yang dilakukan oleh team tersebut terutama di Gua Durian, Gua Bukit Kurau di Kabupaten Agam, nagari Surian di Kabupaten Solok dan beberapa nagari lain di Sumatra Barat. Mereka hanya menjumpai pecahan tembikar yang berasal dari zaman yang lebih muda daripada yang disebutkan di atas. Dr. Bennet Bronson sangat hati-hati memperkirakan umur tembikar tersebut, yang diperkirakan berasal dari awal tahun Masehi.⁴⁾

Dengan ditemuinya pecahan tembikar itu, memberi petunjuk bahwa gua-gua itu telah didiami oleh manusia pada masa prasejarah yang terakhir.

Penemuan peninggalan prasejarah lain yang terdapat di Sumatra Barat ialah kebudayaan *Megalitikum* berbentuk tugu batu (Menhir). Peninggalan-peninggalan tersebut terdapat di nagari Puar Datar, Kabupaten Agam tidak jauh dari Gua Kurau tempat penemuan pecahan tembikar. Di kabupaten 50 Kota ditemui di nagari Durian Tinggi, Limbanang, Guguk, Tiakar, dan lain-lain. Kebudayaan *Megalitikum* adalah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan dari batu besar, yang berkembangnya pada zaman logam; yaitu dari masa perunggu, dan merupakan cabang kebudayaan Dongson.⁵⁾ *Megalit* seperti yang terdapat di Kabupaten 50 Kota itu yang tersebar ke arah timur, juga terdapat di di nagari Aur Duri (Riau), Semenanjung Malaya, Burma, dan Yunan⁶⁾. Jalan persebaran yang ditempuh oleh kebudayaan Megali-

tikum itu sama dengan jalan yang ditempuh oleh kebudayaan Dongson. Dengan pengertian lain kebudayaan Dongson sezaman dengan kebudayaan Megalitikum dan dihasilkan serta didukung oleh suku bangsa yang sama. Menurut para sarjana, pendukung kebudayaan Dongson adalah bangsa Austronesia, yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada masa Neolitikum, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi dan gelombang berikutnya pada zaman Perunggu $\pm$ 500 sebelum Masehi dan merekalah yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia sekarang.⁷⁾ Bangsa Austronesia yang datang pada gelombang I ke Nusantara oleh para sarjana antropologi disebut dengan istilah *Proto Melayu* (Melayu Tua), misalnya suku bangsa Batak, Toraja, Dayak, dan lain-lain. Mereka yang datang pada zaman Perunggu (zaman Logam) disebut *Deutro Melayu* (Melayu Muda) misalnya suku bangsa Minangkabau, Jawa, Makasar, dan lain-lain.

Pecahan tembikar, *megalit* yang terdapat di beberapa tempat di Sumatra Barat, hanya itulah peninggalan hasil kebudayaan tertua yang pernah dijumpai di daerah ini. Sayang, penemuan benda hasil kebudayaan itu tidak disertai dengan penemuan *fosil* manusia, seperti yang terdapat di Pulau Jawa. Kalau kita melihat umur tembikar, seperti yang ditemui oleh Dr. Bennet Bronson, yaitu awal tahun Masehi dan *megalit* yang merupakan unsur kebudayaan zaman logam, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebudayaan tersebut dibawa oleh bangsa Deutro Melayu yang datang pada zaman Perunggu ke Nusantara. Para sarjana antropologi juga mengatakan bahwa suku bangsa Minangkabau yang mendiami provinsi Sumatra Barat, termasuk ke dalam suku bangsa *Deutro Melayu*. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa, "nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari Hindia Belakang", dan datang ke daerah ini melalui pantai timur Pulau Sumatra.⁸⁾ Berdasarkan bukti tersebut di atas penghuni pertama daerah Sumatra Barat pada masa prasejarah adalah bangsa Deutro Melayu, merekalah yang menjadi nenek moyang suku bangsa Minangkabau yang sekarang.

1.3. Nagari Pertama

Suku bangsa Minangkabau yang mendiami provinsi Sumatra

Barat, sebagaimana yang telah dikatakan di atas termasuk ke dalam bangsa *Deutro Melayu* (*Austronesia*). Perpindahan bangsa *Deutro Melayu* ke Nusantara diperkirakan oleh para ahli $\pm$ 500 sebelum Masehi (pada zaman Logam), disebabkan oleh karena adanya desakan bangsa-bangsa dari daerah utara Asia. Bangsa *Deutro Melayu* setelah terdesak dari daerah asalnya di Yunan, pindah ke selatan di pantai-pantai Hindia Belakang dan karena terdesak lagi maka mereka menyebar melalui laut dengan perahu bercadik⁹⁾ ke pulau-pulau di selatan Asia Tenggara dan sampai di daerah ini.

Yang menetap di pantai timur Sumatra bagian tengah, kemudian memudiki sungai-sungai yang bermuara ke Selat Melaka, dan akhirnya sampai di Palalawan,¹⁰⁾ yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Pada permulaannya mereka menetap di sepanjang aliran Sungai Batang Kampar dan di dalam gua-gua. Ini terbukti dengan banyaknya pecahan tembikar yang dijumpai di sepanjang sungai tersebut di daerah Riau. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka berburu dan menangkap ikan.

Karena daerah pertemuan Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan, sering mengalami banjir dan juga karena ingin mencari tanah yang subur untuk bertani (karena di negeri asal mereka, telah mengenal bercocok tanam) mereka memudiki sungai-sungai itu ke pedalaman Sumatra Barat. Yang ke pedalaman Sumatra Barat ini hidup menetap dan mendirikan kampung yang pertama yang bernama Minangkabau, di sebelah utara Batusangkar sekarang. Itulah nagari pertama di Sumatra Barat.¹¹⁾ Menurut Van der Tuuk, Minangkabau itu berasal dari kata *Pinang Khabu* yang berarti nagari asal. Dari sinilah mereka nantinya menyebar ke seluruh daerah Sumatra Barat. Orang-orang yang telah menyebar itu tentulah akan menyebutkan nagari Minangkabau itu sebagai nagari asalnya, jadi nagari Minangkabau itu sebagai nagari asal bagi orang Minangkabau yang sekarang.

Karena mereka telah memiliki tanah yang subur dan kebudayaan yang mereka bawa dari tanah asal mereka di Yunan sudah mengenal bercocok tanam, maka mereka membuat sawah dan menanam padi, serta memelihara ternak. Mereka telah hidup menetap dan berkumpul dan tidak mengembara lagi, berarti pembentukan suatu masyarakat yang memerlukan segala peraturan dan kerja sama. Pembagian kerja, memungkinkan perkembangan berbagai macam cara penghidupan di dalam ikatan kerja sama itu

(organisasi masyarakat). Maka timbullah usaha gotong royong membuat ladang, sawah, rumah gadang (rumah palung) untuk tempat tinggal mereka. Ini dapat dibuktikan sampai sekarang dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat masih ada tradisi gotong royong dalam hal seperti ke sawah, irigasi, kematian, perkawinan, membangun rumah. Ini disebabkan karena kebudayaan merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka.

1.4. Organisasi Masyarakat

Sebenarnya kalau kita lihat dalam ruang lingkup yang lebih luas, daerah Sumatra Barat yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau adalah suatu daerah yang paling ganjil di Indonesia, di mana susunan kemasyarakatan yang ada di sini berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilinial*), sedang daerah lain adalah *patrilinial*. Di dunia ini pun sebenarnya sudah tidak banyak lagi tinggal suku yang *matrilinial*, hanya terdapat pada suku yang berbahasa Ila di Rhodesia Utara, beberapa suku di Dahomey, di Ghana, di antara suku-suku Indian di Amerika, suku Garos dan Khosis di Assam dan suku bangsa Minangkabau di Sumatra Barat.¹²⁾

Semua suku *matrilinial* yang disebut di atas kecuali Minangkabau dan Negeri Sembilan¹³⁾ adalah ukuran kecil, sederhana, terpendcil sifatnya dari dunia luar dan tidak mengalami perkembangan. Tidak satu pun dari ciri-ciri umum dari masyarakat *matrilinial* di dunia lainnya yang dimiliki oleh suku bangsa Minangkabau, di sinilah terletak keganjilannya. Suku bangsa Minangkabau wilayahnya bukanlah dalam ukuran kecil, malahan yang terbesar di antara masyarakat *matrilinial* lainnya, dengan jumlah penduduk lebih kurang 3 juta jiwa. Susunan masyarakat Minangkabau tidak sederhana, mereka tidak pula hidup berkelompok-kelompok, tetapi berbentuk "alam" yaitu alam Minangkabau sedang kompleks susunan masyarakatnya mendekati kompleks masyarakat modern lainnya. Minangkabau juga bukan suatu masyarakat yang terpendcil dan tersisih jauh dari pergaulan dunia, malah sebaliknya.

Dari gambaran dia atas jelaslah, bahwa walaupun sudah memasuki zaman modern tetapi susunan masyarakat suku bangsa Minangkabau tidak banyak mengalami perubahan, walaupun suku-suku yang bertetangga dengan mereka telah memakai sistem *patri-linial* sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut beberapa sarjana, seperti Wilken, Van Vollenhoven,

Mazarella yang mengatakan sebagai berikut, "bahwa garis keturunan matrilineal adalah garis keturunan yang tertua di dunia, baru setelah adanya perkembangan, garis keturunan berubah menjadi *patrilineal*."¹³⁾ Juga buku-buku Tambo Alam Minangkabau mengatakan bahwa susunan masyarakat Minangkabau; telah ada bersamaan dengan berdirinya nagari pertama di daerah ini. Hampir seluruh responden dalam penelitian ini memberikan jawaban bahwa susunan masyarakat yang berdasarkan matrilineal ini telah ada semenjak nenek moyang mereka mendirikan nagari pertama di alam Minangkabau ini, apa yang ada sekarang ini, adalah merupakan warisan turun temurun yang harus diteruskan kepada generasi yang berikutnya.¹⁴⁾

Dengan demikian, jelaslah bahwa susunan masyarakat Minangkabau yang matrilineal itu adalah susunan masyarakat yang tertua, walaupun sekarang mereka tidak menjalankan lagi secara konsekuen sistem itu, tetapi garis keturunan mereka tetap mereka hitung dari garis keturunan ibu. Masyarakat mereka yang kita lihat dan pahami sekarang, adalah merupakan produk dari sejarah yang telah dilaluinya dari zaman prasejarah sampai sekarang. Dengan dasar demikianlah kita melihat susunan masyarakat mereka ke masa yang silam.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat susunan masyarakat mereka selanjutnya. Susunan masyarakat Minangkabau dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya yaitu *kaum, keluarga, korong, kampung, suku, nagari, laras, luhak, alam*. Kesatuan geneologis yang terkecil, yang terdiri dari ibu dengan anak-anaknya disebut *samande*, yang mengepalai *samande* ini bukanlah ayah melainkan saudara laki-laki ibu yang dinamakan *mamak rumah*. Kelompok *samande* ini tidaklah menempati rumah sendiri tetapi tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya dari ibu di dalam sebuah *rumah gadang*. Biasanya sebuah rumah gadang didiami oleh kira-kira tiga generasi. Kesatuan kelompok yang besar ini disebut *saparuik* atau sebuah *paruik*, artinya keluarga dari satu kandungan, atau dilahirkan oleh seorang nenek. Yang mengepalai *paruik* ini ialah *mamak* yang tertua, yang disebut *tungganai* atau *kepala paruik*. Kalau rumah gadang telah penuh sekali karena penghuninya bertambah padat, maka didirikanlah rumah gadang baru. Pecahan kesatuan *paruik* akan merupakan suatu *paruik* lagi,

tapi masih ada hubungan darah dengan paruik aslinya. Mereka masih berada di bawah pengawasan tungganai yang lama, atau mengangkat seorang *penghulu* tersendiri sebagai tungganai. Paruik baru ini disebut kaum, yang masing-masing dikepalai oleh *mamak kepala waris* sendiri. Gabungan dari paruik asli dan kaum merupakan suatu kesatuan geneologis yang terbesar yang dinamakan *suku*. Jadi suku itu merupakan kesatuan yang homogen yang terdiri dari beberapa paruik sesuai dengan perkembangan dalam keluarga. Suku itu dikepalai oleh penghulu suku, yang disebut *andiko*. Penghululah yang berkuasa dan bertanggung jawab untuk memelihara anggota sukunya, kusut yang akan menyelesaikan, keruh yang akan menjernihkan, pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Biasanya penghulu andiko dipilih dari mamak kepala waris yang tertua dari paruik asal. Kesatuan lain yang lebih besar dari kesatuan kampung atau suku adalah *nagari*. Nagari ini bukan hanya merupakan kesatuan *geneologis*, tetapi juga merupakan kesatuan teritorial. Sebagai kesatuan teritorial yang lebih kecil dari nagari dapat kita sebutkan *dusun*, yang biasanya didiami oleh tiga suku, *taratak* didiami oleh dua suku.

Nagari adalah suatu persekutuan hukum teritorial dan merupakan pokok pangkal tata susunan pemerintahan alam Minangkabau seluruhnya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan tentang organisasi masyarakat Minangkabau terdiri dari rumah, paruik, suku, nagari dan akhirnya Alam Minangkabau yang merupakan federasi dari nagari-nagari dan terdiri dari Luhak Nan Tiga yaitu Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

Demikianlah data yang ada tentang organisasi masyarakat Minangkabau sekarang dan ini tidak akan jauh berubah semasa mereka baru sampai di daerah ini, karena sekarang mereka masih mempertahankan prinsip matrilineal, walaupun tidak secara konsekuen lagi.

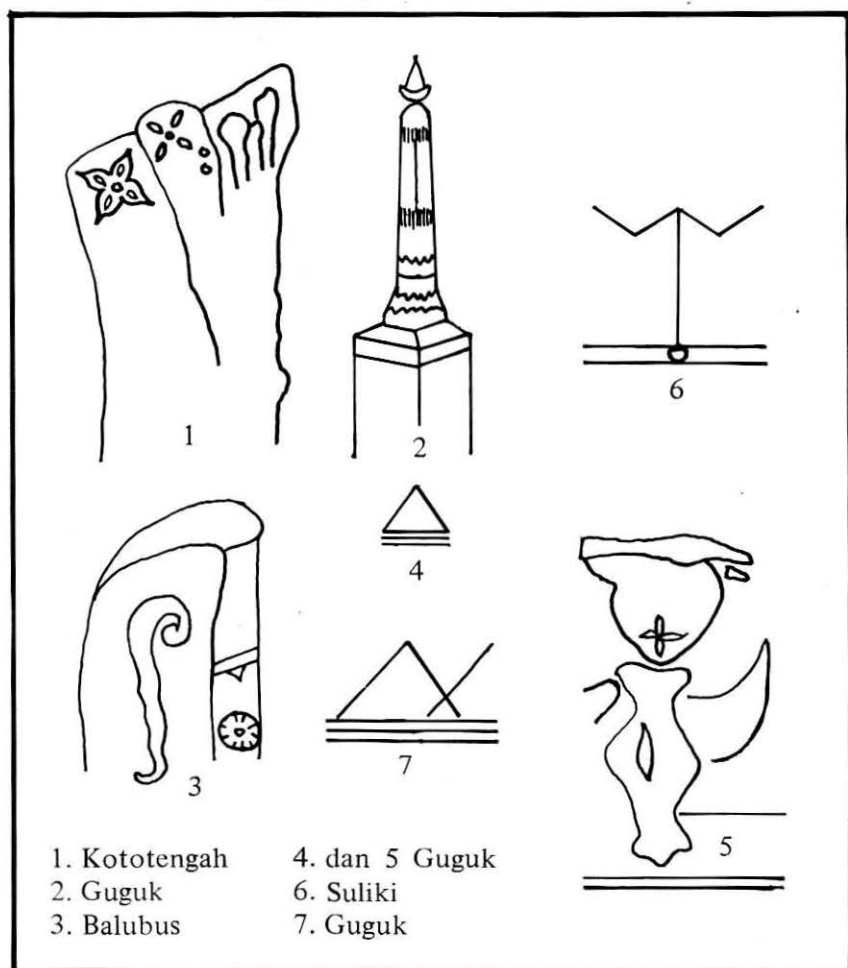
1.5. Kehidupan Seni Budaya

Satu-satunya peninggalan seni budaya masa prasejarah yang dapat kita lihat sekarang adalah seni ukir yang terdapat pada tugu batu (*menhir*) dari kebudayaan Megalitikum yang terdapat di kenagarian Guguk, Balubus, Koto Tengah dalam Kabupaten 50 Kota berupa gambar-gambar bunga, keris, segitiga yang dibuat sangat indah (lihat gambar hal 21)

1.6. Kepercayaan

Kepercayaan mereka pada taraf permulaan ialah pemujaan arwah nenek moyang, dengan memuja tempat yang keramat, seperti gunung, kuburan, pohon kayu yang besar, dan juga binatang¹⁶⁾. Sampai sekarang ada juga penduduk yang percaya adanya tempat yang keramat dan sakti, ini tentu merupakan unsur kebudayaan rohani yang turun temurun semenjak zaman nenek moyang.

Ornamen pada Menhir yang terdapat di Sumatra Barat



BAB II

SUMATRA BARAT ZAMAN KUNO

(± Abad I – 1500 M)

2.1. Pertumbuhan Sejarah

Sumber tertulis zaman mula sejarah Sumatra Barat sangat sedikit. Buku-buku Tambo, seperti "Tambo Alam Minangkabau" dan cerita rakyat yang turun temurun, yang banyak jumlahnya dan tersebar luas di Sumatra Barat, secara semu ada menyinggung perihal kehidupan suku bangsa Minangkabau zaman dahulu yang mendiami daerah tersebut. Tetapi untuk menyaring data sejarah yang bercampur baur dengan *mitologi* dalam tambo dan cerita rakyat itu sukar sekali, bahkan tidak mungkin sama sekali. Begitu juga peninggalan berupa prasasti yang akan menjadi bukti otentik tentang sejarah sesuatu daerah, sangat kurang. Hanya saja dalam prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 683 Masehi, yang terdapat dekat Palembang tertulis kata "*Minangatamwan*." Sebagian penulis sejarah Indonesia misalnya almarhum Prof. Dr. Poerbodjaroko menafsirkan kata tersebut sebagai asal mula kata "Minangkabau."¹⁷⁾ Sekarang kata Minangkabau dipakai untuk nama kebudayaan dan suku bangsa yang mendiami provinsi Sumatra Barat. Mungkin pada masa dahulunya daerah mereka lebih luas daripada pengertian sekarang. Rasanya tidak tepat, kalau kita mengikatkan diri kepada batas administratif yang sekarang untuk mendapatkan sumber sejarah yang akan memberi petunjuk tentang daerah ini pada masa yang silam. Tambahan pula, sejarah daerah Sumatra Barat tidak terlepas dari sejarah daerah sekitarnya dan juga dengan pulau-pulau lainnya. Untuk menulis bagian mula sejarah Sumatra Barat, kita lebih banyak mendapatkan sumber yang terdapat di luar Sumatra Barat.

Peninggalan purbakala yang berupa prasasti atau piagam yang merupakan keterangan yang tertulis, yang terdapat di Sumatra Barat baru ada pada akhir abad XIII, berangka tahun 1286 M berasal dari Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari. Prasasti tersebut didapatkan di Sungai Langsat Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, yang dipahatkan pada alas arca Amonghapaca. Sekarang arca

tersebut disimpan di museum pusat Jakarta. Berikutnya prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Raja Adityawarman ketika ia menjadi raja di Kerajaan Pagarruyung, yang dibuat pada pertengahan abad XIV, yang terdapat di dalam Kabupaten Tanah Datar. Nampaknya sebelum abad XIV, Sumatra Barat, belum begitu memegang peranan penting dalam percaturan sejarah Indonesia. Kemungkinan besar daerah ini merupakan bagian wilayah kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di daerah pantai timur Sumatra pada masa itu, misalnya Kerajaan Melayu dan Sriwijaya.

Penulisan pada bagian permulaan sejarah Sumatra Barat ini lebih banyak merupakan suatu tinjauan tentang fakta sejarah Indonesia yang berasal dari sumber asing serta teori mengenai lalu-lintas perdagangan dan penyebaran kebudayaan Hindu ke Indonesia pada permulaan abad pertama Masehi. Pengertian "tinjauan" dalam persoalan ini, sama dengan pengertian bahwa kita memandang persoalan ini dari tempat ketinggian. Kalau kita memandang dari puncak bukit ke bawah akan ada bagian dari liku-liku yang tidak terlihat. Bagian itu tidak terlihat karena halangan yang menghambat penglihatan. Namun demikian, adanya bagian yang tak kelihatan tersebut tidaklah akan mengubah gambaran umum tentang daerah ini.

Pada permulaan tarikh Masehi, perpindahan bangsa-bangsa *Deutro Melayu* dari daratan Asia ke daerah-daerah di selatan telah berakhir. Mereka telah menetap di sepanjang pantai di kepulauan Nusantara. Setelah mereka menempati kepulauan ini dan hidupnya terpisah-pisah, maka lambat laun karena pengaruh lingkungan alam, bahasa mereka pun menjadi berubah seperti yang kita kenal sekarang dari suku-suku Minangkabau, Jawa, Bugis, Madura, Sunda, Bali, dan lain-lain.

Pada zaman purbakala di Asia terdapat dua jalan perdagangan besar, yaitu yang melalui darat dan melalui laut. Jalan yang melalui darat disebut jalan Sutera mulai dari Cina, melalui Asia Tengah sampai ke Laut Tengah. Perhubungan darat antara Cina dan India dengan Eropa sudah dikenal semenjak tahun 500 sebelum Masehi. Jalan yang melalui laut ialah dari Cina dan Indonesia melalui Selat Malaka ke India terus ke Teluk Persia dan Laut Tengah.

Perhubungan baru antara India dan Cina ini menjadi ramai menjelang abad I Masehi, karena jalan darat di Asia tidak aman lagi. Sejak waktu itu jalan laut daerah-daerah pantai di Indonesia

menjadi daerah perhubungan antara pedagang Arab, India, dan Cina, dan ini memungkinkan bangsa Indonesia pada waktu itu ikut aktif dalam perdagangan. Dengan ikut aktifnya bangsa Indonesia dalam kegiatan perdagangan ini maka perhubungan dengan kebudayaan dari India terbuka. Dalam waktu yang singkat desa-desa dan tempat perdagangan terutama di pantai membentuk kerajaan yang bercorak Hindu antara lain Kerajaan Kutai, Taruma Negara, Melayu, dan Sriwijaya. Sehubungan dengan kenyataan ini Prof. Dr.D.H. Burger dan Prof. Dr.Mr. Prajudi menulis:

"Dalam abad II sesudah Masehi, Indonesia mempunyai perhubungan dengan India dan selama enam abad berturut-turut pengaruh Hindu di Indonesia adalah besar."¹⁸⁾

Sampai sekarang kita masih dapat melihat peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia berupa bangunan dan Agama.

Karena Selat Malaka sangat ramai dilayari kapal dan menjadi lintas dagang antara India dan Cina, maka salah satu bandar di selat itu bertumbuh dengan cepatnya menjadi satu Kerajaan Melayu yang menurut para ahli sejarah terletak di daerah Jambi yang sekarang, dan berdirinya diperkirakan pada permulaan abad VII Masehi. Nama Melayu buat pertama kali muncul dalam berita Cina. Dalam Buku *Tseh Fu-Ji-En Kwei*, diterangkan bahwa dalam tahun 664 (awal 665 M) Kerajaan Melayu mengirim utusan ke negeri Cina untuk mempersembahkan hasil negerinya kepada raja Cina.¹⁹⁾

Kerajaan Melayu yang terletak di daerah Jambi sekarang, mempunyai wilayah sampai ke daerah Minangkabau (Sumatra Barat). Pada masa itu daerah Sumatra Barat yang merupakan bagian Kerajaan Melayu adalah penghasil merica yang terutama di dunia.²⁰⁾ Dari sumber Cina juga kita dapat mengetahui bahwa di samping Kerajaan Melayu, telah pula berdiri Kerajaan Sriwijaya yang terletak di sebelah selatan Kerajaan Melayu.²¹⁾

Dalam satu buku yang disusun oleh I-Tsing, kita dapat mengetahui bahwa dalam tahun 690 Sriwijaya meluaskan daerah kekuasaannya dan Kerajaan Melayu dapat ditaklukkan oleh Sriwijaya "sebelum tahun 692".²²⁾ Dengan jatuhnya Kerajaan Melayu, daerahnya menjadi bagian Kerajaan Sriwijaya, juga termasuk Minangkabau.

Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pantai, negara perniagaan dan perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat. Selama lebih kurang enam abad, Sriwijaya menjadi kera-

jaan yang terutama di Nusantara lainnya. Pada masa Sriwijaya timbul pula kerajaan-kerajaan Hindu lainnya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Hindu itu antara lain Mataram, Medang, dan Kediri. Struktur kerajaan yang timbul di Pulau Jawa berdasarkan pertanian, mempunyai dasar agraris, dan walaupun ada perdagangan laut, namun pertanianlah yang penting. Oleh sebab itu Sriwijaya tak pernah mendapat saingan dalam perdagangan laut di Nusantara. Baru pada masa Kerajaan Kediri (1050--1222) Jawa Timur, mengembangkan angkatan lautnya dan menaklukkan wilayah Nusantara bagian timur. Pada waktu itu daerah kepulauan Nusantara pada pokoknya dibagi atas dua wilayah kekuasaan, bagian barat di bawah kekuasaan Sriwijaya dan bagian timur di bawah kekuasaan Kediri. Pada tahun 1023, 1030 dan 1069, Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan Colamandala yang letaknya di India Selatan. Serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Colamandala sangat melemahkan Kerajaan Sriwijaya, dan hal ini memungkinkan Kerajaan Melayu membebaskan diri dari dominasi Kerajaan Sriwijaya. Dari sumber Cina kita juga dapat mengetahui bahwa dalam tahun 1079 dan 1088, Melayu mengirim utusannya ke Cina.²³⁾ Pada tahun 1178 dari berita "*Chau-Yu-Kua*",²⁴⁾ disebutkan beberapa nagari di Sumatra dan di Semenanjung Malaka yang termasuk dalam lingkungan Kerajaan Sriwijaya pada abad XII. Anehnya nama Kerajaan Melayu tidak disebut lagi, dan hal ini memberi petunjuk kepada kita, adanya kemungkinan bahwa sesudah serangan Kerajaan Colamandala 1069 Kerajaan Melayu telah dapat membebaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya dan membentuk negara sendiri. Sejak Kerajaan Melayu membebaskan diri dari Sriwijaya ibu kotanya dipindahkan dari daerah Jambi ke tempat yang baru di daerah Minangkabau, yaitu Darmasraya di daerah hulu Sungai Batanghari. Hal ini dapat kita ketahui dari isi prasasti Padang Candi 1286, yang terdapat di Sungai Langsat kenagarian Siguntur dekat Sungadareh dalam provinsi Sumatra Barat yang sekarang.

Rupanya Sriwijaya setelah serangan ketiga dari Colamandala dapat bangun kembali sebagai kerajaan besar dan masih tetap merupakan kerajaan yang menguasai bagian barat kepulauan Nusantara sampai akhir abad XIII. Pada tahun 1222 Kerajaan Kediri yang berpusat di Jawa Timur jatuh dan di atas reruntuhan Kerajaan Kediri itu berdiri Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari yang berdiri dalam tahun 1222 berusaha mengimbangi kekuasaan Sri-

wijaya. Pada akhir abad XIII pergulaan antara Kerajaan Sriwijaya dan Singosari mengenai kekuasaan di Indonesia mulai berkobar. Sebelum itu Sriwijaya hanya bergerak dan berkuasa di Indonesia sebelah barat dan Singosari di Indonesia bagian timur.

Pada tahun 1275 Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari mengirimkan suatu ekspedisi militer ke Sumatra, yang dalam sejarah dikenal dengan sebutan "Pamalayu". Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mencari daerah tumpuan dari Kerajaan Singosari di Sumatra dalam rangka kemungkinan datangnya serangan dari armada Khu Bilai Khan, dan juga untuk menguasai jalan dagang internasional di Selat Malaka. Sebagai hasil dari ekspedisi militer ini, maka dalam tahun 1286 Raja Kartanegara mengirimkan arca Amoghapasa dari Jawa ke Sumatra (Kerajaan Melayu), sebagai hadiah untuk raja dan rakyat Kerajaan Melayu. Dengan ini dapat diartikan bahwa semenjak itu Kerajaan Melayu telah tidak ber-setia kepada Kerajaan Singosari dan menjadi daerah tumpuan untuk menghadapi kemungkinan serangan dari negeri Cina.

Dari uraian di atas berdasarkan teori mengenai penyebaran kebudayaan Hindu dan lalu-lintas perdagangan serta sumber asing mengenai Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah Sumatra Barat merupakan bagian dari Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang pernah berkuasa di pantai timur Pulau Sumatra. Barulah sesudah ekspedisi Pamalayu 1286 dari Kerajaan Singosari kita mendapatkan bukti langsung berupa prasasti yang dipahatkan pada alas arca Amoghapasa tentang daerah ini.

2.2. Berdirinya Kerajaan Pagarruyung

2.2.1. Munculnya Adityawarman

Untuk mengetahui siapa sebenarnya Adityawarman, raja Kerajaan Pagarruyung yang pertama, perlu kita meninjau kembali ekspedisi Pamalayu yang telah kita sebut di atas. Ekspedisi Pamalayu adalah operasi militer yang dilancarkan oleh Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari dalam tahun 1275 M. Ekspedisi militer yang dipimpin oleh Panglima Mahisa Anabrang ini, berhasil menguasai Kerajaan Melayu yang berpusat di Darmasraya. Dalam tahun 1294 pasukan Singosari yang dikirimkan ke tanah Melayu kembali ke Jawa dengan membawa dua orang putri, anak Raja Melayu Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Putri tersebut bernama Dara Jingga dan Dara Petak.²⁵⁾

Ketika pasukan Singosari beserta kedua putri Melayu itu sampai di Jawa Timur, Kerajaan Singosari sudah runtuh dan di atas reruntuhan itu berdiri Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dalam tahun 1293. Raden Wijaya mempunyai empat orang istri, semuanya anak Raja Kartanegara. Yang terpenting adalah yang tertua, yang menjadi prameswari, bernama Tribhuwana dan yang bungsu bernama Gayatri. Putri Melayu Dara Petak diambil sebagai selir oleh Raden Wijaya, melahirkan seorang putra yang bernama Jayanegara. Dara Jingga yang kawin dengan seorang pembesar kerajaan melahirkan seorang putra yang dengan nama Abhisekaraja Haji Mantrolot, yang kelak dikenal dengan nama Adityawarman. Karena dari perkawinannya dengan putri Kartanegara, Raden Wijaya tidak memperoleh seorang putra, maka yang menggantikannya menjadi raja Majapahit ialah Jayanegara. Jadi Raja Jayanegara yang menjadi raja Majapahit yang kedua (1309–1328) adalah saudara sepupu Adityawarman. Mengenai ayah Adityawarman, timbul beberapa pendapat dari para sarjana, antara lain dari W.F. Stutterheim dan Prof. Berg.²⁶⁾

Menurut W.F. Stutterheim dalam T.B.G. 76, Adityawarman adalah putra dari Wiswarupakumara dengan putri Melayu. Menurut Stutterheim, Wiswarupakumara adalah saudara Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari.

Prof. Berg. dalam karangannya *De Sadeng Oorlog en de mythe van groot Majapahit* menyatakan bahwa Adityawarman adalah putra bungsu dari raja Majapahit yang pertama. Pendapat kedua orang sarjana itu sangat bertentangan dengan berita *Pararaton* dan Kidung Panji Wijayakrama. Kedua sumber berita itu menyatakan bahwa Dara Jingga dan Dara Petak adalah dua Putri Melayu yang dibawa oleh tentara Singosari, ekspedisi Pamalayu. Dara Petak diambil sebagai istri oleh Raden Wijaya, sedangkan Dara Jingga kawin dengan seorang pangeran. Adityawarman banyak sekali meninggalkan *Prasasti* yang berhubungan dengan masalah dirinya dan kegiatannya. Dalam *Prasasti Kubu Rajo*, yang terdapat di Lima Kaum Batusangkar (lihat lampiran foto-foto), Adityawarman menyatakan ayahnya bernama "Adwayawarman".²⁷⁾ Dalam prasasti Bukit Gombak II dari tahun Saka 1278, juga baris pertama disebut "Adwayawarman" dalam hubungannya

dengan Adityawarman. Dengan kedua prasasti di atas jelas sekali bahwa Adityawarman tidak mengaku putra "Wiswarupakumara", sebagaimana dikemukakan oleh Stutterheim. Juga tidak pula putra bungsu raja Majapahit yang pertama, sebagaimana menurut teori Prof. Berg, tetapi adalah putra Adityawarman. Timbul persoalan lagi, siapakah Adwayawarman itu? Bagaimana hubungan antara Adwayawarman dengan keraton Majapahit, karena semasa mudanya Adityawarman dididik dalam Kerajaan Majapahit. Bagaimanapun Adwayawarman adalah ayah Adityawarman. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Adwayawarman, perlu kita meninjau kembali ke masa tahun 1286 M. Setelah Kerajaan Melayu didatangi oleh Kerajaan Singosari, maka pada tahun 1286 Raja Kartanegara menghadiahkan arca *Amoghapaśa* untuk Kerajaan Melayu, yang pada alas arca tersebut terdapat inskripsi (prasasti).²⁸⁾ Di antara nama-nama dalam prasasti tersebut terdapat nama "Mahamantri Adwayabrahma".²⁹⁾ Pada waktu peristiwa itu terjadi yang menjadi raja di Kerajaan Melayu, ialah Tribuwanaraja Mauliwarmadewa, ayah dari putri Dara Jingga dan Dara Petak. Oleh karena Adityawarman mengaku dirinya adalah putra Adwayawarman, sebagaimana yang tertulis dalam prasasti Kubu Rajo dan Bukit Gombak II, maka dapat dipastikan bahwa Dara Jingga kawin dengan Mahamantri Singosari yang bernama Adwayawarman, dengan kata lain Mahamantri Adwaya adalah menantu dari Raja Tribuwanaraja Mauliwarmadewa. Inilah yang dikatakan dalam buku *Pararaton* bahwa Dara Jingga "*Alaki dewa*" (kawin dengan seorang pembesar). Jadi Adityawarman adalah cucu dari Tribuwanaraja Mauliwarmadewa dan berdasarkan inilah nantinya ia dengan mudahnya menjadi raja di kerajaan Melayu. Jadi sudah jelas ayah Jayanegara dan Adityawarman adalah raja dan pembesar Kerajaan Singosari dan Majapahit di mana di kemudian harinya ia menjadi pembesar yang utama dalam kerajaan tersebut.

Menurut setengah sumber sejarah, Dara Jingga tidak lama tinggal di kerajaan Majapahit, disebabkan ayahnya Raja Tribuwanaraja Mauliwarmadewa mangkat, ia pulang kembali ke kerajaan Melayu dan di Kerajaan Melayulah ia nantinya melahirkan Adityawarman. Sewaktu masih kecil Adityawarman dikirim dan dididik di keraton Majapahit. Hal ini dijelas-

kan oleh Muhammad Yamin sebagai berikut: "Adityawarman berasal dari tanah Minangkabau di Pulau Sumatra tempat lahirnya terletak di Siguntur dengan negeri Sijunjung dan waktu muda dia berangkat ke Majapahit, tempat dia dididik di sekeliling pusat pemerintahan dalam suasana keraton. Kesempatan yang didapatnya itu berasal dari pada turunan-nya. Ayah bundanya mempunyai perhubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit yang pertama (Kertarajasa)".³⁰⁾

Pendapat Muhammad Yamin mengenai tempat lahir Adityawarman dan hubungan kekeluargaannya dengan Kerajaan Majapahit lebih diperkuat oleh Pitono yang menulis sebagai berikut: "Adityawarman adalah seorang putra Sumatra yang lahir di daerah aliran sungai Kampar, dan besar kemungkinan dalam tubuhnya mengalir darah Majapahit. Hubungannya dengan istana Majapahit bersifat geneologis dan politis".³¹⁾

Dengan ini dapat dipastikan bahwa Adityawarman dilahirkan di kerajaan Melayu dan dibesarkan di keraton Majapahit. Di keraton Majapahit Adityawarman dididik bersama dengan saudara sepupunya Jayanegara, yang sebaya umurnya dengan dia.

Dalam tahun 1309 Raden Wijaya mangkat, yang menggantikannya menjadi raja adalah Jayanegara. Karena yang menjadi raja adalah Jayanegara, maka Adityawarman memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam pendidikannya di keraton Majapahit. Bagaimanapun juga Jayanegara sangat membutuhkan bantuan Adityawarman, karena dalam keraton Majapahit ia kurang disukai oleh pembesar-pembesar dan rakyat Majapahit. Ini disebabkan baik Raja Jayanegara maupun Adityawarman keturunan Majapahit dan Melayu. Karena kesempatan yang diperolehnya dalam keraton Majapahit begitu luas, maka kariernya cepat menanjak.

Di keraton Majapahit Adityawarman menjabat pangkat sebagai *Mantri Paraudhatara*, yang sama dengan pangkat *werdhamentri*. Kedudukan yang didapat Adityawarman itu, bukan saja karena ia ada hubungan keluarga dengan raja Jayanegara, tetapi juga karena kecerdasannya. Karena kecakapannya itu pada tahun 1325 Raja Jayanegara mengutus Adityawarman menjadi duta Kerajaan Majapahit ke negeri Cina. Pada tahun 1329 Raja Jayanegara mangkat, yang menjadi

penguasa di Kerajaan Majapahit ialah Tribhuwanatunggadewi, yang memerintah atas nama ibunya Gayatri.

Semenjak Jayanegara mangkat, Adityawarman mulai dilupakan orang. Tetapi karena kecakapan, kecerdasan, dan keberanian ia dapat mengatasi segala rintangan dan tetap menjadi negarawan yang utama dalam Kerajaan Majapahit sejajar dengan Patih Gajah Mada. Keberaniannya dibuktikan ketika terjadi Pemberontakan Sadeng 1331, dengan perhitungan tepat, ia berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Sebagai seorang diplomat yang ulung dibuktikannya, ketika dalam tahun 1332 Tribhuwanatunggadewi mengirim Adityawarman menjadi duta sekali lagi ke negeri Cina.

Dalam tahun 1331 Majapahit baru meliputi daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sesudah tahun tersebut, sebagai pelaksanaan sumpah Palapa — Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai daerah Bali, Sumbawa, Kalimantan, Seram, Sulawesi Selatan, dan Sumatra. Perluasan daerah Majapahit ke Pulau Sumatra mulai dilancarkan pada tahun 1339, di bawah pimpinan Gajah Mada dan Adityawarman.³²⁾ Perluasan daerah kekuasaan Majapahit ke Pulau Sumatra mendapat perlawanan yang besar dari kerajaan-kerajaan Islam yang telah tumbuh dan berkembang di pantai Sumatra bagian timur. Kerajaan-kerajaan Islam itu telah menguasai lalu-lintas dagang di Selat Melaka dan daerah-daerah penghasil merica di Minangkabau Timur. Kerajaan Islam yang dimaksudkan ialah Perlak, Pasai, Samudra, dan nantinya menyusul Kerajaan Aru Barumun yang terletak di daerah Padang Lawas Sumatra Timur.

Penyerangan pasukan Majapahit ke daerah Sumatra Utara tahun 1339, langsung dipimpin oleh Gajah Mada dan penyerangan ke Sumatra bagian tengah dipimpin oleh Adityawarman. Tetapi angkatan darat Majapahit dapat ditahan oleh kesultanan Samudra Pasai, sedangkan angkatan lautnya dihancurkan oleh angkatan laut Aru Barumun. Gajah Mada gagal dalam serangannya di daerah Sumatra Utara dan menguasai perairan Selat Malaka.³³⁾

Adityawarman yang memimpin angkatan perang Majapahit di Sumatra bagian tengah berhasil menaklukkan kesultanan Kuntu-Kampar, yang merupakan negara vasal Kerajaan Aru Barumun. Sebenarnya tujuan utama Gajah Mada dalam penyerangannya ke daerah-daerah di pulau Sumatra adalah

untuk merebut perairan Selat Melaka yang ramai lalu lintas dagangnya. Adityawarman dalam memimpin angkatan perang Majapahit ke Sumatra bagian tengah berhasil menguasai daerah tersebut sampai ke pedalaman Minangkabau.

Di samping itu Adityawarman bercita-cita untuk mewarisi mahkota Kerajaan Majapahit, karena ia saudara sepupu Jayanegara. Nampaknya harapan itu sia-sia saja, karena dalam tahun 1334, Bhre Kahuripan melahirkan seorang putra yang kelak mewarisi mahkota Kerajaan Majapahit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Yamin sebagai berikut: "Sementara itu Hayam Wuruk yang dilahirkan dalam tahun 1334, lama-kelamaan telah menjadi pemuda teruna, sehingga bagi Adityawarman tidak ada kesempatan lagi untuk memenuhi harapan akan menjunjung mahkota Kerajaan Majapahit sebagai ahli waris yang terdekat.³⁵⁾

Semenjak kelahiran Hayam Wuruk hubungan antara Adityawarman dengan Bhre Kahuripan sebagai penguasa Majapahit mulai agak renggang. Dengan lahirnya Hayam Wuruk, simpati orang Majapahit kepada keturunan Dara Petak dan Dara Jingga mulai kurang, walaupun Adityawarman banyak berbuat untuk kemegahan Kerajaan Majapahit. Sesudah tahun 1334 Adityawarman pulang ke negeri asalnya Kerajaan Melayu yang berpusat di Darmasraya Minangkabau.

2.2.2. Adityawarman Membangun Kerajaan Pagarruyung

Adityawarman adalah cucu dari raja Melayu, karena ibunya Dara Jingga adalah anak raja Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Karena itu ia berhak atas takhta Kerajaan Melayu. Timbulnya keinginan Adityawarman untuk membangun Kerajaan Melayu yang mandiri, disebabkan karena kegagalan Gajah Mada dalam tugasnya di Sumatra.

Pada tahun 1347 Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Melayu yang berpusat di Darmasraya. Adityawarman menyusun kembali pemerintahan kerajaan tersebut, seperti di zaman neneknya Raja Mauliwarmadewa, yang kita kenal dalam tahun 1286. Adityawarman, meluaskan daerah dan menanamkan kekuasaannya sampai di Sumatra Barat.

Mulai masa pemerintahan Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Melayu tahun 1347, didapatkan di dalam prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Amoghapasa dari

Padang Candi (sekarang disimpan di museum pusat Jakarta). Dalam prasasti itu ia memakai nama "Udayadityawarman Prataparakramarajendra Maulimaliwarmadewa dan memakai gelar Maharayadhiraja".³⁶⁾ Dengan gelar Maharayadhiraja itu, Adityawarman rupanya hendak menyatakan bahwa tidak ada raja di atasnya, bahwa ia lepas dari kerajaan Majapahit".³⁷⁾ Sebagai pelaksanaan dari tindakannya melepaskan diri dari Kerajaan Majapahit maka dalam tahun 1349, Adityawarman memindahkan pusat kerajaannya dari Darmasraya ke Pagarruyung Minangkabau (pedalaman Sumatra Barat dekat Batu-sangkar).

Pada prasasti Kubu Rajo 1349, yang didapatkan di Lima Kaum Batusangkar, Adityawarman menyebut dirinya raja tanah Kanaka. Tanah Kanaka nama lain untuk Swarnadwipa yang pada waktu itu dipakai untuk menyebut nama Pulau Sumatra. Ia mendirikan dinasti baru yang disebutnya dinasti Kulisadhara alias dinasti Indera. Walaupun dia menyatakan dirinya raja Pulau Sumatra tetapi ia tidak memerintah seluruh pulau tersebut.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan dari pantai timur ke pedalaman Sumatra Barat, maka Adityawarman telah melepaskan kedudukan Kerajaan Melayu di Selat Melaka yang selama ini merupakan urat nadi kerajaan tersebut. Nam-paknya kepindahan Adityawarman ke Pagarruyung terutama didorong oleh faktor politik tidak oleh faktor ekonomi. Karena kepindahan ke Pagarruyung itu, secara ekonomi merugikan. Usaha Adityawarman mencari daerah perdagangan baru di pesisir barat Pulau Sumatra, tidak menolong kerajaannya, dari kemunduran setelah ia meninggal.

2.2.3. Masa Pemerintahan Adityawarman

Di belakang arca Amoghapasa yang dikirimkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1286, Adityawarman memahatkan sebuah prasasti. Itulah buat pertama kali tulisannya di Sumatra Barat. Dalam prasasti yang berangka tahun 1347 Aditya-warman menyatakan bahwa ia telah naik takhta Kerajaan Melayu. Dua tahun setelah ia naik takhta di kerajaan Melayu, Adityawarman memindahkan pusat kerajaannya ke Pagarruyung di pedalaman Sumatra Barat.

Dalam usahanya memajukan Kerajaan Pagarruyung, Adityawarman mengadakan hubungan dengan luar negeri. Adityawarman mengirimkan utusan ke negeri Cina pada tahun 1357, 1375, 1377. *Annalen* Cina menuliskan bahwa utusan tersebut datang dari "*Seng-Kia-Tie-Ya-Lam*", Krom menyatakan bahwa nama tersebut "mirip dengan nama utusan Kerajaan Majapahit pada tahun 1325 dan 1332 yakni "*Si-La-Seng-Kit-Li-Ye*".³⁸⁾ Sedangkan Ir. Moens membacanya sebagai Adityawarman. Kesimpulannya ialah bahwa para sarjana sependapat, bahwa utusan ke Cina 1357, 1375, 1377 adalah dari Adityawarman raja Kerajaan Pagarruyung.

Prasasti Adityawarman yang terakhir adalah prasasti Saruaso yang berangka tahun Saka 1297 (1375 M). Pada tahun tersebut ia ditasbihkan sebagai Bairawa dan bergelar Surawasawan, nama gelar tersebut sampai sekarang melekat untuk nama negeri Saruaso dekat kota Batusangkar. Walaupun prasasti terakhir itu bertahun 1375, tapi seperti telah dikatakan di atas, dari berita Cina kita masih mendapat keterangan sampai tahun 1377. Berita 1377 itu menyatakan bahwa pada tahun tersebut ia digantikan oleh putranya yang bernama *Ma-na-cho-wu-li*. Dalam berita tersebut juga dikatakan bahwa Raja Mauli telah meninggal dalam tahun 1376.

Semasa pemerintahannya, Adityawarman berusaha membawa Kerajaan Pagarruyung ke puncak kejayaannya. Karena adanya kestabilan politik di Nusantara pada waktu itu yakni antara Kerajaan Pagarruyung di sebelah barat dan Kerajaan Majapahit di sebelah timur, Adityawarman berhasil membangun Kerajaan Pagarruyung. Suksesnya ia membangun Kerajaan Pagarruyung, disebabkan dia bekas negarawan Kerajaan Majapahit.

Dari prasasti dan berita Cina itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masa pemerintahan Adityawarman di Kerajaan Pagarruyung berlangsung antara tahun 1349—1376.

2.2.4. Corak Pemerintahan

Adityawarman sebagai seorang yang dididik serta yang telah menjabat berbagai jabatan di Kerajaan Majapahit tersebut, tentulah paham betul terhadap struktur pemerintahan Majapahit. Struktur pemerintahan Majapahit yang sempurna dan kompak tersebut, telah membawa kerajaan itu

kepada puncak kejayaannya dan hal ini pun tentu disadari oleh Adityawarman.

Kita belum memperoleh bukti yang pasti tentang, apakah sistem pemerintahan Majapahit tersebut, ditetapkan oleh Adityawarman di kerajaannya setelah ia memerintah di Pagarruyung ini. Tetapi ada unsur-unsur dari jabatan-jabatan seperti yang ada dalam pemerintahan Majapahit kita jumpai dalam sistem pemerintahan Adityawarman di Pagarruyung. Dengan bukti yang relatif sedikit, kita belum mungkin untuk menyimpulkan bahwa Adityawarman melaksanakan sistem tersebut di kerajaannya, tetapi sebaliknya kita tidak pula mungkin untuk tidak berpendapat demikian.

Pada masa pemerintahan Adityawarman di Pagarruyung, kita menjumpai beberapa unsur yang bersamaan dengan Kerajaan Majapahit. Di belakang arca Amoghapasa tahun 1286 yang terdapat di Padang Candi, tertulis nama seorang tokoh yaitu "*Dewa Tuhan Prapatih*". Menurut Pitono⁴⁰⁾ tokoh ini adalah perdana menteri dari Adityawarman. Nama Tuhan Prapatih, adalah sama dengan *patih* atau *mapatih* yang terdapat di susunan pemerintahan Majapahit, jadi adalah seorang perdana menteri. Kalau kita bandingkan antara kedudukan seorang raja dengan kedudukan menteri antara lain dalam hubungannya dengan rakyat, sudah pasti bahwa para menteri akan lebih langsung berhubungan dengan rakyat daripada raja.

Adityawarman sebagai seorang raja yang baru saja memindahkan pusat kerajaannya ke Pagarruyung, tak dapat tidak akan berusaha mengambil simpati masyarakat dengan berbagai cara. Langkah pertama tentulah dengan cara lemah-lembut dan bijaksana. Jika hal itu tidak mempan barulah dengan cara kekerasan. Adityawarman bertindak di Kerajaan Pagarruyung sangat hati-hati dan bijaksana. Ia akan mencari pembantu-pembantunya sedemikian rupa, yang akan memenuhi syarat-syarat tersebut.

Barangkali kebijaksanaan pembantu-pembantunya ini, yaitu para menteri yang dikepalai oleh seorang patih itu telah menawan hati masyarakat Minangkabau. Tindakan menterinya yang sangat menghormati rakyat, memperhatikan kesejahteraan rakyat, serta memperhatikan sungguh-sungguh setiap buah pikiran yang timbul dari kalangan rakyat; telah

menyebabkan rakyat memuja mereka sebagai tokoh-tokoh demokratis.

Dewa Tuhan Prapatih sebagai perdana menteri, bagi rakyat, merupakan tokoh yang mewakili cara bertindak para pejabat yang demokratis itu. Demikianlah sampai sekarang orang Minangkabau percaya, bahwa *Adat Bodi Caniago* yang demokratis itu, disusun oleh *Datuk Prapatih Nan Sabatang*. Sebagian besar orang berpendapat bahwa *Datuk Prapatih Nan Sabatang* hanyalah tokoh legendaris, namun yang pasti adalah bahwa dalam adat Minangkabau yang sekarang memang ada *Adat Bodi Caniago* yang berbeda dengan *Adat Koto Piliang*; dan memang adat tersebut sangat demokratis jika dibandingkan dengan adat Koto Piliang. Demikianlah tidak salah agaknya, bila kita ikut mendukung ucapan Pitono yang mengatakan "Kami berkecenderungan untuk menghubungkan tokoh adat yang semi-legendaris ini dengan tokoh historis dari Prasasti Padang Candi tersebut."⁴¹⁾

Juga dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit di samping jabatan patih, juga terdapat jabatan *temenggung*. *Temenggung* ini adalah, pembesar yang menanggung keamanan dalam negeri, kepala polisi dan justisi.⁴²⁾

Sebagai seorang menteri keamanan tentulah *temenggung* ini memegang disiplin yang kuat dan keras, namun ia pun adalah seorang yang bijaksana sesuai dengan garis kebijaksanaan dari kementerian dan pemerintahan Adityawarman umumnya.

Seperti yang telah dikatakan di atas, adanya adat Koto Piliang, adalah kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, di samping adat Bodi Caniago. Masyarakat Minangkabau percaya, bahwa penegak adat Koto Piliang adalah *Datuk Ketemenggungan*. Adat Koto Piliang ini berbeda dengan adat Bodi Caniago, dikatakan orang agak bersifat aristokratis-otoriter. Sepintas lalu dengan adat Koto Piliang ini hubungan antara atasan dengan bawahan agak bersifat perintah, berbeda dengan Bodi Caniago yang lebih bersifat musyawarah. Kalau kita simpulkan, maka watak kepemimpinan di dalam adat Koto Piliang agak mirip dengan cara kehidupan dan kepemimpinan di dalam kemiliteran.

Terlalu berani rasanya kalau kita mengidentikkan tokoh legendaris Dt. Ketemenggungan dengan pejabat "temenggung" dalam susunan pemerintahan dalam Kerajaan Maja -

pahit. Tetapi tidak salahnya kita beranggapan ke arah demikian, mengingat persamaan watak antara sistem adat Koto Piliang dengan sistem hierarki kemiliteran dalam sesuatu negara.

Pada prasasti Saruaso, yang memuat nama Ananggawarman, disebutkan bahwa salah seorang penggawa tinggi bergelar "temenggung".⁴³⁾ Dengan demikian jabatan pati dan temenggung itu tertera di dalam prasasti Adityawarman semasa ia menjadi raja di Kerajaan Pagarryung. Jabatan dan pangkat temenggung ini tidaklah lazim dalam pemerintahan kerajaan di Sumatra seperti halnya dengan "patih". Jika ada jabatan dan penjabat temenggung, kita temui dalam kepemimpinan di Kerajaan Pagarryung, tidak salah kalau kita beranggapan, bahwa hal tersebut berasal dari Jawa seperti halnya dengan patih. Mengingat masyarakat Minangkabau percaya bahwa penegak adat Koto Piliang adalah Datuk Ketemenggungan yang hidupnya sezaman dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang kita dapat beranggapan bahwa masyarakat Minangkabau telah mengenal jabatan/penjabat temenggung bersamaan waktunya dengan patih yaitu di masa pemerintahan Adityawarman.

Dari uraian tersebut di atas, didapat suatu kenyataan:

1. Adanya kepercayaan masyarakat Minangkabau bahwa tokoh pendiri adat mereka adalah Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan.
2. Adanya pejabat Dewa Tuhan Prapatih dan Temenggung yang tertera dalam prasasti Adityawarman.
3. Adanya dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit jabatan temenggung dan patih.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Adityawarman kiranya dalam menjalankan pemerintahannya di Pagarryung tentulah dibantu pula oleh suatu kementerian yang perdana menteri-nya adalah seorang patih seperti halnya di Majapahit, dan Dewa Tuhan Prapatih yang tertera di dalam prasasti di belakang arca Amoghapasa dari Padang Candi, Sungai Langsat dekat Sijunjung adalah perdana menterinya.

Demikian kurangnya kita dalam hal keterangan tentang sistem pemerintahan Adityawarman di Pagarryung Sumatra Barat, tetapi adanya unsur-unsur seperti yang telah kita sebutkan di atas, dapatlah kita secara meraba-raba merekons-

truksikan tentang kemungkinan yang ada dalam pemerintahan tersebut. Untuk masa yang lebih kemudian memang kita mendapat bukti yang pasti yang berlaku tidak jauh sebelum masa ini tentang pemerintahan Pagarruyung. Kita mengenal adanya *Raja Tiga Selo*, adanya *Basa Ampek Balai*, sebagai dewan menteri, adanya *Raja Muda* sebagai pimpinan daerah rantau (daerah taklukan). Mengingat ke dalam struktur pemerintahan sepeninggal tersebut telah masuk unsur-unsur Islam, maka pengetahuan tentang struktur tersebut tidaklah membantu kita dalam usaha merekonstruksikan struktur pemerintahan di masa Adityawarman.

Adanya unsur yang sama dalam pemerintahan Adityawarman di Pagarruyung dengan Kerajaan Majapahit, walaupun tidak lengkap menyebabkan kita beranggapan bahwa Adityawarman menjalankan cara pemerintahan Kerajaan Majapahit di Pagarruyung. Kalau ini benar, tentulah Adityawarman memakai sistem pemerintahan sentralisasi menurut pola sistem Majapahit. Adityawarman didampingi oleh seorang perdana menteri yaitu Dewa Tuhan Prapatih (Datuk Perpatih Nan Sabatang) yang dalam kerajaannya memainkan peranan lebih kurang seperti Mapatih Gajah Mada. Dalam bidang angkatan perang, Adityawarman didampingi oleh seorang Temenggung yang bertindak sebagai Panglima Angkatan Perang yang memakai gelar Datuk Ketemenggungan.

Demikianlah uraian kita tentang pemerintahan Adityawarman, kita simpulkan dalam kemungkinan-kemungkinan berdasarkan unsur yang kita temui di dalam prasasti-prasastinya beserta unsur yang kita temui di dalam kehidupan adat Minangkabau dengan tokoh pendiri adat mereka. Bukti yang pasti tentang kehadiran Adityawarman di Sumatra Barat pada masa yang silam ialah ditemuinya prasasti tentang dirinya sejumlah 17 buah di kabupaten Tanah datar, tetapi isinya tidak banyak yang dapat mengungkapkan peristiwa sejarah tentang Sumatra Barat di masa dahulu.

2.2.5. Kepercayaan (Agama)

Pada masa pemerintahan Adityawarman di Pagarruyung Sumatra Barat, agama yang berkembang di dalam kerajaannya ialah agama Budha Tantrayana. Sebagian prasasti yang ditinggalkannya menceritakan tentang upacara agama dari

sekte Bairawa. Perwujudan Adityawarman sebagai Bairawa dapat kita lihat dari arca yang terdapat Padang Roco yang sekarang disimpan di Museum Pusat Jakarta, yang merupakan arca terbesar yang pernah ditemui di Indonesia yang tingginya 4,41 m. Arca ini berdiri di atas alam yang terdiri dari sekumpulan tengkorak manusia.

Pada prasasti, Amoghapasa dari Padang Candi yang dibawa oleh Kern dan Chatterjee,⁴⁴⁾ Adityawarman mendirikan sebuah arca Budha yang bernama *Gaganaganja*, serta pendirian sebuah bangunan Agama Budha yang bernama Jinalaya. Juga pada prasasti Bukit Gombak II juga ada kata-kata pujian kepada sang Budha. Pada Prasasti Saruaso yang terdapat di nagari Saruaso Batusangkar yang telah dibaca oleh Ir. J.L. Moens, Adityawarman ditasbihkan menurut aturan sekte agama Bhairawa. Berdasarkan peninggalan arca dan prasasti dapat kita simpulkan bahwa agama yang dianut oleh Adityawarman ialah Agama Budha, dalam arti telah bercampur dengan unsur *Tantrisme* (khususnya dalam bentuk pemujaan Bhairawa, dan agama ini yang dianut oleh kerajaannya).

Mengenai bangunan agama, sukar kita menerangkan dengan pasti, karena banyak bangunan yang telah dirusak oleh penduduk untuk diambil batu-batunya, atau dirusakkan pada masa permulaan kaum Paderi berkuasa di Minangkabau misalnya bangunan agama yang terdapat di sekitar Lubuksikapung, di Tarung-Tarung, di Tanjung Medan yang hanya tinggal nama.

2.2.6. Pagarruyung Sepeninggal Adityawarman

Adityawarman mangkat pada tahun 1376, meninggalkan Kerajaan Pagarruyung dalam puncak kejayaan dalam sejarahnya. Prasasti yang ditinggalkannya menjadi saksi tentang kebesarannya. Kita tidak memperoleh keterangan yang cukup tentang penggantinya. Dalam berita Cina tahun 1377 dikatakan bahwa Adityawarman digantikan oleh putranya yang bernama Ma-na-cho Wu-li (Maharaja Mauli). Kita tidak memperoleh keterangan, apakah Ma-na-cho Wu-li dalam berita Cina itu sama dengan nama "Anangawarman dalam prasasti Saruaso".⁴⁵⁾

Sampai pertengahan abad XVI kita tidak dapat keterangan lengkap mengenai Kerajaan Pagarruyung. Hanya ada berita

yang perlu diuji kebenarannya bahwa sesudah Adityawarman mangkat Kerajaan Majapahit berusaha kembali untuk menguasai Pagarruyung serta Selat Melaka. Tetapi usaha ini gagal, angkatan perang Majapahit yang datang dari arah pantai timur dikalahkan oleh tentara Pagarruyung dalam pertempuran Padang Sibusuk tahun 1409.⁴⁶⁾ Akibat pertempuran Padang Sibusuk itu membawa akibat yang sangat besar dalam struktur pemerintahan Kerajaan Pagarruyung selanjutnya. Semasa Adityawarman menjadi raja Pagarruyung, pemerintahannya bersifat sentralisasi menurut sistem Kerajaan Majapahit. Tetapi sesudah pertempuran Padang Sibusuk, nagari-nagari di Minangkabau, membebaskan diri dari kekuasaan yang berpusat di Pagarruyung.⁴⁷⁾

Mulai saat itu Kerajaan Pagarruyung, hanya tinggal nama dan lambang; raja Pagarruyung kehilangan kekuasaan di bidang politik.

BAB III
SUMATRA BARAT ZAMAN BARU
(± 1500 M – 1800 M)

3.1. Kerajaan Pagarruyung Sepeninggal Adityawarman

3.1.1. Pemerintahan

Kerajaan Pagarruyung yang dibangun oleh Adityawarman berdirinya cukup lama dan baru berakhir pada permulaan abad ke-19 dengan terjadinya gerakan kaum Paderi di Sumatra Barat. Sesudah pertempuran Padang Sibusuk 1409 M, Kerajaan Pagarruyung tidak begitu kuat lagi, karena kekuasaan raja sudah sangat lemah, walaupun demikian daerah-daerah rantau masih tetap membayar upeti kepada kerajaan.

Semenjak pertempuran Padang Sibusuk 1409 sampai pertengahan abad XVI kita tidak mempunyai keterangan-keterangan tentang pemerintahan Kerajaan Pagarruyung. Keterangan dimulai kembali dengan munculnya Raja "Sultan Alif" lebih kurang tahun 1560". Yang pasti dengan Sultan Alif ini adalah bahwa kerajaan tidak lagi beragama Budha, tetapi telah beragama Islam, dan kekuasaan raja telah lemah sekali.⁴⁸⁾

Pemerintahan telah bercorak desentralisasi dalam arti bahwa nagari-nagari telah merupakan otonom penuh.⁴⁹⁾ Dengan adanya pengaruh Islam inilah kita mengetahui struktur pemerintahan yang lengkap, yang belum pernah kita ketahui sejak Adityawarman, kecuali bayang-bayangnja saja, seperti yang telah kita uraikan pada bab sebelumnya. Di atas otonomi nagari-nagari, kita lihat adanya dua tingkat pemerintahan. Tingkat paling atas adalah raja dan di bawah ini adalah dewan menteri.⁵⁰⁾ Pada tingkat raja dinamakan, *Raja Tiga Selo*. Dengan Raja Tiga Selo berarti adanya tiga raja yang sekaligus berkuasa dalam bidangnya masing-masing, yaitu Raja Alam berkedudukan di Pagarruyung, sebagai pucuk pimpinan; Raja adat berkedudukan di Buo, yang melaksanakan tugas-tugas dalam urusan adat; dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus yang melaksanakan urusan-urusan keagama-

an. Pada tingkat menteri adalah Dewan Menteri yang diistilahkan dengan nama *Basa Ampek Balai*,⁵¹⁾ terdiri:

1. Bandaro (Titah) di Sungai Tarab, ialah sebagai perdana menteri.
2. Tuan Kadi di Padang Ganting dalam urusan keagamaan.
3. Indomo di Saruaso dalam urusan keuangan.
4. Makhudum di Sumanik dalam urusan pertahanan dan daerah rantau.

Masyarakat nagari dalam mengusut persoalannya berjenjang naik sampai ke tingkat kerajaan. Dalam bidang adat dari nagari terus ke Bandaro terus ke Raja Adat di Buo dan akhirnya pada Raja Alam di Pagarruyung. Dalam bidang agama, dari nagari terus ke Tuan Kadi di Padang Ganting, terus ke Raja Ibadat di Sumpur Kudus, akhirnya pada Raja Alam di Pagarruyung, begitulah seterusnya.

Seperti telah dikatakan, struktur pemerintahan seperti yang diuraikan di atas adalah saat telah adanya pengaruh Islam. Dalam hal ini kita pun belum bisa menentukan sejak tahun berapakah adanya lembaga Tiga Selo dan Basa Ampek Balai di dalam struktur Kerajaan Pagarruyung. Berita-berita tentang hal tersebut, hanyalah kita jumpai dalam keterangan-keterangan yang belum bisa kita uraikan secara historis. Namun barangkali ada baiknya kita uraikan kalau berita-berita tersebut ada juga nilai historisnya sedikit seperti yang kita uraikan di bawah ini:

1. Di dalam Tambo Pagarruyung,⁵²⁾ kita dapat berita yang menarik, jika berita itu mempunyai nilai historis, kita dapat mengetahui kapan adanya lembaga-lembaga tersebut. Tentang silsilah raja-raja Pagarruyung ditulis sebagai berikut:
 - a. Adityawarman 1339 – 1376 M
 - b. Ananggawarman 1376
 - c. Sultan Bakilap Alam
 - d. Sultan Persembahan
 - e. Sultan Alif
 - f. Sultan Muning I
 - g. Sultan Patah (Sultan Muning II)
 - h. Sultan Muning III
 - i. Sultan Sembahyang, dan seterusnya

Selanjutnya dikatakan bahwa lembaga Tiga Selo, dibentuk bersamaan pembentukan Basa Ampek Balai. Penobatan dan pelantikan *Raja Tiga Selo* dan *Basa Ampek Balai* itu bersamaan pula dengan pengangkatan dan pengiriman "Sultan Nan Delapan" ke rantau Minangkabau. Rantau nan delapan itu adalah Aceh, Palembang, Tambusai, Rao, Sungai Pagu, Bandar Sepuluh, Siak Indrapura, dan Rembau Sri Menanti. Akhirnya dikatakan bahwa pengangkatan dan pelantikan serta pengiriman itu dilakukan oleh Raja Alam, yaitu Sultan Bakilap Alam. Jika cerita-cerita itu benar, maka kunci untuk menentukan tahun pengangkatan tersebut adalah tahun pemerintahan Bakilap Alam. Memang kita tidak melihat angka tahun pemerintahan dalam Tambo Pagarruyung tersebut tetapi dapat kita kira-kirakan yaitu setelah tahun 1409, karena sampai pada tahun 1409 pemerintahan Pagarruyung masih bersifat sentralisasi. Jadi berdasarkan data tersebut lahirnya lembaga Tiga Selo dan Basa Ampek Balai adalah sesudah tahun 1409 tersebut.

2) Dari cerita Cindur Mata⁵³⁾

Dalam cerita tersebut dikatakan antara lain bahwa Puti Bungsu yang telah dijemput dari ranah Sungai Ngiang oleh Cindur Mata, untuk sementara ditempatkan di rumah tuan Kadi di Padang Ganting. Selanjutnya diceritakan bahwa Cindur Mata diadili oleh Basa Ampek Balai dan Raja Tiga Selo atas tuduhan telah melarikan Puti Bungsu. Dalam cerita Cindur Mata tersebut, telah ada lembaga Tiga Selo dan Basa Ampek Balai di atas. Sekarang timbul persoalan, apakah cerita itu betul kejadian? Kalau betul, kapanakah tahunnya? Jika hal itu dapat dijawab, maka ini akan dapat menjadi petunjuk untuk penentuan tahun berapa berdirinya lembaga-lembaga itu. Seperti telah dikatakan, bahwa sumber-sumber itu belum mempunyai nilai historis yang mutlak, maka kita tidak dapat secara mutlak mepedomaninya untuk penetapan tahun berdirinya lembaga-lembaga itu.

Tetapi bahwa lembaga-lembaga itu ada, itu adalah kebenaran sejarah. Pada dasarnya segala macam tambo dan bukti-bukti yang nyata untuk memberi kemungkinan dalam penyelidikan sejarah tentang lembaga-lembaga itu dan masa sebelumnya telah banyak yang musnah dan hilang. Pertama

kali dengan pembakaran gudang buku tambo Kerajaan Pagarruyung oleh pasukan Belanda pada tahun 1821. Pemusnahan perbendaharaan Tuan Kadi di Padang Ganting dalam masa penyerangan Belanda pertama kali merebut pusat kedudukan Minangkabau di sekitar Tanah Datar. Begitu juga sebagian musnah akibat gerakan Paderi pada permulaan abad ke-19.⁵⁴⁾

Sesuai dengan hal di atas, maka bagian ini dapat kita simpulkan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa sesudah Adityawarman pemerintahan adalah desentralisasi dengan nagari-nagari sebagai otonominya. Di tingkat pusat ada lembaga Basa Ampek Balai, dan Raja Tiga Selo. Tetapi lembaga-lembaga tersebut hanyalah mengurus kepentingan kerajaan dan tidak didapat bukti-bukti tentang urusan rakyat yang diselesaikan oleh Basa Ampek Balai itu. Tugas rutin utama dari Basa-basa itu adalah memungut pajak-pajak di daerah rantau. Ke dalam, tindakan Basa Ampek Balai dan Raja Tiga Selo kurang terasa, karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah para penghulu.

Demikianlah keadaan Kerajaan Pagarruyung sesudah ditinggalkan Adityawarman. Raja sebagai lambang ini berlangsung semenjak sesudah pertempuran Padang Sibusuk sampai permulaan abad ke-19 ketika terjadinya gerakan kaum Paderi untuk memusnahkan kerajaan dan keturunan raja Pagarruyung.

3.1.2. Keadaan Masyarakat

Ketika Raja Adityawarman masih berkuasa, kekuasaan berada dalam tangan pemerintah pusat yang berkedudukan di Pagarruyung (sentralisasi). Setelah ia mangkat kekuasaan pusat Kerajaan Pagarruyung mulai lemah, nagari-nagari di alam Minangkabau mulai melepaskan diri dari kekuasaan yang berpusat di Pagarruyung.

Sesudah pertempuran Padang Sibusuk, rakyat hanya tunduk kepada penghulu-penghulu mereka.⁵⁵⁾ Penghulu-penghululah yang akan membawa segala masalah ke dalam kerapatan nagari saja. Dan dari kerapatan nagari, sesuai dengan masalah-masalah yang ingin dipecahkan, kalau tidak selesai masalahnya baru diteruskan kepada Basa Ampek Balai.

Basa Ampek Balailah yang akan meneruskan masalah tersebut kalau tidak putus di tangan mereka kepada Raja Tigo Selo, sesuai dengan bidangnya. Jadi lembaga Basa Ampek Balai dibentuk oleh penduduk Minangkabau sesudah pertempuran Padang Sibusuk, dalam rangka mengurus segala kepentingan mereka. Basa Ampek Balai merupakan kekuasaan Eksekutif di dalam Kerajaan Pagarruyung, karena mereka merupakan menteri-menteri inti.⁵⁶⁾

Mulai saat itu keadaan Minangkabau kembali ke alam Demokrasi, di mana mereka bebas berbicara, sesuai dengan sistem adat matrilineal yang mereka turun-temuruni semenjak dari zaman nenek moyang mereka. Rakyat tidak suka kekuasaan absolut,⁵⁷⁾ karena keadaan itu akan menyebabkan kebebasan mereka dibatasi. Mulai saat itu mereka kembali menjalankan pengaturan masyarakat, sesuai dengan kelarasan yang berlaku dalam sistem adat mereka, yaitu kelarasan Bodi Caniago, dan kelarasan Koto Piliang. Dalam nagari yang diperintah menurut Laras Bodi Caniago, para penghulu mempunyai kedudukan sama dalam pemerintahan negeri, pemerintahannya bersifat demokrasi, duduknya sama rendah, tegak sama tinggi; *Duduk sehamparan*, tegak *sepamatang*, datar sebagai lantai papan, licin sebagai cermin.⁵⁸⁾ Kalau ada persoalan di antara mereka, mereka pecahkan secara musyawarah. Pembicaraan-pembicaraan dilakukan di balai adat. Penghulu **Andiko** menyampaikan hasil pembicaraan di balai adat itu kepada anak buahnya. Kalau pembicaraan di balai adat itu tidak putus, mereka teruskan kepada Bandaro Nan Kuning, yang kedudukannya sebagai menteri dalam nagari di bawah Indomo yang berkedudukan di Saruaso. Bandaro Nan Kuning adalah jurubicara dari Adat Bodi Caniago.⁵⁹⁾

Lain halnya dalam nagari yang diperintah menurut adat Koto Piliang, Adat Koto Piliang menganut paham *Royalis Aristokratis* (adat beraja-raja). Antara anak buah (penduduk negeri) dengan pimpinan tidak ada hubungan langsung, harus melalui saluran-saluran tertentu. Di sini pucuk pemerintahan dipegang langsung oleh penghulu pucuk yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari penghulu suku⁶⁰⁾ Penghulu-penghulu suku, dalam menjalankan pemerintahan nagari harus bertanggung jawab kepada penghulu pucuk. Penghulu suku, dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh *man-*

ti (urusan pemerintahan umum), *dubalang* (urusan keamanan) dan *malin* (urusan keagamaan). Mereka ini bersama-sama dengan penghulu suku disebut orang *Nan Ampek Jinih*. Jadi orang nan ampek jinih merupakan badan pemerintahan yang bertugas untuk kepentingan kaumnya, yang bertindak sebagai pemimpin sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta selalu dalam hubungan yang bersifat kesatuan tindak dan perbuatan, artinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Kalau ada persoalan nagari yang tidak putus, mereka bawa kepada Bandaro Nan Putih, menteri Luar Negeri di bawah Titah (Bandaro) di Sungai Tarab, yang bertindak sebagai juru bicara dari adat Koto Piliang, kalau tidak putus di sana barulah dibawa persoalan tersebut kepada Rajo Nan Tigo Selo.

3.1.3. Kebutuhan Hidup

Semasa Raja Adityawarman masih berkuasa, ia membuka bandar-bandar pelabuhan yang baru di pesisir barat Pulau Sumatra, seperti Pariaman, Tiku, Air Bangis dan lain-lain. Bandar-bandar itu dibangun adalah untuk menggantikan bandar-bandar yang ada di pantai timur Sumatra yang selama ini merupakan jalan ke luar dari Kerajaan Melayu dan penduduk Minangkabau ketika masih berpusat di Darmasraya. Tetapi dengan dipindahkannya pusat kerajaan ke Pagarruyung oleh Adityawarman, maka ia berusaha membuka bandar-bandar untuk memajukan perekonomian dan perdagangan kerajaannya. Kepindahan perdagangan ke pantai barat, tidaklah menolong Kerajaan Pagarruyung daripada kemundurannya sepeninggal Adityawarman, karena pada masa itu lalu-lintas perdagangan yang utama melalui Selat Melaka. Kita mengetahui dari sejarah bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar selat itu seperti Sriwijaya dan Melayu menjadi besar dan berkembang karena mengutamakan perdagangan melalui laut. Pindahnya pusat kerajaan ke Pagarruyung, berarti menjauhi diri dari pusat perdagangan utama yaitu di Selat Melaka, dan dibukanya bandar-bandar baru di pantai barat, tidaklah menolong perekonomian kerajaan. Tampaknya kepindahan perdagangan kerajaan ke pantai barat lebih banyak bersifat politis, dalam rangka menjauhi dominasi Kerajaan Majapahit. Bandar-bandar baru yang dibuka itu tidaklah ramai dilayari seperti bandar-bandar di pantai timur, karena

lalu-lintas perdagangan pada masa itu masih sepi. Barulah sesudah kejatuhan Melaka pada tahun 1511 M ke tangan Portugis, pedagang-pedagang Islam mengalihkan lalu-lintas perdagangan ke pantai barat, dan barulah pada pertengahan abad ke-16 mulai hidup.⁶¹⁾

Untuk memajukan perekonomian penduduk, dalam rangka mengimbangi kemunduran perdagangan melalui laut, maka semasa Adityawarman, pertanian digiatkan. Ini dapat dibuktikan sampai sekarang berdasarkan peninggalan-peninggalan irigasi yang terdapat di kenagarian Saruaso, salah satu irigasi itu sekarang bernama Bandar Berpahat, tempat di mana terletak Prasasti Bandar Berpahat. Irigasi-irigasi itu gunanya untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Juga di daerah Batu-sangkar dan sekitarnya sampai sekarang kita lihat sawah yang sangat luas dan ini bukan dibuat zaman sekarang tetapi jauh sebelumnya telah ada. Juga di daerah Pariangan terdapat sawah-sawah luas. Bahkan menurut cerita rakyat yang turun-temurun ada "sawah besar setampang benih" yang dibuat semasa orang-orang Minangkabau baru mendirikan nagari di sana, termasuk nagari tertua di Sumatra Barat.⁶²⁾ Jadi sektor pertanian inilah yang diutamakan oleh Adityawarman dan pengganti-penggantinya. Di samping padi, maka usaha penduduk yang lain adalah menanam merica yang dibutuhkan oleh perdagangan dunia pada masa itu.⁶³⁾

Setelah kejatuhan Melaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis pedagang-pedagang Islam memindahkan kegiatan perdagangan mereka ke pantai barat Pulau Sumatra, barulah pada saat itu perdagangan di pantai barat mulai berkembang dan pelabuhan Tiku, Pariangan, Air Bangis, Salido, Indra-pura mulai memegang peranan.

Barang-barang dagang yang diperdagangkan pada masa itu adalah lada, kapur barus, barang-barang hutan dan emas. Perdagangan di pantai barat ini nantinya membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Kerajaan Pagarruyung untuk selanjutnya yaitu masuknya agama Islam yang dibawa oleh pedagang Aceh, maupun Minangkabau sendiri dan terjadinya kontak dengan kebudayaan Barat pada permulaan abad ke-17. Dengan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertanian dan perdagangan adalah merupakan mata pencarian yang utama bagi masyarakat Minangkabau semenjak dahulunya.

3.2. Alam Pikiran dan Kepercayaan

3.2.1. Masuknya Agama Islam

Semasa Adityawarman memerintah Kerajaan Pagarryung, agama yang dianutnya ialah agama Budha sekte Bairawa. Tidak ada bukti-bukti dan keterangan-keterangan tertulis yang sampai kepada kita, apakah rakyat dalam Kerajaan Pagarryung pun menganut agama Budha. Kemungkinan agama tersebut hanya terbatas pada keluarga kerajaan dan sebagian kecil penduduk. Ini terbukti setelah Adityawarman meninggal, rakyat Minangkabau (Sumatra Barat) melepaskan diri dari kungkungan kerajaan yaitu setelah pertempuran Padang Sibusuk (1409). Kemungkinan rakyat Kerajaan Pagarryung telah menganut agama Islam, karena semenjak dibukanya bandar-bandar di pantai barat oleh Adityawarman, banyaknya penduduk Minangkabau (Sumatra Barat) yang berlayar ke Aceh untuk berdagang, sedangkan pada waktu itu Kerajaan Aceh telah menganut agama Islam semenjak abad ke-13.

Di dalam Tambo Pagarryung, kita dapat data yang menarik, jika berita itu mempunyai nilai historis; tentang silsilah raja-raja Pagarryung ditulis sebagai berikut: Adityawarman (1339–1376), Ananggawarman (1376–), Pengganti Ananggawarman dikatakan Sultan Bakilap Alam. Gelar Sultan sepengetahuan kita adalah gelar raja-raja yang menganut Agama Islam. Sayangnya dalam tambo tersebut tidak disebutkan tahun pemerintahan "Bakilap Alam". Tetapi kemungkinan Sultan Bakilap Alam naik takhta Kerajaan Pagarryung sesudah peristiwa pertempuran Padang Sibusuk. Sekarang timbul pertanyaan kepada kita, kapankah agama Islam masuk dan berkembang di Sumatra Barat (Minangkabau)? Ada beberapa pendapat untuk itu.

1. Hasil kesimpulan "Seminar masuknya Islam di Minangkabau" yang diadakan di Padang tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 1969, hanya mengambil beberapa kemungkinan, salah satu kemungkinan itu bahwa Islam telah masuk pada abad ke-7 Masehi ke Minangkabau.⁶⁴⁾ Tempat masuknya ialah wilayah Minangkabau Timur.
2. Prof. Hamka dalam bukunya *Sejarah Umat Islam* mengatakan bahwa, pada abad I Hijrah telah ada kelompok bang-

sa Arab yang membuat perkampungan di pesisir barat Pulau Sumatra.⁶⁵⁾ Oleh Moh. Said dalam prasarannya dalam "Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau 1970", di Batusangkar yang berjudul "Sejarah Minangkabau" dengan menyaring dan mempergunakan karya penulis asing,⁶⁶⁾ pendapat Hamka itu dikuatkan lagi bahwa dengan adanya kelompok bangsa Arab di pantai barat Sumatra itu diartikan bahwa Islam telah masuk ke wilayah ini pada abad I Hijrah.

3. Soekmono dalam bukunya *Sejarah Kebudayaan Indonesia III*, mengatakan bahwa tempat Islam memperoleh pijakannya yang nyata yang pertama di Indonesia adalah di Aceh Utara, yaitu pada akhir abad ke-13. Ini didasarkan kepada bukti-bukti sejarah yang didapat dan dari sanalah menyebar ke tempat lain di Indonesia, antara lain ke pesisir barat pulau Sumatra.
4. Penelitian-penelitian yang dilakukan, berusaha mencari bukti-bukti tertua tentang masuknya Islam di Sumatra Barat, terutama di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Di Ulakan Pariaman, di mana terdapat kuburan Syekh Burhanuddin, yang menurut cerita rakyat yang turun-temurun dikatakan sebagai pengembang agama Islam pertama di daerah ini, tidak didapat bukti-bukti yang meyakinkan kita. Hanya di depan dan di sekitar kuburan itu berserakan nisan-nisan tua yang tidak ada tulisan dan relief-reliefnya. Dalam suatu daerah, yang terletak di kenagarian Koto Tinggi Pakandangan, juga dalam kabupaten Padang Pariaman, team penelitian menemukan nisan-nisan dari kuburan Islam yang tertua. Nisan-nisan tersebut bentuk reliefnya banyak mirip dengan relief-relief nisan kuburan Islam yang terdapat di Aceh yang berasal dari Gujarat. Menurut cerita rakyat yang turun-temurun di tempat penemuan nisan-nisan tersebut, menyatakan bahwa itu adalah kuburan-kuburan dari tokoh-tokoh pengembang agama Islam di daerah itu pada masa dahulunya.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, kita lebih cenderung kepada pendapat Soekmono, bahwa Islam pertama di Indonesia ialah di Aceh pada akhir abad ke-13, dan barulah dari sana berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Ini dikuatkan lagi berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan

dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa nisan-nisan kuburan yang terdapat di kenagarian Koto Tinggi Pakandangan itu, bentuk dan coraknya sama dengan nisan-nisan dari kuburan-kuburan Islam yang terdapat di Aceh yang berasal dari Gujarat. Jadi dengan pengertian lain bahwa Islam yang berkembang di Sumatra Barat ini berasal dari Aceh, dan pada abad ke-14 mulai berkembang ke pesisir barat Sumatra, ketika Adityawarman membuka dan membangun bandar-bandar perdagangan seperti Tikus, Pariaman, Air Bangis, di mana nantinya pedagang-pedagang Aceh yang beragama Islam berdagang ke sana, dan sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama, di kalangan penduduk pesisir.⁶⁷⁾ Dari sinilah nantinya menyebar ke pedalaman Sumatra Barat.

3.2.2. Pengaruh dan Perkembangan Islam di Sumatra Barat

Semasa Adityawarman masih hidup, agama Islam belum begitu cepat berkembangnya, walaupun penduduk telah banyak yang menganut Islam. Ketika Adityawarman meninggal rakyat Minangkabau melepaskan dirinya dari pengaruh kerajaan yang beragama Budha,⁶⁸⁾ dan tampaknya agama Islam lebih cepat meresap dalam masyarakat Minangkabau, dan adat mereka cepat menyesuaikan diri dengan agama tersebut. Perkembangan agama Islam berlangsung dengan jalan damai ke nagari ini, dan jarang dengan kekerasan.⁶⁹⁾ Sehingga kalau kita lihat sekarang sedikit bekas agama Budha pernah ada di daerah ini pada masa yang silam, dan ini menandakan bahwa agama tersebut hanya dianut oleh lapisan atas saja, yaitu keluarga kerajaan. Setelah menjadi pemeluk agama Islam orang Minangkabau menjadi penganut yang saleh, sehingga banyak di antara mereka menjadi mubalig-mubalig pengembang agama Islam yang terkemuka dan menyebarkan agama Islam tersebut ke luar Minangkabau, di antaranya.⁷⁰⁾

- Raja Baginda yang membawa agama Islam ke Kalimantan Utara dan kepulauan Sulu dan mengembangkannya di sana pada tahun 1390 M.
- Syekh Ahmad yang berkubur di Sungai Udang, Negeri Sembilan, pengembang agama Islam yang berasal dari Minangkabau yang meninggal di sana tahun 1467 M.
- Abdul Makmur Chatib Tunggal (Dt. R. Bandang), Chatib Sulaiman (Dt. T. Timang), Chatib Bungsu (Dt. R. Tiro),

adalah pengembang dan pembawa agama Islam ke Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-17 (1605 M).

Perkembangan dan pengaruh Islam menjadi pesat ketika Kerajaan Aceh mulai kuat di bawah pemerintahan Sultan Alau-din Riayat Syah Al Kahar (1537–1568). Aceh berhasil meluaskan wilayahnya ke pantai barat Sumatra, yang semula masuk wilayah Minangkabau.⁷¹⁾ Nampaknya penduduk itu membawa kemajuan dalam perkembangan dan pengaruh Islam di Sumatra Barat pada akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17.

Pada permulaan abad ke-17, seorang ulama dari golongan Sufi, penganut tarikat Naksyabandiyah mengunjungi Pariaman dari Aceh, dan kemudian untuk beberapa lamanya ulama tersebut menetap di Luhak Agam dan Luhak 50 Kota. Juga dalam abad ke-17, di Ulakan Pariaman bermukim seorang ulama yang bernama Syekh Burhanuddin, murid dari Syekh Abdurauf yang berasal dari Aceh. Syekh Burhanuddin penganut Tarekat Syattaryah.⁷²⁾ Murid-murid Syekh Burhanuddin mengembangkan aliran ini sampai ke pedalaman Sumatra Barat (Minangkabau) dan mendirikan pusat pengajiannya di Pamansiangan Luhak Agam. Ulama-ulama (Tuanku-tuanku) yang berasal dari Agam ini memperdalam ajaran Islam ke Ulakan Pariaman, yaitu suatu tempat yang dianggap sebagai pusat dan sumber pengajaran agama Islam di Minangkabau. Dari sinilah nanti banyak lahir ulama-ulama yang akan menjadi pemimpin-pemimpin agama yang terkemuka pada masa berikutnya. Di antaranya yang terkenal ialah Tuanku Koto Tuo yang berasal dari nagari Ampat Angkat Luhak Agam. Kemudian tempat tinggal Tuanku Koto Tuo tersebut menjadi pusat pengembangan agama Islam di Luhak Agam dan sekitarnya. Beliau mengajar murid-muridnya terkenal sebagai penganut agama Islam yang taat dalam menyebarkan agama tersebut. Salah seorang muridnya yang terkenal ialah Tuanku Imam Bonjol. Begitulah pengaruh dan perkembangan Islam di Sumatra Barat, sehingga penduduknya menjadi penganut yang saleh dan taat, yang akan merupakan suatu kekuatan yang kuat nantinya pada abad ke-19 menentang penjajahan Belanda di Sumatra Barat.

3.3. Hubungan ke luar

3.3.1. Dengan Aceh

Semenjak zaman Raja Adityawarman, Kerajaan Pagarruyung telah mengadakan hubungan ke luar, di samping kerajaan-kerajaan yang bertetangga dengannya. Berita-berita Cina menyebutkan bahwa Raja Adityawarman, mengirimkan utusannya ke negeri Cina pada tahun 1357 dan 1375. Juga penggantinya mengirimkan utusan ke negeri Cina pada tahun 1377, dari berita Cina itulah kita mengetahui bahwa Raja Adityawarman telah mangkat pada tahun 1376, dan ia digantikan oleh putranya yang bernama Ma-na-cho-wu-li.

Perhubungan dengan daerah luar ini tetap dilanjutkan oleh raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Pagarruyung pada masa-masa berikutnya, hanya saja di abad ke-15, sesudah terjadi pertempuran Padang Sibusuk 1409, kita kurang mendapatkan data-data yang pasti tentang Kerajaan Pagarruyung barulah pada pertengahan abad ke-16, kita mendapat berita lagi tentang kerajaan tersebut, yang pasti pada masa itu kerajaan telah memeluk agama Islam.

Semenjak dibukanya bandar-bandar perdagangan di pantai barat Sumatra oleh Adityawarman, yaitu Air Bangis, Tiku, dan Pariaman, maka pelayaran perdagangan melalui pantai barat Sumatra mulai agak hidup, tetapi belum ramai seperti pelayaran perdagangan melalui Selat Melaka. Yang diperdagangkan pada waktu itu ialah, lada, kapur barus, emas, barang-barang hutan seperti damar, dan rotan.⁷³⁾

Barulah pelayaran perdagangan melalui pantai barat ini menjadi ramai setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis. Orang-orang Islam yang tidak mau berdagang dengan orang-orang Portugis, menghindari pelayaran melalui Selat Melaka dan menukarnya melalui pantai barat Sumatra, sehingga bandar-bandar perdagangan di pantai tersebut menjadi ramai terutama Air Bangis, Tiku, Pariaman dan terus ke pelabuhan Banten di Jawa Barat.

Karena jalan perdagangan melalui pantai barat mulai ramai, maka Kerajaan Aceh ingin mendominasi dan menguasai daerah-daerah pesisir barat Sumatra tersebut terutama daerah Minangkabau, yang banyak menghasilkan rempah-rempah dan emas yang dibutuhkan oleh dunia perdagangan

waktu itu. Berbagai taktik dipergunakan oleh Kerajaan Aceh untuk menguasai pesisir barat Minangkabau, antara lain dengan cara perkawinan.

Seorang putri Sultan Alaudin Riayatsyah Al Kahar (1537–1568 M), kawin dengan yang dipertuan raja Pagarruyung, kemudian ternyata raja Pagarruyung itu menyia-nyiakan istrinya. Sang istri mengadu kepada ayahnya Sultan Al Kahar, maka raja Aceh pun mengadakan tekanan sedemikian rupa, sehingga raja Pagarruyung setuju untuk menyelesaikan persoalannya dengan menyerahkan pantai barat Minangkabau sampai ke Manjuntio di selatan kepada kekuasaan Aceh.⁷⁴⁾ Untuk mengawasi daerah tersebut, mulai permulaan abad ke-17, Aceh meletakkan gubernur militer (syahbandarnya) di pelabuhan Tikur di utara Pariaman. Hubungan dengan Kerajaan Aceh membawa akibat yang fatal untuk Kerajaan Pagarruyung, yaitu mulai tertanamnya kekuasaan Aceh di pesisir barat, yang merupakan pembayar upeti yang utama untuk Kerajaan Pagarruyung, mulai saat itu perdagangan dikuasai oleh Kerajaan Aceh. Semenjak Aceh menguasai pesisir barat, agama Islam mengalami perkembangan dengan pesatnya, hingga memperkuat kedudukan dan pengaruh Aceh di Minangkabau. Penguasaan Kerajaan Aceh terhadap daerah pesisir barat Kerajaan Pagarruyung ini cukup lama yaitu sampai akhir abad ke-18.

3.3.2. Dengan Bangsa Portugis

Menurut berita Portugis, permulaan abad ke-16 ada utusan Kerajaan Pagarruyung yang datang ke Melaka, kedatangan mereka membicarakan masalah perdagangan dengan bangsa Portugis.⁷⁵⁾ Tetapi dengan berhasilnya Aceh menguasai pesisir barat Sumatra dan yang merupakan musuh utama bangsa Portugis, maka hubungan perdagangan antara Portugis dan Kerajaan Pagarruyung terputus, terutama sekali karena perkembangan agama Islam yang pesat di wilayah ini, menjadi penghalang dalam hubungan selanjutnya.

3.3.3. Dengan Bangsa Belanda

Hubungan antara Sumatra Barat dengan bangsa Belanda terjadi buat pertama kalinya ± tahun 1600, ketika Pieter Both memerintahkan Laksamana Muda Van Caerden mem-

beli lada ke pantai barat Sumatra, karena di Banten sedang putus (kekurangan tempat Belanda biasa membelinya). Pieter Both sendiri sudah tahu bahwa pantai barat ini berada di bawah kekuasaan Aceh. Ketika Laksamana Van Caerden ke sana, beberapa pelabuhan di pantai itu menolak sambil menekankan bahwa transaksi harus dilakukan di ibu kota Aceh.⁷⁶⁾

Di zaman Sultan Iskandar Muda menjadi sultan Aceh (1606–1637 M), yang merupakan sultan Kerajaan Aceh yang terbesar, tidaklah mudah bagi Belanda maupun bangsa Barat lainnya untuk berdagang ke pesisir barat Sumatra, yang merupakan wilayah kekuasaan Aceh. Ketentuan Kerajaan Aceh pada waktu itu, supaya seluruh barang ekspor di daerah taklukan Aceh dibawa ke Banda Aceh untuk dikenakan cukai.⁷⁷⁾ Untuk melaksanakan keputusan ini sultan mengangkat syahbandar-syahbandar di pelabuhan Tiku, Pariaman, Salido, Indrapura adalah orang-orang Aceh. Kalau terjadi perdagangan gelap dengan orang-orang Barat akan dihukum berat oleh sultan.

Pada tahun 1636, Sultan Iskandar Muda mangkat, maka kekuasaan Kerajaan Aceh sepeninggalnya mulai lemah. Daerah-daerah pesisir barat Kerajaan Pagarruyung mulai melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Aceh dan mengadakan perdagangan dengan Belanda, yaitu raja-raja Batang Kapas, Salido, Bayang di pesisir selatan.⁷⁸⁾

Pada tahun 1641, Belanda merebut Malaka dari tangan Portugis, jalan dagang antara Aceh, India dan Persia dibelokkan oleh Belanda menyusur pesisir barat Sumatra dan Selat Sunda. Mulai saat itu ekonomi Aceh mulai terpencil dan wibawa politiknya di daerah-daerah pesisir mulai mundur. Ketika itu wibawa politik Belanda (VOC yang didirikan pada tahun 1602) mulai naik di Indonesia dengan pusatnya Batavia. Selangkah demi selangkah Belanda mulai menjejakkan kakinya di pesisir barat dan menggantikan peranan Aceh. Mula-mula Belanda mendirikan kantor dagangnya di Indrapura, terus ke Salido. Kemudian karena adanya perlawanan rakyat pesisir yang didukung oleh Aceh, maka Belanda mendirikan lojinya di Pulau Cingkuk di depan pantai Painan pada tahun 1664.⁷⁹⁾

Untuk melepaskan pesisir barat Sumatra dari kekuasaan

Aceh, maka Belanda mengadakan perjanjian dengan raja Pagarruyung, pemilik sesungguhnya daerah tersebut. Dalam perjanjian tersebut Belanda mengakui kedaulatan raja Pagarruyung di pesisir barat Sumatra, dari Barus sampai ke Manjuto di selatan. Oleh raja Pagarruyung diberi kebebasan kepada Belanda (VOC) berdagang dan mengatur sesuatu demi perdagangan tersebut di wilayah yang dimaksud. Perjanjian ini terjadi pada tahun 1668, pada waktu itu yang menjadi raja di Kerajaan Pagarruyung ialah Sultan Ahmad Syah.⁸⁰⁾ Mulai saat itu selangkah demi selangkah Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di Sumatra Barat dengan jalan politik pecah belahnya yang terkenal yang nantinya menimbulkan perlawanan yang tidak putus-putusnya dari rakyat Sumatra Barat untuk masa-masa berikutnya.

3.3.4. Dengan Bangsa Inggris

Semenjak permulaan abad ke-17, terjadi persaingan dagang antara Inggris dan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1684, Belanda dapat mengusir Inggris berdagang di Banten, tetapi Bangsa Inggris masih dapat bertahan di Selebar (Bengkulu), dan menguasai perdagangan lada di pantai barat Sumatra. Dalam tahun 1786, Inggris berhasil menguasai Pulau Penang di Selat Melaka, sehingga mereka dapat mengontrol pelayaran dan perdagangan di Pulau Sumatra, Barang-barang dagang Inggris mulai membanjiri pasaran Sumatra Barat, yang mengakibatkan menipisnya keuntungan yang diperoleh oleh Belanda karena persaingan dengan Inggris.⁸¹⁾

Pada tahun 1780–1784, pecah perang antara negeri Inggris dan Belanda di Eropa, di mana perang tersebut merembes ke daerah-daerah koloni mereka di seberang lautan. Dalam tahun 1781 Inggris menyerang Padang dari kedudukannya di Bengkulu dan merebutnya dari tangan Belanda. Benteng serta loji Belanda yang terdapat di Padang dan Pulau Cingkuk dibongkar dan dihancurkan oleh Inggris dan segala kegiatan perdagangan dipindahkan ke Bengkulu. Baru setelah terjadi perdamaian antara Kerajaan Belanda dan Inggris maka pos di Padang dikembalikan ke tangan Belanda lagi.

Bangsa Perancis pun pernah datang di Sumatra Barat, yaitu ketika bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Le Meme dengan anak buahnya mendarat di pantai Air Manis Padang,

pada tahun 1793, merebut kota tersebut dan mendudukinya selama lima hari, setelah merampok kota tersebut mereka pergi. Dalam tahun 1795 Inggris kembali merebut kota Padang karena terlibat perang dengan Belanda kembali.⁸²⁾ Demikianlah keadaan Sumatra Barat sampai akhir abad ke-18.

3.4. Kehidupan Seni Budaya

Ada beberapa bukti yang dapat kita lihat sampai sekarang, mengenai kehidupan seni Budaya Sumatra Barat pada masa yang silam. Seni Budaya itu mengalami berbagai-bagai perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan aliran-aliran yang mempengaruhinya. Peninggalan itu adalah sebagai berikut:

3.4.1. Seni Sastra

Di antara sekian banyak cabang kesenian yang menonjol di lingkungan masyarakat Sumatra Barat ialah seni sastra. Pembuktian tentang ini terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, betapa senangnya orang Minangkabau kepada pantun, pepatah-petitih, gurindam, dan sebagainya yang diwariskan turun-temurun secara lisan.⁸³⁾ Dalam penggalan sejarah Sumatra Barat, sampai saat ini, belum dijumpai pembuktian bahwa suku bangsa Minangkabau mempunyai huruf (tulisan) sebelum dipakainya huruf Melayu (Arab). Oleh karena itu kesusastraan Minangkabau pada mulanya berkembang secara lisan (*oral*) yang dipelajari dari mulut ke mulut. Setelah Agama Islam berkembang pada abad ke-15 dan ke-16 ke daerah ini, barulah digunakan huruf Arab yang diubah di sana-sini, sehingga diberi nama huruf Melayu. Setelah huruf Melayu digunakan barulah seni sastra Minangkabau dituliskan. Karena seni sastra Minangkabau pada mulanya disalurkan secara lisan maka seni pidato menduduki tempat tertinggi. Hampir setiap kesempatan atau upacara baik yang bersifat suka maupun duka, orang Minangkabau menggunakan pidato.⁸⁴⁾ Karena perkembangannya pada masa Islam, banyak seni sastra Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam.⁸⁵⁾ Beberapa seni sastra Minangkabau yang telah dituliskan dengan memakai huruf Arab yang sampai kepada kita pada masa sekarang, antara lain Kaba Cindur Mata, Malin Deman, Rancak Di Labuah, Nan Tongga Magek Jabang, Kaba Si Umbuik Mudo.

3.4.2. Seni Bangunan dan Seni Ukir

Jenis kedua yang menonjol dalam seni budaya Minangkabau ialah seni bangunan dan ukiran. Bangunan dan ukiran di Minangkabau mempunyai ciri-ciri khas yang merupakan pertanda bagi seni daerah ini. Salah satu ciri khas bangunan rumah gadang Minangkabau ialah gonjong yang terdapat di kiri-kanan bangunan itu runcingnya seperti tanduk kerbau, bentuk yang seperti itu tidak dimiliki daerah-daerah lain di Indonesia. Di samping rumah gadang yang juga disebut rumah adat juga terdapat lumbung padi, yang dibangun dengan bentuk tersendiri, juga Balai Adat (balairung), tetapi semuanya mempunyai gonjong seperti tanduk kerbau.⁸⁶⁾ Dengan masuknya Islam ke Minangkabau tampak pengaruh kebudayaan Islam pada bangunan-bangunan tersebut, misalnya pada gonjong-gonjong tersebut sudah terdapat bulan sabit dan bintang yang merupakan lambang Islam. Ukiran-ukiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, seperti ukiran pedang jenawi, ukiran-ukiran yang bermotif huruf Arab. Juga mesjid yang dibangun nampak perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan asli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa tempat di Sumatra Barat, terdapat beberapa rumah adat dan balairung yang sudah ratusan tahun umurnya, misalnya rumah adat di Ladanglawas Kubang Putih di Kabupaten Agam, Rumah Gadang di Koto Nan Ampek Payakumbuh, Rumah Gadang di Palembayan Matur, Balairung di nagari Labung di kecamatan Ampat Angkat Candung, Balairung Sari di nagari Tabek, kabupaten Tanahdatar.⁸⁷⁾ Khusus untuk Balairung sari di nagari Tabek menurut cerita rakyat yang turun-temurun dibangun di zaman Datuk Perpatih Nan Sabatang, tokoh *legendaris* pendiri adat Minangkabau, jadi umurnya sudah sangat tua.

Hampir seluruh bangunan, baik rumah gadang, balairung, lumbung padi, mesjid-mesjid dan bangunan lain-lain dihiasi dengan seni ukir yang indah dan bagus. Motif-motif ukiran itu kebanyakan meniru tanam-tanaman atau bunga-bunga. Jarang sekali atau hampir tidak ada sama sekali diketemukan ukiran-ukiran di Sumatra Barat yang bermotifkan makhluk yang hidup, seperti binatang-binatang dan manusia. Ada lebih kurang terdapat 60 macam motif ukiran yang asli Minang-

kabau.⁸⁸⁾ Pemakaian warna-warna dalam ukiran-ukiran Minangkabau mengutamakan warna-warna merah, putih, dan hitam.

Dengan masuknya pengaruh Islam ke Minangkabau, juga mempengaruhi banyak sedikit seni ukir Minangkabau, misalnya yang terdapat pada rumah gadang Palembang Matur, ukiran-ukiran yang terdapat di sana bergaya Persia. Juga pengaruh Barat dengan kedatangan bangsa Belanda pada pertengahan abad ke-17 ke Sumatra Barat mempengaruhi seni ukir Minangkabau, misalnya yang terdapat pada rumah gadang Laras Sungai Puar yang bermotifkan ukiran-ukiran mahkota. Juga pengaruh Cina nampak pada seni ukir Minangkabau di mana pada beberapa rumah gadang terdapat motif ukiran kipas Cina.

Khusus untuk seni menghias permainan Tabut, salah satu permainan tradisional rakyat Pariaman dan sekitarnya, nampak sekali pengaruh seni hias kebudayaan Islam pada bangunan-bangunan yang dibuat. Permainan tersebut adalah untuk memperingati hari kematian Hasan-Husein cucu Nabi Muhammad S.A.W. yang tewas dalam perang di *Karbella*. Nampak dalam hiasan-hiasan yang dipakai pengaruh Arab-Persia (lihat foto). Permainan ini dilakukan tiap-tiap bulan Muharram yang dimulai tanggal 1 Muharram dan berakhir 10 Muharram.

3.4.3. Seni Musik (bunyi-bunyian) dan Seni Suara

Salah satu cabang kesenian yang digemari oleh orang Minangkabau ialah seni musik, yang dalam bahasa daerah, disebutkan "bunyi-bunyian". Hampir seluruh irama dalam musik Minangkabau dalam bentuk sedih dan sentimental karena lagu-lagu yang disenangi penduduk ialah yang menimbulkan rasa sedih. Jenis alat-alat musik yang dianggap asli dan mempunyai peranan utama ialah yang dipukul dan yang ditiup. Alat-alat yang dipukul, terlihat dalam bentuk gendang dan *talempong*. Alat-alat musik yang ditiup terlihat dalam bentuk puput yang terbuat dari batang padi, salung dan bansi yang terbuat dari bambu dan sarunai yang terbuat dari campuran kayu dan bambu. Dengan masuknya pengaruh Islam ke Minangkabau terdapat alat-alat musik baru yang disebut "*rebab*". Memperhatikan namanya, kemungkinan berasal dari

tanah Arab. Begitu pula alat yang dipukul yang dinamakan "rebana", juga berasal dari Arab, karena lagu-lagu yang mengiringnya memakai kata-kata Arab dan bersifat puji-pujian kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang di Minangkabau dinamakan "selawat".

3.4.4. Seni Tari dan Gerak

Ada beberapa seni tari dan gerak yang merupakan asli Minangkabau misalnya tari piring dan tari payung. Suatu keadaan yang tidak dapat dibantah ialah setelah terjadinya percampuran dengan kebudayaan Barat, seni tari Minangkabau terutama di daerah pesisir, dipengaruhi oleh unsur kesenian dari Barat.

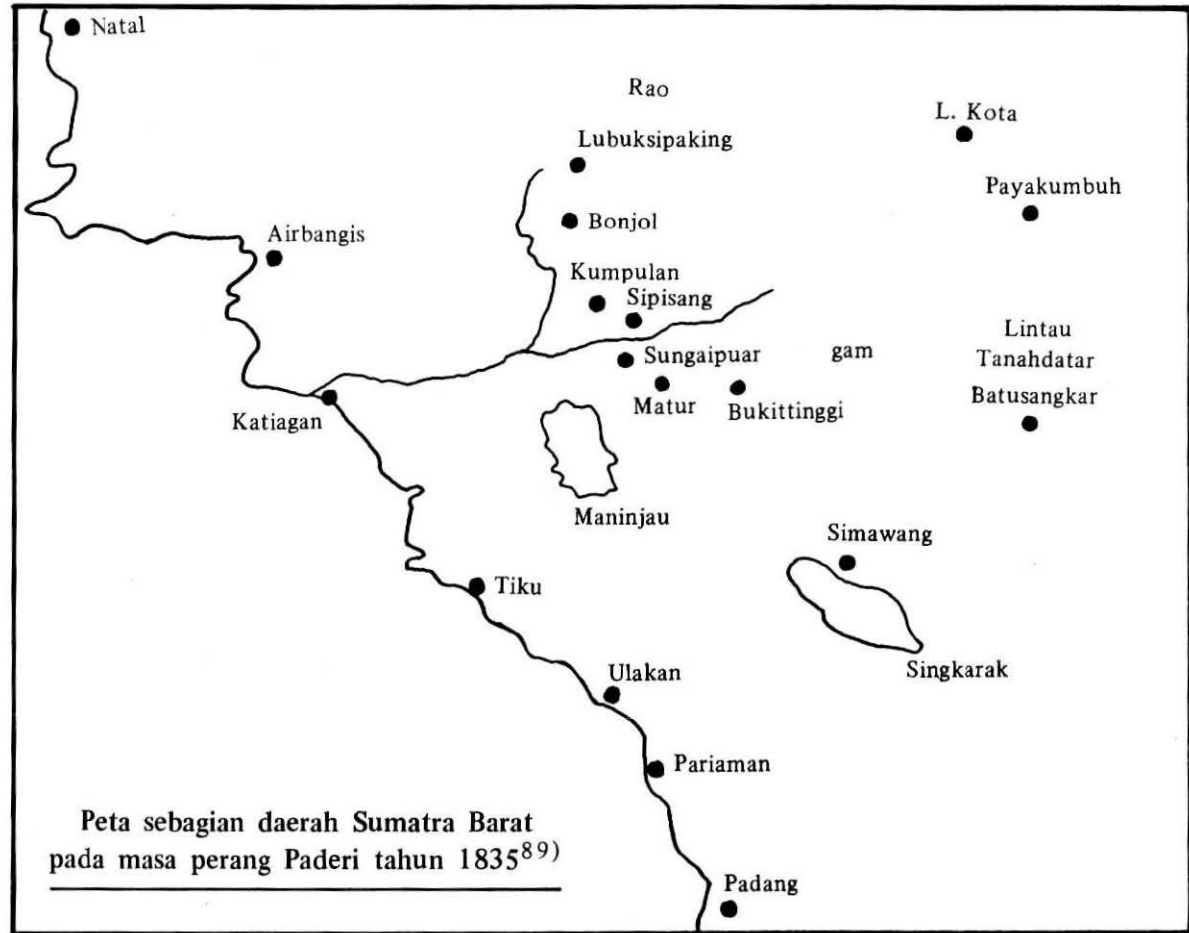
3.4.5. Seni Drama dan Sandiwara

Di Minangkabau telah tumbuh seni drama sejak beberapa abad yang lalu. Pendapat ini dikuatkan oleh karya sastra Minang dalam bentuk kaba-kaba, Malin Deman, Nan Tongga Magek Jabang, Sabai Nan Aluih, dan lain-lain. Karya-karya itu digolongkan ke dalam seni drama, karena telah dipertunjukkan oleh pelaku-pelakunya di depan publik. Bentuk pertunjukan seni drama yang dapat dikatakan khas Minangkabau ialah "randai". Pertunjukan randai merupakan gabungan antara sandiwara dan tari. Karena ia mengungkapkan sebuah cerita, maka ia digolongkan kepada sandiwara, tetapi karena ia dipersembahkan bersama tarian ia dinamakan seni tari.

3.4.6. Seni Bela Diri (Pencak Silat)

Di dalam buku-buku kaba *Cindur Mata*, *Nan Tongga Magek Jabang* dan lain-lain banyak kita peroleh data-data tentang bagaimana tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku dalam cerita tersebut menghadapi musuh-musuhnya yaitu dengan ilmu silat (seni bela diri). Tampaknya ilmu pencak silat di Minangkabau sudah ada semenjak zaman dahulunya. Banyak sekali aliran ilmu silat yang terdapat di Sumatra Barat (Minangkabau), tetapi yang utama ada dua aliran, yaitu ilmu silat Pesisir (Pariaman) dan ilmu silat Pedalaman (Lintau). Dari kedua macam itulah nantinya berkembang dan tumbuh macam-macam aliran silat di Sumatra Barat.

MINANGKABAU



BAB IV
SUMATRA BARAT
($\pm$ 1800 – 1900 M)

4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan

4.1.1. Sumatra Barat pada tahun $\pm$ 1800 M

Kerajaan Pagarruyung sampai tahun 1800 masih berdiri, walaupun kekuasaannya telah semakin berkurang. Sejak pertengahan abad ke-16, hampir seluruh daerah rantau Kerajaan Pagarruyung sudah dikuasai oleh Kerajaan Aceh, Belanda, dan Inggris, tanpa dapat mencegahnya, karena tidak ada angkatan perang untuk menghadapinya. Nagari-nagari sudah terpecah-pecah dalam bentuk otonomi berdiri sendiri-sendiri. Kekuasaan dalam nagari dipegang oleh golongan penghulu (adat) dan merekalah yang berhubungan dengan para pendatang. Sedangkan golongan ulama Islam, kekuasaannya terbatas dalam soal keagamaan saja. Golongan penghulu, walaupun telah memeluk agama Islam, tapi sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Golongan ulama tidak senang melihat keadaan ini, tapi mereka tidak bisa mencegahnya karena tidak mempunyai kekuatan (tentara). Barulah dalam tahun 1803, golongan ulama berhasil mengorganisasi kekuatan dan mendirikan gerakan Paderi, yang bertujuan untuk melakukan gerakan pemurnian Agama Islam di Minangkabau.⁹⁰⁾ Gerakan kaum Paderi ini meluas ke seluruh daerah Minangkabau dalam waktu yang singkat. Mereka dapat merebut kekuasaan dalam nagari-nagari dari tangan para penghulu, bahkan mereka dapat mengakhiri kekuasaan Kerajaan Pagarruyung pada tahun 1809

4.1.2. Hubungan dengan Kekuasaan Eropa

Pada akhir abad ke-18, hanya tinggal dua kekuasaan asing yang ingin menguasai Sumatra Barat karena kekuasaan Kerajaan Aceh yang selama ini mendominasi daerah pesisir barat sudah dapat dipatahkan oleh Belanda maupun Inggris.

Pada tahun 1793, timbul perang Napoleon di benua Eropa, Kerajaan Inggris terlibat perang dengan Perancis, yang juga menguasai negeri Belanda. Akibatnya koloni-koloni mereka di seluruh dunia ikut terlibat dengan perang tersebut. Di Indonesia Inggris berkedudukan di Bengkulu, diperintahkan oleh pimpinan Inggris untuk Asia yang berkedudukan di Calcuta India untuk merebut Sumatra Barat dari tangan Belanda. Dalam tahun 1795, angkatan perang Inggris mendarat di Padang dan dapat merebut pos-pos kompeni (VOC) di Padang tanpa dapat perlawanan yang berarti. Begitu juga pos-pos Belanda di daerah pesisir selatan, seperti di Salido, Painan, Indrapura menyerah kepada Inggris. Semenjak tahun 1795 mulailah kekuasaan Inggris di Sumatra Barat, dan baru berakhir pada tahun 1819, dengan dikembalikannya lagi ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda, berdasarkan perjanjian antara pemerintah Inggris dan Belanda pada tahun 1814 di London mengenai Indonesia.⁹¹⁾

Kekuasaan Inggris maupun Belanda pada akhir abad ke-18 maupun pada permulaan abad ke-19 hanya terbatas pada daerah pesisir barat Kerajaan Pagarruyung (Minangkabau), sedangkan daerah pedalaman Sumatra Barat tidak dikuasai mereka, karena sudah dikuasai oleh kaum Paderi. Hanya saja sebelum Inggris menyerahkan kembali Sumatra Barat ke tangan Belanda pada tahun 1819, Raffles pimpinan tertinggi Inggris di Bengkulu pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Sumatra Barat untuk mengadakan kontak dengan kaum Paderi. Dia sampai di Simawang dalam Luhak Tanah Datar, dan mendirikan pos di sana, dalam rangka mengadakan kontak dengan kaum Paderi, tetapi usaha Raffles gagal karena kaum Paderi tidak mau menerimanya. Itulah perjalanan pertama orang Barat ke pedalaman Sumatra Barat.⁹²⁾

Jadi daerah pesisirlah yang pertama kali menerima pengaruh kebudayaan Barat, dan baru kemudian merembes ke daerah pedalaman. Pengaruh kebudayaan Barat ini nantinya membawa akibat terhadap kelangsungan hidup Kerajaan Pagarruyung pada masa-masa berikutnya.

4.1.3. Akibat Hubungan dengan Kekuasaan Eropa

Penduduk Sumatra Barat yang telah memeluk agama Islam semenjak pertengahan abad ke-16, menjadi penganut

yang saleh dan taat dari ajaran agama tersebut. Tetapi dengan datangnya bangsa Belanda pada pertengahan abad ke-17 dan kemudian disusul oleh bangsa Inggris, maka para penduduk di daerah pesisir mulai berkenalan dengan kebudayaan Barat, yang dibawa oleh bangsa Belanda dan Inggris tersebut. Pada mulanya mereka datang untuk berdagang tetapi keuntungan yang mereka peroleh dari hasil perdagangan tersebut sangat besar, sehingga timbullah keinginan mereka untuk menguasai daerah tersebut, dan pada pertengahan abad ke-17, Belanda berhasil mendirikan beberapa loji di pesisir barat Sumatra Barat. Dengan berhasilnya mereka mendirikan pos perdagangan di beberapa tempat di daerah pesisir mereka pun mulai pula memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan mereka pada penduduk negeri, antara lain kebiasaan minum-minuman keras, berjudi, dan agama Kristen.

Agama Kristen yang mereka perkenalkan kepada anak nagari, tidak mendapat sambutan dan pengikut, ini disebabkan karena, "Bagi orang Minangkabau sendiri soal agama adalah soal hidup mati yang telah terjalin dengan tata kehidupan dengan adat dan norma-norma kehidupan lainnya. Agama bagi orang Minangkabau bukan hanya soal pribadi orang-seorang, tapi juga soal masyarakat seluruhnya. Seluruh masyarakat dalam nagari akan goncang, jika terdapat salah seorang anggotanya yang bertukar agama dari agama Islam ke agama lain. Seseorang yang berani menukar agamanya, berarti dia telah melepaskan diri dari keanggotaan masyarakatnya, dan secara adat di Minangkabau, dia harus dibuang jauh dari nagari.⁹³⁾ Begitulah kukuhnya agama dan ajaran Islam di Minangkabau, sehingga agama lain tidak dapat tempat dalam masyarakat mereka sampai sekarang.

Agama Kristen di Sumatra Barat hanya mendapat pengikut di kalangan orang Cina dan peranakan Barat yang terbatas jumlahnya.

Lain halnya dengan kebiasaan minum-minuman keras dan berjudi yang juga diperkenalkan oleh orang Belanda dan Inggris kepada penduduk pesisir yang mendapat sambutan yang besar sekali. Kebiasaan minuman keras, mengisap candu, berjudi, dan ditambah lagi dengan permainan adu ayam, sangat merajalela di Minangkabau pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Banyak di antara penduduk pesisir

yang jatuh miskin dan menjual tanah dan harta mereka kepada Belanda dan Cina. Penduduk menjadi malas melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti bertani dan berdagang, kerjanya hanya minum-minuman keras dan berjudi. Kebiasaan judi dan minuman keras yang bermula berjangkit di daerah pesisir lama-kelamaan menjalar ke daerah pedalaman Minangkabau.

Para penduduk yang selama ini taat menjalankan kewajiban agama, sekarang sudah lalai. Para penghulu pun sudah terlibat dengan judi, dan pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan *demoralisasi*.⁹⁴⁾

Hal yang seperti ini menimbulkan rasa sedih dari para golongan Ulama Minangkabau terhadap tingkah laku penduduk yang telah meninggalkan kewajiban agama. Untuk memberantas perbuatan maksiat dari golongan tersebut, golongan agama tidak sanggup, karena tidak mempunyai kekuatan. Jalan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada ajaran Islam yang murni, ialah merebut kekuasaan dari tangan para penghulu nagari, golongan agama menanti saat yang baik. Saat yang mereka nantikan segera datang, ketika tiga orang ulama Minangkabau, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang kembali dari Mekah pada tahun 1803. Pada akhir tahun itu juga mereka memproklamasikan gerakan Paderi di Minangkabau untuk memurnikan ajaran Islam kembali.

4.2. Gerakan Pemurnian Agama Islam di Sumatra Barat

4.2.1. Kaum Paderi.

Gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau dimulai ketika tiga orang haji kembali dari Mekah pada tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang. Mereka membawa paham pembaruan agama Islam dari Mekah yang disebutkan paham Wahabi. Paham Wahabi adalah gerakan pemurnian agama Islam yang dilancarkan di tanah Arab dengan tujuan untuk membersihkan agama Islam dari anasir yang bid'ah. Aliran Wahabi ini timbul di tanah Arab pada pertengahan abad ke-16 dan mengembangkan ajaran mereka dengan kekerasan. Kepercayaan mereka berlandaskan kepada mazhab Hambali dan tujuan mereka ialah kembali kepada

kebesaran Quran dan sunah. Dalam memperluas wilayahnya mereka melakukan perang jihad (perang suci). Dan aliran inilah yang dianut oleh ketiga orang haji Minangkabau yang disebutkan di atas, ketika mereka belajar di negeri Arab tersebut.⁹⁵⁾

Mereka bercita-cita untuk menyebarkan paham Wahabi itu nanti setelah kembali ke Sumatra Barat. Ketika mereka kembali pada tahun 1803 ke Sumatra Barat mereka menggabungkan diri dengan Tuanku Nan Renceh seorang ulama terkemuka pada masa itu di Luhak Agam yang berkedudukan di Kamang. Mereka sepakat untuk melancarkan gerakan pembersihan terhadap ajaran dan kebiasaan yang merusak masyarakat Minangkabau masa itu. Untuk itu Tuanku Nan Renceh memerintah kepada haji Piobang untuk membentuk tentara dalam rangka mendukung gerakan mereka. Pada akhir tahun 1803 mereka memproklamasikan berdirinya gerakan paderi dan mulai melancarkan gerakan pemurnian agama Islam dan kelompok mereka disebutkan "kaum Paderi".⁹⁶⁾ Kaum Paderi mengangkat Tuanku Nan Renceh sebagai pemimpin.

4.2.2. Gerakan Kaum Paderi

Kaum Paderi mulai melakukan gerakan pembersihan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam pertama kali ialah di Luhak Agam. Dalam waktu yang singkat Tuanku Nan Renceh berhasil menguasai Luhak Agam dan menjadikan Nagari Kamang sebagai markas besar Kaum Paderi (1804). Gerakan yang dilancarkan kaum Paderi di Luhak 50 Kota, tidak menjumpai perlawanan berat, dan daerah ini segera menjadi pengikut kaum Paderi.

Gerakan yang dilancarkan kaum Paderi di Luhak Tanah Datar mendapat perlawanan hebat dari nagari-nagari yang berada di Luhak tersebut. Ini disebabkan karena Luhak Tanah Datar merupakan pusat Kerajaan Pagarruyung dan kekuasaan kaum adat (penghulu) sangat kuat terhadap nagari-nagari dalam wilayah tersebut.⁹⁷⁾

Di Luhak Tanahdatar, gerakan kaum Paderi dipimpin oleh Tuanku Lintau, seorang ulama yang berasal dari daerah Lintau. Walaupun mendapat perlawanan dari kaum adat, tetapi tentara Paderi terus mengalami kemajuan. Perlawanan yang diberikan oleh nagari-nagari di bawah pimpinan kaum

adat dan Kerajaan Pagarruyung cukup hebat. Untuk mencegah supaya jangan banyak jatuh korban di kedua belah pihak di wilayah tersebut; kaum Paderi dan kaum Adat serta Kerajaan Pagarruyung sepakat untuk mengadakan perundingan di Koto Tengah pada tahun 1809.⁹⁸⁾

Dalam perundingan di Koto Tengah itu, raja Kerajaan Pagarruyung dengan seluruh menteri beserta keluarganya hadir, untuk berhadapan dengan kaum Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lintau. Sebelum perundingan dimulai, seorang perwira Paderi yang bernama Tuanku Lelo, tanpa sepengetahuan Tuanku Lintau, memimpin pasukan berkuda Paderi menyerang kelompok raja Pagarruyung beserta pengikutnya. Pasukan Tuanku Lelo membunuh seluruh keluarga raja Pagarruyung beserta Basa Ampek Balai dan para penghulu yang hadir dalam perundingan itu. Tetapi yang dipertuan raja Pagarruyung yang bernama Arifin Muning Alamsyah dapat meloloskan diri dan melarikan diri ke Kuantan dan dari sana terus ke Jakarta (Batavia).⁹⁹⁾

Peristiwa Koto Tengah ini dianggap sebagai lembaran hitam dalam sejarah kaum Paderi di Sumatra Barat, karena mereka mengkhianati kaum adat. Setelah peristiwa Koto Tengah itu nagari-nagari dalam Luhak Tanahdatar menyerah kepada kaum Paderi, kecuali nagari Batipuh, tempat berkumpulnya para penghulu yang melarikan diri dari nagari-nagari yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan kaum Paderi. Walaupun kemudian nagari Batipuh dapat ditundukkan oleh kaum Paderi, tetapi *strategis* tidak menguntungkan mereka, maka nagari itu ditinggalkan kembali.

Peristiwa pembunuhan di Koto Tengah pada tahun 1809, yang dilakukan oleh kaum Paderi terhadap keluarga Kerajaan Pagarruyung beserta kelompok kaum Adat yang mendukungnya dianggap sebagai tahun terakhir berdirinya kerajaan tersebut. Mulai saat itu Kerajaan Pagarruyung tidak ada lagi, hanya bekasnya yang sangat sedikit yang dapat kita jumpai sekarang di Batusangkar.

Dengan jatuhnya Luhak Tanah Datar ke tangan kaum Paderi, maka seluruh daerah Luhak Nan Tiga, sudah dikuasai oleh gerakan kaum Paderi yang berpusat di nagari Kamang di Luhak Agam.

Setelah berhasil menguasai, mengatur dan menyusun

daerah Luhak Nan Tiga maka kaum Paderi mulai meluaskan daerahnya ke daerah rantau Minangkabau, terutama ke daerah Pasaman. Gerakan kaum Paderi ke daerah Pasaman dipimpin oleh Peto Syarif, yang kemudian bergelar Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah murid Tuanku Koto Tuo yang termasyhur itu.¹⁰⁰⁾ Tahun 1808 Peto Syarif mendirikan Benteng Bonjol yang terletak di kaki Bukit Tajadi. Dari benteng itulah ia mengatur seluruh gerakan Paderi di daerah Pasaman dan sekitarnya. Benteng Bonjol yang dibangun oleh Tuanku Imam Bonjol tersebut merupakan benteng terbesar yang dibangun pada masa perang Paderi.

Setelah daerah Pasaman dapat dikuasai oleh kaum Paderi, maka sekarang mereka mulai melakukan gerakan ke luar wilayah Minangkabau, yaitu ke Tapanuli Selatan. Sebelum mereka memulai gerakannya ke Tapanuli Selatan, kaum Paderi membangun dua buah benteng lagi sebagai basis dan penghubung dalam rangka penyerangan mereka nanti ke sana. Benteng yang dibangun itu benteng Rao dan benteng Dalu-Dalu dibuat pada tahun 1811.¹⁰¹⁾ Kedua benteng tersebut terletak di perbatasan Sumatra Barat dengan daerah Tapanuli. Benteng Rao dipimpin oleh Tuanku Rao dan benteng Dalu-Dalu dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Keduanya adalah perwira Paderi yang berasal dari Tapanuli.

Penyerangan kaum Paderi ke Tapanuli dipimpin oleh panglima-panglima Paderi yang berasal dari daerah tersebut, yaitu Tuanku Rao, Tuanku Lelo, dan Tuanku Tambusai, mereka mulai bergerak maju ke daerah tersebut pada tahun 1816. Dalam waktu yang singkat daerah tersebut dapat dikuasai oleh kaum Paderi dan mereka menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di sana. Sampai sekarang orang-orang Tapanuli Selatan adalah penganut agama Islam yang taat.

Pada tahun 1819, Belanda kembali ke Sumatra Barat, setelah diadakan perjanjian antara pemerintah Inggris dan Belanda di London tahun 1814, Daerah tersebut harus dikembalikan lagi kepada Belanda oleh Inggris. Belanda mulai mengatur siasat untuk menghadapi kaum Paderi, karena kedatangan Belanda ke Sumatra Barat tidak disenangi oleh kaum Paderi. Sebelum Belanda memulai gerakan militernya terhadap kaum Paderi, panglima tertinggi kaum Paderi yaitu

Tuanku Nan Renceh meninggal dunia karena usia tua, pada tahun 1820. Sebagai pengganti Tuanku Nan Renceh kaum Paderi menunjuk Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pada masa Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpin kaum Paderi terjadi serangan Belanda ke pedalaman Sumatra Barat. Masa antara tahun 1803 sampai dengan tahun 1821 disebut dalam sejarah sebagai masa gerakan pemurnian agama Islam di Minangkabau oleh kaum Paderi atau sebagai gerakan pembaruan agama Islam yang pertama di Sumatra Barat.¹⁰²⁾

Dengan dimulainya penyerangan Belanda pada tahun 1821 terhadap kaum Paderi yang berakhir tahun 1837 dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol, kebanyakan penulis sejarah Indonesia menyebutnya sebagai masa "Perang Paderi".

4.3. Perang Paderi 1821–1837

4.3.1. Kaum Paderi Melawan Belanda 1821–1833

Setelah Belanda mendarat di Padang tahun 1819, mereka mulai mengatur siasat untuk menghadapi kaum Paderi yang berkuasa di pedalaman Sumatra Barat. Pertama-tama Belanda mendekati kaum adat yang telah dikalahkan oleh kaum Paderi, mereka banyak yang melarikan diri ke kota Padang, ketika Paderi berhasil menguasai pedalaman Sumatra Barat. Belanda berhasil mendekati kaum adat, dan mereka bersedia membantu Belanda untuk memerangi kaum Paderi. Dengan bantuan kaum adatlah maka Belanda bisa mengetahui jalan-jalan untuk menyerang pertahanan Paderi di Sumatra Barat. Pada tahun 1821, Belanda melancarkan serangan ke pedalaman Sumatra Barat yaitu dengan menyerang Benteng Simawang di Luhak Tanah Datar. Kemudian mereka terus masuk ke pedalaman Minangkabau pada tanggal 18 Februari 1821, setelah seminggu sebelumnya Tuanku Saruaso dan 14 orang penghulu yang menganggap dirinya sebagai wakil Kerajaan Pagarruyung membuat perjanjian dengan Residen Du-Puy sebagai wakil pemerintah Belanda di Padang. Isi perjanjian itu antara lain: "Penghulu-penghulu Minangkabau menyerahkan Pagarruyung, Sungai Tarab, dan Saruaso serta daerah Minangkabau selebihnya kepada Belanda".¹⁰³⁾ Demikianlah bantuan dan peranan kaum Adat dalam membantu

Belanda dalam melawan kaum Paderi. Juga dalam tahun 1821 Belanda menyerang Benteng Paderi di Air Bangis, Tuanku Rao Panglima Paderi yang mempertahankan benteng tersebut tewas dalam pertempuran itu.¹⁰⁴⁾

Untuk memimpin pasukan Belanda di Sumatra Barat pemerintah Hindia Belanda menunjuk Kolonel Raaf sebagai komandan, yang sampai di Padang dalam tahun 1821. Kolonel Raaf, menjadikan benteng Simawang sebagai basis untuk memerangi Paderi di Luhak Tanah Datar. Dalam tahun 1822 Belanda menyerang Pagarruyung, dan mendirikan benteng di sana yang bernama "Van der Capellen", sekarang bernama Batusangkar. Dari benteng tersebut Belanda mengatur siasat untuk menyerang Lintau, tapi serangan itu gagal. Karena gagal menyerang Lintau, Belanda memusatkan penyerangannya ke Luhak Agam, pada tahun itu juga. Pertempuran besar terjadi dengan Paderi di nagari Koto Lawas, Pandai Sikat, kaum Paderi dipimpin oleh Tuanku Pamansiangan. Belanda berhasil menduduki Koto Lawas dan mendirikan benteng di Guguk Sigandang.¹⁰⁵⁾ Karena perlawanan Paderi makin hari makin kuat, pada akhir tahun 1822, Belanda mendatangkan bantuan dari Jawa dan melancarkan serangan di Luhak Agam, dan mendirikan benteng di sana yang bernama Fort de Kock, sekarang bernama Bukittinggi pada tahun 1824.¹⁰⁶⁾ Pada tahun 1824 itu juga Kolonel Raaf meninggal karena sakit, sebagai penggantinya ditunjuk Kolonel Ridder De Stuers sebagai komandan pasukan Belanda di Sumatra Barat.

Dalam bulan Januari 1824, diadakan perjanjian Masang antara Belanda dengan kaum Paderi bertempat di Alahanpanjang Bonjol. Perjanjian itu oleh Belanda dipergunakan untuk menyusun kekuatannya yang sudah porak-peranda, dan sebulan kemudian Belanda menyerang kembali kaum Paderi. Untuk menutup suplai senjata kaum Paderi melalui pantai barat, maka Belanda merebut nagari Katiagan di daerah Pasaman, sehingga semenjak tahun 1824, suplai senjata Paderi di daerah Pasaman yang berasal dari Aceh dikuasai oleh Belanda.

Pada tahun 1825–1830, tidak banyak terjadi pertempuran antara kaum Paderi dengan Belanda, karena pasukan Belanda sedang dikerahkan di Pulau Jawa untuk menghadapi pasukan Diponegoro di Jawa Tengah. Kesempatan ini tidak

dipergunakan oleh kaum Paderi untuk mengusir Belanda dari Sumatra Barat. Kemungkinan disebabkan oleh karena kaum Paderi kekurangan senjata dan amunisi untuk melakukan penyerangan. Pasukan Belanda yang tinggal di Sumatra Barat, bertahan saja di benteng-benteng yang didirikan seperti Fort De Kock dan Fort Van der Capellen.

Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda mengerahkan segenap tenaganya ke Sumatra Barat, ditambah lagi dengan pasukan Sentot yang menggabungkan diri kepada Belanda untuk menyerang kaum Paderi. Penyerangan besar-besaran dilancarkan oleh Belanda pada tahun 1831, dan dengan kekuatan yang besar mereka berhasil mengalahkan kaum Paderi hampir di seluruh daerah di Sumatra Barat. Pada tahun 1832, Belanda berhasil menduduki pusat gerakan Paderi di nagari Kamang. Kemudian mereka meneruskan gerakannya ke daerah Pasaman di dekat Lubuksikaping, pasukan Belanda berhasil menangkap Tuanku Pamansiang, salah seorang panglima Paderi yang terkenal. Tuanku Pamansiang oleh Belanda dibawa ke benteng Guguk Sigandang di Koto Lawas dan dihukum mati di tiang gantungan. Sekarang kuburan Tuanku Pamansiang terdapat di nagari Koto Lawas, dan dirawat oleh penduduk dengan baik.

Setelah berhasil menduduki hampir seluruh daerah Sumatra Barat, Belanda mulai melupakan janjinya kepada kaum adat, yang banyak membantu mereka dalam melawan kaum Paderi. Akibatnya timbul rasa tidak puas dari golongan kaum adat, sehingga mereka mulai mendekati kaum Paderi. Pada tahun 1833, di lereng Gunung Tandikat tercapai kata sepakat antara golongan Adat dan Paderi untuk bersatu mengusir Belanda dari Sumatra Barat. Mereka telah melupakan permusuhan di antara mereka yang terjadi pada masa yang silam. Sekarang tekad mereka satu, yaitu mengusir Belanda dari Sumatra Barat. Maka sejak tahun 1833 timbullah perlawanan rakyat Sumatra Barat menentang Belanda.

4.3.2. Rakyat Sumatra Barat melawan Belanda 1833–1837

Sebelum tahun 1832, yang berperang melawan Belanda adalah kaum Paderi, tetapi setelah perdamaian antara kaum Paderi dengan kaum adat tercapai dengan perjanjian Tandikat, maka seluruh rakyat Sumatra Barat bangkit melawan

penjajahan Belanda, dan mereka mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai komandan tertinggi. Pada bulan Januari 1833, diadakan serangan serentak di seluruh Sumatra Barat terhadap Belanda. Benteng-benteng dan pos-pos Belanda yang bersebaran di seluruh nagari diserang oleh pasukan gabungan Paderi dan rakyat, sehingga banyak pasukan Belanda yang jatuh korban. Komandan pasukan Belanda di Sumatra Barat pada waktu itu ialah Letnan Kolonel Vermeulen Krieger, bertahan di benteng Fort de Kock di Bukittinggi dan meminta bantuan pasukan ke Padang. Karena kekurangan senjata pasukan Paderi dan kaum Adat tidak dapat melakukan serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda, apalagi seluruh pelabuhan di daerah pesisir sudah dikuasai oleh Belanda. Karena kekurangan senjata dan komunikasi yang belum sempurna, maka satu persatu kembali nagari-nagari di Sumatra Barat jatuh ke tangan Belanda.

Mulai tahun 1833, Belanda menyadari bahwa pusat perlawanan rakyat Sumatra Barat terletak di nagari Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Untuk itu Belanda mengadakan persiapan menyerang benteng Bonjol. Begitu gawatnya situasi Sumatra Barat pada waktu itu, maka pemerintah Hindia Belanda mengutus Komisaris Jenderal Van den Bosch ke Sumatra Barat.¹⁰⁷⁾

Untuk menghadapi penyerangan Belanda ini, Tuanku Imam Bonjol memperkuat benteng pertahanan di Bukit Tajadi dan mengangkat komandan-komandan pasukan untuk menghadapi penyerbuan Belanda ke benteng Bonjol. Jenderal Van den Bosch mengatur siasat untuk menyerang Bonjol dari tiga jurusan, yaitu:

1. Dari jurusan utara, yaitu dari Rao, pasukan Belanda dipimpin oleh Mayor Eilers.
2. Dari jurusan barat, yaitu dari Manggopoh, pasukan Belanda dipimpin oleh Kolonel Elout.
3. Dari jurusan selatan, yaitu dari Bukittinggi, pasukan Belanda langsung dipimpin oleh Van den Bosch.

Serangan akan dilakukan pada bulan September 1833. Serangan ini akhirnya gagal dan menimbulkan banyak korban di pihak Belanda sehingga mereka terpaksa kembali ke Jakarta. Dalam tahun itu juga yaitu tanggal 25 Oktober 1833, Belanda mengumumkan *Plakat Panjang*, yang berisi ajak-

an berunding oleh Belanda terhadap rakyat Sumatra Barat. Sebagian pemimpin rakyat Sumatra Barat terbujuk dengan rayuan perjanjian yang dilontarkan Belanda sehingga mereka menerimanya. Tuanku Imam Bonjol menolak dan beliau tetap memperkuat benteng pertahanan Bonjol. Umur perajajian plakat panjang itu tidak bertahan lama, karena setelah Belanda kuat mereka menyerang kembali pada tahun 1834.

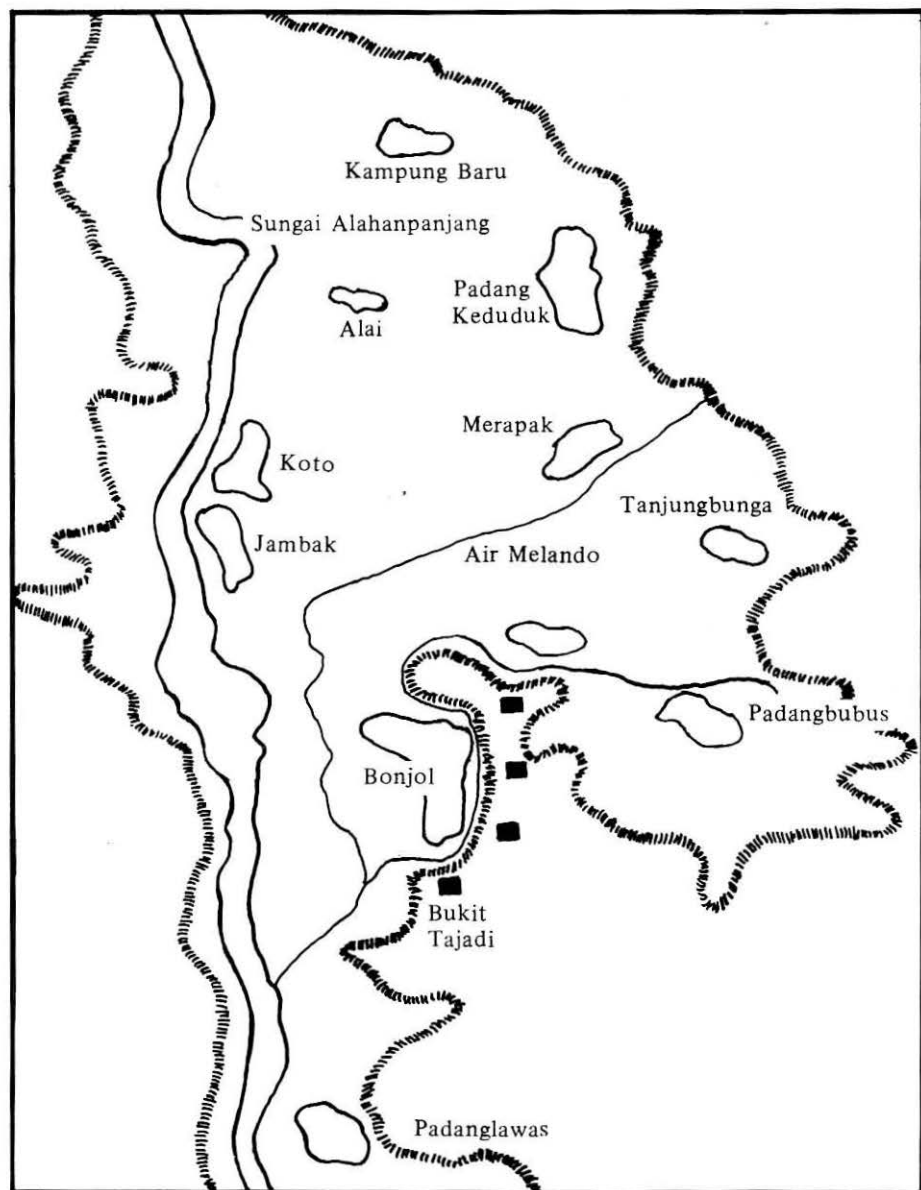
Mulai tahun 1835, pertempuran untuk merebut Bonjol makin sengit, sehingga pertahanan Tuanku Imam Bonjol mulai terjepit. Belanda mengerahkan pasukannya sejumlah 14.000 orang menyerang dan mengepung benteng Bonjol. Karena demikian hebatnya pertahanan Tuanku Imam Bonjol di Bukit Tajadi, maka panglima tentera Hindia Belanda Jenderal Cochius datang ke Padang untuk mempelajari situasi pertempuran di Bonjol. Setelah mempelajari situasi, maka penyerangan terhadap benteng Bonjol dimulai lagi dengan serangan artileri yang terus menerus terhadap benteng tersebut.¹⁰⁸⁾ Pada tanggal 15 Agustus 1837, Bukit Tajadi jatuh ke tangan Belanda dan pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol jatuh pula.

Tuanku Imam Bonjol dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda, tetapi tidak lama kemudian datang surat dari residen Perancis untuk berunding di Palupuh. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta beberapa orang anak buahnya datang ke Palupuh untuk memenuhi ajakan Belanda, tetapi sesampai di Palupuh beliau ditangkap oleh Belanda dengan licik. Tuanku Imam Bonjol ditahan oleh Belanda di Bukittinggi, kemudian dipindahkan ke Padang, dari Padang beliau dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Karena takut akan pengaruh Tuanku Imam Bonjol pada rakyat sekitarnya, maka pemerintah Hindia Belanda, memindahkan ke Ambon dan akhirnya pada tahun 1839 dibuang ke Menado. Pada tanggal 8 Nopember 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal di Menado dalam usia lanjut yaitu 92 tahun

4.3.3. Keadaan Masyarakat Sumatra Barat pada akhir abad-19

Setelah pemerintah Belanda menjadi ahli waris dari bekas daerah VOC di Asia, karena VOC dibubarkan dalam

LEMBAH ALAHANPANJANG



Situasi Benteng Bonjol pada tahun 1836¹⁰⁸⁾

- Benteng
- ~~~~~ Bukit Barisan

tahun 1799, maka secara otomatis daerah Indonesia resmi jatuh ke tangan pemerintah kerajaan Belanda pada tahun 1800. Bangsa Belanda datang kembali ke Sumatra Barat pada tahun 1819, sesudah menerima kembali daerah ini dari tangan pemerintah Inggris. Ketika Belanda mendarat di Padang, daerah pedalaman Sumatra Barat telah dikuasai oleh kaum Paderi. Karena Belanda ingin memperkuat kekuasaannya mereka melancarkan peperangan terhadap kaum Paderi antara tahun 1821–1837. Akhir peperangan itu kaum Paderi kalah dan seluruh daerah Sumatra Barat jatuh ke tangan Belanda.

Setelah Perang Paderi berakhir, dan peperangan di daerah lain di Indonesia selesai, maka untuk menutupi keterkoran keuangan akibat peperangan tersebut, pemerintah Belanda menjalankan suatu aturan tanaman paksa (*cultuurstelsel*) di mana rakyat diwajibkan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Di Sumatra Barat berlaku tanaman paksa kopi dan aturan ini dikenal dengan *koffiestelsel*. Tanaman paksa kopi ini mendapat tantangan dari masyarakat Sumatra Barat, sehingga pada akhir abad ke-19 tanaman paksa berangsur dihapuskan oleh pemerintah Belanda. Tanaman paksa kopi di Sumatra Barat dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1908.

Sesudah Perang Paderi, banyak orang Minangkabau yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dan ada juga yang menuntut ilmu agama Islam di sana. Setelah mereka kembali dari negeri Arab, mereka membawa paham baru dan menimbulkan banyak perubahan pada cara berpikir orang Sumatra Barat di permulaan abad ke-20. Juga pendidikan Barat, yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda, banyak membawa perubahan pada pola berpikir masyarakat Sumatra Barat pada akhir abad ke-19.

4.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan

4.4.1. Perkembangan Agama

Sesudah Perang Paderi 1837, keretakan dalam masyarakat Minangkabau tidak mereda, sebagai akibat pertikaian agama yang tidak kunjung padam. Pertentangan itu terjadi antara penganut tarekat Syattariyah dari aliran Syiah, yang berpusat di Ulakan Pariaman dengan tarekat Naqsyabandiyah yang ber-

pusat di Cangking Luhak Agam.¹⁰⁹⁾ Tarekat Syattariyah dibawa dan dikembangkan di Sumatra Barat oleh Syekh Burhanuddin. Sedangkan tarekat Naqsyabandiyah dikembangkan oleh Syekh Ismael dari nagari Simabur Batusangkar. Pengikut tarekat Naqsyabandiyah di Sumatra Barat sangat banyak dan beberapa orang di antaranya sangat terkenal karena tantangan mereka terhadap tokoh-tokoh muda pembawa pembaruan Islam ke Sumatra Barat pada akhir abad ke-19. Di antara tokoh Naqsyabandiyah yang terkenal ialah Syekh Jalaluddin dari Cangking, Syekh Kumpulan dekat Bonjol, Tuanku Syekh Labuh dari Padang, Syekh Mungkar di Payakumbuh, dan Syekh Khatib Ali dari Padang.

Karena pertentangan antara dua aliran itu sering meruncing, banyak di antara masyarakat Minangkabau yang tidak menyukai hal tersebut, di antaranya dari golongan ulama muda. Oleh sebab itu banyak golongan muda Sumatra Barat sesudah pertengahan abad ke-19 pergi belajar ke Mekah, untuk memperdalam ajaran Islam. Golongan muda inilah yang akan menjadi golongan III, yang akan membawa pembaruan Islam gelombang II ke Sumatra Barat dan membawa perubahan yang sangat besar pada masyarakat Sumatra Barat di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Di antara ulama muda Sumatra Barat yang terkenal ialah:¹¹⁰⁾

1. Syekh Akhmad Khatib, dilahirkan di Bukittinggi pada tahun 1855, menetap di Mekah semenjak 1876 untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan agama Islam. Beliau banyak memberikan bimbingan terhadap ulama Minangkabau yang datang dan belajar di Mekah. Pengaruh Syekh Akhmad Khatib sangat besar di seluruh dunia Islam.
2. Muhammad Yahya gelar Tuanku Simabur, adalah murid Syekh Akhmad Khatib yang terkenal keberaniannya menentang kaum adat dan ulama yang tidak menjalankan ajaran Islam yang sewajarnya. Paham yang beliau sebar, meluas ke seluruh pelosok Sumatra Barat, menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu beliau ditangkap oleh pemerintah Belanda dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1904. Murid-murid Tuanku Simabur nantinya meneruskan usaha beliau untuk memelopori pembaruan Islam di Sumatra Barat pada permulaan abad ke-20.
3. Syekh Muhammad Jamil Jambek, yang dilahirkan di Bu-

kittinggi tahun 1860, adalah murid Tuanku Simabur.

4. Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dilahirkan di Maninjau 1879.
5. Syekh Abdullah Ahmad dilahirkan di Padang Panjang pada tahun 1878, tokoh pendiri pendidikan Adabiyah di Padang.
6. Syekh Ibrahim Musa, dilahirkan di Parabek Bukittinggi pada tahun 1882.
7. Zainuddin Labai Al-Junusi, dilahirkan di Bukit Surungan, Padang Panjang 1890.

Inilah tokoh-tokoh pembaruan Islam di Sumatra Barat pada permulaan abad ke-20. Peranan mereka banyak pengaruhnya kepada tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh politik Sumatra Barat kemudian, dalam rangka melawan penjajahan Belanda di Indonesia.

4.4.2. Perkembangan Pendidikan

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang terdidik dalam lapangan pemerintahan sipil, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1873, membuka Sekolah Raja di Bukittinggi. Murid-murid Sekolah Raja berasal dari penduduk pribumi yang dipilih oleh pemerintah Belanda. Setelah mereka tamat dari pendidikan, mereka dipakai sebagai guru, sebagai anggota pemerintahan sipil (demang) dan anggota pengadilan (jaksa). Karena penghasilan sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda lebih baik dan cukup, maka banyak di antara mereka yang sanggup mengirim anaknya ke sekolah Belanda dan ke luar Sumatra Barat, misalnya ke Jawa untuk sekolah dokter, bahkan ke negeri Belanda untuk belajar ilmu ekonomi dan ilmu hukum.

Kaum terpelajar Sumatra Barat yang mendapat pendidikan Barat dan ditambah dengan ulama muda yang mendapat pendidikan di negara-negara Islam, akan menjadi motor penggerak menentang penjajahan Belanda di Indonesia khususnya Sumatra Barat pada masa kemudian.

5.3. Kehidupan Seni Budaya

Tidak banyak pengaruh seni budaya asing terhadap kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, karena orang Barat (Belanda—Inggris) hanya menetap di daerah pesisir, seperti Padang, Painan, dan Indrapura. Oleh sebab itu pengaruh kebudayaan mereka hanya terdapat sebagian kecil di daerah pesisir, misalnya pada bentuk

bangunan rumah, pakaian pengantin laki-laki, dan ukiran-ukiran yang terdapat pada bangunan-bangunan dan alat-alat lainnya. Bangunan rumah adat di Padang, bentuknya tidak sama dengan bentuk rumah adat di pedalaman Sumatra Barat, atapnya tidak bergonjong, berandanya luas, dan berterali kayu. Ukiran pada rumah tersebut pada jendela dan pintu atas kebanyakan berbentuk mahkota dan bunga. Pakaian mempelai daerah pesisir berbeda pula dengan pakaian mempelai daerah pedalaman. Pakaian mempelai laki-laki memakai jas beludru merah yang dalamnya sampai ke lutut, memakai benang-benang emas. Celananya dari beludru hijau yang dalamnya sampai ke lutut. Kaki memakai kaos kaki putih yang dalam. Seluruh bentuk pakaian itu meniru bentuk pakaian kebesaran pejabat kompeni di abad ke-18, dengan sedikit perubahan. Pakaian ini terutama banyak dipakai pada mempelai laki-laki di daerah Padang sampai sekarang.

Tidak banyaknya pengaruh kebudayaan Eropa pada abad ke-19 pada masyarakat Minangkabau, disebabkan juga karena dalamnya pengaruh ajaran Islam dan adat pada masyarakat.

BAB V

SUMATRA BARAT

(± 1900 – 1942)

5.1. Pemerintahan Hindia Belanda.¹¹¹⁾

Pada saat Belanda kembali menginjakkan kakinya di Sumatra Barat pada tahun 1819, mereka membagi daerah ini atas dua bagian yaitu Residensi Padang dan daerah sekitarnya, yang telah mereka kuasai dan daerah Padang Darat (pedalaman) yang belum mereka kuasai.

Berakhirnya Perang Paderi pada tahun 1837, praktis seluruh daerah Sumatra Barat telah dikuasai oleh pemerintah Belanda, pembagian daerah mengalami perubahan yang besar. Daerah-daerah yang baru ditaklukkan langsung dimasukkan ke dalam keresidenan Padang dan menyusun administrasi pemerintahan seperti di daerah kekuasaan semula. Daerah yang telah ditaklukkan dijadikan sebuah keregenan yang membawahi beberapa buah kelurahan. Kelurahan dibagi pula atas nagari-nagari, yang merupakan kesatuan republik kecil kesukuan.

Setelah semua daerah di Sumatra Barat dikuasai sepenuhnya oleh Belanda maka diijelmakan sebuah residensi baru yaitu *Residentie Sumatra's Westkust*, yang terdiri dari Padang Darat (pedalaman) dan Padang dengan daerah sekitarnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Padang Pesisir. Pembagian daerah dengan penyesuaian kepada susunan daerah sebelumnya ini tetap dipertahankan sampai dengan tahun 1918 dengan keluarnya *Inlands Gemeente Ordonantie Binnenlands Bestuur*.

Permulaan abad ke-20 sebagai realisasi dari Undang-Undang Desentralisasi 1905, maka daerah Sumatra Barat mengalami perubahan susunan daerahnya. Keresidenan Sumatra Barat tidak lagi memakai sistem keregenan tetap, diganti dengan lurah baru yang dinamakan *onderafdeling*. Kelurahan tetap dipertahankan sampai tahun 1922. Saat itu sebagai realisasi perubahan status dari jajahan menjadi bagian Kerajaan Belanda, untuk Indonesia dengan keluarnya *Inlands Staatsrecht*, maka dalam rangka penyeragaman pembagian daerah, Sumatra Barat mengalami perubahan. Residensi

Sumatra Barat dibagi atas daerah-daerah *afdeling* yang terdiri dari beberapa daerah *onderafdeling*. *Onderafdeling* terbagi pula atas district dan *onderdistrict*, di mana *onderdistrict* merupakan gabungan dari beberapa nagari dan seterusnya kesukuan. Beberapa daerah diberi status yang agak lain dari di atas, yaitu daerah yang disebut *gezaghebber* dan beberapa kotapraja atau *gemeente*, seperti Padang dan Bukittinggi.

Jabatan yang paling tinggi yang boleh dipegang oleh penduduk pribumi dari struktur yang disebutkan di atas, ialah regen, pada masa masih memakai sistem keregenan, dan demang ketika terjadi perubahan struktur penghapusan regen.

Pemerintah Belanda tidak mau secara langsung memerintah nagari-nagari. Mereka mengambil cara pemerintahan yang tidak langsung, yaitu dengan perantaraan laras, nagari, dan rapat penghulu di tiap nagari. Dengan cara begini Belanda hendak membuktikan bahwa mereka tidak mencampuri urusan di dalam nagari-nagari di Sumatra Barat. Jika ada sesuatu tindakan yang dijalankan oleh Belanda, rakyat tidak dapat menyalahkan Belanda, melainkan rakyat harus berhadapan dengan penghulu-penghulu di dalam nagari yang menjadi perisainya. Belanda sangat mengerti sekali tentang struktur masyarakat Minangkabau, dan menggunakan kekuasaan penghulu-penghulu itu untuk rakyatnya sendiri, karena Belanda mengetahui bahwa penghulu itu berkuasa penuh terhadap kaumnya.

Untuk melengkapi lembaga eksekutif yang disebutkan di atas, pemerintah Hindia Belanda juga membentuk lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif, sesungguhnya baru dikenal di daerah ini semenjak berlakunya hak desentralisasi, tetapi terbatas sekali. Untuk Sumatra Barat disusunlah *Minangkabau Raad*, sedangkan untuk kota Padang dan Bukittinggi ditetapkan *Gemeente Raad*. Lembaga yudikatif, yang ditetapkan untuk Sumatra Barat disebut *Raad van Justitie*, sedangkan untuk daerah-daerah ditetapkan *Landraad* dan *Landgerecht*.

Susunan pemerintahan Belanda yang disebutkan di atas, berlaku sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942.

Berikut ini digambarkan skema tentang struktur pemerintahan Belanda di Sumatra Barat semenjak tahun 1819–1942 sebagai berikut:

**SKEMA LEMBAGA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN¹¹²⁾
BELANDA DI SUMATRA BARAT**

A. PERIODE 1819 – 1918

RAAD VAN JUSTITIE

RESIDENT

LANDRAAD

Ass. RESIDENT

REGENT

LARAS

KEPALA NAGARI

PENGHULU

RAKYAT

B. PERIODE 1918 – 1922

RAAD VAN JUSTITIE

RESIDENT

LANDRAAD

ASS. RESIDENT

CONTROLEUR

LARAS

KEPALA NAGARI

PENGHULU

RAKYAT

C. PERIODE 1922 – 1942

RAAD VAN JUSTITIE	RESIDENT	MINANGKABAU RAAD
LANDRAAD	ASS. RESIDENT	GEMEENTE RAAD
	CONTROLEUR	
	DEMANGA	
	ASS. DEMANG	
	KEPALA NAGARI	
	PENGHULU	
	RAKYAT	

CATATAN :

1. Garis tebal menunjukkan garis komando
2. Garis putus-putus merupakan koordinasi
3. Untuk periode 1922 – 1942 jabatan yang sederajat dengan ass. Resident adalah **Burgemeester**, dan untuk **Controleur** disebut **Gezaghebberhoofd**.

SUMATRA'S WESTKUST (1941)

AFDELING

1. Zuid Benedenlanden (Padang)

2. Tanah datar (Padangpanjang)

3. Agam (Fort de Kock)

4. 50 Kota (Payakumbuh)

5. Solok (Sawahlunto)

ONDERAFDELING

- a) Padang
- b) Kerinci—Indrapura
- c) Painan
- d) Mentawai

- a) Batipuh X Koto
- b) Batusangkar
- c) Pariaman

- a) Oud Agam
- b) Maninjau
- c) Lubuksikaping
- d) Ophir (Talu)

- a) Payakumbuh
- b) Suliki
- c) Bangkinang

- a) Sawahlunto
- b) Solok
- c) Alahanpanjang
- d) Muaralabuh
- e) Sijunjung

Gemeente Fort De Kock (Bukittinggi)

Gemeente Padang

5.2. Perlawanan Rakyat Sumatra Barat (1900 – 1942)¹¹³⁾

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 berangsur-angsur aturan tanaman paksa dihapuskan dari daerah-daerah di Indonesia. Dan di Sumatra Barat *koffeistelsel* itu dihapuskan pada tahun 1908, tapi sebagai gantinya pemerintah Belanda hendak menjalankan pemungutan iuran *Belasting* di daerah ini. Inilah yang menyebabkan pada tahun 1908, hampir seluruh daerah Sumatra Barat bangkit melawan Belanda. Para pemimpin rakyat Sumatra Barat (para penghulu), disertai dengan kaum intelektual terutama

dari golongan ulama muda Islam, mulai sadar dengan praktek adu domba dan praktek *divide et impera* pemerintah Belanda. Para penghulu dan kaum ulamalah yang menjadi penganjur dan pemimpin perlawanan rakyat yang timbul di Sumatra Barat antara tahun 1900 – 1942 seperti yang diuraikan di bawah ini:

5.2.1. Perang Kamang 1908

Kamang adalah suatu nagari yang terletak lebih kurang 10 km dari Bukittinggi. Perang Kamang terjadi karena Belanda ingin memungut iuran belasting sebagai ganti koffiestelsel yang dihapuskan oleh pemerintah Belanda.

Pada tanggal 1 Maret 1908, di Bukittinggi pemerintah Belanda mengumumkan tentang pemungutan iuran *belasting*. Pengumuman ini disampaikan oleh L.C. Westenenc, sebagai wakil pemerintah Belanda dalam rapat laras sedaerah Agam yang diadakan di Bukittinggi. L.C. Westenenc minta persetujuan dari laras-laras yang hadir dalam rapat tersebut tentang pemungutan iuran *belasting*. Kebanyakan laras-laras yang hadir tidak dapat menerima pengumuman L.C. Westenenc. Tapi yang paling keras menentang adalah Laras Kamang yang bernama *Garang Dt. Palindih*. Pihak Belanda mengadakan perundingan tersendiri dengan masyarakat Kamang di negeri Magek yang diwakili oleh *Datuk Perpatih*, tetapi perundingan itu gagal, perang meletus pada tanggal 15 Juni 1908.

Rakyat Kamang dipimpin oleh H. Abdul Manan, Dt. Rajo Penghulu, dan Dt. Perpatih. Pihak Belanda dipimpin oleh L.C. Westenenc sendiri dengan perwira-perwiranya Kapten Van der Stock dan Letnan Dubell beserta 1 kompi pasukan. Pertempuran besar terjadi di Kampung Tengah Kamang, pada tengah malam. Dalam pertempuran itu Dt. Rajo Penghulu, Haji Abdul Manan tewas beserta dengan 71 orang rakyat. Sedangkan di pihak Belanda, jatuh korban 55 orang, L.C. Westenenc dapat meloloskan diri ke Bukittinggi, dengan bantuan seorang penduduk yang berkhianat. Tanggal 16 Juni 1908, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang, Padangpanjang dan Payakumbuh, sehingga mereka berhasil menduduki nagari Kamang.

Belanda mengadakan pembersihan dan penangkapan-penangkapan terhadap pejuang rakyat yang tidak dapat meloloskan diri. Di antaranya yang tertangkap kemudian di-

buang oleh Belanda ialah:

1. Garang Datuk Palindih, Laras Kamang dibuang ke Jakarta.
2. Dt. Seri Maradjo, kepala Nagari dibuang ke Jakarta.
3. A. Wahid Kari Mudo, ulama dibuang ke Makasar.
4. Pendekar Mukmin dubalang dibuang ke Makasar.

5.2.2. Perang Manggopoh

Manggopoh adalah sebuah nagari yang terletak 11 km. di utara Tiku dan lebih kurang 9 km di barat Lubukbasung dalam Kabupaten Agam. Pada tanggal 16 Juni 1908 telah terjadi suatu perlawanan rakyat menentang pemerintah Belanda. Perlawanan rakyat meletus, juga karena tidak mau memenuhi pengumuman Belanda, tentang peraturan *belasting* tanggal 1 Maret 1908. Pemimpin rakyat Manggopoh dalam perlawanan terhadap Belanda ini ialah Hasik Bagindo Magek, dibantu oleh istrinya bernama Sitti, yang kelak terkenal dengan nama Srikandi dari Manggopoh, karena keberaniannya dalam pertempuran tersebut.

Pasukan rakyat yang menyerang benteng Belanda di Manggopoh, jumlahnya cuma 14 orang. Dengan pasukan yang kecil itu, rakyat Manggopoh berhasil menewaskan pasukan Belanda sejumlah 55 orang dan dua orang meloloskan diri ke Lubukbasung. Berhasilnya pasukan tersebut menghancurkan Belanda, karena kebulatan tekad dan siasat yang mereka pakai. Mereka menyerang benteng Belanda di Manggopoh tepat jam 12 tengah malam, saat serdadu Belanda sedang tidur nyenyak. Ketika sedang tidur serdadu Belanda mereka sergap dan mereka bunuh, tetapi dua orang berhasil meloloskan diri dan meminta bantuan ke Lubukbasung. Tanggal 17 Juni 1908 bantuan pasukan Belanda dari Pariaman dan Lubukbasung datang. Pasukan rakyat Manggopoh melarikan diri ke hutan. Tetapi karena selalu dikejar-kejar banyak yang dapat ditangkap dan dibunuh di tempat oleh Belanda antara lain ialah Madjo Ali dan St. Maradjo Dullah. Pemimpin rakyat Manggopoh Hasik Bagindo Magek serta istrinya Sitti, setelah melarikan diri beberapa lama di hutan-hutan, karena pengkhianatan berhasil ditangkap oleh Belanda.

Setelah ditahan oleh Belanda dalam penjara di Lubukbasung selama 14 bulan, Hasik dan Sitti dipindahkan ke

penjara Pariaman. Mereka ditahan dalam penjara Pariaman selama 16 bulan kemudian dipindahkan ke penjara Padang. Setelah 21 bulan ditahan di penjara Padang barulah ke luar vonnis mereka. Hasik Bagindo Magek dijatuhi hukuman seumur hidup dan dibuang ke Manado, sedangkan Sitti karena telah ditahan dalam penjara selama 4 tahun dibebaskan oleh pemerintah Belanda. Sitti mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya ia dapat mengikuti suaminya dalam pembuangan. Permohonannya ditolak oleh pengadilan dan ia dikembalikan ke kampung halamannya di Manggopoh.

Karena jasa-jasanya yang telah diberikan kepada perjuangan bangsa Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengakui Sitti sebagai perintis Pergerakan Kemerdekaan/Kebangsaan, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 17 Desember 1964 No. Pol. 1379/64/P.K.

Sitti wafat pada tanggal 20 Agustus 1965, di Gasai Gadang Pariaman dalam usia 84 tahun. Dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kesuma Negara Lolong.

Di bawah ini daftar nama-nama rakyat yang menyerang benteng Belanda di Manggopoh.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Hasik Bagindo Magek | 10. Kalik Sidi Marah |
| 2. Sitti (istri Hasik) | 11. Unik |
| 3. Madjo Ali | 12. Said Sidi Malin |
| 4. Dullah St. Marajo | 13. Kana |
| 5. Rahman Sidi Rajo | 14. Dullah Pakih Suleman |
| 6. St. Mangkuto Tabuh | 15. Pacik Tuanku Padang |
| 7. Dukap Marah Suleman | 16. Nak Abbas |
| 8. Muhammad | 17. Sumun |
| 9. Tabat St. Saidi | |

5.2.3. Perang Silungkang

Silungkang adalah suatu nagari yang terletak antara Solok dan Sawahlunto lebih kurang 20 km sebelah timur Solok. Pada tanggal 31 Desember 1926 meletus suatu perlawanan rakyat menentang pemerintah Belanda, di mana ribuan rakyat Silungkang datang menyerang pos-pos pengawalan Belanda yang terdapat di Muarakelaban dan Sawahlunto. Tindakan rakyat Silungkang itu secara serentak telah diikuti oleh negeri-negeri sekitarnya seperti Tarung-tarung,

Padang Sibusuk, Pemuatan, Pianggu, dan lain-lain. Mereka berperang untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Setelah bertempur selama 12 hari dengan sengit, perlawanan rakyat Silungkang dapat dipatahkan oleh Belanda, yaitu tanggal 12 Januari 1927. Di pihak Belanda banyak jatuh korban, antara lain Letnan Simon dengan beberapa puluh anak buahnya tewas, ketika dicegat rakyat Padangsibusuk. Di pihak rakyat Silungkang dan sekitarnya gugur 40 orang. Banyak rakyat yang terlibat dalam perlawanan itu ditangkap oleh Belanda dan diadili. Tiga orang di antaranya dihukum gantung dalam penjara di Sawahlunto mereka ialah:

1. M. Jusuf Pono Kayo
2. Brahim alias Boin
3. Kamaruddin Mangguluang

Beberapa orang pemimpin perang Silungkang dibuang oleh Belanda ke Digul di Irian Jaya antara lain:

1. Talaha St. Langit
2. Buyung St. Sinaro
3. Lamah (wanita)
4. Saleh Mangkuto Rajo
5. M. Jusuf Rajo Kecil
6. Taha St. Jambi

Itulah perlawanan rakyat yang terjadi di Sumatra Barat antara tahun 1900–1942. Perlawanan rakyat itu terjadi karena tidak merasa puas, atas sikap dan perbuatan Belanda yang sewenang-wenang antara lain pemungutan belasting. Juga timbulnya kesadaran di kalangan rakyat sendiri untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Kesadaran ini tumbuh karena telah banyaknya kaum intelektual Sumatra Barat yang mendapat pendidikan di dalam dan di luar negeri, terutama ulama-ulama muda yang mendapat pendidikan di negara-negara Arab.

Karena perlawanan rakyat Sumatra Barat dalam bentuk bersenjata selalu dapat ditindas dan dikalahkan oleh Belanda pada permulaan abad ke-20, maka para kaum intelektual mulai menukar taktik perjuangan. Taktik yang mereka pakai ialah dengan mendirikan organisasi, pendidikan dan komunikasi untuk membangkitkan kesadaran rakyat untuk menentang penjajahan Belanda.

5.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pergerakan Kebangsaan

5.3.1. Alim Ulama

Pergolakan agama yang terjadi di Sumatra Barat pada permulaan abad ke-19 dan akhir abad ke-19, pada lahirnya terlihat sebagai suatu usaha pemurnian agama dan modernisasi pemikiran tetapi jauh di balik itu pergolakan tersebut telah meletakkan sendi yang kokoh guna terwujudnya suatu perjuangan yang lebih besar, yakni cita-cita membebaskan bangsa dari penindasan bangsa asing.

Pembaharuan Islam di Sumatra Barat tidaklah timbul sekonyong-konyong dan berdiri sendiri, tetapi suatu tuntutan dari perjalanan sejarah. Pembaruan di Sumatra Barat terjadi melalui tokoh-tokohnya yang telah mendapat ilmu tentang Agama Islam dari tanah Arab, tempat kelahiran Agama itu. Alam pikiran mereka dipengaruhi pula oleh reformasi dari Mesir yang banyak tersebar melalui buku dan surat kabar. Dari sanalah mereka banyak mengetahui ajaran tentang nasionalisme, cerita tentang perjuangan negara-negara Islam menentang dominasi Barat, telah merangsang setiap murid dan kader yang dididik melalui sekolah agama yang terdapat di Sumatra Barat pada masa itu. Faktor intelektual yang disebarkan melalui pendidikan agama yang dibina secara kritis tanpa taklid dan dogmatik, memperkembang daya pikir dalam perguruan dan kemudian menjalar ke tengah-tengah masyarakat.

Berdirinya Serikat Islam pada tahun 1912 di pulau Jawa, cepat pula menjalar ke Sumatra Barat. Serikat Islam merupakan pergerakan keagamaan yang pertama lahir di Sumatra Barat sebagai cabang dari Serikat Islam yang didirikan di Pulau Jawa. Salah seorang tokoh Serikat Islam putra Sumatra Barat yang terkenal ialah Abdul Muis. Tetapi kemudian Serikat Islam kemasukan unsur komunis, sehingga timbullah Serikat Islam Merah, Haji Datuk Batuah, salah seorang guru pada Sumatra Thawalib membawa pengaruh komunis ke dalam perguruan Islam itu. Mereka mempergunakan metode dakwah dan publikasi untuk menarik massasebanyak-banyaknya.

Di Sumatra Barat pada waktu itu timbul perasaan tidak puas dari ulama-ulama muda yang merasa kebebasannya di-

halang-halangi oleh Belanda. Kaum ulama tua merasa tidak puas karena rong-rongan kaum muda dan kaum buruh di kota-kota merasa tidak puas karena adanya diskriminasi. Semua rasa tidak puas itu dieksploitasi oleh Serikat Islam Merah yang kemudian menjelma menjadi PKI. untuk kepentingan politiknya, maka timbullah perlawanan rakyat di Silungkang terhadap kekuasaan Belanda tahun 1926/1927.

Haji Abdul Karim Amrullah sangat sedih melihat Sumatra Thawalib kemasukan pengaruh komunis melalui H.Dt. Batuah. Pada awal tahun 1923 H.A.K. Amrullah pergi kePulau Jawa, di mana beliau telah bertemu dengan K.H. Ahmad Dahlan tokoh pendiri Muhammadiyah. Sekembali beliau dari Jawa H.A. Karim Amrullah mendirikan Muhammadiyah yang pertama di Sungaibatang, Maninjau pada tahun 1925, yang segera melebarkan sayap organisasinya ke seluruh Sumatra Barat.

Berlainan dengan induknya di Jawa, Muhammadiyah di daerah ini sering bermain api dengan politik. Ini disebabkan karena berhasilnya Muhammadiyah menghimpun massa yang tadinya berantakan karena Perang Silungkang. Mereka mencari perlindungan bernaung di bawah Muhammadiyah, dan karena itu pula Muhammadiyah dicurigai pemerintah Belanda. Sikap politik Muhammadiyah terlihat ketika mereka mempepori penolakan *Guru Ordonantie*, demikian pula dalam kongresnya yang ke-19 tahun 1930 di Bukittinggi, tokoh-tokoh mudanya mengeritik dan menentang penguasa dalam pidatonya. Padahal Muhammadiyah adalah organisasi yang memperoleh toleransi dari Belanda karena tidak menganut paham politik.

Sikap beberapa tokoh Muhammadiyah ini membahayakan kedudukannya tetapi sebelum Belanda sempat menindak, muncul pula organisasi yang lebih radikal yaitu Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) yang dipelopori oleh ulama-ulama Thawalib Padangpanjang.

Permi merupakan lanjutan dari sekolah-sekolah yang bernama Thawalib yang menyatukan diri dalam satu wadah pada tahun 1928. Dalam musyawarah besar Sumatra Thawalib pada tahun 1930 di Bukittinggi lahirlah Persatuan Muslimin Indonesia yang mula-mula disingkat dengan nama PMI di bawah pimpinan Jalaluddin Thaib.

Dalam konperensi besar PMI tahun 1931, PMI berubah menjadi Permi dan menyatakan diri sebagai partai politik. Hal itu karena pergaulan dengan Muchtar Luthfi yang baru saja pulang dari Mesir dengan memasukkan unsur politik ke dalam Permi. Dengan segera ia memimpin Permi bersama-sama Jalaluddin Thaib, dan Ilyas Ya'kub. Permi bertujuan dengan dasar Islam menuju Islam yang mulia dan dengan dasar kebangsaan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Pidato pemimpin-pemimpin Permi sangat tajam, dan sangat menentang penjajahan Belanda. Udara politik sekitar tahun 1930 semakin panas. Tokoh-tokoh nasional sudah banyak yang ditangkap dan dibuang, dan tokoh-tokoh Permi pun mulai ditangkap.

Muchtar Luthfi seorang pemimpin Permi mula-mula dilarang pidato, kemudian ditangkap dan dibuang ke Makasar tahun 1933 setelah melakukan aksi menentang *Ordonansi Sekolah Liar*. Tokoh-tokoh Permi yang terdiri dari para ulama itu satu persatu ditangkap oleh Belanda. Rasuna Said seorang tokoh wanita Permi ditangkap tahun 1932 dan dipenjarakan di Semarang. Pada tahun 1933 dilakukan penggeledahan serentak terhadap seluruh cabang Permi. Haji Ilyas Ya'kub dan Jalaluddin Thaib ditangkap dan dibuang ke Digul. Pengawasan terhadap Permi diperketat, rapat-rapat dilarang, yang akhirnya organisasi itu mati dengan sendirinya.

5.3.2. Pemuda

Pemuda-pemuda Sumatra Barat yang pergi merantau ke Jawa menuntut ilmu pengetahuan, tidak pernah melupakan kampung halaman mereka. Ketika pergerakan kebangsaan bergelora di pusat pemerintahan di Jakarta, pemuda-pemuda asal Sumatra terutama pemuda Sumatra Barat mendirikan perkumpulan *Jong Sumatranen Bond*. Peristiwa itu terjadi tahun 1917 di asrama Stovia Jakarta dengan tokoh-tokohnya Amir, Anas, dan seorang tamatan HBS M. Nazir Dt. Pamuncak.

Setelah berdirinya *Jong Sumatranen Bond* di Jakarta, maka pada tahun 1918 datanglah Nazir Dt. Pamuncak ke Padang untuk menggembleng pemuda di daerah ini. Sambutan hangat dan spontan dari pemuda daerah menghasilkan diben-

tuknya cabang *Jong Sumatranen Bond* di Padang dan Bukit-tinggi, dengan susunan pengurus untuk cabang Padang sebagai berikut:

Ketua : Anas Munaf
Sekretaris : Bahder Johan
Bendahara : Muhammad Hatta
Komisaris : Abdul Malik
Komisaris : Aisyah Yahya

Dalam perkembangan selanjutnya pemuda Sumatra Barat antara lain Mohammad Yamin bersama dengan pemuda daerah-daerah lain di Indonesia berhasil melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada waktu itu pemuda-pemuda Sumatra Barat telah banyak yang menetap di Jakarta dalam rangka menuntut ilmu.

5.3.3. Wanita

Peranan wanita di Sumatra Barat dalam pergerakan kebangsaan, tidaklah pula kurang peranannya dari kaum pria. Pada tahun 1912, sudah ada wanita Sumatra Barat yang bergerak dalam pers, dengan menerbitkan berkala *Soenting Melajoe* yang dipimpin oleh Siti Rohana dan Rohana Kudus. Pada tahun 1923 Rahmah El Junusiah mendirikan perguruan Diniyah Putri di Padang Panjang yang merupakan peningkatan cara berpikir dan bertindak kaum kaum wanita di Sumatra Barat. Dari sekolah ini banyak kader yang dihasilkan yang tersebar di seluruh Indonesia dan Semenanjung Melayu. Tokoh-tokoh wanita Sumatra Barat tidak saja bergerak dalam bidang kewanitaan, tetapi mereka memperlihatkan sepak terjang yang cukup menakutkan pemerintah Belanda di daerah ini, seperti Srikandi Sitti yang telah memperlihatkan keberaniannya dalam Perang Manggopoh. Tokoh-tokoh wanita Minang pada zaman pergerakan memperlihatkan keberaniannya tidak dengan senjata tetapi dalam ikut menggelorakan semangat nasionalisme.

Sesuai dengan zaman itu, semua komponen masyarakat ikut memberikan andil dalam pergerakan nasional, demikian pula kaum wanita. Tokoh-tokoh wanita Permi, Rasuna Said, Fatimah Hatta, Ratna Sari, dan Rasimah Ismael telah tercatat namanya dalam sejarah mereka tidak saja berani me-

maki Belanda di atas podium, tapi juga menyediakan dirinya untuk dihukum.

5.3.4. Partisipasi Pers

Surat kabar tertua di Sumatra Barat ialah *Sumatra Courant* yang terbit di Padang tahun 1862. Kemudian tahun 1872 terbit *Padangsche Handelsblad*. Tapi kedua surat kabar tersebut belum bersifat kebangsaan, karena keduanya adalah milik orang Belanda dan dipergunakan untuk kepentingan penjajahan mereka, dan memakai bahasa Belanda.

Pada tahun 1890, terbit di Padang sebuah surat kabar tengah bulanan bernama *Pelita Kecil* yang terakhir dipimpin oleh Dt. Sutan Maharaja Besar, penerbitannya menggunakan Bahasa Melayu. Surat kabar *Pelita Kecil*, sedikit demi sedikit berhasil menggugah perasaan nasionalisme orang Sumatra Barat. Kemudian *Pelita Kecil* berubah nama menjadi *Warta Berita*. Surat kabar ini selanjutnya bernama *Soeloeh Melajoe* dan kemudian bernama *Oetoesan Melajoe*, yang terbit sampai tahun 1921.

Dari kelompok kaum agama, lahir sebuah majalah bernama *Al Munir* pada tahun 1911 di bawah pimpinan H. Abdullah Ahmad. *Al Munir* adalah pelopor pers Islam di Sumatra Barat, yang dalam perkembangannya dibantu oleh Syekh Karim Amrullah. Surat kabar *Al Munir* hanya terbit sampai tahun 1916. Di samping *Al Munir*, pada tahun 1912, terbit pula majalah bernama *Al Achbar* pada tahun 1912.

Kemudian surat kabar umum lainnya yang pernah terbit ialah *Soenting Melajoe* di bawah pimpinan Sitti Rohana dan Rohana Kudus. Pada tahun 1914, surat-surat kabar *Tjahaja Soematera*, yang dipimpin oleh orang Cina bernama Lim Soen Hian, juga diterbitkan. Surat kabar ini kemudian dipimpin oleh orang Sumatra Barat Radjo Sampono dan terakhir oleh Sutan Nurdin dan Sikumbu. *Tjahaja Soematera* mengakhiri penerbitannya tahun 1942, ketika Jepang masuk ke Sumatra Barat.

Dalam tahun 1914 juga terbit surat kabar *Sinar Soematera* yang berakhir juga 1942. Waktu itu surat kabar tersebut dipimpin oleh orang Cina Yap Gui Sek kemudian oleh Dt. Sinaro.

Dengan adanya surat kabar dan majalah yang terbit di

Sumatra Barat antara tahun 1900–1942, telah membangkitkan harga diri dan rasa kebangsaan serta nasionalisme masyarakat Sumatra dalam menentang penjajahan Belanda. Melalui koran dan majalah mereka mengeritik dan mencela perbuatan pemerintah penjajahan Belanda di Sumatra Barat pada masa itu.

Demikianlah orang-orang pers telah memainkan peranan penting dalam membangkitkan nasionalisme masyarakat Sumatra Barat.

5.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan

5.4.1. Perkembangan Agama

Pada awal abad yang ke-20, kembali tiga orang ulama Sumatra Barat dari Mekah, ialah Syekh Karim Amarullah, Abdullah Ahmad dan Syekh Jamil Jambek. Mereka melanjutkan pembaruan agama yang telah mulai dirintis oleh murid Ahmad Khatib sebelumnya. Mereka mencela cara lama yang tidak bersumber pada Quran dan Sunah Nabi. Pembaruan yang dilancarkan oleh ulama-ulama muda Sumatra Barat yang baru kembali dari Mekah mendapat tantangan dari kaum tua. Tidak jarang ulama-ulama pembaruan itu dituduh dan dicap sebagai orang yang sesat. Perang podium dan perang pena sudah menjadi kebiasaan waktu itu. Kaum tua melalui surat kabar *Oetoesan Melajoe* menghantam gerakan kaum muda dan demikian pula sebaliknya, sehingga keadaan Minangkabau terpecah dua. Masing-masing ulama menentukan tempatnya berpijak, pengikut-pengikut kaum muda dengan terompetnya *Al Munir* terdiri dari hampir semua murid Ahmad Khatib. Tokoh utamanya tiga orang yang telah disebutkan di atas, kemudian diikuti oleh Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Abbas Padang Japang, Syekh Rasyid Maninjau, Syekh Daud Rasyidi, dan lain-lain.

Sedang di pihak kaum tua terdiri dari Syekh Khatib Ali, Syekh Mungkar, Syekh Bajang, Syekh Saad dan lain-lain. Tidak semua murid Ahmad Khatib masuk barisan kaum muda seperti Syekh Jamil Jaho dan Syekh Suleman Arrasuli berada di pihak kaum tua. Sebagian besar disebabkan karena tarikatnya ditentang. Perpecahan itu mencapai waktu cukup lama, dan barulah pada tahun 1928 mulai merdeka ketika kedua

golongan sama-sama bersatu untuk menentang *Guru Ordonantie*, yaitu peraturan yang menetapkan wewenang pemerintah Hindia Belanda untuk memberi izin mengajar dan mengawasi pengajaran pada perguruan swasta.

Kaum muda dan Kaum tua waktu itu berhimpun dan lebih 2000 orang guru agama berkumpul di Bukittinggi untuk menentang pelaksanaan *ordonantie* tersebut di daerah ini.¹¹⁵⁾

Kaum muda kaum tua melupakan pertentangan mereka dan telah bersatu menghadapi bencana bersama itu. Sebelum peristiwa tersebut di Sumatra Barat telah lahir berbagai perguruan swasta yang sebagian besar didirikan oleh ulama-ulama Islam. Di antara perguruan swasta yang didirikan tersebut ialah sekolah-sekolah Thawalib. Dari sekolah-sekolah Thawalib itu banyak lahir pers Islam seperti *Al Munir* di Padangpanjang, *Al Bayan* di Parabek, *Al Basyr* di Sungayang, *Al Iman* di Padang Japang, dan lain-lain. Melalui pers ini pulalah, suara mereka, tentang reformasi dan nasionalisme, dikumandangkan.

Hal inilah yang menyebabkan Belanda mengeluarkan Guru *Ordonantie*, yaitu peraturan yang menetapkan wewenang pemerintah untuk memberi izin mengajar dan mengawasi pengajaran pada perguruan swasta, pemerintah Belanda sudah menaruh curiga terhadap lembaga Islam tersebut.

Walaupun sudah dikeluarkan Undang-undang *Ordonantie*, mereka tidak gentar. Karena itu Belanda menangkap tokoh-tokoh masyarakat yang dicurigai dan dibuang ke Digul (Irian Jaya, dan tempat-tempat pembuangan lain misalnya Jamaluddin Tamin dibuang ke Digul, H. Abd. Karim Amarullah dibuang ke Sukabumi, Rasuna Said, tokoh wanita Permi ditangkap dan dipenjarakan karena menentang *ordonantie*. Tokoh-tokoh Permi seperti H. Ilyas Ya'kub, Muchtar Luthfi, dan Jalaluddin Thaib ditangkap dan dipenjarakan selama sembilan bulan dipenjara Padang, kemudian seterusnya dibuang ke Digul.

Banyak lagi tokoh masyarakat yang ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Digul. Demikianlah keadaan Sumatra Barat mulai tahun 1930 suhu politik meningkat terus, sampai dengan masuknya penjajahan Jepang 1942.

BAB VI

ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942–1945)

6.1. Keadaan pemerintahan dan Kenegaraan

6.1.1. Keadaan di Saat-saat Jepang Memasuki Sumatra Barat

Ketika pemerintahan Belanda di Sumatra Barat menghadapi keruntuhannya di awal tahun 1942, Belanda meminta kesediaan rakyat Sumatra Barat untuk bekerja sama menghadapi kedatangan Jepang, tetapi rakyat Sumatra Barat melalui beberapa orang pemimpinnya menolak ajakan itu. Sebaliknya daripada bekerja sama dengan Belanda, di Padangpanjang rakyat di bawah pimpinan Khatib Sulaiman dan Leon Salim membentuk suatu badan yang dinamakan *Komite Menegakkan Merah Putih*, yang bertujuan untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai suatu pernyataan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia masih ada dan tidak dapat diperbuat semau-mau penjajah saja. Pernyataan ini sekaligus ditujukan kepada Belanda dan Jepang. Tetapi pengibaran Sang Merah Putih itu tak dapat dilaksanakan, karena ada beberapa orang yang berkhianat, sehingga beberapa orang pemimpin rakyat juga turut ditangkap Belanda dan dibawa ke Kotacane untuk diadili. Dengan adanya penangkapan itu pengibaran bendera Merah Putih tak dapat dilaksanakan dan rakyat berusaha dengan jalan lain, tetapi sehari sesudah penangkapan itu terjadi, bala tentara Jepang telah menjejakkan kakinya di perbatasan Sumatra Barat pada tanggal 13–3–1942. Empat hari sesudah itu pada tanggal 17–3–1942 seluruh kota-kota penting, seperti Payakumbuh, Bukittinggi, Padangpanjang, Solok, Padang, dan lain-lainnya sudah diduduki oleh bala tentara Jepang tanpa mendapat perlawanan dari pihak Belanda yang menyerah tanpa syarat. Timbang terima kekuasaan antara Belanda dengan Jepang dilangsungkan di Padang, pihak Belanda diwakili oleh Residen Bosselaar dan pihak Jepang diwakili oleh Kolonel Fujiyama. Setelah serah terima kekuasaan tersebut, berarti daerah Sumatra Ba-

rat, seperti dengan seluruh daerah Indonesia lainnya, sudah berada di bawah kekuasaan bala tentara Jepang tanpa mempertimbangkan bagaimana kemauan rakyat di tempat itu, seolah-olah hanya merupakan penyerahan semacam benda mati saja, yang dapat dibuat semau-maunya.

6.1.2. Pemerintahan Jepang

Pada tanggal 9 Maret 1942, di Jawa, ditandatangani penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Tetapi di daerah-daerah, penyerahan kekuasaan itu tidak dapat dilangsungkan pada saat yang sama dengan di Jawa, karena keadaan tidak mengizinkannya. Seperti diketahui bahwa tentara Jepang baru mulai memasuki perbatasan daerah Sumatra Barat pada tanggal 13 Maret 1942, yaitu empat hari sesudah penandatanganan penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada Jepang, dan baru tanggal 17 Maret 1942 serah terima kekuasaan antara Belanda dan Jepang di Sumatra Barat dapat dilakukan. Hal ini berarti penguasa di Sumatra Barat sudah pindah dari orang-orang yang selama ini terkenal rapi dan teliti dalam masalah pemerintahan kepada orang-orang yang sudah terkenal kekejaman dan kebusannya di medan perang. Keadaan yang demikian harus diterima oleh rakyat Sumatra Barat, karena hal itulah yang kiranya dapat dilaksanakan pada saat itu. Kalau bersikap lain berarti menentang kekuatan yang tak mungkin dihadapi pada waktu itu. Tetapi setelah Jepang mulai berkuasa di Sumatra Barat, mereka menunjukkan sikap yang berlainan daripada apa yang telah didengar sebelumnya tentang kekejaman mereka di medan perang bahkan sebaliknya yang diperlihatkan oleh Jepang. Jepang melalui kaki tangannya (mata-mata) telah menyebarluaskan berita bahwa mereka datang untuk membebaskan daerah Asia dari kekuasaan Imperialisme Barat yang telah lama membelenggu bangsa-bangsa di Asia. Mereka bersemboyan "Asia untuk Asia". Oleh karena itu kedatangan Jepang di daerah Sumatra Barat mendapat sambutan dari rakyat yang tidak tahu apa-apa tentang masalah politik dunia pada waktu itu. Mereka berbondong-bondong datang menyambut kedatangan saudara tua yang akan melepaskan dari belenggu penjajahan yang sudah sekian lama mereka rasakan kesakitannya. Setiap tentara

Jepang memasuki suatu daerah rakyat datang tanpa dipanggil untuk menyambutnya dengan kibaran bendera Merah Putih dan bendera Jepang, Hinomaru, sambil mengucapkan *banzai*, yang berarti hidup Jepang.

Secara keseluruhan daerah Sumatra berada di bawah komando kesatuan Tomi, yaitu kesatuan angkatan darat Jepang yang menguasai daerah Sumatra, Jawa, dan Madura. Kesatuan ini pada mulanya berpusat di Shonanto (Singapura) yang pada tahun 1943 dipindahkan pusatnya ke Bukittinggi dan berkuasa hanya untuk daerah Sumatra Barat.

Untuk memudahkan jalannya roda pemerintahan Jepang di Sumatra Barat, Jepang tidak mengubah struktur pemerintahan yang telah ada yang dibuat oleh Belanda. Bahkan pada mulanya orang-orang Belanda yang telah menjabat sesuatu tugas di pemerintahan Sumatra Barat tetap dipekerjakan oleh Jepang, karena pada umumnya orang Jepang yang datang itu berada di Sumatra Barat adalah orang-orang yang hanya tahu berperang saja, sedangkan bagaimana cara memerintah menurut struktur yang ada mereka tidak tahu. Baru setelah orang-orang sipil Jepang mulai datang, mereka mulai mengambil alih kekuasaan dari orang-orang Belanda yang seterusnya mereka diintendir atau diasingkan ke tempat-tempat yang telah disediakan.

Berikut ini digambarkan sedikit perbedaan struktur pemerintahan Jepang dengan struktur pemerintahan Belanda di Sumatra Barat di mana perbedaan hanya terletak pada namanya saja, sedangkan bentuknya sama saja.

Pemerintahan Jepang:

1. *Sumatra Neishi Kaigun shu*
(Keresidenan Sumatra Barat) yang dikepalai oleh Shu-Cho.
2. *Bun* (luhak) dikepalai Bun-Shucho.
3. *Fuku-bun* (Kedemangan) dikepalai oleh Fuku-bun-cho.
4. *Gun* (di bawah Fuku-bun) dikepalai oleh Gun-cho.
5. *Fuku-gun* (Kecamatan) di-

Pemerintahan Belanda:

1. *Sumatra Westkust*
(Residentie) dikepalai oleh resident
2. *Afdeling* (Ass. resident)
3. *Onder Afdeling* (Controleur)
4. *District* (demang)
5. *Onder District* (Ass. de-

kepalai oleh Fuku-gun-cho. mang).
6. *Negari* (Kepala Negeri) 6. *Negeri* (Kepala Negeri)

Dari gambaran di atas kelihatan kepada kita bahwa yang berubah sebenarnya adalah namanya saja, sedangkan strukturnya tidak mengalami perubahan sesudah orang-orang Belanda diintendir semuanya, banyak orang Sumatra Barat yang ikut membantu Jepang dalam menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu orang Sumatra Barat lebih memahami keadaan daerahnya dari Jepang untuk menghadapi rakyat banyak. Maka orang-orang itulah yang dipergunakan Jepang, lebih-lebih karena antara rakyat dengan Jepang sendiri menemukan kesukaran dalam masalah bahasa yang dipakai sebagai penghubung.

Jabatan *Fuku-bun-cho* (Demang) sudah diserahkan kepada putra daerah, sedang sewaktu Belanda masih berkuasa, jabatan ini dipegang oleh orang Belanda sendiri dengan nama *controleur*. Oleh Belanda jabatan di bawah tingkatan itu yang diserahkan kepada orang Sumatra Barat, yaitu mengepalai suatu district saja. Pada mulanya Jepang memperlihatkan sikap yang baik terhadap rakyat daerah Sumatra Barat. Semboyan Jepang yang selalu didengung-dengungkan kepada rakyat, seperti Jepang pembebas Asia, Jepang saudara tua, Indonesia — Jepang sama-sama dan sebagainya termakan oleh rakyat, dan rakyat pun membalas dengan sikap baik pula dan banyak yang ikut membantu Jepang.

Bendera Merah putih boleh dikibarkan di samping bendera *Hinomaru*, lagu Indonesia Raya boleh pula dinyanyikan di samping lagu *Kimigayo*, lagu kebangsaan Jepang. Pemimpin masyarakat Sumatra Barat dibolehkan pula mendirikan suatu perkumpulan yang dinamai Komite Rakyat yang pada umumnya bergerak di bidang sosial, seperti mengurangi eksese perang terhadap Sumatra Barat, mendirikan sekolah-sekolah, memelihara semangat perjuangan, membantu Jepang, dan sebagainya. Komite Rakyat ini didirikan oleh pemuka-pemuka rakyat Sumatra Barat, yaitu: Suska, Mr. Abu Bakar Jaar, Abdullah St. Sinaro, Syarif Usman, Ismael Lengah, dan beberapa orang lainnya yang kesemuanya berjumlah sebanyak 17 orang. Komite ini didirikan dengan bantuan Persatuan Saudagar Indonesia di Padang dan mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat Sumatra Barat.

6.1.3. Sikap Masyarakat Sumatra Barat Terhadap Jepang¹¹⁸⁾

Sikap Jepang yang manis tidak bertahan lama, situasi dan kondisi waktu itu menyebabkan Jepang bertindak kebalikan dari apa yang diperlihatkannya pada mula mereka datang ke Sumatra Barat. Situasi di medan perang memperlihatkan gejala bahwa Jepang makin lama makin terdesak oleh gabungan pasukan Sekutu. Keperluan perang Jepang makin meningkat, sedangkan sumber penghasilan bertambah kurang. Oleh karena itu rakyat di tempat-tempat yang dikuasai Jepang disuruh bekerja untuk membiayai Perang Asia Timur Raya dengan apa yang dapat mereka sediakan. Hal yang demikian juga tidak ketinggalan dilaksanakan Jepang di Sumatra Barat. Rakyat dipaksa mengerjakan jalan di Logas untuk kepentingan perang Jepang, dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang dibuat Jepang untuk perang. Kebebasan sikap untuk para pemimpin masyarakat Sumatra Barat mulai dikurangi dengan bermacam-macam alasan, organisasi pemuda yang bernama "Pemuda Nippon Raya juga dilarang kegiatannya, karena dianggap akan mengganggu kepentingan perang Jepang. Organisasi yang diberi hak hidup adalah organisasi yang ikut membantu Jepang dan didirikan oleh Jepang, seperti Seinen-dan, Kaibodan, Bogodan, yaitu badan-badan yang bekerja untuk kepentingan Jepang yang keanggotaannya dipaksakan kepada setiap pemuda negeri / desa. Mereka yang tidak mau akan disiksa oleh kenpetai Jepang yang sangat terkenal pandai dalam menyiksa tawanan. Hal tersebut di atas menyebabkan sikap rakyat Sumatra Barat juga berubah terhadap Jepang, dari sikap senang berubah menjadi sikap benci. Di dalam hal ini sekurang-kurangnya ada empat golongan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu:

- 6.1.3.1. golongan politisi yang kontra
- 6.1.3.2. golongan politisi yang pro
- 6.1.3.3. golongan yang masa bodoh
- 6.1.3.4. golongan yang pro-Belanda
- 6.1.3.1. Golongan politisi yang kontra, yaitu golongan yang sedari semula tidak mau bekerja sama dengan Jepang karena mereka tidak yakin bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan dengan kedatangan Jepang kehidupan rakyat

tidak akan menjadi lebih baik daripada di masa Belanda. Kedua penjajah itu sama buruknya bagi masyarakat Sumatra Barat, untuk apa mereka dibantu. Mereka lebih baik berusaha sendiri membangun bangsanya yang sudah lama terjajah. Golongan yang kontra Jepang ini biasanya selalu dikejar-kejar oleh Jepang dan kegiatan mereka sangat dibatasi dan dikekang. Karenanya mereka akan bergerak secara ilegal, gerakan di bawah tanah.

- 6.1.3.2 Golongan politisi yang pro, yaitu golongan politisi yang menganggap kedatangan Jepang dapat dipergunakan sebagai batu loncatan atau sebagai alat untuk mencapai cita-cita perjuangan mereka yang sudah lama terpendam. Melalui Jepang dengan ikut bekerja sama dengan mereka, diharapkan akan dapat dengan lebih leluasa memperjuangkan dan mencapai kemerdekaan. Kelihatan mereka membantu Jepang, tetapi pada isinya mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan dengan mempergunakan Jepang sebagai alat atau sekurang-kurangnya memperlakukannya sebagai kesempatan yang diberikan Jepang kepada mereka. Golongan pro-Jepang ini lebih bebas bergerak dari golongan yang kontra.

Pada dasarnya kedua golongan ini sama-sama membenci Jepang, seperti sama membenci semua penjajahan lainnya, tetapi taktik yang mereka pergunakan untuk mencapai tujuan perjuangan mereka agak berbeda, yang satu nyata-nyata menentang Jepang dengan segala sikap dan tanduknya, sedangkan golongan yang pro, bekerja sama dengan Jepang.

- 6.1.3.3. Golongan masa bodoh adalah golongan yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi saja, asal kebutuhannya dicukupi, mereka akan merasa senang. Orang-orang dari golongan inilah yang sering dipergunakan oleh Jepang untuk menjadi mata-mata Jepang yang akan mengawasi setiap gerakan orang yang menentang Jepang dan segera melaporkannya pada Jepang. Dari golongan inilah biasanya timbulnya golongan pengkhianat bangsa. Hanya saja

jumlah golongan ini tidak besar.

- 6.1.3.4. Golongan yang pro-Belanda yaitu orang-orang bekas pegawai Belanda dulu yang masih memimpikan kembalinya Belanda berkuasa di Indonesia. Jumlah mereka juga tidak banyak dan tidak semua bekas pegawai Belanda dulu itu yang menjadi golongan pro-Belanda, banyak di antaranya yang berjiwa sangat patriotis menentang Jepang. Golongan ini tidak akan membahayakan perjuangan mencapai kemerdekaan, karena selalu bersikap ragu-ragu dan takut-takut. Mereka lebih suka tinggal di rumah daripada bergerak di luar rumah.

Di samping golongan yang empat itu masih terdapat lagi satu golongan yang sangat besar yaitu rakyat banyak yang tidak tahu-menahu dengan tujuan perjuangan para pemimpin mereka dan juga tidak mengetahui tujuan perang Jepang. Mereka hanya dipusingkan oleh urusan mereka sendiri dalam menyambung hidupnya sekeluarga. Apa yang dikatakan pemimpin mereka itulah yang mereka jalankan. Tetapi justru golongan inilah yang diperjuangkan oleh golongan yang kontra-Jepang, maupun golongan yang pro-Jepang.

Golongan pertama dan kedua sudah dari semula, yaitu dari semenjak kedatangan Jepang ke Sumatra Barat sudah menentukan sikap mereka, sedangkan golongan yang dua lagi melihat pada situasi. Pada umumnya, makin lama Jepang berkuasa di Sumatra Barat, sikap masyarakat makin bertambah membenci Jepang, banyak di antara mereka yang secara diam-diam menentang Jepang, misalnya dengan tidak mengerjakan setiap perintah Jepang kepada mereka.

Lebih-lebih setelah tindakan Jepang sudah terang-terangan dilaksanakan dengan kasar dan kejam. Tetapi makin keras tindakan Jepang makin meningkat pula kebencian rakyat kepadanya. Di akhir kekuasaan Jepang, rasa kebencian ini dilampiaskan dengan mencuri milik-milik Jepang pada pabrik-pabrik yang terletak agak di luar kota, hampir setiap malam ada pencurian yang memusingkan Jepang karena tidak seorang pun yang mengaku, walaupun mereka mengetahui betul siapa-siapa yang melakukan pencurian tersebut.

6.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat

6.2.1. Keadaan Sosial¹¹⁹⁾

Keadaan kehidupan sosial di daerah Sumatra Barat pada waktu Jepang berkuasa pada umumnya sangat susah sekali dan kesusahan itu terlihat dalam seluruh lapangan penghidupan masyarakat. Para petani tidak dapat mengerjakan sawah mereka karena sebagian besar waktu mereka dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Begitu juga lapangan pekerjaan lainnya tidak dapat berjalan dengan lancar, karena segala sesuatunya diperuntukkan bagi Jepang, sedangkan Jepang sendiri, sebagai penguasa tidak mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya penghidupan masyarakat sangat ter-siksa, bahan makanan sangat sukar mendapatkannya walaupun berbentuk sayur-sayuran saja.

Bahan-bahan yang selama ini tidak dimakan rakyat, sekarang sudah sukar juga mendapatkannya, karena semua sudah dihabiskan oleh orang yang lebih dulu menemuinya, manusia sudah berebutan dengan ternaknya dalam mencari sayur-sayuran. Ikan-ikan di sungai oleh Jepang ditangkapi dengan mempergunakan dinamit, sehingga menghabiskan mata pencarian rakyat. Pokoknya pada waktu itu rakyat hanya berusaha menghabiskan apa yang ada saja, tidak sempat berusaha untuk menghasilkan sesuatu seperti menanam padi, jagung, kacang tanah, dan sebagainya, karena apabila hasilnya akan diambil, maka orang-orang Jepang sudah datang mendahului mengambilnya tanpa permissi. Boleh dikatakan waktu itu orang yang dapat makan satu kali dalam sehari sudah termasuk orang yang beruntung. Kebanyakan rakyat hanya makan bubur saja sekali satu atau dua hari. Penderitaan ini masih ditambah lagi dengan tiadanya bahan sandang. Kebanyakan rakyat sudah memakai baju yang terbuat dari kulit kayu "tarok" atau dari goni bekas. Lebih banyak telanjangnya daripada pakai baju. Rasanya susah sekali membandingkan zaman Jepang itu dengan daerah lain dalam hal kesusahan hidup. Di samping pakaian yang tidak pantas itu badan mereka penuh kurap, kudis, panau, tukak, dan segala macam penyakit kulit, badan kering dan selalu dalam keadaan kelaparan. Penderitaan yang sudah demikian itu masih ditambah lagi oleh Jepang dengan perintah kerja

paksa melalui tipuan-tipuan yang licik. Para pemuda Sumatra Barat dikatakan akan dibawa ke Shonanto atau ke tempat-tempat lain untuk dipekerjakan atau dididik menjadi tentara Jepang dan sebagainya, tetapi setelah banyak yang mendaftar, mereka diangkut ke Logas untuk membuat jalan kereta api di tengah-tengah hutan balantara. Perumahan, makan, dan pengobatan tidak pernah diperoleh selama kerja itu. Yang sering diperoleh setiap hari adalah pukulan-pukulan Jepang, kerja berat, dan sejenis siksaan model Jepang waktu itu. Banyak pemuda-pemuda yang meninggal di sana. Kalau yang dapat melarikan diri sudah seperti setengah mayat, lutut besar, perut kembung, muka pucat, badan kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang saja. Keadaan yang disebutkan di atas itu menyebabkan keadaan sosial di Sumatra Barat waktu Jepang berkuasa di sana sangat buruk dan menyedihkan. Segala-galanya serba tidak ada, orang bersikap sendiri-sendiri, yang di Sumatra Barat merupakan suatu hal yang pantang sekali, tetapi karena didesak keadaan terpaksa berbuat begitu. Nilai gotong royong makin menipis, pencurian dan perampokan merajalela tanpa dapat diatasi.

Orang lebih banyak tinggal di hutan daripada di dalam kampung, karena di dalam hutan masih banyak yang dapat dikumpulkan buat makan keluarga, walaupun hanya terdiri dari umbi-umbian dan daun kayu, asal dapat menahan lapar buat sementara. Korban jiwa oleh keadaan yang seperti ini di Sumatra Barat jauh lebih banyak dari korban jiwa dalam perang.

6.2.2. Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Sumatra Barat sewaktu Jepang berkuasa sangat kacau, roda perdagangan tidak jalan sebagaimana mestinya, barang-barang perdagangan tidak ada di pasar, apakah dalam bentuk sandang, pangan dan lain-lain. Orang-orang pada takut ke pasar, karena sewaktu-waktu dapat ditangkap Jepang untuk dibawa kerja paksa, lebih-lebih orang laki-laki yang tegap-tegap. Pada waktu ini kegiatan jual beli sering dilaksanakan dengan jalan barter, yaitu saling tukar-menukar kebutuhan yang dapat dilakukan di mana saja, dan tidak memerlukan pasar. Kalaupun ada barang-barang di

pasar, itupun dijual dengan sembunyi-sembunyi, karena kalau diketahui oleh Jepang kemungkinan barang itu akan diambilnya tanpa bayar. Akibat dari itu semua kehidupan ekonomi rakyat sangat susah dan hal ini makin lama makin bertambah sulit karena keadaan Jepang sendiri juga makin terjepit di medan perang.

6.3. Kehidupan Seni dan Budaya¹²⁰⁾

6.3.1. Pendidikan

Dalam masalah pendidikan Jepang memang mengadakan perubahan-perubahan. Sekolah Dasar yang pada waktu itu dinamakan Sekolah Nippon Indonesia (SNI) yang berasal dari HIS Belanda yang lamanya tujuh tahun dijadikan enam tahun, untuk mempercepat masa belajar satu tahun. Bahasa pengantar pada SNI dipergunakan bahasa Indonesia seluruhnya. Huruf Jepang (*Katakana*) diajarkan pada SNI ini, sedangkan huruf *Hong-ji* dan *Kang-ji* diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah baru, yang sebelumnya belum ada, didirikan atau ditambah seperti Sekolah Pertanian, Sekolah Teknik Tinggi, Sekolah Pamong, Sekolah Polisi dan lain-lainnya yang hasilnya juga dibutuhkan oleh Jepang.

Dalam masalah pendidikan, Jepang berusaha menjepangkan orang-orang Sumatra Barat dengan bermacam-macam cara. Kepada murid-murid sekolah diajar bahasa Jepang, *taiso* (senam) di waktu pagi secara masal, bergotong royong ala Jepang yaitu hanya bekerja tanpa mendapat imbalan apa-apa. Anak sekolah lebih sering bergotong royong daripada belajar. Di samping itu lagu-lagu Jepang merupakan lagu wajib yang harus diajarkan pada anak-anak sekolah, terutama oleh guru-guru harus dapat karena mereka diharuskan pula mengajarkannya kepada orang lain selain dari murid-muridnya sendiri. Pegawai-pegawai kantor diwajibkan juga belajar bahasa Jepang, karena itu kursus-kursus bahasa Jepang dibuka di mana-mana. Di samping itu juga anak-anak sekolah diberikan latihan kemiliteran dan hal ini adalah untuk pertama kalinya terjadi di Sumatra Barat. Para pemuda diberikan latihan militer dalam bentuk kesatuan *Kei-bo-dan* (pembantu polisi), *Sei-nen-dan*, (penjaga keamanan kampung), *Hei-ho* (prajurit Asia Timur Raya) *Romusha* (tentara pembangunan Asia

Timur Raya), *Gyugun* (tentara sukarela) dan lain-lainnya. Pada dasarnya latihan-latihan militer itu diberikan oleh Jepang adalah untuk mendidik orang Sumatra Barat dengan disiplin militer yang sewaktu-waktu dipergunakan untuk kepentingan perangnya. Walaupun demikian latihan-latihan itu ternyata merupakan suatu pendidikan yang sangat berguna bagi rakyat Sumatra Barat sesudah Jepang kalah, karena dengan pengalaman itulah sebagian besar diatur daerah Sumatra Barat pada awal kemerdekaan Indonesia oleh orang-orang yang telah matang ditempa Jepang itu.

Dilihat secara sepintas lalu, maka pendidikan di zaman Jepang di Sumatra Barat, di samping banyak yang buruknya, banyak pula yang baiknya. Baiknya adalah buat pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa pergaulan dan bahasa resmi dalam rapat-rapat. Di waktu inilah bahasa Indonesia mendapat kesempatan berkembang dengan seluas-luasnya. Di samping itu latihan militer merupakan pendidikan kader bagi rakyat Sumatra Barat di kemudian hari, yang sesungguhnya berada di luar pengetahuan Jepang. Hal ini terutama terjadi dalam tubuh *Gyugun*, yang pendiriannya yang pertama adalah atas saran daripada para pemimpin rakyat Sumatra Barat sendiri.

Hei-ho dijadikan tumpuan tempat belajar bagi pemuda-pemuda Sumatra Barat dalam mempersiapkan diri untuk kemudian hari apabila saatnya telah datang. Khatib Suleiman, Suska, Dt Simarajo, adalah pemimpin rakyat Sumatra Barat yang menjadi pimpinan *gyugun* yang pertama. Atas usaha mereka inilah *gyugun* menjadi tempat pendidikan kader bagi pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan memang dalam kenyataannya di waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan ke seluruh penjuru dunia, orang-orang Sumatra Barat yang telah melalui latihan *gyugun* itu merupakan pemimpin-pemimpin masyarakat. Bahkan di antara mereka yang masih hidup sampai sekarang masih merupakan pemimpin atau pemuka masyarakat yang disegani karena jasanya di awal kemerdekaan dan di saat-saat menjelang kemerdekaan itu. Di bidang pendidikan formal memang zaman Jepang yang singkat itu tidak menghasilkan apa-apa, selain dari merusak mental anak didik dengan segala macam bentuk kekerasan

hidup. Sopan santun pergaulan dalam hidup menjadi sangat kabur dan berubah kepada gejala hidup yang kurang sopan, karena contoh kongkrit hampir setiap hari diperlihatkan Jepang kepada anak-anak sekolah. Guru atau orang tua mereka ditangani atau dimarahi Jepang di hadapan mereka, sehingga menghilangkan penghargaan murid-murid kepada guru. Di samping belajar sama sekali tidak teratur, karena alat-alat tulis sering ditukar dengan alat-alat pertanian untuk gotong royong.

6.3.2. Pengaruh Kebudayaan Jepang

Dalam pengaruh kebudayaan ini terlihat pada usaha Jepang dalam menjadikan masyarakat Sumatra sebagai orang Jepang baru, dalam arti Jepang berusaha memaksakan kebudayaannya di daerah Sumatra Barat. Kenyataannya memang terlihat di sana-sini orang Sumatra Barat yang telah membiasakan kebiasaan Jepang, tetapi pada umumnya hal ini dilakukan karena terpaksa saja. Di hati kecilnya masing-masing mereka jelas tidak mau. Daripada melawan Jepang yang sudah terkenal kekejamannya itu, biarlah diikuti saja kemauan mereka, dan hal ini dilaksanakan kalau terpaksa saja. Satu contoh dalam hal ini adalah di waktu melakukan *sei-kei-rei* (rukuk menghadap istana kaisar Jepang di Tokio). Kalau diawasi oleh Jepang, *sei-kei-rei* dilakukan, tetapi kalau tidak ada yang memperhatikan, mereka tidak melakukan *sei-kei-rei* itu. Bagi orang-orang Sumatra Barat adalah merupakan suatu hal yang dirasakan sangat menghina, karena mereka melakukan rukuk hanyalah kepada Tuhan di waktu sembahyang. Dengan rukuk menghadap Tokio seolah-olah mereka dipaksa merubah kiblat mereka dan hal ini sangat berat untuk melakukannya dan sangat melukai perasaan orang Sumatra Barat pada umumnya, lebih baik mereka ditampar berkali-kali daripada *sei-kei-rei* ke Tokio itu. Tetapi untuk menjaga jangan sampai terlalu banyak korban jiwa, maka *sei-kei-rei* itu dilakukan juga, tetapi dengan setengah hati. *Sei-kei-rei* kepada pembesar Jepang yang liwat atau kebetulan sedang melihatnya, juga sangat dirasakan menekan perasaan orang Sumatra Barat. Kalau tidak sangat terpaksa mereka tidak akan melakukannya.

Bahasa dan lagu-lagu Jepang merupakan unsur-unsur

kebudayaan Jepang yang dipaksakan masuknya ke dalam masyarakat Sumatra Barat. Walaupun Jepang berkuasa, banyak juga orang yang belajar bahasa Jepang dan melagukan nyanyi Jepang, tetapi begitu Jepang kalah mereka tidak melakukan lagi.

Pengaruh kebudayaan Jepang yang sangat merusak orang Sumatra Barat adalah yang merupakan keruntuhan akhlak dan moral secara umum dalam masyarakat. Akibat perlakuan Jepang yang sangat kasar dan kejam pada umumnya selama mereka berkuasa di daerah Sumatra Barat, banyak anak-anak yang sudah meniru-niru perbuatan kasar Jepang itu, tidak menghormati orang yang lebih tua lagi. Di samping itu semua, banyak terdapat anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Hal ini sangat memalukan keluarga atau orang yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak pada umumnya terlantar hidupnya.

Sebagai benda kebudayaan Jepang yang tertinggal sekarang di daerah Sumatra Barat dan sekaligus merupakan tugu peringatan terhadap kekejaman dan keganasan Jepang adalah yang merupakan benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai yang dahulunya dikerjakan dengan cucuran keringat, darah, dan jiwa rakyat Sumatra Barat. Di samping itu bekas-bekas pembangunan jalan kereta api di daerah Logas juga merupakan suatu peninggalan Jepang yang mempunyai arti sangat mendalam pada diri orang-orang Sumatra Barat, karena daerah rawa-rawa Logas itu meminta ribuan jiwa pemuda-pemuda Sumatra Barat melalui tangan-tangan kejam Jepang. Selain dari yang disebutkan di atas rasanya tidak ada peninggalan budaya Jepang yang sampai sekarang masih dirasakan pengaruhnya, semuanya hilang lenyap bersama-sama kehancuran Jepang di medan perang Pasifik, serta kehancuran Jepang secara keseluruhannya.

Suatu hal yang perlu dicatat di sini sebagai peninggalan Jepang yang besar juga artinya bagi masyarakat Sumatra Barat adalah perubahan terhadap cara berpikir. Walaupun banyak nilai-nilai negatif yang ditinggalkan Jepang, tetapi perubahan cara menanggapi sesuatu dengan cepat sederhana bagi umumnya seluruh orang Sumatra Barat adalah merupakan hasil latihan yang ditinggalkan Jepang melalui kekasaran dan kekejamannya.

Latihan-latihan yang keras dan kejam itu menyebabkan orang Sumatra Barat makin percaya kepada dirinya sendiri, disiplin pribadi makin meningkat, dan rasa kesadaran untuk berdiri sendiri makin meningkat. Kekejaman Jepang dan bangkitnya kepercayaan pada diri sendiri ini menyebabkan timbulnya perlawanan terhadap Jepang. Kebanyakan perlawanan itu dilakukan tidak terang-terangan, dengan gerakan di bawah tanah.

6.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan

6.4.1. Perkembangan Agama¹²¹⁾

Pada umumnya kepercayaan yang dianut orang di Sumatra Barat adalah agama Islam. Pada waktu pendudukan tentara Jepang, kegiatan pelaksanaan agama Islam menjadi meningkat, karena rasa kehormatan beragama, orang Sumatra Barat agak tersinggung oleh tindakan-tindakan Jepang dengan memaksa orang rukuk terhadap Tokio yang bertentangan dengan arah kiblat penganut Islam. Orang Jepang sebagai suatu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertindak tidak mengenal peri keagamaan. Walaupun pada mulanya kaum ulama dirangkul oleh Jepang, tetapi hal itu hanya sekedar untuk melunakkan hati rakyat yang sudah mulai marah melihat kekejaman-kekejaman Jepang. Bahkan Jepang mengadudombakan antara golongan agama dengan golongan adat. Selama golongan agama tidak terlalu menentang Jepang, mereka dibiarkan berkembang dengan bebas, bahkan dijadikan alat propaganda oleh Jepang untuk membendung rasa benci rakyat yang kian meningkat. Tetapi kemudian kebebasan beragama ini pun dikurangi oleh Jepang, karena dalam pengajian yang diberikan oleh ulama-ulama Islam selalu diselipkan rasa benci pada Jepang dan bagaimana cara yang baik untuk mengatasi cara biadab Jepang terhadap rakyat Sumatra Barat.

Pemerintah militer Jepang di Sumatra Barat berhasil memaksakan ulama-ulama Islam untuk memfatwakan bahwa perang Asia Timur Raya adalah perang sabil. Tetapi hal ini hanya beberapa saat saja, karena kemudian arti perang sabil itu dibelokkan menjadi perang sabil untuk menghancurkan Jepang. Para ulama itu akhirnya mempergunakan kesempatan

yang diperoleh di mana mereka mencari jalan yang baik untuk cepat-cepat mengusir Jepang dari daerah Sumatra Barat. Berdasarkan inilah akhirnya golongan alim ulama dengan golongan cerdik pandai dan ninik mamak bekerja sama untuk meminta kepada Jepang supaya diizinkan mendirikan *Gyugun*. Dari *Gyugun* inilah mereka akan mempersiapkan pemuda-pemuda Sumatra Barat untuk mempercepat tercapainya cita-cita perjuangan mereka, yaitu mencapai kemerdekaan. Ulama-ulama Sumatra Barat yang dipelopori oleh Inyik Djambek dan Syekh Daud ar Rasuli merestui pembentukan *Gyugun* yaitu tentara sukarela pembela tanah air dan agama. Di antara pemuda-pemuda yang dilatih pertama kalinya dalam *Gyugun* adalah pemuda-pemuda Islam dan pemuda-pemuda terpendang dalam masyarakat Sumatra Barat seperti: M. Dahlan Djambek, Ismail Lengah, Syarief Usman, Dahlan Ibrahim, Syofyan Nur, Syofian Ibrahim, A. Thalib, Nurmatias, Sayuti Amin, Alwi St. Maradjo, Syafei Ali, Mahyudin Tonek, Burhanuddin, Munir Latif, dan lain-lain 40 orang untuk perwira dan sebanyak 80 orang untuk calon bintang.

Kemudian ternyata bahwa orang-orang yang mengikuti latihan *Gyugun* itu, baik yang di Padang, Bukittinggi, ataupun di daerah Padangpanjang, Batusangkar, Pariaman, dan sebagainya, hampir seluruhnya menjadi pemimpin-pemimpin rakyat di Sumatra Barat dan yang hidup sampai sekarang, masih tetap memegang jabatan penting pada pemerintahan atau sebagai pemimpin masyarakat.

Sama halnya dengan keadaan sewaktu Belanda masih berkuasa, maka di waktu pendudukan Jepang ini pun di Sumatra Barat peranan alim ulama sangat besar dalam perjuangan, terutama untuk menolong rakyat dari penindasan tentara Jepang dan mempertahankan agama Islam. Tetapi perjuangan mereka yang terang-terangan secara Islam atau atas nama Islam menentang Jepang tentu saja tidak dapat dilaksanakan, karena hal itu sama saja dengan bunuh diri, sedangkan perjuangan masih panjang. Dengan demikian di Sumatra Barat tidak terdapat gerakan perlawanan dengan motivasi agama secara terang-terangan. Tetapi perlawanan dengan motivasi agama secara diam-diam jelas ada, karena para ulama yang dipimpin oleh Inyik Djambek dan Syekh Daud ar Rasuli telah merestui perjuangan yang demikian

dengan mengutamakan kepentingan bangsa lebih dahulu. Kesempatan yang diperoleh dari Jepang, menambah semangat para pemuda untuk berlatih dan meningkatkan semangat perjuangan.

6.4.2. Kehidupan Intelektual

Karena orang Jepang kurang menghargai nilai-nilai ilmu pengetahuan selain untuk kepentingan perangnya maka golongan intelektual di Sumatra Barat tidak mendapat perhatian dari Jepang, karena mereka umumnya adalah orang-orang hasil didikan Belanda dan sangat cinta dan pro-Belanda serta membenci Jepang dengan sangat. Karena itu mereka termasuk golongan yang dicurigai oleh Jepang dan seluruh gerak-gerik mereka diawasi, sedikit saja kesalahan sudah cukup dijadikan alasan untuk menangkap dan menghukum. Oleh karena itu kehidupan intelektual selama pendudukan Jepang Sumatra Barat tidak mendapat tempat yang wajar. Dari golongan intelektual yang tidak pro-Belanda kegiatan mereka ditujukan kepada usaha mempersiapkan para pemuda untuk membebaskan diri dari Jepang. Merekalah yang menyampaikan kepada rakyat bahwa Jepang makin lama makin susah kedudukannya di medan perang karena telah dijepit oleh tentara Sekutu. Propaganda-propaganda Jepang yang selalu mengatakan mendapat kemenangan pada setiap pertempuran mereka tafsirkan bahwa Jepang makin lama makin bertambah kecil daerahnya yang menuju pada kekalahan.

Hal ini mereka sampaikan kepada para pemuda dengan bermacam-macam cara. Mereka sendiri tergabung dalam golongan cerdik pandai dalam masyarakat Sumatra Barat, dengan demikian mereka mudah menyebarkan pendapat mereka itu kepada rakyat pada umumnya.

6.5. Hubungan dengan dunia luar¹²²⁾

Sewaktu Jepang berkuasa di Sumatra Barat, orang Sumatra Barat seperti katak di bawah tempurung. Semua hubungan dengan dunia luar ditutup atau dilarang oleh Jepang, lebih-lebih setelah kedudukannya di medan perang makin parah. Jangankan berhubungan dengan dunia luar, untuk bergerak di daerah Sumatra Barat saja sukar rasanya. Ada saja orang berkumpul sedikit, mereka

segera ditangkap oleh kenpeitei Jepang yang akan memberikan siksaan yang kejam. Gedung-gedung bioskop ditutup kecuali kalau mempertunjukkan film tentang kemenangan Jepang di medan perang. Menyimpan buku yang berbahasa Belanda dilarang atau dituduh sebagai mata-mata Belanda yang akan diurus oleh Ikenpeitei Jepang dengan segera. Memutar radio luar negeri pun kalau diketahui dapat dituduh sebagai mata-mata musuh Jepang dan segera ditangkap dan kalau sudah ditangkap biasanya tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Jadi di waktu itu gelap rasanya bumi ini bagi rakyat Sumatra Barat, karena yang dilihat dan didengar hanyalah apa yang dikatakan Jepang saja, sedangkan hal-hal yang terjadi di luar itu sama sekali tidak diketahui.

Tetapi semua itu justru menghidupkan keinginan rakyat Sumatra Barat untuk mendapatkan berita yang lebih banyak. Demikianlah terjadi orang berusaha mendengarkan berita-berita perang dari radio luar negeri secara sembunyi-sembunyi, karena kalau terang-terangan akan diambil oleh kenpeitei Jepang dan akan disiksa dengan kejam. Memang secara terbuka tidak ada kelihatan hubungan Sumatra Barat dengan luar negeri, bahkan dengan luar daerah Sumatra Barat saja rasanya sukar berhubungan.

Untuk menjaga jangan sampai dicurigai Jepang orang Sumatra Barat melakukan hubungan secara bisik-bisik antara sesama mereka dengan mempergunakan bermacam-macam kode sebagai tanda pengenal untuk sesuatu nama atau peristiwa. Dengan menyebutkan kode-kode itu dalam percakapan sehari-hari, maka berita dari mulut ke mulut dapat disampaikan secara berantai. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau dianjurkan oleh para pemimpin rakyat untuk dilaksanakan oleh anggota masyarakat umum dapat pula disampaikan secara beranting. Walaupun secara nyata tidak kelihatan gerakan di bawah tanah di Sumatra Barat, tetapi cara yang dilakukan untuk mendapat dan menyampaikan berita itu juga sudah merupakan suatu gerakan di bawah tanah, walaupun hanya merupakan suatu gerakan yang kecil saja. Sebaliknya hal ini mematangkan orang Sumatra Barat untuk menghadapi peristiwa berikutnya setelah Jepang kalah. Cara ini berkembang menjadi sistem kurir, yaitu mengutus seseorang untuk mengerjakan atau menyampaikan sesuatu kepada daerah lain yang sukar dicapai.

Dalam keadaan yang demikian orang Sumatra Barat menyadari bahwa hal itu, kebutaan akan berita yang sesungguhnya, tidak

boleh dibiarkan berlama-lama. Beberapa orang berusaha membentuk kelompok-kelompok kecil yang bertujuan untuk membentuk publik opini jangan sampai ditelan oleh propaganda Jepang, selalu menggembar-gemborkan kemenangannya di medan perang dengan kemenangan yang gilang-gemilang dan janji-janji kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok yang demikian terdapat di mana-mana di Sumatra Barat, seperti di bawah pimpinan Bakar Yusuf, Zainuddin BS, dan Wali Suleiman di daerah Pariaman, Rauf di Payakumbuh, Syamsuddin dan Abbas Rahman di Bukittinggi, dan Binar di Padangpanjang.¹²³⁾ Mereka ini bersama-sama dengan beberapa orang lain berusaha mengobarkan semangat perjuangan rakyat supaya jangan sampai hilang kepercayaan pada diri sendiri melihat kekejaman Jepang dan berita-berita yang dilansir Jepang.

Dalam keadaan demikian itu sebetulnya Jepang tidak buta dengan kenyataan itu, mereka sebetulnya sudah mengetahui keadaan dan juga telah mengetahui siapa-siapa di antara pemimpin Sumatra Barat itu yang dicurigai. Jepang telah menyiapkan suatu daftar nama dari orang-orang yang dicurigai dan telah ditetapkan pula nasib yang akan menimpa mereka, yaitu akan dibunuh semuanya.

Daftar ini kemudian terkenal dengan nama "Les Hitam". Orang-orang yang masuk dalam daftar "Les Hitam" cukup banyak dan umumnya mereka adalah orang yang anti kepada Jepang dan orang-orang yang pernah mendapat didikan Belanda. Daftar ini dikumpulkan Jepang dengan perantaraan mata-mata mereka yang tersebar di mana-mana. Kalau digolongkan, mereka yang terdaftar itu, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Golongan politik dan cerdik pandai
- b. Golongan orang-orang yang mendapat didikan Belanda (bekas pegawai-pegawai Belanda).
- c. Golongan Ninik Mamak
- d. Golongan Alim Ulama

Di antara mereka itu terdapat nama-nama seperti berikut:

Khatib Sulaiman	Inyik Adam B.B.
Dt. Majo Urang	Inyik Dt. P. Baringek
Mr. St. M. Rasjid	MR. Lim
Raden Suleman	Dr. Hakim
Anwar St. Saidi	Abdullah ¹²⁴⁾
dan lain-lain	

Jepang bermaksud menghilangkan orang-orang yang ada di dalam daftar itu dengan penembakan masal, agar apabila Sekutu menang mereka akan kehilangan tenaga-tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang pemerintahan, kepolisian, pendidikan, dan sebagainya. Begitu juga dengan Indonesia umumnya, Sumatra Barat khususnya, akan kehilangan tenaga-tenaga itu yang akan menimbulkan kebingungan menghadapi Indonesia merdeka. Tetapi untungnya rencana jahat Jepang itu belum dapat dilaksanakan, karena sebelum terlaksana, pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom sudah dijatuhkan Sekutu di Kota Hiroshima tanggal 8 Agustus dan Rusia ikut mengumumkan perang terhadap Jepang. Peristiwa ini menyebabkan seluruh rencana Jepang tidak dapat lagi dijalankan di seluruh daerah pendudukannya, karena Jepang telah menyatakan kalah tanpa syarat terhadap Sekutu untuk menjaga rakyat dan harta milik Jepang yang masih ketinggalan jangan sampai menemui kehancuran lebih lanjut.

Karena Jepang sangat merahasiakan berita kekalahannya itu, maka rakyat Sumatra Barat belum lagi mengetahuinya, tetapi sudah melihat tanda-tandanya dalam tindak-tanduk Jepang yang ada di Sumatra Barat. Sikap mereka dengan mendadak berubah dari kasar menjadi agak lunak tanpa diketahui sebab-sebabnya, Gyugun dan kaibodan dibubarkan dan senjata mereka dilucuti. Tanda-tanda kekalahan Jepang di medan perang Pasifik sama sekali tidak kelihatan. Yang kelihatan di mata rakyat hanyalah kegelisahan pada hampir seluruh orang Jepang yang ada di daerah Sumatra Barat.

Untuk menjaga jangan sampai rakyat umum mengetahui kekalahan Jepang, pesawat-pesawat radio rakyat disegel dan dilarang keras memergunakannya. Walaupun demikian ada juga sebagian kecil orang Sumatra Barat yang telah dapat mengetahui kekalahan Jepang itu dan berusaha menyebarkan berita itu dari mulut ke mulut serta membicarakan untuk dapat mengambil langkah yang diperlukan menghadapi situasi yang demikian. Demikian keadaan di Sumatra Barat menjelang saat-saat kemerdekaan tercapai. Semua golongan berada dalam kebingungan, tidak ada berita yang resmi mengenai kekalahan Jepang dan berita-berita saling simpang siur yang menambah kacaunya suasana.

BAB VII

ZAMAN KEMERDEKAAN (1945–1975)

7.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan

7.1.1 Tumbuhnya Pemerintahan RI di Daerah

Pada tanggal 16 Agustus 1945 di kota Padang, seorang pejabat tinggi Kejaksaan Jepang dengan cara sangat berhati-hati menyampaikan kepada Mr. St. Moh Rasjid bahwa Jepang telah berdamai dengan Sekutu. Sementara itu, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dapat ditangkap oleh seorang pekerja pada PTT. Kabar ini dengan cepat tersebar luas di Padang, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Berita ini dapat membangkitkan semangat para pemuda dan menimbulkan kesibukan yang luar biasa untuk menyambut kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan rapat rahasia oleh para pemuda untuk membahas kekalahan Jepang dan masalah kemerdekaan yang baru saja dicapai. Tanggal 19–8–1945 diadakan lagi rapat di Pasar-gadang, Padang dan sebagai kesimpulan dianggap perlu membentuk suatu badan yang bertugas memberikan penerangan kepada rakyat dengan segera. Badan ini terbentuk pada tanggal 25–8–1945 dengan nama "Balai Penerangan Pemuda Indonesia" (BPPI), dan susunan pengurus BPPI, adalah sebagai berikut:

Ketua I	: Ismael Lengah
Ketua II	: Suleiman
Tata Usaha	: Nasrun AS dan Yahya Jalil
Bendahara	: Dahlan J. St. Mangkuto
Perbekalan	: Ilyas Yakub
Keamanan	: Burhanuddin
Kesehatan	: Dr. Nazaruddin
Penerangan	: Rusdi
Koordinator	: Kasim Dt. Malilik Alam
Penghubung	: Syarif Usman, Bagindo Aziz Chan, Khatib Sulaiman, Mr. Nazaruddin, dan lain-lainnya.

125)

Markas BPPI terdapat di Pasargadang Padang, dengan tugas menjaga kantor-kantor pemerintah yang telah diduduki, membakar semangat rakyat untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan yang telah diumumkan. Di samping itu mereka juga berusaha mencari orang yang tepat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan di daerah Sumatra Barat. Untuk itu mereka pergi kepada M. Syafei yang sewaktu Jepang masih berkuasa mengetuai *Sumatra Cho-Sangi-In*. Terjadilah pembicaraan antara Yahya Jalil dan Arifin Alip sebagai utusan para pemuda dengan Moh. Syafei tentang kemerdekaan Indonesia dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya di Sumatra Barat. Di samping itu sikap Jepang masih sangat mencurigakan. Moh. Syafei berjanji untuk membicarakan-nya lebih dahulu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Sumatra Barat lainnya di Padangpanjang dan Bukittinggi serta dengan Khatib Sulaiman.

Sementara itu berita proklamasi telah tersiar dengan luas di Sumatra Barat. Di Bukittinggi, pada tanggal 17-8-1945, seorang pegawai PTT yang bernama Ali Basya dapat menangkap berita Proklamasi yang ditujukan pada kantor berita Domei, Bukittinggi oleh Kantor Berita Domei di Jakarta. Berita itu disampaikan kepada Adinegoro untuk disebarluaskan. Oleh karena itu keesokan harinya sekelompok pemuda meminta surat kawat berita Proklamasi yang dapat disadap oleh Ali Basya tadi dan langsung menyerahkan kepada Moh. Syafei, yang langsung mengadakan rapat dengan dr. Rasjidin di Padangpanjang yang dihadiri juga oleh Khatib Sulaiman dan pemimpin-pemimpin lain. Dalam pertempuran itu diambil keputusan untuk memperbanyak berita proklamasi dan kemudian disampaikan kepada para pemuda. Berita Proklamasi yang disebarkan itu mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat yang terbukti dengan banyaknya dikibarkan Sang Saka Merah Putih di rumah-rumah penduduk sebagai yang dianjurkan oleh para pemuda itu. Sebagai kelanjutan dari gerakan pemuda itu, pada tanggal 21 Agustus 1945 di bawah pimpinan Mara Karma diadakan pertemuan di kantor Majelis Islam Tinggi (MIT) untuk membicarakan situasi waktu itu dan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. Kemudian dibentuklah suatu organisasi pemuda yang diberi nama Pemuda Indonesia yang disingkat dengan PI. Karena rasanya tidak mungkin menanggulangi masalah yang sedang dihadapi itu hanya oleh beberapa pemuda daerah itu saja, maka akhirnya diadakan pertemuan pemuda yang

lebih luas sifatnya yang dihadiri oleh 40 orang pemuda terkemuka waktu itu. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk membentuk dua buah organisasi, satu bersifat lokal di daerah Bukittinggi, sedangkan yang satunya lagi bersifat lebih luas yang meliputi daerah Sumatra. Dalam pertemuan itu antara lain hadir tokoh-tokoh pemuda: Zainal Zainur, Dahlan Jambek, Nusyirwan dan lain-lain. Diputuskan bahwa organisasi lokal diketuai oleh Nusyirwan dengan wakilnya Mara Karma, sedangkan Zainal Zainur akan bergerak dalam organisasi pemuda yang lebih luas yang dinamakan Pemuda Republik Indonesia (PRI), seperti nama organisasi pemuda yang telah didirikan di daerah Jawa sebelumnya. Selanjutnya organisasi itu disebar sampai ke daerah-daerah yang lebih kecil sebagai cabang dan ranting

Walaupun sudah ada kegiatan pemuda yang teratur dan tertib menurut ukuran waktu itu dan berita Proklamasi sudah tersebar ke daerah-daerah, tetapi keadaan yang demikian masih dirasa kurang, karena Sang Saka Merah Putih masih belum berkibar di puncak Jam Gadang di tengah kota Bukittinggi, sebagai suatu pertanda bahwa kemerdekaan betul-betul sudah menjadi milik rakyat Indonesia.

Oleh karena itu beberapa pemuda, antara lain Nusyirwan, Dahlan Jambek, dan lain-lain bermupakat mencari jalan bagaimana supaya Sang Saka Merah Putih dapat dikibarkan di puncak Jam Gadang itu, sedangkan pada waktu itu bendera Jepang Hinomaru masih berkibar di sana. Diputuskan untuk menyuruh rakyat berkumpul di sekitar Jam Gadang pada pagi hari. Setelah rakyat berkumpul, barisan pemuda dengan teratur menuju ke arah Jam Gadang dan seorang pemuda yang bernama Bustami Rantai mengambil sebuah bendera dari sebuah toko di sekitar Jalan Komidi yang terus dipersiapkan untuk dinaikkan ke puncak Jam Gadang, sedangkan rakyat berdiri di sekitarnya dengan segala kesiapsiagaan untuk menjaga kemungkinan Jepang bertindak yang tak diinginkan. Sebelum bendera Merah Putih itu dikibarkan, Tejasukmana dan Mara Karma mengucapkan pidato singkat sebagai sambutan yang diikuti dengan mengucapkan ikrar oleh seluruh yang hadir bahwa Sang Saka Merah Putih yang telah dikibarkan itu akan dipertahankan dengan jalan apa pun. Setelah bendera dikibarkan maka resmilah Jepang kalah bagi rakyat dan kemerdekaan betul-betul telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia, tidak ada keragu-raguan lagi seperti sebelumnya.

Sesudah kejadian di Padang dan Bukittinggi itu, maka berita Proklamasi telah tersebar sampai ke mana-mana di daerah Sumatra Barat, seperti di Payakumbuh, Solok, Batusangkar, Sawahlunto/Sijunjung, Padangpanjang, Pariaman, dan sebagainya yang menyebabkan rakyat bergerak dengan spontan berusaha mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Gerakan rakyat ini ada yang dilakukan tanpa mendapat hambatan dari Jepang, tetapi tidak kurang pula dengan melalui jalan kekerasan karena dihalang-halangi oleh Jepang. Beberapa orang tokoh masyarakat pada waktu itu yang ikut menggerakkan massa antara lain adalah: Marah Adin, Dr. Darwis, T.D. Bandaro Hitam, Nurhakim, (Solok) Zainuddin, St. Kerajaan, dan Khatib Sulaiman (Batusangkar) K. Dt. Rajo Sikumbang, Ibrahim Gandhi, Muin Dt. Rajo Endah, Adam BB, Buyung D. Asri, Ramli Dahlan (Padangpanjang) St. Saakuddin, Udin, Ibrahim Rasjid, (Pariaman) bekas *Gyugun* dan *Heiho* di Payakumbuh dan sebagainya.¹²⁶) Atas usaha mereka dan beberapa orang yang tidak disebutkan di sini, semangat kemerdekaan dengan cepat ditanggapi oleh rakyat dan menjalar ke seluruh pelosok Sumatra Barat. Demikian tinggi semangat rakyat umum pada waktu itu sehingga Jepang yang sebetulnya masih memegang kekuasaan tidak dapat berbuat apa-apa selain dari membiarkan saja apa yang dilakukan oleh rakyat bersama dengan para pemimpinnya, asal jangan mereka (Jepang) langsung disakiti sebagai akibat balas dendam. Jepang hanya berjaga-jaga untuk keselamatan diri mereka.

Setelah jelas bahwa Indonesia telah merdeka dan di daerah Sumatra Barat pada umumnya, Jepang tidak memperlihatkan sikap menentang tindakan yang dilakukan masyarakat dan setelah berita itu tersebar luas ke seluruh daerah Sumatra Barat, maka perlu diatur suatu pemerintahan yang akan dapat menjalankan segala tugas pemerintahan dan supaya jangan sampai terjadi kekacauan di kalangan rakyat banyak. Untuk merealisasinya maka pada tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 1945 di Padang diadakan rapat di antara para pemimpin masyarakat yang mewakili hampir seluruh daerah Sumatra Barat. Pada tanggal 29 Agustus 1945 keluar keputusan pertama, yaitu suatu pernyataan yang mendukung Proklamasi Indonesia yang telah diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pernyataan itu ditandatangani oleh Muhammad Syafei atas nama bangsa Indonesia di Sumatra Barat.

Keputusan kedua adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) sebagai bagian dari Komite Nasional Indonesia yang berada di Jakarta yang bertugas mengambil alih dan mengatur kekuasaan di seluruh Indonesia, maupun di daerah-daerah. Dalam rapat KNID Sumatra Barat yang pertama pada tanggal 31 Agustus 1945 di Padang, ditetapkan susunan pengurusnya sebagai berikut:

Ketua	: Muhammad Syafei
Ketua Muda I	: Rusad Dt. Perpatih Baringek
Ketua Muda II	: Dr. M. Jamil Dt. Rangkayo Tuo
S. Usaha/Bendahara	: Mr. St. Mohammad Rasjid
Anggota-anggota terbagi atas:	
Bagian Persatuan dan Pendidikan	: Mr.M. Nasrun dan Saadudin Jambek
Badan Penolong	
Keluarga Korban Perang	: Khatib Sulaiman, Ismael Lengah, Sulaiman, H.A. Wahab Amin, Dr. Nazaruddin, dan Burhanuddin
Badan Keamanan Rakyat	: Ismael Lengah, Ahmaddin Dt. Berbangso, Sulaiman, dan Rd. Sulaiman
Kesehatan Rakyat	: Dt.Majo Urang, Umar Marah Alamsyah, Dr.Atos, dan Mr. Nazaruddin
Kaum ibu	: Rangkayo Dt. Temenggung, Sam-sidar Yahya, Zubaidah Munaf, dan Hapipah Lanjunin. ¹²⁷⁾

Dengan terbentuknya susunan pengurus KNID Sumatra Barat ini, maka mulailah badan itu berfungsi sebagai badan yang menjalankan fungsi pemerintahan, sementara pejabat pemerintahan masih belum ditunjuk. Di samping itu badan pemerintahan yang dibentuk Jepang seperti *Seikei Ganshu Hokokai* dan lain-lain di bubarkan dan tidak berkuasa lagi. Badan pemerintahan resmi yang ada di Sumatra Barat adalah KNID yang mempunyai cabang dan ranting di kecamatan-kecamatan dan nagari-nagari yang langsung dibentuk.

Tokoh-tokoh KNID di Payakumbuh antara lain adalah: H.

Darwis Dt. Temenggung, H.I. St. Alamsyah, H.Z. Hamidy, H. Asmaun, Abu Bakar, dan lain-lainnya.

Tokoh-tokoh KNID di Padangpanjang antara lain adalah:

Ketua	: M. Arif
Wakil Ketua	: Dr. Rasjidin
Setia Usaha I	: K. Dt. Rajo Sikumbang.
Setia Usaha II	: Haska
Anggota	: 15 orang

Tokoh-tokoh KNID di Batusangkar adalah:

Ketua	: Ahmad Syuib
Ketua II	: St. Usman Said
Wk. Ketua I	: Zainuddin St. Kerajaan
Wk. Ketua II	: Ibrahim Agus

Tokoh-tokoh KNID di Solok adalah:

Ketua	: Marah Adin
Ketua I	: Dr. A. Darwis
Ketua II	: Sultani St. Malako
Sekretaris	: Nurhakim Dt. Bandaro Hitam
Bendahara	: Lanukan Saidi

Tokoh-tokoh KNID di Sawahlunto adalah:

Ketua	: Darwin
Wk. Ketua	: Sudin Dt. Kabut
Bendaharawan	: Karim Musa di Pariaman KNID diketuai oleh Dr. Sadikin.

Setelah KNID di Padang dan di daerah-daerah lainnya terbentuk dan sudah menjalankan fungsinya sebagai badan pemerintahan yang resmi, maka makin banyak terjadi bentrokan dengan Jepang, terutama hal ini disebabkan karena pemerintahan Indonesia merdeka di Sumatra Barat sudah harus dijalankan dengan baik supaya kekacauan tidak sampai terjadi. Sedangkan Jepang waktu itu masih memiliki senjata yang lengkap dan masih menganggap dirinya berkuasa sebelum serah terima dengan Sekutu. Di samping itu rakyat juga bertindak sebagai pelampiasan rasa tertekan oleh Jepang selama mereka berkuasa di daerah Sumatra Barat. Yang sering menimbulkan bentrokan dengan Jepang adalah di waktu hendak merampas senjata dan menduduki tempat-tempat pemerintahan seperti kantor dan lain-lain.

Setelah KNID terbentuk selanjutnya didirikan Badan Keamanan Rakyat sebagai realisasi dari seruan Presiden tanggal 25 Agustus 1945 di Jakarta. Pada tanggal 2 September 1945 pengurus Badan Keamanan Rakyat yang ditetapkan dalam rapat KNID Sumatra Barat yang pertama tanggal 31 Agustus 1945, disempurnakan lagi dengan susunan sebagai berikut:

Penasehat	: A. Dt. Barbangso dan R. Sulaiman
Pengurus	: Jamalus Jahya sebagai ketua Marah Tahar, Ismael Lengah, S.J.St. Mangkuto, H. Sirajuddin Abbas
Anggota	: 24 orang.

Pembentukan BKR tingkat Sumatra Barat diikuti dengan pembentukan BKR di daerah lain di Sumatra Barat. Yang menjadi inti dari BKR adalah para perwira *Gyugun*, prajurit *Gyugun* dan dari organisasi pemuda PRI dan BPPI. Para anggota *Gyugun* sebelumnya sudah dilucuti oleh Jepang di bawah pimpinan Mayor Akiyama dengan suatu tipu muslihat yang agak licik. Setelah *Gyugun* dilucuti, baru dikatakan bahwa Jepang sudah kalah dari Sekutu. Sesudah dilucuti mereka dibubarkan, dan dalam keadaan tanpa aktivitas. Sementara itu datang berita tentang pembentukan BKR yang dikeluarkan di Jakarta, maka tidak ayal lagi para perwira *Gyugun* segera berkumpul di Padang dan menetapkan cara pembentukan BKR itu di Sumatra Barat. Diputuskan bahwa tenaga akan disebar ke daerah-daerah dan ditetapkan:

A. Thalib	: Untuk daerah Kerinci dan Pesisir Selatan
Syarif Usman	: Untuk daerah Muaralabuh dan Solok
Dahlan Ibrahim	: Untuk daerah Tanahdatar
Dahlan Jambek	: Untuk daerah Agam
Ismael Lengah	: Untuk daerah Padang dan sekitarnya

Dalam pembentukan BKR di daerah-daerah perlu disebutkan beberapa nama yang besar jasanya antara lain:

Di Payakumbuh	: Makinuddin, Nurmatias dan Anwar
Di Pariaman	: Mahyuddin Tonek
Di Padangpanjang	: Mustafa Kamal, Ramli Dahlan, Anas Karim
Di Bukittinggi	: Dahlan Jambek
Di Batusangkar	: Dahlan Ibrahim
Di Sijunjung	: Zainal Arifin

Di Padang : Ahmad Hosen, Anwar Badu, Yusuf Ali
Di Pasarusang : Kemal Mustafa

BKR walaupun namanya Badan Keamanan Rakyat, tetapi fungsi yang sesungguhnya adalah sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, meskipun tugasnya lebih dititikberatkan pada segi keamanan, karena situasi waktu itu menghendaki demikian.

Sejalan dengan pembentukan BKR, maka dibentuk pula kepolisian di Sumatra Barat. Dalam pembentukan kepolisian ini tidak banyak kesukarannya, karena kepolisian mulai dari waktu Belanda berkuasa, sampai pada waktu Jepang tetap menjalankan fungsinya sebagai badan keamanan. Di waktu Republik Indonesia telah berdiri, maka di Sumatra Barat kepolisian dibentuk oleh anggota-anggota polisi yang sudah ada itu. Ditetapkan pula yang akan menjadi kepala polisi Sumatra Barat adalah orang yang tertinggi pangkatnya, begitu juga untuk kepala polisi di daerah-daerah. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan maka ditetapkan:

R. Suleman : sebagai kepala polisi Sumatra Barat

Suleman Efendi : kepala polisi Kota Padang

Kaharuddin Dt.

Rangkayo Basa : kepala polisi Padang Luar Kota

Setelah terbentuknya kepolisian Sumatra Barat ini, maka Sang Saka Merah Putih dikibarkan di tiap kantor polisi di Sumatra Barat seperti Padang maupun di daerah-daerah lainnya. Hal ini memberikan dorongan semangat yang lebih kuat pada masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Dalam hal ini Jepang tidak dapat berbuat apa-apa selain melihatkan saja segala perbuatan dari kepolisian Republik Indonesia itu.

Setelah KNID, BKR, dan Kepolisian terbentuk tanggal 1 Oktober 1945, diangkatlah Mohd. Syafei sebagai Residen Sumatra Barat oleh KNID Sumatra Barat yang disetujui oleh Gubernur Sumatra yang waktu itu dijabat oleh Mr. Teuku Mohd. Hasan yang berkedudukan di Medan. Residen adalah merupakan puncak pimpinan di Sumatra Barat waktu itu yang merupakan daerah keresidenan sebagai bagian dari daerah provinsi Sumatra yang pusat pemerintahannya terdapat di Medan. Waktu itu seluruh Indonesia baru dibagi menjadi delapan daerah provinsi dan Sumatra merupakan salah satu provinsi.

Setelah residen ditetapkan, maka diaturlah kelengkapan

aparatus yang lain yang akan membantu residen dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Di samping itu juga jawatan-jawatan yang diperlukan diadakan untuk kelengkapan pemerintahan.

Maka dengan keputusan residen Sumatra Barat tanggal 8 Oktober 1945, No. : RI I, ditetapkan sebagai berikut:

1. Urusan Umum di kantor residen Sumatra Barat dikepalai oleh Mohammad Rusad gelar Dt. Perpatih Baringek
Urusan surat-menyurat di kantor itu dikepalai oleh:
D. Dt. Junjung
2. Kantor Kesejahteraan Minangkabau dikepalai oleh:
Ahmad Arief gelar Dt. Majo Urang
3. Pejabat Pengadilan Mr. Harun Al Rasjid
4. Pejabat Kejaksaan: Mr. Sutan Mohd. Rasjid dan A. Razak gelar Sutan Malelo
5. Pejabat Polisi: Raden Suleiman
6. Pejabat Kesehatan : Dr. Muhammad Jamil
7. Pejabat Pengajaran : A. Muluk
8. Pejabat Urusan Pekerjaan Umum: Moh.Yasin Dt. Kayo
9. Pejabat Pertanian : Mohammad Said
10. Pejabat Urusan Ternak : A.H. Endamora
11. Pejabat Urusan Kehutanan: Amir Hakim Siregar
12. Pejabat Perhitungan Uang Negara: R.M. Sanjoyo Sastroningrat
13. Pejabat Administrasi Kas Negara: Agus Sastradipura
14. Pejabat Kas Negara : Setti Heran Gelar Sutan Namora
15. Pejabat Pajak : Supardi Prawiradirejo
16. Pejabat Penggadaian : Mohammad Jakin
17. Pejabat Duane : Abu Nawas
18. Pejabat Cukai dan Perhubungan: Syamsuddin
19. Pejabat Candu Garam : Burhanuddin gelar Dt. Majo Besar
20. Pejabat Tera : M. Sutomo
21. Pejabat Pos, Kawat, Telepon, dan Radio: Sudibio
22. Pejabat Kereta api : Marah Badaruddin
23. Pejabat Umbilin : Rusli

Selanjutnya dalam surat keputusan yang sama juga ditetapkan orang-orang yang mewakili pekerjaan Kepala Luhak (kabupaten) sebagai berikut:

1. Padang dan kelilingnya : Jamalus Yahya gelar St.Pamuncak

2. Painan : Muhammad Syarif gelarBandaro
3. Kerinci Indrapura : M. Jarjis Bebastani
4. Tanahdatar : Palin Gelar St. Alamsyah
5. Agam : Muhammad Josan Gelar St. Rajo
6. Limapuluh Kota : Syahfiri gelar St. Pangeran
7. Solok : Sutan Diatas gelar Dt. Bagindo Rajo
8. Luhak Kecil Talu : Abdul Rahman gelar St. Larangan¹²⁸⁾

Untuk Padang dan Bukittinggi masing-masing diangkat seorang wali kota. Wali kota Padang adalah Dr. A. Hakim, tetapi karena tidak berada di tempat, pekerjaan sehari-hari dijalankan oleh wakilnya: St. Ahmad (di waktu Sekutu telah berada di Padang maka diangkat Mr. Abu Bakar Jaar sebagai wali kota Padang). Sedangkan di Bukittinggi ditetapkan Bermawi sebagai wali kota.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 seluruh pejabat yang telah diangkat mengucapkan sumpahnya di depan residen. Sumpah setia inilah yang mengikat tokoh-tokoh itu sebagai pejabat Republik Indonesia di Sumatra Barat, sedangkan gaji dan fasilitas lainnya belum ada pada waktu itu. Walaupun demikian semangat kerja para pejabat waktu itu sangat tinggi, karena didasari oleh kesadaran yang tinggi.

Setelah residen ditetapkan dan setelah keluarnya keputusan Residen No. RI. I. tanggal 18 Oktober 1945 tersebut di atas serta para pejabat yang telah ditunjuk menyatakan sumpah setia, maka mulailah roda pemerintahan di Sumatra Barat berjalan dengan agak teratur. Segala sesuatu mengenai masalah pemerintahan mulai disempurnakan.

Sebelum itu, pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1945, dalam sidang pleno kedua, keanggotaan KNID Sumatra Barat disempurnakan supaya dapat menampung seluruh wakil-wakil dari segala golongan dan aliran yang terdapat dalam masyarakat Sumatra Barat. Anggota KNID yang semula berjumlah 41 orang dijadikan 80 orang, sehingga seluruh golongan dan aliran dalam masyarakat dapat terwakili. Selanjutnya setelah keluar maklumat Wakil Presiden RI X/45, maka jumlah anggota KNID Sumatra Barat dijadikan 107 orang sesuai dengan isi pengumuman tersebut, sehingga golongan dan aliran yang terwakili di dalam KNID itu menjadi lebih banyak dan KNID tersebut hanya berfungsi legislatif, tidak

seperti semula di mana KNID Sumatra Barat pada mulanya berfungsi sebagai eksekutif. Karena Moh. Syafei sudah diangkat menjadi residen Sumatra Barat, maka kedudukannya sebagai ketua KNID Sumatra Barat digantikan oleh Dr. Jamil Dt. Rangkayo Tuo dengan Mr. St. Moh. Rasjid sebagai ketua I dan Mr. Nasrun sebagai ketua II. Dengan demikian masa jabatan Moh. Syafei sebagai residen Sumatra Barat berlangsung dari tanggal 1 Oktober 1945 s/d 15-11-1945 yaitu 45 hari lebih kurang. Mohd. Syafei mengundurkan diri karena alasan kesehatan yang selalu terganggu sehingga tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Beliau bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri dengan alasan tersebut di atas. Penggantinya adalah Rusad Dt. Perpatih Baringek yang sebelumnya menjabat sebagai wakil residen Sumatra Barat dan sebagai wakil residen beliaulah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari berhubung residen sendiri kurang baik kesehatannya. Sebagai orang yang telah banyak pengalaman dalam bidang pemerintahan usaha Rusad Dt. Perpatih Baringek sebagai residen Sumatra Barat kedua sesudah kemerdekaan adalah menyempurnakan pejabat-pejabat pemerintah dengan diadakannya mutasi secara besar-besaran dan sekaligus menaikkan pangkat mereka setingkat lebih tinggi. Di samping itu dipilih orang-orang yang cakap dan berwibawa untuk suatu bidang dalam pemerintahan.

Pada tanggal 23 Januari 1946 diumumkanlah pengangkatan wakil wali kota dan demang-demang di Sumatra Barat. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat orang-orang pemerintahan Sumatra Barat yang telah ada. Sebagai wakil wali kota Padang ditunjuk Aziz Khan dari pegawai Kantor Penyelidikan Padangpanjang. Sedangkan Iskandar Tejasukmana dari KNID Bukittinggi ditunjuk sebagai wakil wali kota Bukittinggi. Di samping itu beberapa demang dimutasikan, beberapa orang demang muda diangkat menjadi demang, beberapa orang anggota KNID daerah daerah diangkat jadi demang dan seorang guru juga ditunjuk sebagai demang. Jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 29 orang sebagai tenaga tambahan baru.

Sementara itu KNID Sumatra Barat juga terus disempurnakan. Pada awal Desember 1945, dalam sidang pleno keempat dibentuk. Dewan Harian dan Dewan Eksekutif KNID Sumatra Barat. Susunan Dewan Harian adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. M. Jamil

Anggota : Bakhtaruddin, Syarif Usman, Marzuki Yatim,

Darwis Thaib, Usman Keadilan, Abdullah Kamil,
Saalah St. Mangkuto

Susunan Dewan Eksekutif adalah sebagai berikut:

Ketua : Residen Sumatra Barat

Wakil : Mr. St. Moh. Rasjid

Anggota : Mr. Nasrun, Anwar St. Saidi, Abdullah¹²⁹⁾

Di samping itu juga ditunjuk 20 orang wakil yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatra dan seorang Wakil (Mr. Nasrun) untuk duduk dalam KNID Pusat di Jakarta. Banyak lagi masalah yang telah ditetapkan yang menuju kepada perbaikan dan sesuai dengan pengumuman yang datang dari Pemerintahan Pusat di Jakarta.

Dalam sidang KNID Sumatra Barat V, Dr. Jamil Dt. Rangkayo Tuo diangkat sebagai residen menggantikan Rasjad Dt. Perpatih Baringek. Dengan demikian Rusad Dt. Perpatih Baringek menjadi Residen Sumatra Barat kedua, berlangsung antara tanggal 15 November 1945 s/d 14 Maret 1946, awal sidang KNID Sumatra Barat V. Dengan diangkatnya Residen Dr. M. Jamil Dt. Rangkayo Tuo maka keanggotaan Dewan Eksekutif dan Dewan Harian mengalami perubahan sebagai berikut:

Dewan Eksekutif:

Ketua : Residen Sumatra Barat

Wakil Ketua: Mr. M. Nasrun

Anggota : Syarif Said, B.M. Tahar, Aziz Khan, Sidi Bakaruddin

Dewan Harian:

Ketua : Mr. M. Nasrun

Wakil ketua : Rustam Thaib

Anggota : H. Mahmud Yunus, Abdullah

Dewan Harian ini dilengkapi dengan bagian Kebudayaan, bagian Perjuangan Sosial dan bagian Ekonomi.

Dengan keluarnya keputusan gubernur Sumatra No. 143, tanggal 2 Juli 1946, maka daerah provinsi Sumatra dibagi dalam tiga sub provinsi yaitu:

1. Sub provinsi Sumatra Utara
2. Sub provinsi Sumatra Tengah
3. Sub provinsi Sumatra Selatan

Masing-masing sub provinsi dikepalai oleh seorang gubernur muda. Untuk sub provinsi Sumatra Tengah Dr. M. Jamil dt. Rang-

kayo Tuo diangkat sebagai gubernur muda oleh Gubernur Sumatra Mr. Teuku Moh. Hasan. Dengan demikian susunan pemerintahan di daerah sub provinsi Sumatra Tengah mengalami pula sedikit perubahan penyesuaian dan penyempurnaan.

Sejalan dengan masa penyempurnaan pemerintahan di Sumatra Barat pada awal kemerdekaan itu, masalah angkatan bersenjata juga disempurnakan. Dengan keluarnya maklumat pemerintah Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka Indonesia dibagi dalam dua komandemen, yaitu:

1. Komandemen Jawa dengan sepuluh divisi
2. Komandemen Sumatra dengan enam divisi

Sumatra Barat dan Riau termasuk divisi III yang berkedudukan di Bukittinggi dan Kolonel Dahlan Jambek sebagai komandan divisi.

Di Sumatra Barat sendiri pembentukan divisi itu baru terjadi pada bulan Januari 1946, tetapi penyempurnaan BKR menjadi TKR sudah berlangsung dalam pertengahan bulan Nopember 1945 itu juga. Dengan dileburnya BKR menjadi TKR, maka kesempatan bagi para pemuda terbuka seluas-luasnya untuk ikut membela kemerdekaan. Dengan cepat batalion-batalion di Sumatra Barat telah terbentuk, dengan susunan pimpinan sebagai berikut:

Koordinator TKR	: Ismael Lengah
Batalion Padang	: Yasid Abidin
Batalion Bukittinggi	: Dahlan Jambek
Batalion Padangpanjang	
(Batalion Merapi)	: Anas Karim
Batalion Tanahdatar	: Dahlan Ibrahim
Batalion Pariaman	
(Batalion Nan Tongga)	: Mahyuddin Tonek
Batalion Payakumbuh	: Makinuddin
Batalion Sawahlunto	
Si-junjung	: Kemal Mustafa
Batalion Simpanggaung/	
Air Haji	: Alwi St. Marajo

Menjelang terbentuknya Divisi di Sumatra Barat dan Riau, batalion-batalion yang sudah disebutkan tadi sudah dipersenjatai, yang didapat dengan bermacam-macam cara, antara lain caranya adalah:

1. Mendapat dari polisi karena senjata polisi tidak pernah dilucuti.

2. Mencuri dari gudang-gudang senjata Jepang
3. Mengadakan bujukan pada penjaga atau komandan Jepang yang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia
4. Mendapatkan dari serdadu Sekutu (India Muslim yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia)
5. Membeli dari Singapura melalui Pekanbaru
6. Dan lain-lain cara lagi

Tidak kurang terjadi bentrokan dengan Jepang di waktu mereka mengetahui adanya pencurian/perampokan senjata di gudang-gudang yang mereka kuasai, seperti yang terjadi di Payakumbuh dan Batusangkar. Di Padang dan Bukittinggi, Jepang sering tertipu oleh muslihat dengan menggunakan bujuk rayu wanita tertentu. Umumnya pencurian/perampasan pada gudang senjata Jepang terjadi di seluruh daerah Sumatra Barat dan hasilnya cukup banyak sehingga batalion-batalion dapat dipersenjatai.

Setelah komandan-komandan Batalion mengadakan rapat di Padangpanjang pada tanggal 1 Januari 1946 dibentuklah Divisi III Sumatra Barat dengan nama Divisi III Banteng. Susunannya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Panglima Divisi | : | Kolonel Dahlan Jambek berkedudukan di Bukittinggi (Mulanya di Batusangkar) |
| Resimen I | : | Letnan Kolonel Syarif Usman sebagai komandan dan berkedudukan di Bukittinggi dan terdiri dari: |
| Batalion I | : | Mayor Anas (Komandan), Padangpanjang |
| Batalion II | : | Mayor A. Halim (Aleng), Bukittinggi |
| Batalion III | : | Mayor Makinuddin H.S. Payakumbuh |
| Resimen II | : | Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim sebagai komandan yang berkedudukan di Sungaipenuh (sebelumnya di Batusangkar dan Sawahlunto), terdiri dari: |
| Batalion I | : | Mayor Mansur, Solok |
| Batalion II | : | Mayor Sofyan Ibrahim, Batusangkar |
| Batalion III | : | Mayor A. Thalib, Sungaipenuh, Kerinci |
| Resimen III | : | Ismael Lengah sebagai komandan yang berkedudukan di Solok (sebelumnya di Padang dan Lubukalung), terdiri dari: |
| Batalion I | : | Mayor Yasid Abidin, kemudian Mayor |

Ahmad Hosen, Padang

Batalion II : Mayor Mahyuddin Tonek, Pariaman
 Batalion III : Mayor Alwi St. Mangkuto, Painan
 Resimen IV : Berkedudukan di Riau.

Pada bulan April 1946 TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sesuai dengan Ketetapan Presiden RI No.2/SD tanggal 7 Januari 1946, no.4/SD tanggal 25 Januari 1946 tentang pembentukan TRI. Susunannya sebagai berikut:

Panglima Divisi III : Kolonel Dahlan Jambek
 Kepala MO/Kepala staf umum: Let.Kol. Yazid Abidin
 Kep.Staf. Organisasi dan Personalia: Let.Kol.K.Dt. Malilik Alam
 Kep. Staf Siasat : Let. Kol. Dahlan Ibrahim
 Kep. Polisi Tentara : Mayor Syafei
 Kep. Badan Penyelidik: Kapten Leon Salim
 Kep. Keuangan/Inten- : Mayor Gazali, kemudian Mayor Chaidir
 dans Hamid
 Kep. P & P : Mayor Nasrun, kemudian Mayor Syofyan Ibrahim
 Kep. Perlengkapan : Mayor Sudarsono, kemudian Kapten Suhadi
 Kepala Persenjataan : Mayor Rasin
 Kep. Kesehatan : Let. Kol. Dr. Nazaruddin
 Kep. Pendidikan/Latihan : Mayor Munir
 Kepala Penerangan : Kapten Khatib Salim, kemudian Kapten Nasrun AS

Tubuh Angkatan Bersenjata di Sumatra Barat selalu disempurnakan, sehingga formasi resimen sampai pada awal tahun 1947 adalah sebagai berikut:

Resimen I : Komandan Let. Kol. A. Halim
 Batalion I : Komandan Mayor Mustafa Kamal, kemudian diganti oleh Mayor Burhanuddin
 Batalion II : Komandan Mayor Abu Nawas
 Batalion III : Komandan Mayor Makinuddin, kemudian diganti oleh Mayor Kemal Mustafa
 Batalion IV : Komandan Kapten Mahadi
 Batalion V : Komandan Mayor Kemal Mustafa
 Resimen II : Komandan Let. Kol. A. Thalib

Batalion I	: Komandan Mayor Syofyan Nur
Batalion II	: Komandan Mayor Alwi St. Mangkuto
Batalion III	: Kapten Mansoer Samy
Resimen III	: Komandan Let. Kol. Ahmad Hosen
Batalion I	: Komandan Mayor Anwar Umar
Batalion II	: Komandan Kapten Arief Amin
Batalion III	: Komandan Kapten Zainuddin
Batalion IV	: Komandan Mayor Syuib

Pada tanggal 5 Juni 1947, TKR, dijadikan Tentara Republik Indonesia (TRI). Dengan demikian seluruh struktur TKR di daerah harus disamakan dengan pusat, misalnya sub komandemen sudah dihapuskan.

TRI, sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, persenjataannya masih sangat kurang. Sebagian besar senjatanya adalah bekas senjata Jepang yang didapat dengan bermacam-macam cara. Di samping itu, karena kebutuhan senjata sangat mendesak dalam jumlah yang lumayan, maka diusahakan memperbaiki senjata yang sudah rusak dan membuat senjata sederhana. Dalam pembuatan senjata itu sangat terkenal bengkel senjata di Kubugadang, Payakumbuh, bekas gudang, dan bengkel senjata Jepang. Di sini dibuat bermacam-macam senjata ringan seperti granat tangan, ranjau, bom, tank, dan sebagainya, di bawah pimpinan Maki-nuddin. Bengkel stasiun kereta api Padangpanjang juga dijadikan bengkel senjata. Bengkel yang terbesar terdapat di Sawahlunto, yang sangat banyak sumbangannya terhadap TNI di Sumatra Barat dalam hal persenjataan.

Demikianlah keadaan TNI di Sumatra dengan kesederhanaan persenjataannya pada tahun 1947. Kondisi senjata sama sekali tidak memadai untuk berperang, hanya cukup untuk menjaga keamanan dalam keadaan damai. Karena organisasi angkatan bersenjata selalu disempurnakan, mulai dari BKR, terus pada TKR, sampai pada periode TNI, maka sudah semenjak tahun 1946 dirasakan kekurangan akan perwira-perwira yang akan memimpinnya. Bekas perwira-perwira *Gyugun* dan prajurit *Gyugun* serta *Heiho* yang telah menjadi perwira semuanya, dirasakan sudah tidak cukup lagi sedangkan suasana pada waktu itu menghendaki para pemimpin militer yang terlatih baik dan mempunyai pengetahuan kemiliteran yang luas.

Untuk mengatasi masalah itu, maka pada tanggal 17-2-1946

dibentuklah Akademi Militer di Bukitapit, Bukittinggi. Instruktur diangkat dari bekas perwira *Gyugun* yang langsung mendapat latihan dari Jepang ditambah dengan beberapa orang pemimpin masyarakat yang ada di Sumatra Barat. Akademi Militer ini hanya berlangsung untuk dua periode. Angkatan I dipimpin oleh Kol. Ismael Lengah dengan 84 orang siswa dan angkatan II dipimpin oleh Mayor Munir Latif dengan 60 orang siswa. Dari 144 orang siswa itu, dinyatakan lulus sebanyak 62 orang (angkatan I) dan 60 orang (angkatan II) yang mengikutinya sampai selesai. Mereka inilah yang mengisi personalia pada Divisi III Banteng Sumatra Barat dengan pangkat letnan dua.

Di samping itu perkembangan ALRI di Sumatra Barat juga tidak ketinggalan. Dalam hal ini besar jasanya adalah: Nizarwan yang ditugaskan menyusun ALRI dan dibantu oleh beberapa orang seperti M. Sabirin, Wagimin, Zakir bin Hamzah, Samik Ibrahim, dan lain-lain.

Kepolisian Negara juga tidak tinggal diam dalam menyempurnakan dirinya. Beberapa orang pemuda telah berhasil mendapat pendidikan kilat sebagai perwira penghubung yang diberi pangkat pembantu letnan dua polisi. Di antara mereka itu adalah Johny Anwar, Amir, Mahmud, Syamsu Bahar, dan Nahar yang kemudian hari menjadi pemimpin polisi di Sumatra Barat.

Sementara itu partai-partai yang telah tumbuh di Sumatra Barat sebagai akibat maklumat wakil Presiden RI tanggal 3 November 1945, mulai pula membentuk barisan-barisan yang persenjatai seperti Hizbullah (Muhammadiyah), barisan Hulubalang (MTKAAM), Sabilillah (MIT), Tentara daerah Indonesia (PKI), Lasykar Muslimin Indonesia (Perti), Tentara Allah (Tarikat H. Jalaluddin) Syaifullah (PKI lokal). Semua barisan itu terbentuk antara tahun 1945–1946 oleh partai politik yang resmi waktu itu, dan pembentukannya berdasarkan instruksi dari induk organisasinya di pusat. Di samping itu ada pula barisan-barisan yang lahir secara spontan, seperti:

Angkatan Api Islam di Sawahlunto (A. Hamid)

Ekstremist Front Utara di Padang (Azhari dan kawan-kawan)

Barisan Gerilya Sumatra Barat, Padang (Ali Umar)

Barisan Sabotase Padang (Wedana Muluk)

Pembela Kedaulatan Rakyat di Tanahdatar

Api Sibonka (Angkatan Perang Indonesia Silungkang Bonjol Kamang) di Padangpanjang (Inyik Adam) dan lain-lain.

Demikianlah keadaan pemerintahan dan angkatan bersenjata serta barisan-barisan di Sumatra Barat sebelum Agresi Belanda I.

7.1.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

7.1.2.1. Sekutu di Sumatra Barat

Setelah Jepang menyerah kalah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia sebagai salah satu daerah Pasifik yang berada di bawah kekuasaan Sekutu di bawah Panglima Perang Pasifik Sekutu, Jenderal Mac Arthur, diserahkan kepada Mountbatten (Panglima Inggris) yang berkedudukan di Ceylon. Tetapi tentara Sekutu sebetulnya belum siap untuk mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Jepang. Oleh karena itu kepada Jepang diperintahkan untuk menjaga keamanan sampai Sekutu datang. Itulah sebabnya mengapa Sekutu tidak segera datang ke Indonesia setelah Jepang kalah tanggal 15-8-1945. Secara resmi Sekutu mendarat di Jakarta pada tanggal 29-9-1945 tetapi beberapa daerah Indonesia Timur telah diambil alih oleh Sekutu sebelumnya.

Pasukan Sekutu yang datang ke Indonesia adalah pasukan Inggris di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang mempunyai kekuasaan *de facto*, terhadap Indonesia. Bersama-sama tentara Inggris itu ikut pula orang-orang sipil Belanda yang dinamakan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang akan mengurus masalah administrasi di Indonesia.

Tetapi yang ditemui Sekutu di Indonesia bukan sebuah daerah yang masih berada di bawah kekuasaan Jepang, melainkan sebuah daerah yang telah merdeka lengkap dengan aparat pemerintahan yang telah diproklamasikan tanggal 17-8-1945. Dengan demikian Sekutu tidak berhadapan dengan daerah bekas jajahan Jepang, tetapi berhadapan dengan sebuah negara merdeka yang sama martabat dan haknya dengan Sekutu. Demikianlah yang dihadapi Inggris yang mewakili Sekutu di Indonesia, terutama untuk daerah Jawa, Madura, dan Sumatra. Di daerah itu sering terjadi bentrokan antara Sekutu dan Republik Indonesia, lebih-lebih Sekutu selalu diikuti oleh Belanda setiap kali mendarat.

Di Sumatra Barat sebetulnya Palang Merah Sekutu sudah diterjunkan di Padang pada tanggal 20-8-1945. Selanjutnya

pada tanggal 8-9-1945 dan 23-9-1945 juga diterjunkan beberapa orang rombongan kecil Sekutu dengan tegas memberikan penjelasan mengenai kedatangan tentara Sekutu ke Sumatra Barat. Setelah kedua belah pihak memahami kedudukan masing-masing, maka didapat persetujuan bahwa Pemerintah Republik Indonesia di Sumatra Barat akan ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas Sekutu.

Pada tanggal 13 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Telukbayur, di mana telah siap 500 orang pemuda Sumatra Barat menyamar sebagai kuli pelabuhan untuk memata-matai seluruh kegiatan Sekutu, karena mereka diikuti oleh NICA. Sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku, maka tugas Sekutu di Sumatra Barat adalah mengurus penyelesaian masalah perang dengan Jepang. Untuk itu Sekutu mendirikan pos-pos penjagaan di Telukbayur, Muara, Kompleks Rumah Sakit Tentara, Simpang Alanglawas, dan sebagainya dengan markas besarnya di kantor wali kota Padang yang sekarang ini, yang sebelumnya sudah dikosongkan oleh wali kota Padang Mr. Abu Bakar Jaar, pengganti Dr. A. Hakim. Sekutu berjanji tidak akan mencampuri urusan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatra Barat.

7.1.2.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan terhadap Sekutu/NICA

Oleh karena NICA selalu mengiringi kedatangan Sekutu dan setelah orang-orang Belanda yang ditawan Jepang dibebaskan, maka banyak orang Belanda berkeliaran di Sumatra Barat dan mereka mulai mencoba meminta bekas-bekas kantor mereka yang dahulu. Hal ini akhirnya menimbulkan ketegangan antara pemuda-pemuda dengan orang-orang Belanda itu yang sering dilanjutkan dengan pertempuran.

Pada akhir Oktober 1945, setelah datang pemuda dari Jawa yang menceritakan sepak terjang Sekutu di sana, maka para pemuda Sumatra Barat tidak dapat menahan kesabaran lagi dan mulai mengadakan aksi yang diawali dengan mencoret rumah-rumah dan gedung-gedung dengan kata-kata yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat, antara lain: Sekali merdeka, tetap merdeka, Merdeka atau mati, Usir imperialisme, dan lain-lain.

Hal ini menimbulkan kemarahan Sekutu, sehingga mereka mengobrak-abrik markas pemuda di Padang, percetakan, bioskop, dan lain-lain tempat kegiatan pemuda-pemuda Republik Indonesia di Sumatra Barat. Akibatnya beberapa pertempuran tak dapat dielakkan lagi, seperti di Lubuksikaping, Bukittinggi, Lubukalung, dan sebagainya. Dalam pertempuran ini pemuda Indonesia sering dibantu oleh orang-orang Jepang yang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia. Banyak di antara orang Jepang yang ikut gugur di samping pemuda-pemuda Indonesia.

Puncak pertentangan Sekutu dengan para pemuda di Sumatra Barat adalah sewaktu pada malam 27 Nopember 1945 terjadi pengepungan terhadap sebuah gedung sekolah yang dirampas oleh Sekutu. Semua anggota Sekutu yang ada di dalam gedung itu tewas semuanya. Kemudian Mayor Anderson, nona Halligen seorang perwira Sekutu, dan seorang anggota Palang Merah, terbunuh pada tanggal 5 Desember 1945.

Pemerintah Republik Indonesia di Sumatra Barat dide sak oleh Sekutu untuk mengatasi kekacauan itu Pemerintah berusaha sedapatnya mengatasi semua insiden sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang ada. Tetapi kebencian rakyat tidak dapat dibendung, sehingga Sekutu tidak berani ke luar kota karena tidak aman.

Setelah markas Resimen III dan batalion Yazid Abidin dipaksa pindah ke Lubukalung oleh Sekutu, mereka menganggap bahwa keadaan akan menjadi aman. Pada permulaan tahun 1946 kaum pejuang yang terdiri dari para pemuda, banyak yang masuk kota Padang mengacaukan kedudukan Sekutu, merampas senjata dan lain-lain. Sekutu menuduh pemerintah Republik Indonesia, terutama polisi yang melakukan hal itu dan itulah sebabnya Sekutu melakukan tindakan balasan terhadap mereka.

Pada tanggal 28 Juni 1946 pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Negara dalam keadaan bahaya dan dibentuklah Dewan Pertahanan Negara. Pada tanggal 6 Juli 1946 di Sumatra Barat dibentuk pula Dewan Pertahanan Daerah (DPD) yang diketuai oleh residen Sumatra Barat, wakilnya komando Divisi III Banteng dan anggotanya dua orang dari Eksekutif, tiga orang dari wakil organisasi. Dengan

dibentuknya DPD Sumatra Barat, maka TRI dan barisan-barisan melakukan serangan gabungan ke markas-markas Sekutu/NICA di Padang selama tiga hari, pada tanggal 7, 8, 9, Juli 1946. Serangan Gabungan itu menyebabkan Sekutu mengeluarkan peraturan jam malam untuk kota Padang. Peraturan ini ditentang oleh Johny Anwar yang menjabat Kepala Polisi Padang waktu itu. Sementara itu tanggal 15 Juli 1945 Sekutu mengumumkan bahwa administrasi tentara di Jawa dan Sumatra sudah diserahkan pada Belanda.

Di Sumatra Barat sendiri terjadi perubahan susunan pemerintahan. Dr. M. Jamil Dt. Rangkayo Tuo diangkat menjadi gubernur muda Sumatra Tengah, sedangkan Mr. St. Moh Rasjid diangkat menjadi residen Sumatra Barat dan Marzuki Yatim menjadi wakil ketua KNI Sumatra Barat. Penggantian pimpinan pemerintahan ini disambut oleh rakyat dengan rasa gembira, dengan harapan agar perjuangan menentang Sekutu/NICA makin ditingkatkan, karena tindakan mereka makin tidak menghormati pemerintah Republik Indonesia.

Karena tindakan Sekutu/NICA makin menghebat dan meningkat, maka kota Padang dikosongkan dari badan-badan pemerintahan dan orang-orang dewasa yang diungsikan ke luar kota seperti Lubukalung dan sebagainya. Sedangkan residen dengan stafnya berkedudukan di Bukittinggi, sehingga yang tinggal hanya beberapa orang untuk mengawasi gerak-gerik Sekutu/NICA. Dengan demikian kedudukan Sekutu/NICA di Padang tidak aman lagi dari gangguan para pejuang Sumatra Barat.

Setelah tugas Sekutu melucuti dan memulangkan tawanan perang Jepang selesai, maka awal September 1946 Sekutu mengumumkan akan menarik diri dan akan digantikan oleh Belanda yang hampir selama satu tahun dibantu oleh Sekutu memperluas daerahnya di kota Padang dan sekitarnya.

7.1.2.3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan terhadap Belanda

Pada tanggal 28 Nopember 1946 seluruh kekuasaan Sekutu di Padang, secara resmi diserahkan kepada Belanda. Pada mulanya Belanda hanya bertindak sebagai pengganti Sekutu di daerah yang didudukinya. Tetapi beberapa hari

saja sesudah itu, Belanda sudah menjalankan aksi kolonialnya dengan tujuan hendak memulihkan kekuasaannya kembali. Belanda menduduki tempat-tempat yang strategis di pusat kota Padang dan menyergap markas BKR pada dini hari yang menyebabkan komandannya gugur dan 99 anggotanya tertangkap. Akibat peristiwa ini, maka para pejuang Sumatra Barat yang dipelopori oleh TNI bersama barisan-barisan rakyat melakukan serangan terbuka ke kota Padang dari segi tiga front, yaitu front utara front timur, dan front selatan kota Padang. Akibat seringnya terjadi pertempuran di kota Padang, maka rakyat berduyun-duyun mengungsi ke daerah pedalaman Sumatra Barat yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Tetapi suasana tegang di Sumatra Barat itu untuk sementara dapat ditenangkan dengan datangnya berita gencatan senjata dari Pusat.

Di Jakarta, persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1946. Untuk menjelaskan maksud persetujuan itu Pemerintah Pusat mengirimkan tiga orang ke Sumatra Barat, di mana pertemuan antara kedua belah pihak terjadi pada tanggal 11 Desember 1946.

Dalam menerima penjelasan Persetujuan Linggarjati Sumatra Barat diwakili oleh:

Mr. Amir Syarifuddin	(ketua)	dari pusat
Dr. A.K. Gani		
Let. Jenderal Urip Sumoharjo	(anggota)	
Mr. Moh. Rasjid	(anggota)	
Let. Kol. A. Halim	(anggota)	
Marzuki Yatim	(anggota)	
Kapten A. Salim Yakub	(anggota)	
Darwis	(anggota)	
Mr. Nazaruddin	(anggota)	
Kapten Nasrun AS.	peninjau	

Pihak Belanda diwakili oleh:

Dr. Kuts	(ketua)
Jenderal Mayor Buurman van Vreeden	(anggota)
Kolonel Sleyter	(anggota)
Mayor Schotsborg	(anggota)
Kapten Hendricks	(anggota)

Kapten Tiden	(anggota)
Letnan Vreenedal	(anggota)
De Boer	(anggota)
Waarnar	(anggota)

Isi yang terpenting dari persetujuan itu adalah pengakuan de facto atas Indonesia (Jawa, Madura, Sumatra) oleh Belanda dan gencatan senjata. Gencatan senjata ini tidak dapat bertahan lama, karena dalam pelaksanaannya Belanda menolak pengawasan keamanan terhadap daerah-daerah yang sudah direbut Belanda sesudah tanggal 14 Oktober 1946.

Tanggal 28 Desember 1946 Belanda mengadakan pengeledahan terhadap kereta api yang akan berangkat. Akhirnya komandan TNI Sumatra Barat, Ismael Lengah mengeluarkan pengumuman pembatalan gencatan senjata, karena tindakan Belanda selalu saja melanggar persetujuan.

Pada awal tahun 1947 dimulai kembali pertempuran hebat antara Belanda dengan rakyat Sumatra Barat dengan perbandingan senjata yang tidak seimbang. Belanda mempergunakan pesawat udara (mustang), mortir, houwitzer, carier (sejenis panser). Sedangkan pihak Sumatra Barat hanya mempergunakan senjata rampasan Jepang dan Belanda, bom dan granat buatan sendiri, senapan balansan dan bambu runcing. Walaupun demikian semangat rakyat sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mempergunakan taktik bumi hangus sebagai senjata terakhir. Rakyat yang tak dapat ikut bertempur seperti orang tua dan anak-anak diungsikan ke tempat yang aman, sedangkan yang masih kuat ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Perlawanan yang gigih dari rakyat Sumatra Barat, menyebabkan Belanda terpaksa membuka perundingan kembali, dengan Indonesia. Demikianlah terjadi perundingan pada bulan April — Maret 1947.

Pihak Sumatra Barat diwakili oleh:

Mr. St. Moh. Rasjid (residen)
 Ismael Lengah (komandan Divisi IX Banteng)
 Letkol A. Halim
 Mayor Mansyur
 Iskandar Tejasukmana
 Bagindo Aziz Khan (Wali kota Padang)

A. Gafar Jambek	(peninjau)
Bakharuddin HS	(peninjau)
Dt. Majo Indo	(peninjau)
Marah Alif	(peninjau)
Nursuud Akhir	(peninjau)
Johny Anwar	(peninjau) (Kepala Polisi Padang)
Umar Alamsyah	(peninjau)

Sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh:

Dr. Van Straten
 Kolonel J.W. Sleyters
 Let. Kol. Schotsborg
 Mayor Donk
 Kapten Van Buuren
 Texter
 Lts. Beldingh
 Glambits
 Belgen
 Schepers
 Smith
 Ir Pronk

Banyak yang disepakati dalam perundingan itu, tetapi sementara itu letusan senjata di garis demarkasi masih tetap terdengar. Keputusan yang dicapai menetapkan jalur selebar 2 km, sebagai daerah tidak bertuan (bebas dari militer) antara Belanda dan Sumatra Barat. Tetapi kenyataannya di daerah itu pertempuran selalu berkecamuk.

Demikianlah keadaan di Sumatra Barat menjelang pe - cahnya Agresi I, di mana keadaan umumnya berada antara perang dan perundingan. Kalau Belanda terdesak, mereka minta berunding, dan kalau Sumatra Barat sedang lengah me - reka menyerang. Tidak jarang terjadi dalam perundingan, Belanda menangkap wakil-wakil rakyat Sumatra Barat yang ikut berunding, seperti yang terjadi terhadap diri Mr.St.Moh. Rasjid (residen), Mr. Harun Al Rasjid (ketua Pengadilan Tinggi), Johny Anwar (kepala polisi Padang). Dalam keadaan yang demikian, kekejaman Belanda di Sumatra Barat makin meningkat, sampai-sampai tidak menghormati pejabat-pejabat pemerintah Republik Indonesia di Sumatra Barat lagi yang telah mereka akui de facto sebelumnya. Demikian pada tang-

gal 19 Juli 1947, Bagindo Aziz Khan, wali kota Padang, batu penghalang kekuasaan Belanda di Sumatra Barat (Padang) dibunuh dengan cara yang kejam.

Sebelum membicarakan peristiwa Agresi I Belanda di Sumatra Barat, terlebih dahulu dibicarakan dua kejadian yang mempengaruhi banyak sedikitnya kemunduran semangat perjuangan rakyat Sumatra Barat. Pertama adalah dengan diresmikan berdirinya *volksfront* (front rakyat) pada tanggal 14 Maret 1946 dalam sidang KNI Sumatra Barat *volksfront*, di Sumatra Barat diprakarsai oleh KNI Sumatra Barat, bukan oleh partai-partai politik seperti di Jawa. *Volksfront* seringkali bertindak sangat radikal dan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah Daerah Sumatra Barat yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kegoncangan antara pemerintah dengan *volksfront* sehingga membingungkan rakyat. Tindakan yang dilakukan *volksfront* lebih banyak merugikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan daripada menguntungkan. Karena itu pada akhirnya, tanggal 24 April 1946, *volksfront*, yang baru berumur 40 hari itu dibubarkan dan para pemimpinnya ditangkap.

Kedua adalah Peristiwa 3 Maret 1947 sesuai dengan peribahasa "Sebanyak orang yang sayang sebanyak itu pula orang yang benci", juga terjadi di daerah Sumatra Barat sewaktu menghadapi saat-saat gawat dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada golongan yang merasa tidak puas dengan jalan perjuangan di Sumatra Barat yang menurut mereka berjalan lambat. Rasa tidak puas ini mereka salurkan dalam bentuk organisasi "Pemberantasan Anti Kemerdekaan Indonesia (PAKI), yang melancarkan aksi-aksi yang mendiskreditkan pemerintah dan TRI di mata rakyat. Sebagian barisan Hisbullah dan Sabilillah dapat mereka rangkul.

Sewaktu para pemimpin Sumatra Barat menghadiri rapat KNIP di Malang, PAKI mengambil kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan (kup) Sumatra Barat. Beberapa orang pemimpin yang tinggal di Sumatra Barat ditangkap dengan surat perintah palsu. Tetapi berkat kesigapan dan ketegasan pemerintah Sumatra Barat yang didampingi oleh Komandan Divisi III Banteng, kup itu dapat digagalkan dan beberapa pemimpinnya ditangkap serta barisan Hizbullah dan Sabilillah

dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam TRI. Beberapa orang pemimpinnya adalah Saalah J.St. Mangkuto, N. Dt. Rajo Mangkuto, Bachtiar Yunus, Syamsuddin Ahmad, dan lain-lain.

Peristiwa 3 Maret menyebabkan Sumatra Barat harus melakukan konsolidasi kekuatan Republik Indonesia di Sumatra Barat kembali. Maka pada bulan Juli 1947 dibentuklah Front Pertahanan Nasional (FPN) Sumatra Barat, yang anggotanya terdiri dari wakil seluruh golongan dan aliran dalam masyarakat.

Sekretariat FPN adalah sebagai berikut:

Ketua	: HAMKA
Sekretaris	: Khatib Sulaiman
Kepala Bag. Pemuda	: Karim Halim
Kepala Bag. Wanita	: Rasuna Said
Kepala Bag. Barisan	: Udin

7.1.2.4. Agresi Belanda I

Antara 21 Juli 1947 – 4 Agustus 1947 Belanda melancarkan serangan besar-besaran di seluruh daerah Republik Indonesia dengan senjata yang serba lengkap. Dalam waktu dua minggu Belanda hampir dapat menguasai seluruh kota besar di Republik Indonesia.

Demikian juga halnya di Sumatra Barat, Belanda dengan serentak melakukan serangan ke segala arah dari kota Padang. Ke utara, pada tanggal 4 Agustus 1947, Lubukalung dimortir dan diduduki dengan dijaga oleh dua kompi. Pertahanan TRI mundur ke daerah Tapakis (sebelah utara Lubukalung) yang dipertahankan bersama barisan-barisan dan rakyat. Ke timur Belanda sudah menduduki Indarung dan daerah sekitarnya, tetapi untuk melewati daerah itu lebih ke timur lagi, mereka mendapat perlawanan dari TRI yang berpusat di Airsirah. Ke selatan Belanda sampai ke Teluk Kabung dan Sungaipisang.

Walaupun kuatnya serangan serentak Belanda itu, tetapi mereka hanya dapat menguasai/menduduki daerah Padang Luar Kota lebih sedikit, karena mereka mendapat perlawanan yang hebat dari TRI yang berjuang bersama-sama rakyat. Senjata yang paling ampuh yang dipergunakan TRI adalah perang gerilya. Sewaktu Belanda maju, mereka menghindar,

sewaktu kembali sudah disiapkan menghancurkan seluruh kekuatan Belanda di sana.

Serangan Belanda secara besar-besaran juga ikut mengejutkan dunia internasional, sehingga PBB terpaksa bersidang untuk ikut membicarakannya dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk mengawasi gencatan senjata yang diserukan PBB.

Demikianlah pada tanggal 8 Desember 1947, atas prakarsa KTN, perundingan dilakukan di atas kapal *Renville*, kepunyaan Amerika Serikat yang menjadi salah satu anggota KTN.

Di Sumatra Barat Persetujuan Renville itu diterima dengan perasaan kurang senang oleh sebagian pemimpin dan rakyat umum, karena mereka menganggap bahwa Indonesia berada di pihak yang kalah menurut isi persetujuan itu. Banyak daerah-daerah Republik yang harus diserahkan pada Belanda sebagai akibat persetujuan itu. Untuk mengatasi rasa tidak puas itu, Hatta, bersama dengan beberapa orang pemimpin lainnya datang ke Sumatra Barat untuk menjelaskan lebih lanjut, sehingga dengan demikian keadaan agak sedikit tenang.

Di dalam masa damai pemerintah daerah Sumatra Barat tidak tinggal diam dalam usaha menggalang persatuan. Karena FPN dirasa tidak berfungsi lagi, sebab terlalu banyak perbedaan ideologi di dalamnya, maka dibentuk badan baru dengan nama Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD), sedangkan FPN digabungkan ke dalamnya.

MPRD juga dibentuk di kabupaten dan nagari dengan Badan Pertahanan Nagari dan Kota (BPNK) yang berada di bawah FPN dimasukkan ke dalamnya. Tugas MPRD adalah memperkuat persatuan di kalangan rakyat, memperkuat semangat perjuangan pengorbanan rakyat, memberikan latihan penerangan dalam usaha-usaha memperkuat pertahanan. Di samping itu rasionalisasi dan reorganisasi di bidang ketentaraan dilakukan untuk mempertinggi mutu dan kemampuan tentara.

Di bidang pemerintahan sipil juga dilaksanakan perbaikan-perbaikan. Pada bulan Januari 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Barat terbentuk yang selama ini tugasnya dijelaskan oleh KNID. DPRD ini beranggotakan 130

orang yang terdiri dari:

- 38 orang wakil partai-partai
- 78 orang wakil kewedanan-kewedanan
- 14 orang wakil angkatan

Pertengahan tahun 1948, Mr.M.Nasrun dilantik menjadi gubernur Sumatra Tengah sebagai pelaksanaan U.U.No.10/1948, tanggal 15 April 1948. Dalam U.U. itu ditetapkan Sumatra dibagi atas tiga provinsi sebagai daerah otonom yaitu:

- Provinsi Sumatra Utara
- Provinsi Sumatra Tengah
- Provinsi Sumatra Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Tengah (DPRST) beranggotakan 29 orang dengan perincian sebagai berikut:

- 5 orang dari Riau
- 4 orang dari Jambi
- 20 orang di Sumatra Barat

Anggota-anggota DPRST dari Sumatra Barat adalah sebagai berikut:

1. H. Ilyas Jacub (Masyumi) Ketua
2. Marzuki Yatim (Masyumi)
3. Saaduddin Jambek (tak berpartai)
4. A. Gafar Jambek (tak berpartai)
5. St. Mohd. Yunus (tak berpartai)
6. Dr. Rahim Usman (partai sosialis)
7. Tan Tuah Bagindo Ratu (PBI)
8. Abdullah (Murba)
9. Bakhtaruddin (PKI)
10. S.J. St. Mangkuto (Masyumi)
11. Anwar St. Saidi (tak berpartai)
12. Usman Keadilan (PKI)
13. Damanhuri Jamil (PSII)
14. H. Sirajuddin Abbas (Perti)
15. R.S. Sunyapraja (PKI)
16. Dt. Simarajo (MTKAAM)
17. Zainal Zainul (Pemuda)
18. Khatib Sulaiman (PSI)
19. Ahmad Syuib (Murba)
20. Sultani St. Malako (Murba)

7.1.2.5. Agresi Belanda II

Dengan diperkuatnya pemerintahan sipil dan militer sesudah Agresi Belanda I di Sumatra Barat, keadaan pada umumnya tidak menjadi baik karena terdapatnya perbedaan penafsiran pelaksanaan Persetujuan Renville antara Belanda dengan Republik Indonesia. Di satu pihak Belanda selalu berusaha memperkuat dan memperluas daerah yang didudukinya, serta tidak mematuhi pasal-pasal dalam persetujuan itu. Di pihak lain pemerintah Republik Indonesia berusaha sedapat mungkin menjalankan isi Persetujuan Renville. Banyak wali nagari yang diangkat Belanda, di daerah kekuasaannya bermuka dua; lahirnya mereka tunduk pada Belanda, hakekatnya mereka adalah orang Republik tulen, sehingga banyak rencana Belanda yang bocor ke daerah Republik dan hal ini mengakibatkan Belanda menangkap setiap orang yang dicurigainya.

Di samping itu tinggalnya menteri Kemakmuran Republik Indonesia (Mr. Syafruddin Prawiranegara) di Sumatra Barat dan kunjungan wakil Presiden/Perdana Menteri Mohd. Hatta ke Sumatra Barat, serta intruksi Pemerintah Pusat (Desember 1948) agar Sumatra Barat siap siaga dan waspada menghadapi kemungkinan yang akan timbul dari pihak Belanda, menyebabkan pemerintahan di Sumatra Barat beserta rakyatnya berada dalam keadaan siap siaga dan waspada. Lebih-lebih laporan-laporan yang diterima dari mata-mata Republik di daerah Belanda menunjukkan bahwa Belanda akan segera melakukan serangan (perang) kembali.

Agresi Belanda II di Sumatra Barat dimulai dengan penyebaran pamflet oleh Belanda di kota Bukittinggi (pusat pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra Barat waktu itu) pada malam tanggal 18-12-1948 yang berisikan bahwa Persetujuan Renville tidak berlaku lagi. Paginya tanggal 19-12-1948 Belanda dari Padang melancarkan serangan besar-besaran ke front utara, timur, dan selatan.

Gerakan Belanda ini dengan cepat dapat merebut kota-kota penting di Sumatra Barat melalui perlawanan yang gigih dari rakyat Sumatra Barat. Tetapi karena persenjataan dan pengalaman perang tidak seimbang, dalam waktu singkat beberapa daerah penting sudah diduduki Belanda yang sebelum-

nya sudah dikosongkan dari pemerintahan sipil dan militer.

Tanggal 19 Desember 1948 itu, seluruh batas garis demarkasi Renville sudah dilalui Belanda. Di front utara pada tanggal 24 Desember 1948 Belanda sudah menduduki daerah Payakumbuh. Sebelumnya secara berturut-turut telah diduduki daerah Sicincin, Kayutanam, Pariaman, Padangpanjang, Bukittinggi, Baso, dan lain-lainnya. Di front timur diduduki pula Solok (20-12-1948), Sawahlunto (1-1-1949), Alahanpanjang (13-1-1949) dan 24-1-1949 hampir seluruh daerah penting di front timur sudah diduduki Belanda. Di front selatan tanggal 6 Januari 1949 Belanda mulai menyerang Painan dan tanggal 25-1-1949, Sungaipenuh dan daerah sekitar front selatan sudah diduduki Belanda.

Dengan cepat, selama empat bulan, Belanda sudah dapat menduduki hampir seluruh daerah penting di Sumatra Barat melalui korban rakyat yang tidak sedikit. Dalam hal ini kelebihan Belanda terletak pada keunggulan perseniataannya dan taktik perang.

Walaupun hampir seluruh daerah Sumatra Barat telah diduduki Belanda, tetapi pada setiap daerah pendudukan itu Belanda tidak aman, karena mereka hanya menguasai di waktu siang hari, sedangkan pada malam hari kekuasaan sebetulnya berada dalam tangan para gerilyawan dan kaum pejuang Sumatra Barat.

7.1.2.6. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Sewaktu Belanda menduduki Bukittinggi, pusat pemerintahan Sumatra Barat pada tanggal 22-12-1948, kota tersebut sudah dikosongkan dari pemerintah sipil dan militer serta rakyat sudah banyak yang mengungsi ke daerah pedalaman. Pada tanggal 19-12-1948 rombongan Mr. Syafruddin Prawiranegara sudah meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban (Payakumbuh). Tanggal 22-12-1948 menyusul rombongan Mr. St. Mohd. Rasjid.

Setelah semua tokoh berkumpul diputuskan untuk membentuk "Pemerintahan Darurat Republik Indonesia" (PDRI), yang sebelumnya tanggal 19-12-1949, sewaktu Belanda menyerang Jogjakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Soekarno telah menyerahkan mandatnya ke-

pada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra. PDRI secara resmi diumumkan pada tanggal 22-12-1948 di Halaban.

Susunan PDRI adalah sebagai berikut:

1. Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI, merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri.
2. Mr. Teuku Moh. Hasan, sebagai wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri PPK, dan Menteri Agama.
3. Mr. St. Mohd. Rasjid, sebagai Menteri Keamanan, Menteri Sosial, dan Menteri Pembangunan Pemuda.
4. Mr. Lukman Hakim, sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman.
5. Ir. M. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan.
6. Ir. Indracaya sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran.
7. Marjono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.

Kabinet PDRI ditetapkan sebagai Kabinet Perang. Selanjutnya ditetapkan:

Mr. Susanto Tirtoprojo

I.Y. Kasimo

K.H. Masykur

Supeno

R.P. Suroso

Jenderal Sudirman

Pimpinan Komisariat PDRI
di Jawa

Kolonel A.H. Nasution

Kolonel Hidayat

Kolonel Nazir

Kolonel H. Suyono

Kombes Pol. Umar Said

— tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang

— Panglima Tentara Teritorial Jawa

— Panglima Sumatra

— Panglima Angkatan Laut

— Panglima Angkatan Udara

— Kepala Polisi Negara

Untuk meningkatkan perjuangan maka ditunjuk:

Tengku Daud Beureuh — Gub. Militer Aceh, Langkat, dan

	tanah Karo
Dr. F.L. Tobing	— Gub. Militer Sumatra Timur dan Tapanuli
R.M. Utoyo	— Gub. Militer Riau
Dr. A.K. Gani	— Gub. Militer Sumatra Selatan dan Jambi
Mr. S.M. Amin	— Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara
Mr. M. Nasrun	— Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Tengah
Dr. M. Isa	— Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Selatan.

Tanggal 23 Januari 1949, Maramis yang sedang berada di New Delhi diangkat menjadi Menteri Keuangan. Selanjutnya oleh Mr. St. Mohd. Rasjid sebagai Gubernur Militer Sumatra Barat bersama wakilnya (Komandan tentara sub Teritorium) ditetapkan pejabat-pejabat: Bupati Militer, Wedana Militer, Camat Militer, dan Wali Perang untuk seluruh Sumatra Barat berikut dengan tugas-tugasnya.

Dengan terbentuknya PDRI dan Pemerintah Militer di Sumatra Barat, serta seluruh aparatnya maka semangat perjuangan rakyat Sumatra Barat bangkit kembali yang terpukul oleh serangan serentak dan mendadak oleh Belanda pada minggu-minggu terakhir tahun 1948 dan awal tahun 1949.

Karena kesukaran perhubungan, setelah ditetapkannya pejabat-pejabat tersebut, mereka merupakan pejabat mobil yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain sambil mengatur siasat dan memimpin perang. Secara spontan rakyat mengerahkan tenaganya untuk membantu perjuangan, ada yang masuk barisan mobilisasi, ada yang menjadi kurir, ada yang menjadi kaum pejuang, ada yang bekerja menyiapkan perbekalan, dan sebagian besar ikut bergerilya di front membantu kesatuan-kesatuan tentara. Boleh dikatakan hanya orang yang sangat tua yang tidak ikut berjuang. Hal inilah yang menyebabkan Belanda pada umumnya tidak dapat menguasai daerah Sumatra Barat secara keseluruhan. Di waktu siang mereka merupakan penduduk biasa yang tidak tahu menahu dengan urusan perang, tetapi di waktu malam mereka merupakan pejuang kemerdekaan yang ulet dan gigih. Karena itu

Belanda hanya dapat bergerak di sekitar pos penjagaannya sambil menghujani daerah-daerah sekitarnya dengan tembakan membabi buta. Keluar dari pos-pos tersebut keadaan mereka tidak aman sama sekali. Hampir pada setiap jalan besar yang dapat dilewati kendaraan bermotor dilintangkan pohon kelapa antara jarak 10 m dan seluruh jembatan penting di luar kota sudah dihancurkan. Lahirnya, kelihatan, Belanda menguasai daerah Sumatra Barat, tetapi hakekatnya tetap dikuasai oleh rakyat Sumatra Barat bersama pemerintah militernya.

Banyak terjadi korban jiwa dan harta benda serta peristiwa berdarah di waktu itu. Di antara peristiwa yang sangat menyedihkan adalah: Peristiwa Situjuh (15-1-1949) di mana 69 orang pemimpin tewas, di antaranya Khatib Sulaiman (MPRD), Arisun St. Alamsyah (Bupati Militer), Munir Latif (Let. Kol) dan lain-lain. Kemudian terjadi peristiwa Pembunuhan 30 orang pejuang di jembatan Ratapan Ibu, (Payakumbuh) yang dikenal dengan nama "Peristiwa Jembatan Ratapan Ibu". Sementara itu korban yang tidak diketahui jumlahnya terdapat di Padang Pariaman, Padangpanjang, Padang luar Kota, Alahanpanjang, Muaralabuh, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Batusangkar, Lintaubuo, Telukkabung, Pesisir Selatan/Kerinci, dan sebagainya.

Spontanitas rakyat dalam perjuangan juga terlihat dalam masalah biaya perang. Tanggal 28-12-1948, dengan instruksi DPD Sumatra Barat No. 2/DPD/P-Ist, ditetapkan iuran perang 10% dari penghasilan dalam bentuk natura. Tetapi sebagian besar rakyat tidak memberikan 10% saja, bahkan apa yang ada mereka serahkan untuk keperluan perang. Pada beberapa tempat, di tengah-tengah rumah kosong telah tersedia makanan dalam bentuk ubi rebus, jagung rebus, dan lain-lain yang telah disiapkan penghuninya di waktu malam, sedangkan siang hari mereka pergi mengungsi. Makanan itu disediakan untuk para pejuang yang lewat ke sana. Ada pula pada beberapa nagari apabila tentara atau para pejuang lewat, di waktu pergi atau pulang mereka sudah disediakan nasi bungkus atau buah-buahan. Kalau mereka baru saja makan, maka nasi bungkus atau buah-buahan itu disuruh bawa saja. Dengan demikian ke mana pun tentara, para pejuang, atau para pe-

mimpin sipil pergi, mereka tidak akan mendapat kesukaran makanan, karena di mana-mana rakyat telah menyediakannya. Apalagi pada tempat-tempat tertentu sudah disediakan dapur umum, yaitu tempat khusus yang menyediakan makanan bagi tentara dan pejuang lainnya.

Untuk pembiayaan perang lainnya seperti untuk membeli senjata dan alat-alat perang dipergunakan candu, hadiah pemerintah India kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sewaktu kedudukan Yogyakarta makin terjepit, sebagian candu itu dibawa ke Bukittinggi untuk membiayai perang selanjutnya. Sayangnya hanya sebagian dari candu yang berjumlah empat ton yang dapat dimanfaatkan, selebihnya hilang tidak menentu.

Kemudian pada tanggal 7-5-1949 terjadi persetujuan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda untuk mengadakan gencatan senjata. Sementara itu akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, negeri Belanda. Persetujuan ini terkenal dengan Persetujuan Roem-Royen, karena delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Di Sumatra Barat persetujuan gencatan senjata ini baru dapat dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1949, setelah berulang kali utusan dari Pemerintah Pusat mengunjungi PDRI di Sumatra Barat.

Bagaimanapun proses terjadinya persetujuan Roem-Royen itu, PDRI yang selama tujuh bulan bersama-sama berjuang dengan rakyat Sumatra Barat, tetap mematuhi untuk menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia seluruhnya.

Tetapi secara efektif gencatan senjata baru terlaksana pada tanggal 13-8-1949 di seluruh Sumatra Barat setelah tanggal 3 Agustus 1949 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak di seluruh Indonesia. Dengan demikian perayaan ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1949 dapat dirayakan semeriah-meriahnya. Di dalam pidato 17 Agustus 1949, Gubernur Militer Mr. St. Mohd. Rasjid mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Sumatra Barat yang telah berjuang dengan gigih mempertahankan kemerdekaan dan membantu PDRI.

7.1.3. Sumatra Barat setelah Pengakuan Kedaulatan

Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag berakhir tanggal 29 Oktober 1949 dengan isi pokoknya adalah Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia dengan tidak bersyarat, di mana kedaulatan diserahkan paling lambat pada tanggal 17 Desember 1949.

Sementara itu di Sumatra Barat terdapat kesibukan-kesibukan, di mana Gubernur Militer Mr. St. Mohd. Rasjid dipanggil ke Jakarta untuk ikut ke KMB (akhirnya tak jadi pergi karena anaknya sakit), beliau diwakili oleh Residen Hamdani. Karena Mr. St. Mohd. Rasjid akhirnya berdomisili di Jakarta, maka Mr. Nasrun diangkat jadi Gubernur Militer Sumatra Barat sejak Oktober 1949.

Mr. Nasrunlah yang merundingkan bagaimana sebaiknya penyerahan kekuasaan di Sumatra Barat akan diurus dengan Kolonel Van Erp. Disetujui sebelum Belanda meninggalkan Sumatra Barat, wakil-wakil rakyat Sumatra Barat sudah masuk kota untuk mengadakan persiapan supaya jangan terjadi kekosongan kalau Belanda tiba-tiba berangkat. Tanggal 14-12-1949 pemulihan kota Bukittinggi dilaksanakan, tanggal 12-12-1949 pemulihan kota Payakumbuh, dan tanggal 16-12-1949 pemulihan di Sawahlunto/Sijunjung. Selanjutnya pada bulan yang sama di seluruh daerah Sumatra Barat telah dilakukan timbang terima antara Belanda dengan Penguasa setempat. Tanggal 27-12-1949 Gubernur Militer Sumatra Tengah mengambil alih seluruh kekuasaan dari Belanda. Pada tanggal 1 Pebruari 1950 resmilah berdiri Pemerintahan Sipil di Sumatra Tengah kembali dan Pemerintahan Militer Sumatra Barat sudah dihapuskan secara resmi bulan Desember 1949 dan Sumatra Barat dimasukkan ke dalam wilayah Sumatra Tengah.

Semenjak pemulihan kekuasaan dilaksanakan di seluruh Indonesia, maka di Sumatra Barat mulailah diatur kehidupan kembali sesuai dengan kehidupan suatu bangsa merdeka, yang sudah diinjak-injak Belanda selama Agresi I dan Agresi II.

Setelah gubernur Sumatra Tengah dan DPRST (Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Tengah) aktif kembali, rupanya antara gubernur Mr. M. Nasrun dengan DPRST tidak terdapat kerja sama yang baik. Setelah diadakan penyelesaian dengan

Pemerintah Pusat maka diambil kebijaksanaan, yaitu pada tanggal 20-10-1950 Mr. M. Nasrun ditarik ke pusat dan diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri. Sebagai gantinya diangkat Ruslan Mulyoharjo sebagai pejabat gubernur.

Tetapi DPRST tidak dapat menerima kebijaksanaan Pemerintah Pusat ini, karenanya antara pejabat gubernur dengan DPD tidak dapat dilakukan serah terima. Karena hal ini oleh Pemerintah Pusat dianggap pembangkangan, maka tanggal 5-1-1951 DPRST dibekukan.

Selama masa gubernur Ruslan Mulyoharjo yang berjalan kira-kira enam tahun (20-10-1950 sampai dengan 20-12-1956) diaturlah kehidupan masyarakat dan pemerintahan kembali. Kehidupan sosial ekonomi yang selama berlangsungnya revolusi (1945-1949) sudah hancur, mulai dibangun kembali. Sekolah-sekolah mulai diatur, anak-anak yang mengungsi ke rimba-rimba, kadang-kadang ada yang dapat sekolah secara darurat, setengahnya sama sekali tidak dapat sekolah, semuanya ditampung pada sekolah-sekolah yang terdapat di kota-kota. Akibatnya kelas-kelas paralel sangat banyak diadakan untuk menampung anak-anak daerah Republik.

Roda perekonomian sudah mulai lancar, walaupun masih banyak yang kelihatan lumpuh, terutama urusan perekonomian yang besar semua modal para pedagang sudah dipergunakan untuk keperluan mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kehidupan masih terasa agak susah, tetapi sudah ada perkembangan ke arah perbaikan.

Usaha pemerintah Sumatra Tengah waktu itu kelihatannya adalah konsolidasi ke dalam, karena itu kelihatannya arus pembangunan yang diinginkan rakyat agar segera dilaksanakan, berjalan agak lambat. Gedung-gedung yang dibumihanguskan, jalan dan jembatan yang dirusak sewaktu revolusi dibiarkan sangat lama terbengkalai secara darurat, sehingga agak mengganggu kelancaran lalu-lintas umum.

Keadaan yang demikian dilihat oleh beberapa pejuang Sumatra Barat di waktu revolusi dulu, terutama oleh bekas anggota Divisi Banteng yang telah dibubarkan. Atas prakarsa beberapa orang anggota bekas Divisi Banteng maka pada tanggal 20-25 Desember 1956 diadakan reuni anggota bekas

Divisi Banteng di Padang. Tujuan reuni antara lain adalah:

1. Membangun daerah dengan kemampuan dan kekayaan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya.
2. Memperhatikan nasib cacat veteran, janda-janda dan anak yatim akibat perjuangan fisik.
3. Menuntut supaya posisi-posisi penting di daerah diduduki oleh orang-orang yang kreatif, jujur, tak pernah absen dalam revolusi dan sejauh mungkin berasal dari daerah.
4. Menuntut agar supaya segera dilaksanakan perubahan-perubahan yang progresif dan radikal di semua bidang, termasuk ABRI dan kepemimpinan negara dengan tetap memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya hasil resmi adalah dibentuknya sebuah dewan yang dinamai Dewan Banteng yang beranggotakan 17 orang dan diketuai oleh Let. Kol. Ahmad Hosen, komandan Resimen Infanteri IV Sumatra Barat. Karena tuntutan Dewan Banteng tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, maka pada tanggal 20-12-1956, Ahmad Hosen mengambil alih kekuasaan Sumatra Tengah dari tangan Ruslan Mulyoharjo. Dengan demikian Sumatra Barat berada di bawah kekuasaan Dewan Banteng dengan dukungan anggota resimen infanteri IV Sumatra Barat yang diambil alih secara sepihak.

Kejadian ini menyebabkan Pemerintah Pusat segera mengambil tindakan pengamanan. Tanggal 10-9-1957 pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) guna mencari penyelesaian dalam masalah pemerintahan. Selanjutnya Musyawarah Nasional disusul oleh Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP).

Tetapi sebelum para pemimpin nasional di Jakarta dapat mengambil keputusan, pada tanggal 9-1-1958, dalam pertemuan Dewan Banteng di Sungaidareh dengan tokoh-tokoh politik didapat persetujuan untuk mendirikan suatu pemerintahan baru dengan nama PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diumumkan tanggal 15-2-1958.

Pemerintah Pusat menganggap hal ini sudah sebagai penyelewengan besar dan harus segera ditertibkan. Atas perintah KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) dikirimlah ke Sumatra Barat satu kesatuan operasi yang dinamakan Operasi

Militer 17 Agustus di bawah komando Kolonel A. Yani yang meluncurkan operasi pembersihan mulai tanggal 17 April 1958.

Kesatuan Operasi Militer 17 Agustus dengan cepat dapat memulihkan keadaan di Sumatra Barat. Satu demi satu daerah Sumatra Barat dapat dikuasai kembali oleh kesatuan Operasi Militer 17 Agustus. Pada tanggal 29-5-1961 Ahmad Hosen melaporkan diri pada komandan Operasi Militer 17 Agustus. Beberapa bulan kemudian hampir seluruh kesatuan PRRI dan rakyat yang ikut membantu melaporkan diri pada kesatuan-kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) setempat yang segera menyelesaikan masalahnya. Pada akhir tahun 1961 keamanan di seluruh Sumatra Barat sudah pulih kembali.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Daerah No.19/1957 (L.N. 1957/072) dan dengan Undang-Undang Penetapan No.61/1958 (LN 1958/No.122), Daerah Provinsi Sumatra Tengah dibagi menjadi tiga Daerah Tingkat I, yaitu:

1. Daerah Tingkat I Sumatra Barat
2. Daerah Tingkat I Riau
3. Daerah Tingkat I Jambi

Sedangkan daerah Kerinci dengan Undang-Undang Daerah No.21/1957 (LN 1957/No.77) dan dengan Undang-Undang Penetapan No.58/1958 (LN 1958 No.108), dibagi atas dua Daerah Tingkat II, yaitu:

1. Daerah Tingkat II Pesisir Selatan yang dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatra Barat.
2. Daerah Tingkat II Kerinci yang dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

Setelah kekuasaan Gubernur Ruslan Mulyoharjo diambil alih oleh Ahmad Hosen dan setelah Ahmad Hosen meninggalkan kota Padang, maka terjadi kekosongan Kepala Pemerintah di Sumatra Tengah. Setelah APRI masuk ke Sumatra Barat, maka kekosongan itu diisi oleh Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa sebagai gubernur Daerah Tingkat I Sumatra Barat.

Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No.5/1960, tanggal 23-9-1960 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. Des. 2/28/26-244, tanggal 30-11-1960, dilantiklah sebanyak 28 orang anggota DPRGR

Sumatra Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat langsung menjadi ketuanya sesuai dengan Penetapan Presiden No.5/1960 tersebut.

Sesudah Sumatra Barat menjadi Daerah Tingkat I dan setelah keadaan aman kembali maka mulai kembali mengatur kehidupan sosial ekonomi yang sangat terganggu oleh peristiwa Dewan Banteng dan PRRI. Tetapi karena akibat revolusi tahun 1945—1949 belum semuanya teratasi ditambah lagi dengan akibat yang ditimbulkan oleh PRRI, maka kehidupan di Sumatra Barat setelah tahun 1961 berjalan dengan lambat. Rakyat yang telah berkali-kali mengalami masa perang, dihindangi psikose-ketakutan. Apalagi kekosongan pejabat-pejabat yang terlibat peristiwa PRRI digantikan dengan orang-orang yang tidak terlibat. Kesempatan ini banyak dipergunakan oleh orang-orang PKI untuk menduduki posisi-posisi penting, apalagi setelah Masyumi dan PSI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Di Sumatra Barat sebelum terjadi peristiwa Dewan Banteng, Masyumi sangat kuat di daerah ini. Sewaktu Dewan Banteng, Masyumi mendapat kesempatan, menumpas PKI dengan seluas-luasnya. Setelah Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang dan PKI mendapat kekuasaan, maka terjadilah balas dendam oleh PKI terhadap bekas-bekas anggota Masyumi dulu. Akibatnya rakyat menjadi takut, karena akhirnya PKI tidak memilih lawan lagi, dan bermacam-macam teror dan fitnah dilancarkan oleh PKI. Di Sumatra Barat, suasana anti PRRI dipergunakan oleh PKI dengan sebaik-baiknya. Golongan atau aliran dalam masyarakat di Sumatra Barat yang tidak sejalan dengan PKI selalu mendapat tekanan dan fitnah.

Dalam keadaan demikian, pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta PKI melakukan kup dan membunuh 6 orang Jenderal TNI Angkatan Darat dan seorang perwira pertama. Tetapi berkat kesigapan dan kewaspadaan para pemimpin Indonesia yang berjiwa Pancasila serta semangat perjuangan 45, tindakan PKI yang telah melanggar UUD 45 itu, dalam waktu yang singkat dapat diatasi dan keadaan dapat diamankan dan dipulihkan seperti biasa.

Generasi muda di Sumatra Barat, yang selama PKI mendapat kekuasaan, sangat tertekan ruang geraknya, meledak

menjadi kesatuan aksi massa yang militan yang bersama-sama ABRI ikut menumpas sisa-sisa PKI.

Secara menyeluruh di seluruh Indonesia Kesatuan aksi yang lahir secara spontan yang tergabung ke dalam KAMI, KAPPI, KASI, KAGI, KABI, KAWI, dan sebagainya membentuk satu barisan baru dalam masyarakat Indonesia yang kemudian terkenal dengan nama Angkatan 66.

Di Jakarta tanggal 11 Maret 1966, keluar SP 11 Maret yang menugaskan PANGAD Jenderal Suharto menyelamatkan negara. Tugas pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Dengan demikian maka sisa-sisa PKI dibersihkan di seluruh Indonesia, demikian juga keadaannya di Sumatra Barat.

Sejak 11 Maret 1966, keadaan di Indonesia umumnya, di Sumatra khususnya mulai berangsur-angsur baik. Pemerintah bukan lagi dijadikan sasaran perjuangan golongan dan aliran-aliran dalam masyarakat, melainkan telah menjadi suatu bidang yang dibina bersama oleh golongan dan aliran-aliran dalam masyarakat itu dalam mewujudkan terlaksananya ide Pancasila dan jiwa UUD 45. Dengan demikian keadaan di Indonesia umumnya setahap demi setahap mulai diperbaiki dan pembangunan mulai dijalankan.

Pada tahun 1969, mulailah dijalankan PELITA I dalam rangka akselerasi pembangunan di Indonesia. Semenjak itu mulailah terasa, bukan saja di Sumatra Barat, bahkan di seluruh Indonesia, usaha pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan terlaksananya Pancasila dan UUD 45. Pembangunan dilaksanakan dengan merata sesuai dengan kemampuan dan dana yang tersedia. Kekurangan-kekurangan dalam perencanaan dan untuk menanggulangi keadaan yang sangat mendesak, maka PELITA dilengkapi dengan INPRES, KE-PRES dan sebagainya. Dengan biaya INPRES misalnya dapat kita lihat ratusan SD, puluhan Puskesmas dan banyak jalan-jalan didirikan dan diperbaiki. Pada tahun 1975, ini Indonesia umumnya, Sumatra Barat khususnya sedang menjalani masa PELITA II.

8. PENUTUP

Sengaja kami tidak menjelaskan Sejarah Sumatra Barat secara mendetail sejak tahun 1966, karena bahannya banyak yang belum terkumpul, masih berserakan di seluruh daerah Sumatra Barat dan dari bahan yang ada seringkali masih kontroversial. Di samping itu proses sejarahnya masih berkembang dan kalau ditulis masih bersifat sangat peka. Untuk menuliskan sejarah yang demikian dibutuhkan bahan yang lengkap dan waktu yang banyak.

Hanya saja sebagai saran penutup di sini perlu dikemukakan, bahwa dari apa yang telah dituliskan sebelumnya, jelas kelihatan Sejarah Daerah Sumatra Barat itu masih jauh dari lengkap dan masih terputus-putus. Hal ini bukan disebabkan karena ketidakmampuan menulis, tetapi adalah karena ketiadaan waktu untuk mengumpulkan bahan sejarahnya secara lengkap.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan itu di sini perlu kiranya disarankan, terutama untuk mengumpulkan bahan sejarah lisan Sumatra Barat dengan titik berat pada masa sesudah kemerdekaan, mumpung masih ada beberapa tokoh sejarah yang masih hidup, baik di Sumatra Barat sendiri, maupun di luar Sumatra Barat. Kalau menunggu beberapa tahun lagi kemungkinan sudah terlambat dan kembali data sejarah Sumatra Barat akan menjadi kabur atau dikaburkan.

Sebaiknya sejarah Sumatra Barat tidak ditulis oleh para pelaku sejarahnya, karena hal itu akan memberikan pandangan yang berat sebelah dan sangat subyektif sifatnya yang akan dapat menghilangkan nilai-nilai sejarahnya. Oleh karena itu sebaiknya Proyek Pencatatan dan Penelitian Sejarah Daerah Sumatra Barat ini sebaiknya diteruskan pada masa-masa yang akan datang, tepatnya tahun 1977 dan seterusnya dengan penekanan pada bahan sejarah lisan, khususnya untuk masa-masa terakhir dari periode Sejarah Sumatra Barat.

Demikianlah laporan ini diakhiri dengan segala kekurangannya.

INDEKS

A

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Abbas Rahman | Ahmad Khatib |
| Abdullah | Ahmad Hosen |
| Abdullah Ahmad | Ahmad Syuib |
| Abdullah St. Sinaro | Ahmadin Dt. Berbangso |
| Abdullah Kamil | Airbangis |
| Abdul Malik | Airmanis |
| Abdul Manan | Aisyah Yahya |
| Abdul Makmur Khatib Tunggal | Alam Minangkabau |
| (Dt. R. Bandang) | Al Akhbar |
| Abdul Muis | Alahanpanjang |
| Abdul Rahman St. Larangan | Al Munir |
| Abhiseka | Alaudin Riayatsyah Al Kahar |
| Absolut | Ali Basya |
| Abu Bakar | Ali Umar |
| Abu Bakar Jaar (Mr.) | Alim Ulama |
| Abu Nawas | Alwi St. Marajo |
| Aceh | Ambon |
| Adabyah | Amerika |
| Adinegoro | Amir |
| Adityawarman | Amir Hakim Siregar |
| Administratif | Amir Mahmud |
| A. Dt. Berbangso | Amoghapasa |
| Adwaya | Ampat Angkat |
| Adwayawarman | A. Muluk |
| Afdeling | Ananggawarman |
| Agama | Anas |
| Agraris | Anas Makruf |
| Agresi I | Annalen-Cina |
| Agresi II | Andiko |
| Agus Sastradipura | Angkatan Api Islam |
| A. Hamid | Antropologi |
| A. H. Endamora | Anwar |

Anwar Badu
 Anwar St. Saidi
 Anwar Umar
 Api Sibongka
 APRI
 Arab
 Arab-Persia
 A. Razak Sutan Malelo
 Arca
 Arkologi
 Arief Amin
 Arifin Alip
 Arifin Muning Alamsyah
 Aristokrasi-Otoriter
 Aru-Barumun

B

Bagindo Aziz Khan
 Bahasa Melayu
 Bahder Johan
 Bahrin alias Borin
 Bainar
 Bairawa
 Bakar Yusuf
 Balai Adat
 Balairung
 Bali
 Balubus
 B. M. Tahar
 Banda Aceh
 Banda Bapahat
 Banda Bakali
 Bandar
 Bandar Sepuluh
 Bandaro
 Bandaro Nan Kuning
 Bandaro Nan Putih
 Bangkinang

Asia
 Asia Barat
 Asia Tengah
 Asia Tenggara
 Asia Timur
 Ass. Demang
 Ass. Residen
 Assam
 A. Thalib
 Atos (dr.)
 Aur Duri
 Austronesia
 A. Wahid Kari Mudo
 Azhari

Bangunan Batu Besar
 Banten
 Bansi
 Banzai
 Barisan
 Barung-Barung
 Batangantokan
 Batalion
 Batalion Merapi
 Batalion Nan Tongga
 Batanghari
 Batangpadi
 Batangkampar
 Batangkapas
 Batak
 Batavia
 Batipuh
 Batipuh X Koto
 Batusangkar
 Basa Ampek Balai
 Basoka

Basuki
Belanda
Belasting
Bengkulu
Bennet Bronson (Dr.)
Benteng Bonjol
Bun
Bun-Cho
Burhanuddin
Burma
Bustami Rantai
Buyung Dt. Asri
Buyung St. Sinaro

Bid'ah
Bodi Caniago
Bodisatwa
Bogodan
Bonjol
Bosselar
Budha
Bugis
Bukit Gombak II
Bukit Surungan
Bukit Tajadi
BKR
Buo
BPPI

C

Candung
Cangking
Ceylon
Chatib Bungsu (Dt. R. Tuo)
Chatib Sulaiman
Chau-Yu-Kua
Chopper
Cho-Shangi-In

Cianjur
Cina
Cina Selatan
Cindur Mata
Cingkuk
Cochius (Jend.)
Colamandala
Controleur

D

Dahlan Ibrahim
Dahlan St. Mangkuto
Dahomey
Dara Jingga
Dara Petak
Dalu-Dalu
Darek
Darmasraya
Darwin

Darwis
Darwis Thaib
Datuk Ketumanggungan
Datuk Perpatih Nan Sebatang
D. Dt. Junjungan M.
Dayak
De Fakto
Demang
Demokrasi

Desentralisasi
Deutro Melayu
Dewa Tuhan Prapatih
Dewan Banteng
Dewan Perwakilan Sumatra
DPR
DPRST
Digul
Diniyah Putri
Diponegoro
District
Divisi III Banteng
Djalaluddin Thaib
Dogmatik
Dongsong
Dominasi

Domei
Dt. Majo Urang
Dt. Perpatih
Dt. Rajo Penghulu
Dt. Seri Marajo
Dt. Simarajo
Dt. Sinaroja
Dt. Sutan Maharaja Besar
Dubalang
Du-puy
Dubell (Letn.)
Dullah Pakih Suleman
Dukap Marah Suleman
Durian Tinggi
Dusun
Dwi-Tunggal

E

Eiler (May.)
Ekspedisi
Elout (Kol.)
Eropah

F

Fakta
Fatimah Hatta
Federasi
Fort de Kock
Fort van der Capellen
Fossil
Front Barat
Front Timur
Front Utara
Fujiyama
Fuku-Bun
Fuku-Bun-Cho
Fuku-Gun
Fuku-Gun-Cho

G

Gajah Mada
Garang Dt. Palindih
Garis Keturunan
Gasan Gadang
Gayatri
Gazali (May.)
Genealogis
Gendang
Gemente
Gemeente Raad
Geografis
Gezaghebber
Ghana
Gyugun

Gonjong
Gotong Royong
Gubernur
Gubernur Muda
Gua Bukit Durian
Gua Bukit Kurau
Gubernur Militer
Guguk
Guguk Sigandang
Gujarat
Gun
Gun-Cho
Gunung Tandikat

H

H. A. Wahab Amin
H. Asmaun
H. Jalaluddin
Haji
Haji Abdullah
Haji Datuk Batuah
Haji Miskin
Haji Piobang
Haji Sumanik
Hakim (Dr.)
HAMKA
H. Mahmud Yunus
Hapipah Lanjumin
Harun Al Rasjid (Mr.)

Hasan-Hosen
Hasik Bagindo Magek
Haska
Hayam Wuruk
Hindia Belanda
Hindia Belakang
Hindu
H I S
Hei-ho
Hinomaru
Hirojima
Hizbullah
H. Sirajuddin Abbas
H. Z. Hamidy

I

Ibrahim Agus	Inggris
Ibrahim Gandhi	Inlands Staatsrecht
Ibrahim Rasyid	Inskripsi
Illegal	Inyik Adam B. B.
Ilyas Yakub	Inyik Jambek
Indera	Intelektual
India	Internasional
India Selatan	Invasi
Indian	Irigasi
Indomo	Islam
Indonesia	Ismael Lengah
Indonesia Raya	I-Tsing
Indrapura (Indropuro)	

J

Jalan Sutera
Jamalus Yahya
Jambi
Jam Gadang
Jawa
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Jayanegara
Jepang
Jinalayah
Johnny Anwar
Jong Sumatra
Justisi

K

Kabupaten	Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Agam	Kabupaten Sawahlunto
Kabupaten Lima Puluh Kota	Sijunjung
Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Solok
Kabupaten Pasaman	Kabupaten Tanahdatar

K. Dt. Rajo Sikumbang	Kesatuan Tomi
Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa	K. H. Muhammad Dahlan
Kalik Sidi Marah	Khatib Salim (Kapt.)
Kalimantan	Khosis
Kamang	Kidung Panji Wijaya
Kamaruddin Mangguluang	Kimigayo
Kampar	Koloni
Kampar Kanan	Komandemen
Kampar Kiri	Komite Rakyat
Kampung	Kompeni
Kana	Korong
Kanaka	Kota madya
Kang-ji	Kota Madya Bukittinggi
Karbella	Kota Madya Padang
Kartanegara	Kota Madya Padangpanjang
Kasim Dt. Malilik Alam	Kota Madya Payakumbuh
KNID	Kota Madya Sawahlunto
KNIP	Kota Madya Solok
Katakana	Kotacane
Kaum	Koto
Kaum Paderi	Koto Lawas
Keadilan Sosial	Koto Nan Ampek
Kediri	Koto Piliang
Kedukan Bukit	Koto Tangah
Keibodan	Koto Tinggi
Kelarasan	Kristen
Kemal Mustafa	Krom
Kempeitai	Kubang Putih
Kepala Negari	Kubu Gadang
Keramat	Kubu Rajo
Keraton	Kulishadara
Keresidenan	Kuntukampar
Kerinci	Kuta
Kern	
Kertajaya	

L

Labung	Lima Kaum
Ladanglawas	Limbanang
Landgerecht	Lintau
Landraad	Logas
Lamah	Loji
Laras	London
Laras Sungai Puar	Lubukbasung
Laut Tengah	Lubuksikaping
Legendaris	Lumbung
Legislatif	Luhak
Leon Salim	Luhak Agam
Les Hitam.	Luhak Lima Puluh Kota
Lim (Mr.)	Luhak Nan Tigo
Lim Soen Liang	Luhak Tanahdatar

M

Mac Arthur (Jend.)	Maninjau
Majo Ali	Manjuto
Madura	Mansoer Samy
Magek	Mansur
Mahadi	Manti
Mahamantri	Mantri Praudhatara
Mahamantri Adwayabrahma	Mantrolot
Maharaja	Mapatih
Mahisa Anabrang	Mara Karma
Mahyuddin Tonek	Marah Adin
Majapahit	Marah Badaruddin
Makasar	Marah Rusli
Makhudun	Marzuki Yatim
Makinuddin	Masang
Malaka	Masehi
Malin Deman	Mataram
Mamak	Matrilinial
Mamak Kepala Waris	Matur
Mamak Rumah	Mauli
Ma-na-cho-wu-li	Mauliwarmadewa
Manggopoh	Mazarella

Mazhab Hambali
 Medan
 Megalit
 Megalitikum
 Melayu
 Menado
 Menhir
 Mekkah
 Mentawai
 Merah Putih
 Merapi
 Mesir
 Mesolitikum
 Minangkabau
 Minangkabau Raad
 Minangkabau Timur
 M. Arif
 M. Jamil Dt. Rangkayo Tuo
 M. Jarjis Bebastani
 M. Rasyid (Mr.)
 M. Nasrun. (Mr.)
 M. Sabirin
 M. Sutomo
 M. Yusuf Pono Kayo

M. Yusuf Rajo Kecil
 Mokhtar Naim (Dr.)
 Moens (Ir.)
 Mohammad Yakin
 Moh. Said
 Moh. Yasin Dt. Kayo
 Motif
 Mounbatten
 Muaralabuh
 Muarakelaban
 Muchtar Lufti
 Muhammad
 Muhammad Hatta
 Muhammad Josan St. Rajo
 Muhammad Syarief Bandaro
 Muhammad Yahya (Tuanku
 Simabur)
 Muhammad Yamin
 Muhammadiyah
 Muin Dt. Rajo Endah
 Munir
 Munir Latif
 Mustafa Kamal
 Musyawarah
 M T K A A M

N

Nagari
 Nahar
 Naksybandyah
 Nan Ampek Jinih
 Nan Tongga Magek Jabang
 Napoleon
 Nasionalisme
 Nasrun A S
 Nazir St. Pamuncak
 Negeri Sembilan
 Neishi-Kaigan-cho
 Nenek Moyang

Neolitikum
 Nizarwan
 N I C A
 Nurhakim Dt. Bandaro Hitam
 Nurmatias
 Nusantara
 Nusyirwan
 Nyak Abbas

O

Oetoesan Melayoe
Onder Afdeling
Onder District
Ophir
Ordonansi Sekolah Liar
Ordonantie
Organisasi
Ornamen
Out Agam

P

Padang
Padangcandi
Padangdarat
Padangganting
Padanglawas
Padang Luar Kota
Padangroco
Padangsibusuk
Padangsche Handelsblad
Paderi
Pagarruyung
Painan
Pakandangan
Palaeolitikum
Palaeontologi
Palalawan
Palembang
Palembayan
Palin glr. St. Alamsyah
Palupuh
Pamalayu
Pamansiangan
Panau
Pandai Sikat
Parabek
Pararaton

Pariangan
Paruik
Pasargadang
Pasai
Pasarusang
Pasifik
Pasaman
Patih
Pacik Tuanku Padang
Partisipasi
Payakumbuh
Pecahan Tembikar
Pedalaman
Pedang Jenawi
Pencak Silat
Pendeka r Mukmin
Pelita Kecil
Pemuatan
Pemuda Nippon Raya
Pemuda Sumatra
Penelitian
Penemuan
Penghulu
Penghulu Pucuk
Penghulu Suku
Peninggalan

Perahu Bercadik
 Perancis
 Perang Kamang
 Perang Paderi
 Perang Pasifik
 Perang Silungkang
 Periode
 Perlak
 Permi
 Persatuan Muslimin Indonesia
 Persia
 Perti
 Pesisir
 Pesisir Selatan
 Piangu
 Pieter Both
 Pinanghabu
 Pithecanthropus
 Pitono Harjowardoyo

R

Raad van Justitie
 Raaf (Kol.)
 Raden Suleman
 Raden Wijaya
 Rajo Sampono
 Raffles
 Rahman Sidi Rajo
 Raja Adat
 Raja Alam
 Raja Ibadat
 Raja Muda
 Raja Tiga Selo
 Ramli Ibrahim
 Rancak Dilabuh
 Randai
 Rangkeyo Dt. Tumenggung
 Rao

Podium
 Politik
 Polisi
 Prasejarah
 Plakat Panjang
 Presiden
 PRI
 PRRI
 Prof. Berg
 Prof. Dr. D. H. Burger
 Prof. Dr. Mr. Prayudi
 Prof. Dr. Poerbocaroko
 Proklamasi
 Propinsi
 Proto Melayu (Melayu Tua)
 PTT
 Publik Opini
 Puti Bungsu

Rasimah Ismail
 Rasin (May.)
 Rasuna Said
 Rasyidin (Dr.)
 Rauf
 Ratna Sari
 Rebab
 Rebana
 Reformasi
 Regen
 Relief
 Rembau Negeri Sembilan
 Republik
 Republik Indonesia
 Responden
 Residen
 Residensi

Resimen
 Rhodesia Utara
 Riau
 Ridder (Kol.)
 Rohana Kudus
 Romusha
 Rumah Gadang
 Rusdi
 Rusli
 Rustam Thaib
 Rusyad Dt. Perpatih Baringek

S

Saaduddin Jambek
 Saalah St. Mangkuto
 Sabai Nan Aluih
 Sadeng
 Sadikin (Dr.)
 Said Sidi Malin
 Sakti
 Saleh Mangkuto Rajo
 Salido
 Salung
 Samande
 Samudra
 Samudra Indonesia
 Samudra Pasai
 Saparuik
 Saruaso
 Saudara Tua
 Sawahbesar Setampang Benih
 Sawahlunto
 Sawahlunto Sijunjung
 Sayuti Amin
 Sei-Kei-Rei
 Sei-nen-dan
 Sehamparan

Sekutu
 Selat Malaka
 Selawat
 Semarang
 Semenanjung Malaka (Malaya)
 Seni Budaya
 Seni Drama
 Seni Gerak
 Seni Musik
 Seni Ukir
 Seni Tari
 Sentot
 Sentralisasi
 Sepematang
 Seram
 Serikat Islam
 Shonanto
 Shu-cho
 Siak Indrapura
 Sidi Bakaruddin
 Siguntur
 Sijunjung
 Sikumbu
 Si-la-seng-kit-li-ye

Silungkang	Sumpur Kudus
Sinar Soematra	Sunda
Singgalang	Sungaidareh
Singosari	Sungailangsar
Simabur	Sungaingiang
Simawang	Sungaitarab
Simon (Letn.)	Sungaiudang
Sir Philip Christison (Letjen.)	Sup Provinsi
Siti Rohana	Supardi Prawirodirejo
Sitti	Surawasawan
Sitti Heran glr. St. Namora	Suska
Si Umbut Mudo	St. Ahmad
SNI	St. Mangkuto Tabuh
Soekmono	St. Maradjo Dullah
Soeloeh Melayoe	St. Saaladdin
Srikandi	St. Usman Said
Sriwijaya	Sutan Nurdin
Sudarsono	St. Diatas glr. Dt. Bagindo Rajo
Sudibio	Syafei
Sudin St. Kabut	Syafei Ali
Sufi	Syahbandar
Suhadi	Syahfari glr. St. Pangeran
Suku	Syamsu Bakar
Sulaiman Efendi	Syamsuddin
Sulawesi Selatan	Syarif Usman
Suliki	Syarifuddin
Sultani St. Malako	Syattaryah
Sumanik	Syarif Said
Sumatra	Syofian Ibrahim
Sumatra Barat	Syofian Nur
Sumatra Courant	Swarnadwipa
Sumatra Tengah	Swatantra
Sumatra Thawalib	Syekh Abbas Padang Japang
Sumatra Timur	Syekh Abdul Karim Amrullah
Sumatra Selatan	(Haji Rasul)
Sumatra Utara	Syekh Abdullah Ahmad
Sumatra Westkust	Syekh Ahmad
Sumbawa	Syekh Abdurauf
Sumpah Palapa	Syekh Burhanuddin
Sumpah Pemuda	Syekh Khatib Ali

Syekh Daud Ar Rasuli
 Syekh Daud Rasyidi
 Syekh Ibrahim Musa Parabek
 Syekh Ismail
 Syekh Kumpulan
 Syekh Labuh
 Syekh Mungkar
 Syekh Muhammad Jamil Jambek
 Syekh Rasyid Maninjau

T

Tabek	
Tabut	Tharikat
Taha St. Jambi	Tiakar
Talah St. Langit	Tiku
Talang	Titah
Talempong	Tuan Kadi
Tanaman Faksa	Tuanku Imam Bonjol
Taiso	Tuanku Koto Tuo
Tanjungmedan	Tuanku Lelo
Tantrisme	Tuanku Lintau
Tambo	Tuanku Nan Renceh
Tambo Alam Minangkabau	Tuanku Pamansiangan
Tambo Pagarruyung	Tuanku Rao
Tambusai	Tuanku Saruaso
Tapanuli	Tuanku Tambusai
Tapanuli Selatan	Tugubatu
Taklik	Tuhan Prapatih
Taratak	Tungganai
Tari Payung	Tradisi
Tari Piring	Tradisional
Tarikh Masehi	TRI
Taruma Negara	Tribhuwana
Tarung-Tarung	Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa
Teluk Persia	Tribhuwana Tunggadewi
Temenggung	Tseh-fu-ji-en-kwei
Territorial	

U

Udin
Ulakan
Unik
Universitas Pennsylvania
Usman Keadilan

V

Van Caerden
Van den Bosch (Kom.Jen.)
Van der Capellen
Van der Tuuk
Van der Stock (Kapt.)
Van Vollenhoven
Vazal
Vermulen Krieger (Letkol.)
VOC
Volksfront
Vulkanis

W

Wagimin
Wahabi
Wakil Presiden
Wali Kota
Wali Suleman
Warisan
Warta Berita
Wedana
Werdhamentri
Westenenck, LC.
W. F. Stutterheim
Wiswarupakumara
Wilken

Y

Yahya Jalil
Yap Gui Sek
Yazid Abidin
Yunan
Yusuf Ali

Z

Zainal Arifin
Zainal Zainur
Zainuddin B.S.
Zainuddin St. Kerajaan
Zakir bin Hamzah
Zaman Batu
Zaman Besi
Zaman Kuno
Zaman Logam
Zaman Mula Sejarah
Zaman Perunggu
Zaman Purbakala
Zaman Tembaga
Zubaidah Munaf
Zuid Benedenlanden

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN PERTAMA PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH, DEPARTEMEN P DAN K 1976/1977

SEJARAH DAERAH SUMATRA BARAT

Nama responden :
Jabatan :
Keneherian :
Kecamatan :
Kabupaten :

PETUNJUK:

1. Silanglah nomor item yang saudara anggap menjadi jawaban yang benar dari pertanyaannya (boleh lebih dari satu)
 2. Kalau ada titik-titik, maka silanglah lebih dahulu nomor itemnya sesudah itu isilah titik-titik tersebut dengan jawaban yang saudara anggap benar terhadap pertanyaannya.
 3. Menyilang nomor item dan mengisi titik-titik dapat dilakukan oleh responden atau oleh petugas penelitian.
-

PERTANYAAN:

1. Dari manakah asal mula nenek moyang suku bangsa Minangkabau yang mendiami Provinsi Sumatra Barat?
 - A) Puncak Gunung Merapi
 - B) India Belakang
 - C) Mongol
 - D) Tidak tahu
 - E)
2. Dari arah manakah mereka masuk ke Sumatra Barat?
 - A) Utara
 - B) Selatan
 - C) Timur
 - D) Barat
 - E) Tidak tahu
 - F)

3. Di manakah tempat pertama mereka menetap di Sumatra Barat?
 - A) Pariangan Padangpanjang
 - B) Sumpur Kudus
 - C) Galundi Nan Baselo
 - D) Bukit Batupatah
 - E) Tidak tahu
 - F)
4. Bagaimanakah mereka memenuhi keperluan hidup mereka?
 - A) Berburu/Menangkap ikan
 - B) Meramu
 - C) Berladang
 - D) Bercocok Tanam
 - E) Tidak tahu
 - F)
5. Di manakah mereka tinggal (diam)?
 - A) Dalam gua-gua
 - B) Di atas pohon kayu
 - C) Dalam rumah palung
 - D) Tidak tahu
 - E)
6. Apakah mereka sudah mempunyai organisasi masyarakat?
 - A) Belum
 - B) Sudah
7. Kalau sudah, bagaimanakah kira-kira bentuk organisasi mereka?
 - A)
 - B)
 - C)
 - D)
8. Apakah mereka sudah menganut sistem kepercayaan?
 - A) Belum
 - B) sudah

9. Bagaimanakah bentuk sistem kepercayaan mereka?
 - A) Menyembah roh-roh nenek moyang.
 - B) Menyembah gunung-gunung
 - C) Dewa-dewa
 - D) Kuburan-kuburan
 - E) Pohon-pohon besar
 - F) tidak tahu
 - G)
10. Adakah mereka mendirikan kerajaan sebelum berdirinya kerajaan Pagarruyung?
 - A) Ada
 - B) Tidak
11. Kalau ada, apakah nama kerajaan tersebut?
 - A)
 - B)
 - C) Tidak tahu namanya
12. Kapanakah kerajaan Pagarruyung didirikan?
 - A) Abad 14
 - B) Abad 12
 - C) Abad 13
 - D) Abad 11
 - E)
 - F)
 - G) Tidak tahu
13. Di manakah pusat kerajaan Pagarruyung pertama kali didirikan?
 - A) di Kumani
 - B) di Sumpurkudus
 - C) di Pagarruyung
 - D) di Bukit Batupatah
 - E)
 - F)
 - G)
 - H) Tidak tahu

14. Apakah Kerajaan Pagarruyung sudah mempunyai hubungan dengan dunia luar?
- A) belum
 - B) Sudah :
 - dengan
 - dengan
 - dengan
15. Benarkah Adytiawarman pendiri Kerajaan Pagarruyung yang I?
- A) Benar
 - B) Tidak
16. Bagaimanakah keadaan perekonomian di dalam Kerajaan Pagarruyung semasa Adytiawarman?
- A) bertani
 - B) berdagang
 - C) berdagang dan bertani
 - D) berlayar
 - E)
 - F)
 - G) Tidak tahu
17. Apakah di dalam Kerajaan Pagarruyung sudah ada agama?
- A) belum
 - B) sudah
 - 1. Budha
 - 2. Hindu
 - 3. Hindu/Budha
 - 4.
 - 5.
 - 6. Tidak tahu
18. Apakah semasa raja Adytiawarman memerintah, ada bangunan-bangunan agama yang didirikan?
- A) tidak
 - B) ada :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

19. Apakah Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katemenggungan, hidupnya sezaman dengan Adytiawarman?
- A) Ya
 - B) tidak
20. Bilamanakah agama Islam masuk ke dalam Kerajaan Pagarruyung?
- A) Abad ke-14
 - B) Abad ke-13
 - C) Abad ke-12
 - D) Abad ke-15
 - E)
 - F)
 - G) tidak tahu
21. Bagaimanakah keadaan Kerajaan Pagarruyung sepeninggal Adytiawarman?
- A) runtuh
 - B) tetap berdiri
 - C) tidak tahu
22. Kapanakah pengaruh Belanda masuk ke Minangkabau (Sumatra Barat)?
- A) abad ke-15
 - B) abad ke-16
 - C) abad ke-17
 - D)
 - E) tidak tahu
23. Di manakah tempat yang pertama (I), dikuasai Belanda di Sumatra Barat?
- A) Pulau Cingkuk
 - B) Painan
 - C) Pariaman
 - D) Padang
 - E)
 - F)
 - G) tidak tahu

24. Apakah waktu masuknya bangsa Belanda di Sumatra Barat Kerajaan Pagarruyung masih berkuasa?
 - A) masih
 - B) tidak
25. Ketika permulaan masuknya Belanda di Sumatra Barat, bagaimanakah hubungan daerah Sumatra Barat dengan dunia luar (luar Sumatra Barat)?
 - A) tidak ada hubungan
 - B) ada hubungan
 - dengan daerah
 - dengan daerah
 - dengan daerah
26. Apakah dengan masuknya bangsa Belanda ke Sumatra Barat, agama Kristen pun ikut berkembang?
 - A) tidak ikut berkembang
 - B) berkembang
27. Dengan negara-negara mana sajakah Sumatra Barat, pada permulaan abad ke-18 mengadakan hubungan?
 - A) Mesir
 - B) Arab
 - C) Turki
 - D) India
 - E) Persia
 - F)
 - G) tidak ada
28. Kapanakah masuknya gerakan pembaharuan Islam ke Sumatra Barat?
 - A) abad ke-18
 - B) abad ke-17
 - C) abad ke-19
 - D) abad ke-16
 - E) tidak tahu
29. Bagaimanakah keadaan daerah Sumatra Barat pada permulaan abad ke-19?

- A) dikuasai Belanda (dijajah)
 - B) tidak dikuasai
 - C)
 - D)
 - E) tidak tahu
30. Dengan masuknya pengaruh Barat dan pembaharuan Islam di Sumatra Barat dalam abad ke-19 menimbulkan:
- A) nasionalisme
 - B) pergolakan sosial
 - C) perlawanan rakyat
 - D)
 - E)
 - F) tidak tahu
31. Nasionalisme di Sumatra Barat menimbulkan?
- A) anti Belanda
 - B) anti agama Kristen
 - C) anti adat
 - D)
 - E)
 - F) tidak tahu
32. Bagaimanakah keadaan pendidikan di Sumatra Barat pada permulaan abad ke-19?
- A) baik
 - B) tidak baik
 - C) tidak ada
 - D)
 - E)
 - F) tidak tahu
33. Dengan dikuasainya Sumatra Barat oleh Belanda, bagaimana akibatnya dalam lapangan ekonomi dan sosial?
- A) tanaman paksa
 - B) Perdagangan dikuasai oleh Belanda
 - C) timbul perlawanan oleh rakyat
 - D) rakyat terpecah-pecah
 - E)

- F)
 G) tidak tahu
34. Bagaimanakah gerakan nasionalisme di Sumatra Barat pada permulaan abad ke-20?
 A) bangkit
 B) tidak bangkit
 C)
 D)
 E) tidak tahu
35. Bagaimanakah sikap pemerintah India Belanda menghadapi gerakan nasionalisme di Sumatra Barat pada permulaan abad ke-20?
 A) keras
 B) lunak
 C) pecah belah
 D)
 E)
 F) tidak tahu
36. Bagaimanakah bentuk gerakan nasionalisme di Sumatra Barat pada masa itu?
 A) bersifat keagamaan
 B) partai partai politik
 C)
 D)
 E)
 F) tidak tahu
37. Bagaimanakah pengaruh kebudayaan asing (Barat) terhadap struktur masyarakat Sumatra Barat pada masa itu?
 A) baik
 B) buruk
 C)
 D)
 E) tidak tahu
38. Bagaimanakah keadaan masyarakat Sumatra Barat sesudah perang dunia I?

- A) terpecah-pecah
 - B) bersatu
 - C) curiga-mencurigai
 - D)
 - E)
 - F) tidak tahu
39. Bagaimanakah pandangan Belanda terhadap masyarakat Sumatra Barat ketika akan meletusnya perang dunia ke-2?
- A) baik
 - B) buruk
 - C) ingin bekerja sama
 - D)
 - E)
 - F) tidak tahu
40. Dengan dikalahkannya Belanda oleh Jepang dalam perang dunia ke-2 bagaimanakah sikap Jepang terhadap rakyat Sumatra Barat?
- A) baik
 - B) buruk
 - C) ingin bekerja sama
 - D)
 - E)
 - F) tidak tahu
41. Bagaimana keadaan perekonomian Rakyat Sumatra Barat pada masa pendudukan Jepang?
- A) sukar
 - B) baik
 - C)
 - D)
 - E)
42. Bagaimanakah perlawanan rakyat terhadap kekejaman penjajahan Jepang?
- A) meningkat
 - B) pasif
 - C) bekerja sama dengan Jepang
 - D)

- E) tidak tahu
43. Bagaimana hubungan rakyat Sumatra Barat pada masa kekuasaan Jepang dengan dunia luar?
- A) sembunyi-sembunyi
 B) terbuka
 C)
 D)
 E) tidak tahu
44. Ketika Jepang merasa dirinya akan kalah dalam kancah perang dunia ke-2, bagaimana sikapnya terhadap rakyat Sumatra Barat?
- A) baik
 B) buruk
 C)
 D)
 E) tidak tahu
45. Dari manakah rakyat Sumatra Barat mendapat berita tentang kekalahan Jepang?
- A) radio
 B) surat kabar
 C)
 D)
 E) tidak tahu
46. Dari manakah Rakyat Sumatra Barat mengetahui berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945?
- A) dari radio
 B) surat kabar
 C) dari Jepang
 D)
 E)
 F) tidak tahu

Nama Petugas :
 Tgl. wawancara :
 Tanda tangan :

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN KEDUA PENINGGALAN SEJARAH SUMATRA BARAT PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH P DAN K 1976/77

Nama responden :
Jabatan :
Kenegarian :
Kecamatan :
Kabupaten :

PETUNJUK :

1. Silanglah nomor item yang saudara anggap menjadi jawaban yang benar dari pertanyaan di bawah ini (boleh lebih dari satu disilang)
 2. Kalau ada titik-titik, maka silanglah lebih dahulu nomor itemnya, sesudah itu isilah titik-titik tersebut dengan jawaban yang saudara anggap benar.
 3. Menyilang nomor item dan mengisi titik-titik dapat dilakukan oleh responden atau oleh petugas penelitian.
-

PERTANYAAN:

1. Apakah ada peninggalan prasejarah di tempat saudara?
 - A) ada
 - B) tidak ada
2. Kalau ada, berbentuk apa peninggalan itu?
 - A) Tugu batu
 - B) Kuburan batu
 - C) Kapak batu
 - D) Perkakas batu
 - E) Tulang-tulang binatang
 - F) Kapak perunggu

G)
.....
.....

3. Pernahkah saudara mendengar/mengetahui bahwa di daerah ini terdapat peninggalan warisan budaya berupa batu bertulis (prasasti)?
 - A) pernah
 - B) tidak pernah
4. Kalau pernah, di manakah daerah tempat batu bertulis itu terdapat?
 - A) di (nama tempat)
 - B) dipindahkan ke
 - C) dalam/pada kuburan di
 - D) dalam gua di
 - E) di lapangan terbuka di
 - F)
5. Di manakah sekarang tempat penyimpanan batu bertulis tersebut?
 - A) masih di sana
 - B) dipindahkan ke
 - C) tidak tahu
6. Pernahkah batu bertulis itu diteliti atau dipelajari seseorang?
 - A) tidak pernah
 - B) tidak tahu
 - C) pernah, yaitu
oleh :
tahun :
7. Berapakah kira-kira jumlah seluruh batu bertulis yang telah diketahui di daerah ini?
.....
.....
8. Dari manakah atau dari siapakah kira-kira berasal nya batu bertulis itu?

- A) raja/sultan
- B) kerajaan
- C) keluarga
- D) tidak tahu

9. Siapakah yang mula-mula menemukan batu bertulis itu?

- A) oleh
- B) tidak tahu

10. Untuk apakah dipergunakan batu bertulis itu?

- A) untuk upacara
- B) untuk peringatan
- C)
-

11. Bagaimanakah kira-kira bentuk dan ukuran batu bertulis itu?

- A) berbentuk
- B) berukuran

12. Sepanjang pengetahuan saudara apakah kira-kira isi batu bertulis itu?

- A)
- B)
- C)
- dst.

13. Apakah jenis huruf (tulisan) pada batu bertulis itu?

- A) Sankskerta
- B) Pallawa
- C) Jawa kuno
- D) Latin
- E) Arab
- F) tidak tahu

14. Pernahkah saudara mendengar/mengetahui beberapa batu bertulis yang tersebut di bawah ini?

Nama batu bertulis (prasasti)

Tempat sekarang

a. Pariangan

Pariangan

b. Limo kaum (I) (II)

Limo Kaum

c. Bukit Gombak (I)	Pagarruyung (Gudam)
d. Bukit Gombak (II)	”
e. Kapalo Bukit Gombak (I)	”
f. Kapalo Bukit Gombak (II)	”
g. Gudam (I)	”
h. Gudam (II)	”
i. Ponggongan (I) (II) (III) (IV)	”
j. Saruaso (I)	Saruaso
k. Saruaso (II)	Saruaso
l. Bandar Bapahat	?

15. Apakah saudara masih mengetahui batu bertulis selain dari yang telah disebutkan di atas?
- A) tidak
- B) ya, yaitu di
-
-
16. Apakah saudara pernah mendengar/mengetahui bahwa ada batu bertulis di:
- A) Ombilin
- B) di dalam danau Singkarak
- C) Singgalang
- D) Rambatan
- E) Rambahan
- F) Sumpur Kudus
- G) tidak tahu
17. Apakah menurut pendapat saudara masih banyak lagi kemungkinan adanya batu bertulis di daerah Sumatra Barat?
- A) ya
- B) tidak
18. Kalau ya, di daerah manakah kemungkinan yang masih mengandung batu bertulis itu?
- A) di daerah
- B) di daerah
- C) di daerah
-
-

19. Siapakah di antara orang-orang yang tersebut namanya di bawah ini yang pernah meninggalkan batu-batu bertulis (prasasti)?
- A) Adytiawarman
 - B) Dt. Katemenggungan
 - C) Dt. Perpatih Nan Sabatang
 - D) Sultan Alif
 - E) Sultan Muning Alam Syah
 - F) Sultan Alam Bagagar Syah
 - G)
 -
 -
20. Di mana sajakah pandam perkuburan yang saudara ketahui dari:
- A) Raja Alam di
 - B) Raja Adat di
 - C) Raja Ibadat di
 - D) Raja/Sultan di
 - E)
 -
 -
21. Di samping peninggalan batu bertulis dan pandam perkuburan, apakah saudara pernah mendengar/mengetahui peninggalan berupa:
- A) Bangunan Kuno di
 - B) Candi di
 - C) Biaro di
 - D) Patung di
 - E) Permandian di
 - F) Lempeng-lempeng tembaga bertulis di
 - G)
 -
22. Pernahkah saudara mendengar, bahwa ada seseorang/sekelompok orang yang menemukan peninggalan-peninggalan warisan budaya yang selama ini belum kita ketahui?
- A) tidak pernah

- B) pernah, yaitu:
di
di
tahun
23. Kalau pernah, apa atau bagaimanakah kira-kira:
a. Jenis peninggalan :
.....
b. Isi peninggalan :
.....
c. Guna peninggalan :
.....
d. Bentuk peninggalan :
.....
e. Masa peninggalan :
24. Pernahkah saudara mendengar atau mengetahui peninggalan warisan budaya berupa tambo?
A) pernah
B) tidak pernah
25. Kalau pernah di manakah kira-kira tempat penyimpanan tambo tersebut?
A) pada pemerintah
B) pada keluarga
C) pada jawatan
D) tidak tahu
26. Pernahkah saudara mendengar bahwa di daerah ini ada peninggalan warisan budaya berupa silsilah raja-raja?
A) pernah
B) tidak pernah
27. Kalau pernah di manakah tersimpannya silsilah raja-raja itu sekarang?
A) pada pemerintah
B) pada keluarga

33. Kalau ada, bagaimana kira-kira jenis peninggalan itu?

<i>Jenis Peninggalan</i>	<i>Tempatnya</i>
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

34. Pernahkah saudara mengetahui/mendengar peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa pemerintahan Belanda berkuasa di Sumatra Barat di daerah saudara?

- A) ada
B) tidak pernah

35. Kalau ada, bagaimanakah kira-kira jenis peninggalan itu?

<i>Jenis peninggalan</i>	<i>Tempatnya</i>
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

36. Pernahkah saudara mendengar/mengetahui peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa penjajahan Jepang di Sumatra Barat?

- A) pernah
B) tidak pernah

37. Kalau ada, bagaimana kira-kira jenis peninggalan itu?

<i>Jenis peninggalan</i>	<i>Tempatnya</i>
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

38. Apakah saudara masih ada mendengar/mengetahui benda-benda lain sebagai peninggalan warisan budaya selain daripada yang disebutkan di atas?

- C) pada jawatan
- D) tidak tahu
28. Pernahkah saudara mendengar/mengetahui bekas-bekas peninggalan bangunan-bangunan kuno?
- A) tidak pernah
- B) pernah, yaitu di
-
-
29. Apakah ada di daerah ini peninggalan warisan budaya berupa tulisan pada:
- A) piring
- B) dulang
- C) genderang
- D) keris
- E) tombak
- F) bangunan
- G)
30. Pernahkah sdr. mendengar/mengetahui peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa Perang Paderi di daerah saudara?
- A) pernah
- B) tidak pernah
31. Kalau ada, bagaimana kira-kira jenis peninggalan itu?
- | <i>Jenis peninggalan</i> | <i>Tempatnya</i> |
|--------------------------|------------------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
32. Pernahkah saudara mendengar/mengetahui peninggalan bersejarah dari masa permulaan masuknya Islam di Sumatra Barat?
- A) ada
- B) tidak pernah

- A) pernah
- B) tidak pernah

39. Kalau ada, bagaimana kira-kira jenis peninggalan itu?

Jenis peninggalan

Tempatnya

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |

40. Apakah benda-benda peninggalan bersejarah tersebut bisa diambil fotonya?

- A) boleh
- B) tidak

Nama Petugas :

Tanggal wawancara :

Tanda tangan :

LAMPIRAN III

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Dt. Bgd. Suleman
Jabatan : Ninik Mamak
Kenagarian : Pelangai
Kecamatan : Ranah Pesisir
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. Nama : Ruslan Yusuf
Jabatan : Penasehat LKAAM Sei. Pagu
Kenagarian : Kotabaru
Kecamatan : Sungaipagu
Kabupaten : Solok
3. Nama : A.M. Dt. Perpatih
Jabatan : Mahasiswa IKIP Padang
Kenagarian : Pariaman
Kecamatan : Pariaman
Kabupaten : Padang/Pariaman
Umur : 43 tahun
4. Nama : Syafruddin
Jabatan : Guru
Kenagarian : Sungaisarik
Kecamatan : VII Koto
Kabupaten : Padang/Pariaman
Umur : 36 tahun
5. Nama : Anwar M.
Jabatan : Camat Pancung Soal
Kenagarian : Indrapura
Kecamatan : Pancungsoal
Kabupaten : Pesisir Selatan
6. Nama : Ramli
Jabatan : Pegawai Kantor Dept. P & K
Kenagarian : Muaro
Kecamatan : Sijunjung
Kabupaten : Sawahlunto/Sijunjung

7. Nama : Basir Sari Marajo
Jabatan : Pensiunan P & K Kabupaten Pess. Selatan
Kenagarian : Nanggalo
Kecamatan : Koto XI Tarusan
Kabupaten : Pesisir Selatan
8. Nama : Martias Mahmoed
Jabatan : Guru KOKAR
Kenagarian : ---
Kecamatan : ---
Kabupaten/Kodya : Kodya Padangpanjang
9. Nama : Dahlan Dt. Sati
Jabatan : Pegawai Tata Usaha SMEAN Bukittinggi
Kenagarian : Gadut
Kecamatan : Tilatangkamang
Kabupaten : Agam
Umur : 50 tahun
10. Nama : Firdaus
Jabatan : Kasi — Kebudayaan
Kenagarian : Muaro
Kecamatan : Sijunjung
Kabupaten : Sawahlunto/Sijunjung
11. Nama : M. Rasyid Manggis Dt. Radjo Pengulu
Jabatan : LKAAM — Sumbar
Kenagarian : Kurai Limo Jorong
Kecamatan : Bukittinggi
Kabupaten : Agam
12. Nama : B.K. Dt. Rangkajo Basa
Jabatan : Pensiun
Kenagarian : Pasirtalang
Kecamatan : Sungaipagu
Kabupaten : Solok
13. Nama : Makmur
Jabatan : Kasi Kebdy. P & K Pess. Selatan
Kenagarian : Pasarbaru
Kecamatan : Bayang
Kabupaten : Pesisir Selatan

14. Nama : Ali Umar
Jabatan : Guru
Kenagarian : Sikapak
Kecamatan : Pariaman
Kabupaten : Padang/Pariaman
Umur : 42 tahun
15. Nama : Sjaiful Islami
Jabatan : Pegawai Dep.Pen. Tk.II Kab.Pd./Pariaman
Kenagarian : Pasar Pariaman
Kecamatan : Pariaman
Kabupaten : Padang/Pariaman
Umur : 33 tahun
16. Nama : Amiruddin Hasan
Jabatan : Guru/Kepala Sd. Toboh
Kenagarian : Campago/Kamp. Dalam
Kecamatan : V Koto
Kabupaten : Padang Pariaman
Umur : 40 tahun
17. Nama : Adrian Hasan Basri
Jabatan : Kepala Sekolah SD.
Kenagarian : Cubadakair
Kecamatan : Pariaman
Kabupaten : Pd/Pariaman
Umur : 38 tahun
18. Nama : Asrul Wahid
Jabatan : Tani
Kenagarian : Batuhampar
Kecamatan : Payakumbuh
Kabupaten : 50 Kota
19. Nama : Mhd. Nudjus
Jabatan : Kepala SMEA Bukittinggi
Kenagarian : Payakumbuh
Kabupaten : 50 Kota
Umur : 43 tahun
20. Nama : Ellyza Nurhan

- | | | |
|--|------------|---------------------------------|
| | Jabatan | : Kasi Kebudayaan P & K 50 Kota |
| | Kenagarian | : Payakumbuh |
| | Kecamatan | : Payakumbuh |
| | Kabupaten | : 50 Kota |
-
- | | | |
|-----|------------|---------------|
| 21. | Nama | : Ibnu Abbas |
| | Jabatan | : Tukang |
| | Kenagarian | : Pasirtalang |
| | Kecamatan | : Sungaipagu |
| | Kabupaten | : Solok |
-
- | | | |
|-----|------------|--------------------|
| 22. | Nama | : Drs. Hasan Basri |
| | Jabatan | : Guru SMA |
| | Kenagarian | : Padangkandis |
| | Kecamatan | : Guguk |
| | Kabupaten | : Lima Puluh Kota |
| | Umur | : 41 tahun |

DAFTAR CATATAN

- 1) *Sumatra Barat dalam Angka 1972*, Kantor Gubernur Sumatra Barat 1972, hal. 15.
- 2) *Ibid.*, hal. 39
- 3) Dr. Bernet Bronson cs., *Laporan Penelitian Arkeologi di Sumatra Barat*, Kantor Pembinaan Permuseuman, Perwk. Dept. P dan K Sumbar., 1973 hal. 15.
- 4) Syafnir Abu Naim, *Laporan Kepurbakalaan di Sumatra Barat* Kantor Pembinaan Permuseuman, Perwk. Dept. P dan K Sumbar., 1973, hal. 5
- 5) Drs. R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973, hal. 72.
- 6) F.M. Snitger, *The Forgotten Kingdom of Sumatra*, Prehistoric Monuments, hal. 170.
- 7) Drs. R. Soekmono, *op.cit.*, hal. 71.
- 8) Hasil wawancara dengan beberapa orang responden di daerah Sumatra Barat antara bulan Agustus s/d September 1976.
- 9) Drs. R. Soekmono, *op.cit.*, hal. 58-80.
- 10) *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Jilid II, Pem. Daerah Kodya Padang, Padang, 1970, hal. 5.
- 11) *Ibid.*, hal. 6.
- 12) Muchtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press Padang, Indonesia, 1968, hal. 199.
- 13) Suharto Ryoatmojo, *Etnologi*, UPP. Prapancha - Yogyakarta, 1953, hal. 49-50.
- 14) Hasil wawancara bulan Agustus s/d September 1976 di daerah Sumatra Barat.
- 15) *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, jilid II, Pemda Kodya Padang, Padang, 1970.
- 16) Drs. M.D. Mansoer cs., *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970, hal. 33.
- 17) Prof. Poerbocaroko, *Riwayat Indonesia I* (Stensilan), FKIP Unand Padang, 1964, hal. 16.
- 18) Burger dan Prayudi, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1957, hal. 28.
- 19) Poerbocaroko, *op.cit.*, hal. 9.
- 20) Mangaradja Onggang Parlindungan, *TuanKu Rao*, Tanjung Pengharapan Jakarta, 1964, hal. 524.
- 21) R. Soekmono, *op.cit.*, hal. 34.

- 22) Poerbocaroko, *op.cit.*, hal. 14.
- 23) N.J. Krom, *Zaman Hindu*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1956, hal.155.
- 24) R. Soekmono, *op.cit.*, hal. 54.
- 25) Slamet Mulyono, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*, 1968, hal.18.
- 26) *Ibid.*, hal. 20 dan 21.
- 27) R. Pitono Hardjowardoyo, *Adityawarman*, Bhratara, Jakarta, 1966, hal. 20.
- 28) R. Soekmono, *op.cit.*, hal. 58.
- 29) Slamet Mulyono, *op.cit.*, hal.22.
- 30) Muhammad Yamin, *Gajah Mada*, Balai Pustaka, Jakarta, 1960, hal.42.
- 31) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal. 38.
- 32) Slamet Mulyono, *op.cit.*, hal.23.
- 33) Slamet Mulyono, *op.cit.*, hal.140.
- 34) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal. 39.
- 35) Muhammad Yamin, *op.cit.*, hal.45.
- 36) R. Soekmono, *Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau berdasarkan Peninggalan Purbakala*, Panitia Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau Batusangkar, 1970, hal. 4.
- 37) Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia I*, Balai Pustaka, Jakarta, 1963,hal. 109.
- 38) Asmaniar Z Idris, *Sejarah Kerajaan Pagarruyung*, Panitia, Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970, hal.9.
- 39) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal.30.
- 40) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal.11.
- 41) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal.13.
- 42) St. Muhammad Zein, *Kamus Moderen Bahasa Indonesia*, Grafica, Jakarta hal. 799.
- 43) Sanusi Pane, *op.cit.*, hal. 108.
- 44) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal.10.
- 45) Sanusi Pane, *op.cit.*, hal. 108.
- 46) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 519.
- 47) R. Pitono Hardjowardojo, *op.cit.*, hal. 61.
- 48) M.D. Mansoer cs., *op.cit.*, hal. 63.
- 49) M.D. Mansoer cs., *loc.cit.*,
- 50) M.D. Mansoer cs., *op.cit.*, hal.64.
- 51) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 523—525.
- 52) *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Pemda Kodya Padang, Padang, 1970, hal. 34.
- 53) A.Dt. Madjoindo, *Tjindur Mato*, Balai Pustaka, Jakarta, 64.
- 54) Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, *loc.cit.*
- 55) Muhammad Radjab, *Perang Paderi*, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, Jakarta, 1954, hal.3.

- 56) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 524.
- 57) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 519.
- 58) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 524.
- 59) Ahmad Dt, Batuah dan A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1956, hal. 39.
- 60) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 525.
- 61) Abrar, *Pemerintahan Nagari, Suatu Pandangan Sosiologis*, APDN. Bukittinggi, hal. 5.
- 62) Moh. Said. *Sejarah Minangkabau dengan Menyaring dan Mempergunakan Karya penulis Asing*, (paper), Panitia Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970, hal.12.
- 63) *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau II*, Pemda. Kodya Padang, 1970. hal.10.
- 64) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 501.
- 65) *Seminar Islam di Minangkabau*, Panitia Seminar Islam di Minangkabau, Padang, 1969, hal.7.
- 66) HAMKA, *Sejarah Umat Islam*, Nusantara, Bukittinggi-Jakarta 1961,hal. 661-662.
- 67) Moh. Said. *loc.cit.*
- 68) J.C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society*, Sumur Bandung, 1960, hal.60.
- 69) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 519.
- 70) HAMKA, *op.cit.*, hal. 659.
- 71) Syamsuir Tasman, *Kecenderungan Merantau Suku Minangkabau*, (skripsi) FKPS IKIP Padang, Padang, 1972, hal. 37-38.
- 72) Drs. M.D. Mansoer cs., *op.cit.*, hal. 83-84.
- 73) Christine Dobbin, Indonesia (Tuanku Imam Bonjol 1772-1864) Cornell Modern Indonesian Project, No.13 (April) 1972, hal. 5/6.
- 74) Moh. Said. *op.cit.*, hal.12.
- 75) Moh. Said, *loc.cit.*,
- 76) Moh. Said, *op.cit.*, hal. 11.
- 77) Moh. Said, *op.cit.*, hal. 13.
- 78) Moh. Said, *op.cit.*, hal. 14.
- 79) Drs. M.D. Mansoer cs, *op.cit.*, hal. 93-94.
- 80) Drs. M.D. Mansoer cs, *op.cit.*, hal. 97.
- 81) Moh. Said, *op.cit.*, hal. 16.
- 82) Drs. M.D. Mansoer cs., *up.cit.*, hal. 103
- 83) Drs. M.D. Mansoer cs., *op.cit.*, hal. 111.
- 84) Drs. H. Amura, *Tinjauan Umum terhadap Kesenian Minangkabau*, dalam Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, jilid I, 1970, hal.
- 85) *Ibid.*, hal. 7.
- 86) *Ibid.*, hal. 8.

- 87) *Ibid.*, hal. 8–11.
- 88) Lihat Foto Ukiran.
- 89) Drs. Marjani Martamin cs, *Ragam Ukiran Rumah Gadang Minangkabau*, Jurusan Sejarah FKPS–IKIP Padang, Padang 1976, hal
 90) Christine Dobbin, *op.cit.*, hal.4.
- 91) *Ibid.*, hal. 5–37.
- 92) Drs. M.D. Mansoer cs., *op.cit.*, hal.111.
- 93) Moh. Said, *op.cit.*, hal. 19.
- 94) Dr. Muchtar Naim, *Masalah Penduduk, Migrasi dan Sosial Budaya di Pasaman Barat*, PUTL Bukittinggi, 1976.
- 95) B.J.O. Schrieke, *Pergolakan di Sumatra Barat*, hal. 12.
- 96) Christine Dobbin. *op.cit.*, hal.9.
- 97) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal.124.
- 98) Luhak Tanah Datar adalah merupakan Luhak yang tertua di Sumatra Barat, rakyatnya kukuh memegang adat-istiadat.
- 99) Muhammad Radjab, *loc.cit.*, dan Sagimun MD, *TuanKu Imam Bonjol*, hal.19.
- 100) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 138.
- 101) Christine Dobbin, *op.cit.*, hal. 5–35.
- 102) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 156.
- 103) Muhammad Radjab, *loc.cit.*
- 104) Muhammad Radjab, *op.cit.*, hal.43–45.
- 105) Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 277.
- 106) Guguk Sigadang terletak antara nagari Pandaisikat, Kotolawas, Koto-baru, dalam Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanahdatar.
- 107) Lihat Foto Benteng Fort de Kock, sekarang menjadi tempat rekreasi Rakyat Sumatra Barat di Bukittinggi.
- 108) Sagimun MD, TuanKu Imam Bonjol, Bhratara, 1974, hal. 30–31.
- 109) Mangaraja Onggang Parlindungan, *op.cit.*, hal. 307–309.
- 110) Schrieke, Pergolakan Agama Islam di Sumatra Barat, Bhratara, Jakarta, 1972, hal. 25–26.
- 111) Delian Noer, *The Modernist Muslimin Movement in Indonesia 1900-1942* East Asian Historical Monographs, 1973, hal. 30–41.
- 112) Hamdi Agus, *Suatu Tinjauan Sejarah tentang Perkembangan Lembaga Administrasi Pemerintahan Belanda di Sumatra Barat* (paper) Jurusan Sejarah FKPS–IKIP Padang, 1976, hal.3.
- 113) *Ibid.*, hal.5.
- 114) Junirman Noerman, *Beberapa Peranan Islam dalam Perlawanan Rakyat Minangkabau dalam Menentang Penjajahan Belanda di Pertengahan Pertama Abad ke-20*, (skripsi) Jurusan Sejarah FKPS–IKIP Padang, 1967, hal.
- 115) Radjalis Kamil, *Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional di Sumatra Barat sebelum Tahun 1942* (tesis) Jurusan Sejarah FKPS–IKIP

padang, 1976.

- 116) Drs. M.D. Mansoer cs., *op.cit.*, hal. 190.
- 117) Fatimah Enar cs, *Sumatra Barat 1945–1950*, Pemerintah Daerah Sumatra Barat, Padang, 1976, hal 2–14.
- 118) Drs. Azmi, wawancara.
- 119) Fatimah Enar cs, *loc.cit*
- 120) Wawancara
- 121) Wawancara
- 122) Wawancara
- 123) Wawancara
- 124) Wawancara
- 125) Wawancara
- 126) Kementerian Penerangan *Sumatra Tengah*.
- 127) Wawancara
- 128) Kementerian Penerangan *Sumatra Tengah*.
- 129) Kementerian Penerangan *Sumatra Tengah*.
- 130) Kementerian Penerangan, *Sumatra Tengah*.

DAFTAR BACAAN

- Abrar, *Pemerintahan Nagari Suatu Pandangan Sosiologis*, APDN Bukit-tinggi.
- Agus, Hamdi, *Suatu Tinjauan Sejarah tentang Perkembangan Lembaga Administrasi Pemerintahan Belanda di Sumatra Barat* (Skripsi) Jurusan Sejarah FKPS—IKIP Padang, 1976.
- Amiruddin Jr, *Sejarah Perjuangan Harimau Kuranji 1945—1950 di Sumatra Tengah*, Sri Dharma NV, Padang, 1957.
- Amura, Drs. H., *Tinjauan Umum terhadap Kesenian Minangkabau*, Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Jilid I, Padang, 1970.
- Asmanias Z. Idris, *Sejarah Kerajaan Pagarruyung*, Panitia Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Batuah, Ahmad Dt. dan A.Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adat - nya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1956.
- Bronson, Dr. Bernet cs., *Laporan Penelitian Arkeologi di Sumatra Barat*, Kantor Pembinaan Permuseuman, Perwk.Dept.P dan K Sumbar, 1973.
- Burger dan Prayudi, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, J.B. Wol - ters Jakarta, 1957.
- Dobbin, Christine, *Indonesia*. (Tuanku Imam Bonjol 1972—1864) Cornell Modern Indonesia Project, No.13 (April) 1972.
- Fatimah Enar cs., *Sumatra 1945—1950* (stensilan), Pemerintah Daerah Su- matra Barat, Padang 1976.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Nusantara, Bukittinggi, Jakarta, 1961.
- Harjowardoyo, R. Pitono, *Adityawarman*, Bhratara, Jakarta, 1966.
- Hatta, Muhammad, *Sekitar Proklamasi*, Tinta Mas, Jakarta, 1970.
- Kohin, George Mc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1969.
- Kamil, Rajalis, *Peranan Pers dalam Pengerahan Nasional di Sumatra Barat Sebelum Tahun 1952* (tesis) Jurusan Sejarah FKPS—IKIP Padang, 1976.
- Kantor Gubernur Sumatra Barat, *Sumatra dalam Angka 1972*, Padang, 1973.
- Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Sumatra Tengah*.
- Krom, N.J. *Zaman Hindu*, PT Pembangunan, Jakarta, 1956.
- Leur, J.C.Van., *Indonesian Trade and Society*, Sumur Bandung, 1960.
- Modjoindo, A.Dt., *Tjindur Mato*, Balai Pustaka Jakarta, 1964.
- Mansoer, Drs.M.D.cs., *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970
- Martamin, Drs. Mardjani, *Ragam Ukiran Rumah Gadang Minangkabau* (stensilan), Jurusan Sejarah FKPS—IKIP Padang, 1976.
- Mulyono, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara- Negara Islam di Nusantara*, 1968.
- Naim, Dr. Mochtar, *Masalah Penduduk, Migrasi dan Sosial Budaya di Pa- saman Barat*, PUTL Bukittinggi 1976.

- ; *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press Padang, Indonesia, 1968.
- ; *Merantau; Voluntary Migration*, (A Dissertation, University of Singapura 1973).
- ; Syafnir Abu, *Laporan Kepurbakalaan di Sumatra Barat*, Kantor Pembinaan Permuseuman, Perwk.Dept. P & K Sumbar, 1973.
- Nasution, Dr.A.H., *Sejarah Perjuangan Nasional Di bidang Bersenjata*, Mega Bookstore, PN Karya Cotas, Jakarta 1966.
- Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, East In Asian Historical Monographs, 1973.
- Nurman, Yunirman, *Beberapa Peranan Islam dalam Perlawanan Rakyat Minangkabau dalam Menentang Penjajahan Belanda di Pertengahan Pertama Abad ke-20* (Skripsi), Jurusan Sejarah, FKPS-IKIP Padang, 1967.
- Notosusanto, Nugroho, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*, Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
- Pemda Kodya Padang, *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau I*, Padang, 1970.
- Pane, Sanusi, *Sejarah Indonesia I*, Balai Pustaka, Jakarta, 1963.
- Parlindungan, Mangaradja Onggang, *Tuaniku Rao*, Tanjung Pengharapan, Jakarta, 1964.
- Poerbocaroko, *Riwayat Indonesia I*, (stensilan), Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1964.
- Rajab, Muhammad, *Perang Paderi*, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, Jakarta, 1954.
- Suarto, Riyotmojo, *Etnologi*, UPP, Prapanca, Yogyakarta, 1968.
- Sagimun, MD, *Tuaniku Imam Bonjol*, Bhratara, Jakarta, 1974.
- Said, Mohd., *Sejarah Minangkabau dengan Menyaring dan Mempergunakan karya Penulis Asing*, Panitia Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Schrieke, *Pergolakan Agama Islam di Sumatra Barat*, Bhratara, Jakarta, 1972.
- Soekmono, Drs. R., *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973.
- Snitger, F.M. *The Forgotten Kingdom of Sumatra*, Prehistoric Monuments Tasman Syamsuir, *Kecenderungan Merantau Suku Minangkabau*, (Skripsi) FKPS IKIP Padang, 1972.
- Yamin, Muhammad, *Gajah Mada*, Balai Pustaka, Jakarta, 1960.
- Zein, St. Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Grafika Jakarta.



Perpustakaan
Jenderal